



RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023



BUKU I





GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 memuat arahan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 794);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Berita Daerah 314);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
19. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 terdiri dari:
 - a. Buku I : tentang gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi makro, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, dan pendanaan; dan
 - b. Buku II : tentang program dan rencana kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang berisikan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun 2023 periode tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 3

- (1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan KUA APBD Provinsi Lampung dan PPAS Tahun 2023.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023; dan
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam melakukan pembahasan RKA-PD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Bappeda Provinsi Lampung 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan tahun berjalan; dan
- c. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah pada anggaran tahun berikutnya.

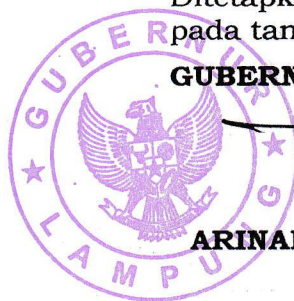
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 6 - 2022

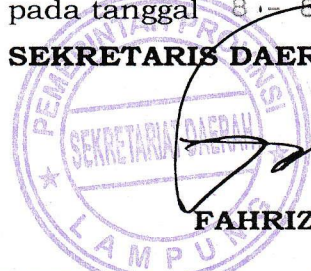
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG



FAHRIZAL DARMIN TO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 22

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah.....	II-1
2.1.1.2. Kondisi Topografi.....	II-3
2.1.1.3 Kondisi Geologi.....	II-4
2.1.1.4. Kondisi Hidrologi.....	II-4
2.1.1.5. Kondisi Klimatologi.....	II-9
2.1.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-11
2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana.....	II-20
2.1.1.8. Kondisi Demografi.....	II-29
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-31
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD.....	II-124
2.2.1. Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2021 Provinsi Lampung.....	II-124
2.2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021.....	II-124
2.2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah.....	II-126
2.2.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD.....	II-143
2.3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategi Daerah.....	II-177
2.3.1. Permasalahan Pembangunan.....	II-177
2.3.2. Isu Strategis.....	II-184
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kinerja Makro Ekonomi Daerah.....	III-2
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III-18
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-30
3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-32
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-34
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-37
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-41
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-2
4.1.1. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam Rpjmn 2020-2024 Dan Rkp 2023.....	IV-2
4.1.2. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Perubahan Rpjmd Provinsi Lampung 2019 – 2024.....	IV-6

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA.....	V-1
5.1. Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota.....	V-1
5.2. Indikator Makro Kabupaten/Kota.....	V-11
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....	VI-1
6.1. Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	VI-2
6.2. Sinkronisasi Program Prioritas Menurut Prioritas Pembangunan Daerah.....	VI-17
6.3 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah dan Nasional.....	VI-164
6.4. Program Prioritas Berdasarkan SPM	VI-188
6.5. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	VI-207
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VII-1
BAB VIII. PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar I - 1 Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah.....	I-7
Gambar II - 1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung.....	II-1
Gambar II - 2 Peta Geologi Provinsi Lampung.....	II-6
Gambar II - 3 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung.....	II-7
Gambar II - 4 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung	II-8
Gambar II - 5 Peta Hidrologi Provinsi Lampung.....	II-9
Gambar II - 6 Peta Klimatologi Provinsi Lampung	II-11
Gambar II - 7 Peta Kawasan Pertanian dan Perikanan	II-13
Gambar II - 8 Peta Kawasan Perkebunan	II-14
Gambar II - 9 Peta Kawasan Pertambangan.....	II-15
Gambar II - 10 Peta Kawasan Industri.....	II-17
Gambar II - 11 Peta Kawasan Pariwisata.....	II-20
Gambar II - 12 Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung.....	II-28
Gambar IV - 1 Sasaran dan Target Prioritas Pembangunan Tahun 2023	IV-24
Gambar IV - 2 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Lampung	IV-47
Gambar V - 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	V-3

DAFTAR TABEL

Tabel II - 1 Luas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	II-2
Tabel II - 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung	II-7
Tabel II - 3 Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung.....	II-8
Tabel II - 4 Curah Hujan Rata-Rata Normal Tahunan (mm/tahun)10	
Tabel II - 5 Sebaran Komoditas Pekebunan.....	II-13
Tabel II - 6 Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi Lampung	II-18
Tabel II - 7 Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Lampung	II-21
Tabel II - 8 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung.....	II-22
Tabel II - 9 Potensi Luas Bahaya Gempabumi di Provinsi Lampung.....	II-22
Tabel II - 10 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung	II-23
Tabel II - 11 Tabel Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Lampung	II-24
Tabel II - 12 Tabel Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Lampung.....	II-24
Tabel II - 13 Tabel Potensi Luas Bahaya Epidiemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Lampung	II-25
Tabel II - 14 Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung api Krakatau di Provinsi Lampung	II-25
Tabel II - 15 Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung	II-26
Tabel II - 16 Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Lampung.....	II-27
Tabel II - 17 Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Lampung	II-27
Tabel II - 18 Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Lampung.....	II-28
Tabel II - 19 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016-2021.....	II-30
Tabel II - 20 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	II-34
Tabel II - 21 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota ADHB se-Provinsi Lampung.....	II-37
Tabel II - 22 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terhadap Total PDRB Tahun 2017 - 2021 (Persen).....	II-39
Tabel II - 23 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2021 (Ribu Jiwa)	II-42
Tabel II - 24 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2016 - 2021 (Persen).....	II-43
Tabel II - 25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Berdasarkan Komposit 2017- 2021	II-48
Tabel II - 26 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016 - 2021	II-49
Tabel II - 27 Persentase IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021.....	II-51
Tabel II - 28 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021	II-52
Tabel II - 29 Kondisi Makro Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2015-2021	II-54
Tabel II - 30 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung	II-57
Tabel II - 31 Rasio PAD terhadap APBD Provinsi Lampung Tahun 2015-2021.....	II-58
Tabel II - 32 Skor PPH Provinsi Lampung Tahun 2014-2021.....	II-60
Tabel II - 33 Ketersediaan Bahan Pangan Provinsi Lampung berdasarkan Atap Tahun 2016-2021	II-61
Tabel II - 34 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2017-2021.....	II-63
Tabel II - 35 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Tingkatan Umur se-Sumatera Tahun 2021....	II-65
Tabel II - 36 Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SMA dan PT se-Sumatera Tahun 2021	II-67
Tabel II - 37 Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA dan PT se-Sumatera.....	II-69
Tabel II - 38 Tabel Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan se-Sumatera Tahun 2021	II-70
Tabel II - 39 Tabel Angka Harapan Lama Sekolah se-Sumatera Tahun 2017-2021	II-72
Tabel II - 40 Rata-Rata Lama Sekolah se-Sumatera dan Nasional Tahun 2017-2021	II-74

Tabel II - 41 Perbandingan Jumlah guru dan Siswa 2017 – 2021	II-79
Tabel II - 42 Angka Harapan Hidup se-Sumatera dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-86
Tabel II - 43 Jumlah Puskesmas Provinsi Lampung Tahun 2017-2021.....	II-88
Tabel II - 44 Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021	II-90
Tabel II - 45 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Dinas KPTPH, 2021.....	II-95
Tabel II - 46 Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan, 2021.....	II-96
Tabel II - 47 Persentase Capaian Produksi Tanaman Hortikultura, 2021	II-98
Tabel II - 48 Tabel Sebaran Pemanfaatan Biogas Di Provinsi Lampung Tahun 2020.....	II-103
Tabel II - 49 Cakupan Pelayanan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung Tahun 2021	II-104
Tabel II - 50 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Sektor Pariwisata.....	II-106
Tabel II - 51 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, 2017 – 2021.....	II-106
Tabel II - 52 Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2021	II-108
Tabel II - 53 Ekspor Provinsi Lampung Berdasarkan Komoditas Unggulan Tahun 2020-2021 (US\$ Juta)	II-113
Tabel II - 54 Ekspor Provinsi Lampung berdasarkan Negara Tujuan, 2020-2021	II-114
Tabel II - 55 Neraca Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2016 s/d 2020.....	II-115
Tabel II - 56 PDRB Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Harga Konstan Tahun 2017-2021	II-116
Tabel II - 57 Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2021	II-118
Tabel II - 58 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2021.....	II-119
Tabel II - 59 Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Lampung, 2020.....	II-121
Tabel II - 60 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021	II-125
Tabel II - 61 Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Tahun 2021.....	II-127
Tabel II - 62 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2021 Provinsi Lampung.....	II-144
Tabel III - 1 Nilai PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK Provinsi Lampung Tahun 2017-2021.....	III-2
Tabel III - 2 Kontribusi PDRB (ADHB) Prov. Lampung terhadap PDRB Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2017-2021.....	III-3
Tabel III - 3 Distribusi PDRB ADHB Provinsi Lampung Tahun 2017-2021	III-4
Tabel III - 4 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (ADHK) Provinsi Lampung Tahun 2017-2021.....	III-6
Tabel III - 5 Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2021	III-7
Tabel III - 6 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha (persen, ADHK 2010) Tahun 2017– 2021.....	III-8
Tabel III - 7 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010) Tahun 2017 –2021.....	III-10
Tabel III - 8 PDRB Perkapita Provinsi Lampung (ADHB) Tahun 2017 – 2021.....	III-10
Tabel III - 9 PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional (ADHK) Tahun 2017 – 2021	III-11
Tabel III - 10 Sasaran Indikator Makro Provinsi Lampung Tahun 2023.....	III-30
Tabel III - 11 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2023.....	III-33
Tabel III - 12 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2023	III-40
Tabel III - 13 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2023.....	III-42
Tabel IV - 1 Indikator Sasaran Makro RKP 2023.....	IV-6

Tabel IV - 2 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023	IV-23
Tabel IV - 3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 terhadap RKP 2023	IV-25
Tabel IV - 4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 terhadap Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.....	IV-28
Tabel IV - 5 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pendidikan.....	IV-30
Tabel IV - 6 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Kesehatan.....	IV-31
Tabel IV - 7 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-32
Tabel IV - 8 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	IV-34
Tabel IV - 9 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Sosial	IV-35
Tabel IV - 10 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas ..	IV-37
Tabel V - 1 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023	V-3
Tabel V - 2 Keselarasan Sasaran Makro Rkpd Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2023	V-12
Tabel VI - 1 Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	VI-2
Tabel VI - 2 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah.....	VI-17
Tabel VI - 3 Program Prioritas berdasarkan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional	VI-165
Tabel VI - 4 Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM.....	VI-188
Tabel VI - 5 Program dan Kegiatan berdasarkan OPD Tahun 2023	VI-207
Tabel VII - 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	VII-1
Tabel VII - 2 Indikator Kinerja Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	VII-2

DAFTAR GRAFIK

Grafik II - 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung (Persen).....	II-30
Grafik II - 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia	II-33
Grafik II - 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se Sumatera tahun 2021	II-35
Grafik II - 4 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional	II-37
Grafik II - 5 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional	II-38
Grafik II - 6 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 - 2021.....	II-40
Grafik II - 7 Indeks Williamson Provinsi Lampung.....	II-41
Grafik II - 8 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung	II-43
Grafik II - 9 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung tahun 2016 - 2021 (persen)	II-45
Grafik II - 10 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung.....	II-46
Grafik II - 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia	II-47
Grafik II - 12 Posisi IPM Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera Tahun 2021	II-49
Grafik II - 13 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia (2016 - 2021).....	II-51
Grafik II - 14 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017-2021..	II-53
Grafik II - 15 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Kerja, Februari 2021	II-56
Grafik II - 16 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal-Informal (2017-2021)	II-57
Grafik II - 17 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 - 2021 (Persen).....	II-58
Grafik II - 18 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota	II-59
Grafik II - 19 Trend Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021	II-64
Grafik II - 20 Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan usia Lampung dan Nasional	II-65
Grafik II - 21 Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan	II-67
Grafik II - 22 Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung dan Nasional.....	II-69
Grafik II - 23 Grafik Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung dan Nasional.....	II-70
Grafik II - 24 Trend Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021	II-72
Grafik II - 25 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	II-73
Grafik II - 26 Trend Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Indonesia,.....	II-74
Grafik II - 27 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	II-76
Grafik II - 28 Rasio Sarana dan Prasarana SMA di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021	II-77
Grafik II - 29 Rasio Sarana dan Prasarana SMK di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021	II-78
Grafik II - 30 Rasio Sarana dan Prasarana SLB di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021.....	II-78
Grafik II - 31 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK 2017-2021	II-79
Grafik II - 32 Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2013 - 2021	II-81
Grafik II - 33 Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2021.....	II-82
Grafik II - 34 Trend Kasus Kematian Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021	II-83
Grafik II - 35 Kasus kematian Bayi Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung.....	II-84
Grafik II - 36 Angka Kematian Balita di Provinsi Lampung Tahun 2017 -2021	II-84
Grafik II - 37 Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021	II-85
Grafik II - 38 Kasus Kematian Ibu Provinsi Lampung Tahun 2017-2021	II-86

Grafik II - 39 Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota Provinsi Lampung	II-86
Grafik II - 40 Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Indonesia.....	II-87
Grafik II - 41 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	II-88
Grafik II - 42 Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung.....	II-90
Grafik II - 43 Tren Ratio Dokter Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung.....	II-92
Grafik II - 44 Tren Rasio Spesialis di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2015 - 2021	II-93
Grafik II - 45 Rasio Bidan di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2015-2021	II-93
Grafik II - 46 Cakupan Vaksinasi Covid-19 Per Tanggal 3 Januari 2022 Berdasarkan Asal KTP.....	II-96
Grafik II - 47 Perbandingan Luas Panen Padi Lampung-Indonesia Tahun 2019-2021 (ha).....	II-98
Grafik II - 48 Produksi Padi Lampung – Indonesia Tahun 2019 – 2021 (ton)	II-98
Grafik II - 49 Produksi Jagung Lampung Tahun 2019 – 2021 (ton).....	II-99
Grafik II - 50 Jumlah Nilai Ekspor Provinsi Lampung, 2016-2021	II-114
Grafik II - 51 Nilai Impor Provinsi Lampung, 2016 – 2021 (juta US\$).....	II-116
Grafik II - 52 Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap 2015–2021	II-121
Grafik II - 53 Perbandingan Kondisi Jalan menurut Tingkat Kerusakan, Tahun 2015-2021.....	II-122
Grafik II - 54 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2021	II-123
Grafik II - 55 Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2020-2021	II-124
Grafik II - 56 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2021.....	II-124
Grafik II - 57 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2021	II-125
Grafik II - 58 Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia (2016-2021)	II-125
Grafik III - 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung Tahun 2017– 2022	III-18
Grafik III - 2 Laju Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017– 2021.....	III-12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah tahunan. Penyusunan RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi: Persiapan penyusunan RKPD, Penyusunan rancangan awal RKPD, Penyusunan rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan rancangan akhir RKPD, dan Penetapan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran di tahun berkenaan.

Dokumen RKPD Provinsi Lampung tahun 2023 merupakan perencanaan tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Diharapkan menjadi momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat kemandirian masyarakat, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah

sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Penting untuk mengawal Konsistensi antara RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD. Konsistensi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 mencakup pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*), dan atas-bawah (*top-down*); dengan deskripsi sebagai berikut:

- Proses perencanaan dengan *pendekatan politik* dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.
- Untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan sejak tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif *pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif*, substansi RKPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah diperkaya pula dengan informasi berupa saran/masukan yang dihimpun dari kelompok akademisi, asosiasi profesi, pelaku dunia usaha, kalangan pers, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya, yang dilakukan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023. Dengan demikian, produk perencanaan yang akan dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan telah pula memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan *good governance*.
- Penyusunan RKPD merupakan kesatuan rangkaian dari *proses pendekatan*

perencanaan pembangunan secara bawah-atas (bottom-up), dimulai dari: Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan, Musrenbang kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Musrenbang Provinsi Lampung hingga Musrenbang Nasional; bertujuan untuk menyerap aspirasi dan penyampaian usulan kegiatan pembangunan pada masing-masing lingkup pemerintahan yang dilaksanakan secara berjenjang.

- Dalam hal proses *pendekatan perencanaan secara atas-bawah (top-down)*, penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 juga dipaduserasikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan memperhatikan peraturan maupun kebijakan nasional lainnya.

Penyusunan RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana:

1. Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan prakiraan maju, berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam periode 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
4. Secara faktual, RKPD menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi saat ini dan prospek perekonomian pasca Covid 19 mengakibatkan perlunya kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang fokus bagi pemulihan dan penguatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, tema pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023 adalah "Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah" yang telah diselaraskan dengan tema RKP 2023 "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan fokus prioritas untuk Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Reformasi Birokrasi, Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya serta Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023. Dengan demikian RKPD Provinsi Lampung tahun 2023 mencerminkan komitmen daerah dalam mewujudkan capaian pembangunan tahun 2023. Pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah turut mengambil peran dalam upaya pemulihan dan penguatan perekonomian, kesehatan dan sosial pasca pandemic Covid 19.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

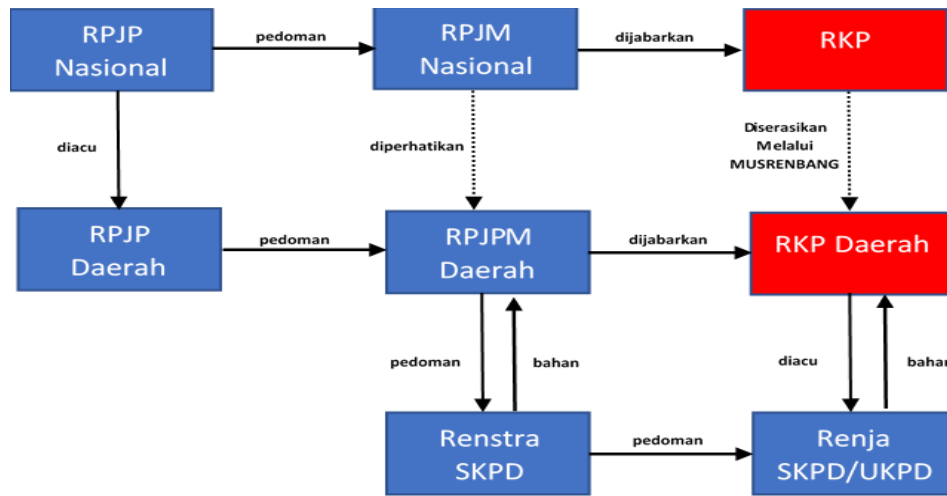
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan pelaksanaan layanan dasar kepada masyarakat dan rencana pemanfaatan ruang/wilayah dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar I - 1 Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



1.4 Maksud dan Tujuan

Secara substantif, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 memuat deskripsi tentang gambaran umum daerah, capaian sasaran pembangunan sebelumnya, arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Seluruh uraian dalam RKPD tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung yang disinergikan dengan RPJMN Tahun 2019-2024 dan RKP Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah:

- 1) Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
- 3) Memberikan arah dan pedoman kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah

Provinsi Lampung berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

- 4) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.
- 5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi tahapan dan mekanisme antara perencanaan dan penganggaran, dimana RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 yang diusulkan oleh Gubernur Lampung untuk disepakati bersama dengan DPRD Provinsi Lampung sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2023.
- 6) Menyediakan satu bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023

1.2. Dasar Hukum

Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023

1.3. Hubungan Antardokumen

Menjelaskan tentang keterkaitan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023

1.5. Sistematika

Menjelaskan sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang gambaran umum dan capaian pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD Tahun lalu dan RPJMD 2019-2024.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2021 dan pencapaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2021.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tinjauan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung hingga tahun 2021, serta arah kebijakan, tantangan dan proyeksi pembangunan ekonomi tahun 2022 dan tahun 2023.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan tahun 2023.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan tinjauan kebijakan Pembangunan dalam RKP 2023 serta tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023.

4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023

Menjelaskan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan berdasarkan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

4.3 Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung

Menjelaskan rencana pembangunan tahun 2023 menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Pokok- Pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota tahun 2023.

5.2 Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan target capaian sasaran makro kabupaten/kota tahun 2023.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2023, indikator dan target program dan kegiatan, lokasi, pagu usulan dan prakiraan maju pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sinkronisasi dan dukungan Program Prioritas Daerah dan Nasional.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menjelaskan sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan perangkat daerah Provinsi Lampung tahun 2023.

BAB VIII PENUTUP

Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang penyusunan RKPD tahun 2023.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

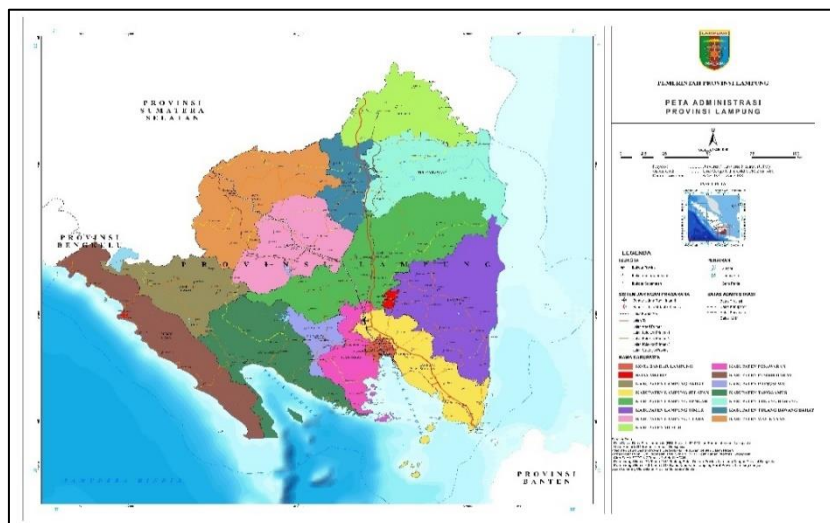
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 3⁰45'sampai 6⁰45' Lintang Selatan dan 103⁰40'sampai 105⁰50' Bujur Timur. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.575,41 km² termasuk 172 pulau disekitarnya. Provinsi Lampung juga memiliki wilayah lautan sepanjang 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas dengan luas perairan diperkirakan lebih kurang 24.820 km² dan panjang garis pantai lebih kurang 1.663,26 km (Sumber: Garis Pantai RBI 2021). Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara
- Selat Sunda di sebelah selatan
- Laut Jawa di sebelah timur
- Samudera Indonesia di sebelah barat

Gambar II - 1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung



Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
2. KabupatenTanggamus dengan ibukota Kota Agung.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana.
5. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi.
6. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih.
7. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
8. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Wiralaga Mulya.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.
14. Kota Bandar Lampung.
15. Kota Metro.

Sementara itu, secara luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah Kabupaten terluas di Provinsi Lampung dan juga memiliki jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa terbanyak. Untuk wilayah terkecil dimiliki oleh Kota Metro seiring kecilnya luas wilayah, Kota Metro pun memiliki jumlah Kecamatan dan Kelurahan tersedikit di Provinsi Lampung.

Tabel II - 1 Luas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Luas (Km2)
1	Lampung Selatan	17	300	2.218,84
2	Lampung Tengah	28	311	4.548,93
3	Lampung Utara	23	247	2.656,39
4	Lampung Barat	15	136	2.116,01
5	Tulang Bawang	15	151	3.107,47
6	Tanggamus	20	302	2.901,98
7	Lampung Timur	24	264	3.867,43
8	Way Kanan	15	227	3.531,10
9	Pesawaran	11	144	1.279,60
10	Pringsewu	9	131	614,97
11	Mesuji	7	105	2.200,51
12	Tulang Bawang Barat	9	96	1.281,45
13	Pesisir Barat	11	118	2.993,80

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Luas (Km2)
14	Kota Bandar Lampung	20	126	183,72
15	Kota Metro	5	22	73,21
Provinsi Lampung		229	2.640	33.575,41

Sumber: Kepmendagri 050-145 Tahun 2022

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Secara topografi, wilayah Provinsi Lampung dibagi ke dalam 5 (lima) unit topografi, yaitu :

- a. Daerah topografis berbukit sampai bergunung.
Meliputi lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25%, dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolan-tonjolannya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran, dan Gunung Rajabasa.
- b. Daerah topografis berombak sampai bergelombang.
Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit - bukit sempit, kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran alluvial, vegetasi yang terdapat di daerah ini adalah tanaman-tanaman perkebunan seperti: kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian peladangan seperti : padi, jagung, dan sayur-sayuran.
- c. Daerah dataran alluvial
Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah Timur, yang merupakan bagian hilir (*downstream*) dari sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, dan Way Mesuji. Ketinggian di daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m, dengan kemiringan 0% sampai 3%. Pada bagian pantai sebelah Barat dataran alluvial menyempit dan memanjang menurut arah Bukit Barisan.

- d. Daerah dataran rawa pasang surut
Di sepanjang pantai timur merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian 1/2 m sampai 1 m, pengendapan air menurut naiknya pasang.
- e. Daerah River Basin
River basin atau daerah aliran sungai adalah hamparan wilayah yang dibatasi oleh pembatas topografi yang menerima dan mengumpulkan air hujan serta unsur hara. Provinsi Lampung memiliki 6 (enam) River Basin yang utama, yaitu River Basin Jepara, River Basin Tulang Bawang, River Basin Seputih, River Basin Sekampung, River Basin Semangka, dan River Basin Way Mesuji

Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan, berdasarkan SK Menhut no 256/KPTS-II/2000 seluas 1.004.735 Ha (28,47%) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain itu merupakan daerah perkebunan (26,17%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian, dan perumahan.

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Batuan yang tertua dan tersingkap di Wilayah Lampung adalah batuan malihan/metamorf yang terdiri dari sekis, genes, filit, kuarsit, dan pualam yang secara keseluruhan termasuk dalam kompleks Gunungkasih (Ptgm). Umur kompleks ini belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan Pra-Karbon. Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batu pasir dan batu lempung dengan sisipan rijang dan batu gamping dikenal dengan nama Formasi Menanga (Km).

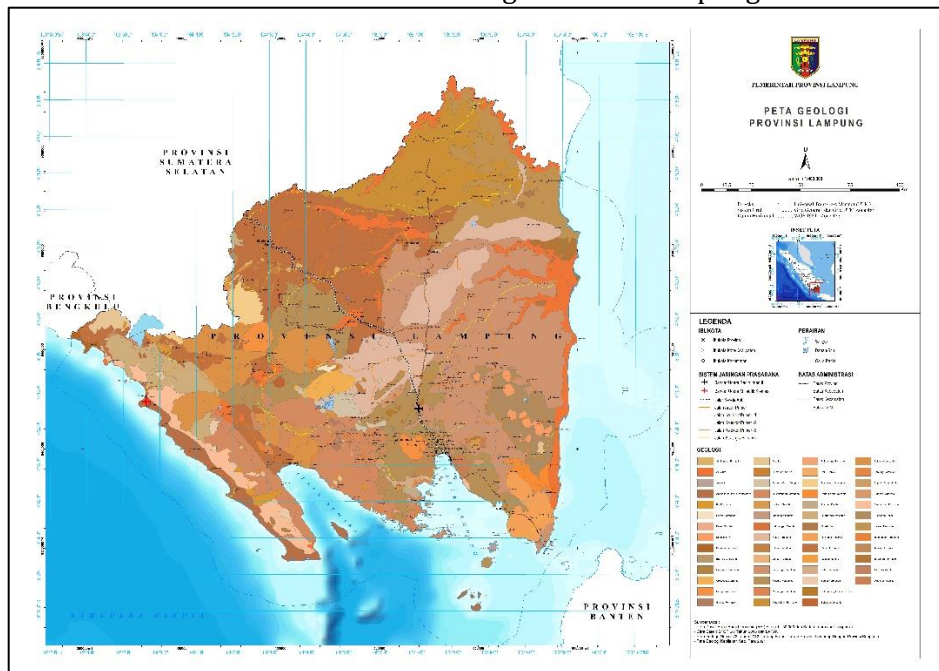
Batuan gunung api berkomporsi andesitik (lava, breksi, tufa) yang terubah dan terkekarkan kuat dipetakan sebagai Formasi Tarahan (Tpot), diperkirakan setara dengan Formasi Kikim yang terdapat di daerah Bengkulu. Umur formasi ini diperkirakan Paleosen Tengah–Oligosen Awal. Litologi tuf dan breksi dikuasai oleh sisipan tufit, diendapkan di lingkungan benua, mungkin busur gunung api, magmatisma ada kaitannya dengan penujaman, secara regional dapat dikorelasikan dengan formasi kikim. Kondisi ini

ditafsirkan sebagai sisa busur gunung apipaleogen yang tersingkap. Keberadaannya sering disebut sebagai bukti penunjaman (subduction) di sepanjang Parit Sunda yang terus berlangsung. Formasi Sabu, Formasi Campang dan Formasi Tarahan tersingkap di Jalur Bukit Barisan, Batuan Granit- Granodiorit yang menerobos Batuan Granitoid Kapur Akhir menunjukkan umur 48,37 – 34,57 juta tahun (Eosen – Oligosen).

Perkembangan geologi tersier di daerah ini, selanjutnya menunjukkan perbedaan yang nyata antara jalur Jambi-Palembang, Bukit Barisan dan Bengkulu. Perbedaan tersebut dicerminkan dengan adanya perbedaan sedimentasi cekungan yang terdapat di ketiga jalur tersebut. Pada jaman Oligosen Akhir- Miosen Tengah di jalur Jambi-Palembang terjadi sedimentasi genangan laut di cekungan Sumatera Selatan yang diwakili oleh *Formasi Talangakar (Tomt)* yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batu pasir terdiri dari serpihan gampingan, napal, batu lempung dan batu lanau, *Formasi Gading (Tomg)* yang terdiri dari batu pasir, batu lanau dan batu lempung dengan sisipan batu gamping dan lignit, dan *Formasi Baturaja (Tmb)* terdiri dari batu gamping terumbu, kalkarenit dengan sisipan serpih gampingan. Di jalur Bukit Barisan terjadi kegiatan gunung api yang diwakili oleh *Formasi Hulusimpang (Tomh)* terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa bersusunan andesit/basaltik, terubah, berurat kuarsa (*Tmos*) yang terdiri dari perselingan batu lempung, batu pasir, batu lanau, serpih, terkadang gampingan. *Tektonik* yang terjadi pada Miosen Tengah diikuti oleh sedimentasi laut dangkal yang dicerminkan oleh *Formasi Airbenakat* (terdapat di luar Provinsi Lampung), Setelah tektonik yang terjadi pada Pliosen Tengah, sebagian besar daerah ini terangkat ke permukaan, di jalur Jambi-Palembang diendapkan *Formasi Kasai (Qtk)* yang berlingkungan darat (perselingan batu pasir tufaan dengan tufa berbatu apung, struktur silangsiur, sisipan tipis lignit dan kayu terkesikkan). Di jalur Bukit Barisan di endapkan *Formasi Ranau (Qtr)* yang terdiri dari breksi batuapung, tufa mikaan, tufa batu apung, dan kayu terkersikkan, dan *Formasi Bintunan (Qtb)* yang terdiri dari batu pasir tufaan, tufa pasir, batu lempung tufaan, konglomerat aneka batuan, tufa berbatuapung dan sisa tumbuhan. Seluruh *formasi Kasai, Ranau, Lampung*

selama Pliosen Akhir–Pliosen terlipat lemah dan tererosi di akhir Plistosen. Sejak itu kegiatan gunung api berlangsung di jalur Jambi–Palembang dan Bengkulu hanya terjadi sedimentasi. Kondisi geologi Wilayah Provinsi Lampung, disajikan dalam Peta Geologi Provinsi Lampung pada gambar di bawah ini.

Gambar II - 2 Peta Geologi Provinsi Lampung



Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Provinsi Lampung memiliki empat (4) wilayah sungai diantaranya WS Semangka, WS Seputih-Sekampung, WS Mesuji-Tulang Bawang dan WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau. Berdasarkan sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi di Provinsi Lampung meliputi Wilayah Sungai (WS) Mesuji-Tulang Bawang dan WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau. Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang yang melintasi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Way Kanan. Wilayah Sungai Musi-Sugohan-Banyuasin-Lemau berada di Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota meliputi WS Semangka dan WS Seputih-Sekampung. Wilayah

Sungai Semangka melintasi Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus. Wilayah Sungai Seputih-Sekampung melintasi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

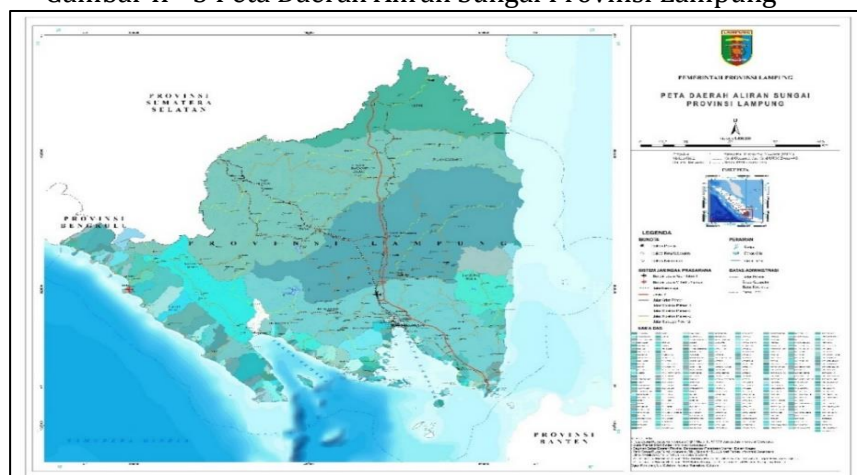
Berikut ini daftar 10 (sepuluh) DAS yang memiliki luas terbesar di Lampung :

Tabel II - 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung

No.	Nama DAS	Luas (hektar)
1	Tulang Bawang	979.818,78
2	Seputih	751.526,73
3	Mesuji	723.714,52
4	Sekampung	482.316,03
5	Semangka	161.448,33
6	Way Jepara	76.187,28
7	Way Kambas	48.750,40
8	Way Ratai	32.477,47
9	Way Tenubang	28.943,08
10	Manula	25.396,62

Sumber: BNPB, dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

Gambar II - 3 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

Secara hidrologi di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) cekungan air tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar Lampung, cekungan air tanah Metro – Kotabumi, cekungan air tanah Talang Padang, cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Batu Raja dan

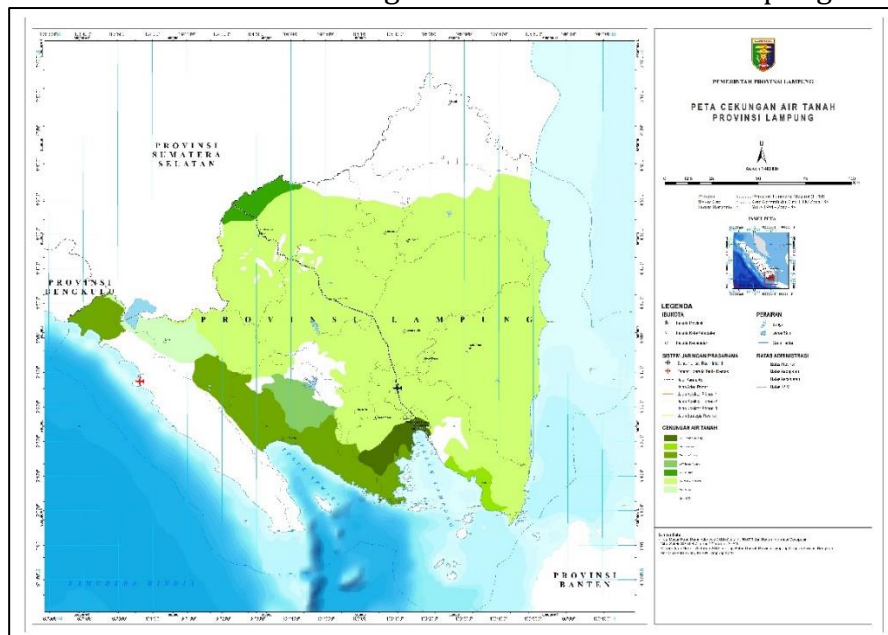
cekungan air tanah Danau Ranau. Luas masing – masing CAT di Provinsi Lampung disajikan pada tabel dan gambar berikut di bawah ini:

Tabel II - 3 Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

NO	NAMA CAT	Luas CAT (Ha)	Lokasi CAT
1	CAT Bandar Lampung	44.381,32	Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung selatan, Tanggamus
2	CAT Talang Padang	60.964,60	Pringsewu, Tanggamus
3	CAT Kalianda	23.543,92	Lampung Selatan
4	CAT Baturaja	43.019,06	Way Kanan
5	CAT Metro-Kotabumi	2.040.169,77	Tulang Bawang, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, dan Way kanan
6	CAT Kota Agung	279.955,88	Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat
7	CAT Ranau	78.893,68	Lampung Barat, Pesisir Barat

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

Gambar II - 4 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

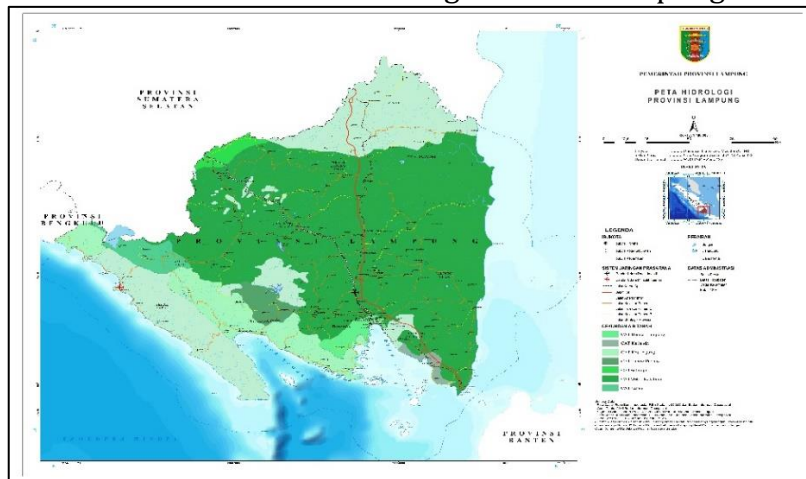


Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

Dalam rangka konservasi air tanah terdapat beberapa zona pemanfaatan air tanah, yaitu:

- a. Zona Aman Potensi Tinggi (*ZONA I*)
- b. Zona Aman Potensi Sedang (*ZONA II*)
- c. Zona Aman Potensi Kecil (*ZONA III*)
- d. Zona Imbuh / Resapan (*ZONA IV*)
- e. Zona Bukan CAT

Gambar II - 5 Peta Hidrologi Provinsi Lampung



Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

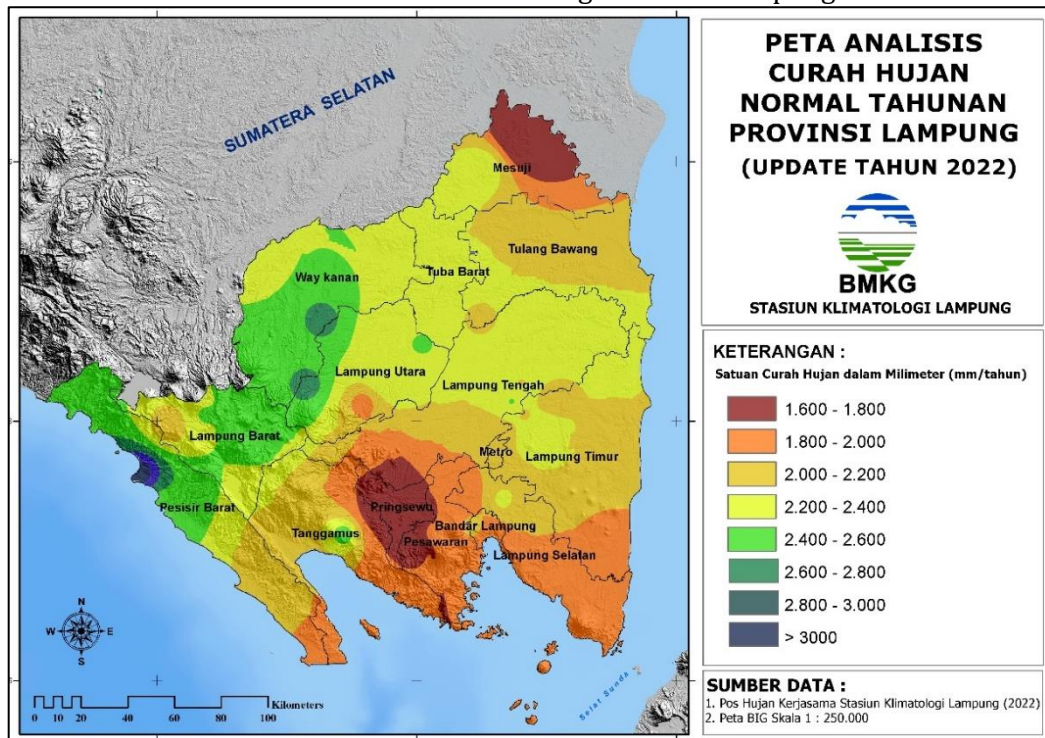
Provinsi Lampung beriklim tropis-humid, karena terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan. Angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua Provinsi Lampung beriklim tropis-humid, karena terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan. Angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat hingga Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur hingga Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C - 29°C, dengan suhu maksimum sebesar 33°C dan minimum sebesar 20°C. Kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%. Rata-rata curah hujan bulanan setiap tahunnya sebesar 168,95 mm/bulan dan rata-rata curah tahunan adalah antara 1.500 s/d 3.500 mm, sebagaimana diperlihatkan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel II - 4 Curah Hujan Rata-Rata Normal Tahunan (mm/tahun)

No.	Kabupaten/ Kota	Curah Hujan Rata-Rata Normal Tahunan (mm)				
		<1.800	1.800-2.500	2.500-2.800	2.800-3.000	>3.000
1	Bandar Lampung	-	1.950	-	-	-
2	LampungBarat	-	2.301	-	-	-
3	Lampung Selatan	-	1.994	-	-	-
4	Lampung Tengah	-	2.220	-	-	-
5	Lampung Timur	-	2.147	-	-	-
6	Lampung Utara	-	2.373	-	-	-
7	Mesuji	1.726	-	-	-	-
8	Metro	-	2.164	-	-	-
9	Pesawaran	-	1.905	-	-	-
10	Pesisir Barat	-	-	-	2.828	-
11	Tanggamus	-	2.067	-	-	-
12	Pringsewu	1.696	-	-	-	-
13	Tulang Bawang Barat	-	2.233	-	-	-
14	Tulang Bawang	-	2.155	-	-	-
15	Way Kanan	-	2.442	-	-	-

Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, 2022

Gambar II - 6 Peta Klimatologi Provinsi Lampung



Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Lampung 2022, data diolah 1991-2020

2.1.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan kawasan pengembangan potensi meliputi:

1. Kawasan Hutan Produksi

Dalam arahan tata ruang, hutan mempunyai fungsi khusus yaitu berfungsi lindung, konservasi, dan untuk pendukung kehidupan serta segala ekosistemnya disamping menghasilkan produk kehutanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu. Oleh sebab itu arahan budidaya untuk kehutanan adalah pengembangan hasil hutan non-kayu.

Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas

terletak di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan. Deliniasi kawasan hutan produksi tetap didasarkan kepada fungsi hutan yang ada.

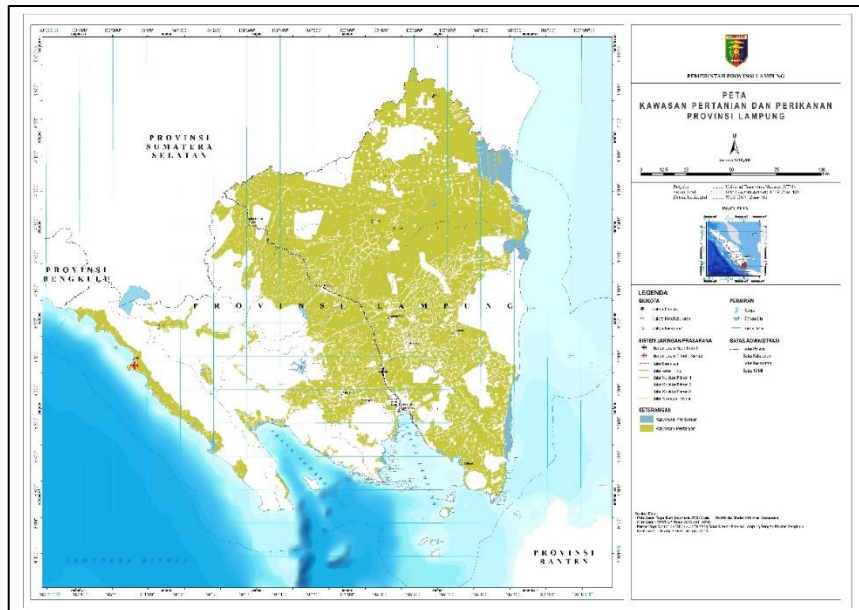
2. Kawasan Pertanian dan Perikanan

Kawasan peruntukan pertanian Provinsi Lampung terdiri dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 369,831 Ha, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 327,835 Ha dan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 361,699 Ha. Lokasi pertanian lahan basah di Provinsi Lampung tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung kecuali Bandar Lampung, sedangkan luas areal pertanian tanaman pangan lahan kering tersebar pada beberapa kabupaten Provinsi Lampung kecuali Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus. Lahan pertanian tanaman pangan basah dan kering yang ada dapat diupayakan dan dipertahankan keberadaannya dalam rangka mempertahankan swasembada pangan yang telah dicapai sebelumnya dan untuk mengembangkan pertanian kerakyatan. Beberapa komoditas yang memiliki produktivitas yang dapat dijadikan komoditas unggulan di Provinsi Lampung adalah tanaman padi, ubi kayu, dan jagung.

Potensi perikanan di Lampung sangat besar yang terbagi dalam tiga wilayah, yaitu sepanjang pesisir pantai timur (Laut Jawa), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka) dan sepanjang pesisir pantai barat. Untuk jenis perikanan tangkap seperti tuna mata esar, setuhuk, setuhuk loreng, tuna sirip biru dan albakora, sebaran meliputi daerah pesisir pantai Barat, Teluk Lampung di Pesawaran, Teluk Semangka di Kabupaten Tulang Bawang dan Pesisir Pantai Timur Sumatera lainnya, perikanan budidaya air payau dikembangkan di pesisir pantai Timur, Pesisir Barat dan Pesawaran yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian hutan mangrove, agar dapat menjaga ekosistem pesisir dan kelautan. Sedangkan budidaya kolam dapat dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Luas kawasan perikanan

ini adalah 66.090 Ha. Pelabuhan perikanan dikembangkan di Kabupaten Tulang Bawang (Kuala Teladas), Kabupaten Lampung Barat (Kuala Krui dan Bengkunt), Kota Bandar Lampung (Lempasing), Kabupaten Tanggamus (Kota Agung) dan Kabupaten Lampung Timur (Labuan Maringgai). Wisata bahari dikembangkan di sepanjang pesisir Lampung, khususnya di sepanjang pesisir Barat Sumatera.

Gambar II - 7 Peta Kawasan Pertanian dan Perikanan



Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

3. Kawasan Perkebunan

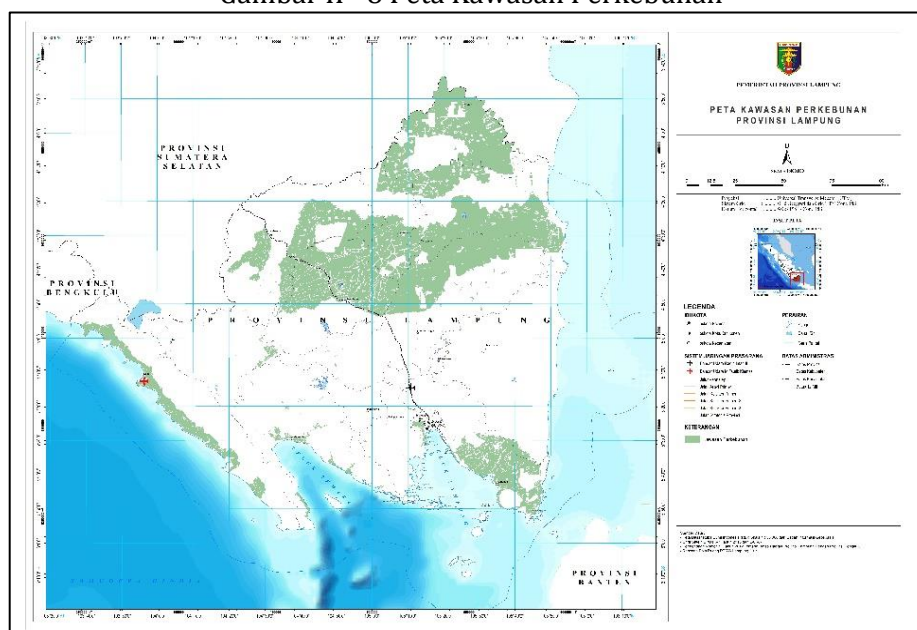
Sektor perkebunan terus dikembangkan dengan kombinasi perkebunan rakyat dan perkebunan skala besar. Luas kawasan peruntukan perkebunan adalah 878.611 Ha. Pengembangan komoditas ini diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri ekonomi kerakyatan. Tanaman perkebunan tersebut diarahkan pada lahan-lahan di beberapa kabupaten, sebagaimana dipetakan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel II - 5 Sebaran Komoditas Pekebunan

Komoditi	Kabupaten
Kopi, Lada, Tebu, Kakao dan Kelapa	Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Pringsewu, Tulang bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesawaran dan Tanggamus

Komoditi	Kabupaten
Tebu	Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan dan Tulang Bawang Barat
Sawit	Lampung Tengah, Lampung Selatan, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang.

Gambar II - 8 Peta Kawasan Perkebunan



Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

4. Kawasan Pertambangan

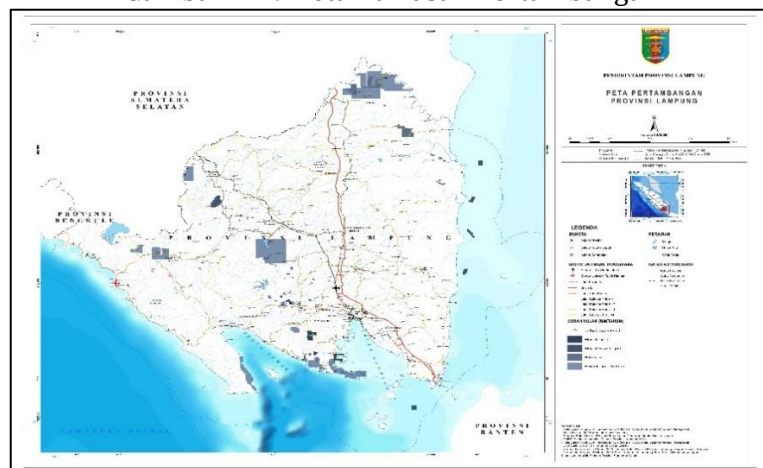
Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi:

- Kabupaten Tanggamus (cadangan) meliputi ziolit (437.670.000 m³), emas (415.677 ton), batu bara (867.000 ton), geothermal (400 Kw), bentonit (88.700.000 m³) dan granit (62.500.000 m³, dan andesit di Kecamatan Kelumbayaan;
- Kabupaten Lampung Barat (cadangan) meliputi andesit (1.000.000 m³), emas (16.783Ha), geothermal (430 Kw), trass (2.750.000 m³) diatomea (170.000 m³) dan perlit (10.500.000 m³);
- Kabupaten Lampung Utara (cadangan), yaitu andesit (97.400.000 m³); Kabupaten Way Kanan (cadangan) meliputi batubara

- (131.250.000), emas (829.680 ton), marmer (615.800.000 m³), kaolin (2.929.000 m³) dan batu mulia (40.000 m³);
- d. Kabupaten Mesuji (cadangan), yaitu batubara (360.000 km²);
 - e. Kabupaten Tulang Bawang Barat (cadangan) yaitu pasir kuarsa (3.600.000 m³) dan migas (dalam penelitian);
 - f. Kabupaten Lampung Tengah (cadangan) meliputi andesit (443.260.000 m³), emas (102.875 ton), batubara (2.358.855 ton), biji besi (68.457 ton), feldspar (389.350.000 m³) dan granit (980.600.000 m³).
 - g. Kabupaten Lampung Timur (cadangan) meliputi andesit (3.449.511 m³), pasir kuarsa (32.575.000 m³) dan minyak bumi (dalam penelitian).
 - h. Kabupaten Lampung Selatan (cadangan) meliputi andesit (87.340.000 m³), zeolit (8.000 m³), batu bara (5.000 ton), biji besi (1.902.000 ton), pasir besi (5.071 m³), emas (10.732,5 ton), mangan (243.000 ton), granit (287.000.000 m³).
 - i. Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Gunung Rajabasa terdapat cadangan batubara dan panas bumi dengan deposit dalam tahap penelitian.

Kawasan pertambangan di Provinsi Lampung dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar dibawah ini:

Gambar II - 9 Peta Kawasan Pertambangan



Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

5. Kawasan Industri

Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten, terutama pada lokasi yang dekat dengan penghasil sumberdaya. Hingga saat ini, kawasan industri yang akan dipertahankan pengembangannya sebagai kawasan industri seluas 35.807 Ha. Kawasan Industri di Provinsi Lampung terdapat di wilayah Tanjung Bintang Lampung Selatan seluas 350 Ha. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran sesuai dengan kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dan dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung ekosistem. Adapun sebaran kawasan peruntukan industri prioritas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, meliputi:

- a. Kawasan Peruntukan Industri Lampung (KAIL) di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Kawasan Peruntukan Industri Tanggamus di Kabupaten Tanggamus;
- c. Kawasan Peruntukan Industri Way Pisang di Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Kawasan Peruntukan Industri Mesuji di Kabupaten Mesuji;
- e. Kawasan Peruntukan Industri Sulusuban di Kabupaten Lampung Tengah;
- f. Kawasan Peruntukan Industri Way Kanan di Kabupaten Way Kanan;
- g. Kawasan Peruntukan Industri Tulang Bawang Barat di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- h. Kawasan Peruntukan Industri Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang;
- i. Kawasan Peruntukan Industri Ketibung di Kabupaten Lampung Selatan;
- j. Kawasan Peruntukan Industri Tegineneng di Kabupaten Pesawaran

- c. Mendorong wisatawan melakukan perjalanan berwisata pada umumnya mencari pengalaman baru yang dapat diperoleh dari obyek sejarah, makanan lokal, olahraga, adat istiadat, kegiatan di lapangan dan petualangan alam.

Pengembangan pariwisata dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung lebih menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan Lindung.

Rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

1. Pengembangan wisata Pantai Barat Lampung; meliputi Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat
2. Pengembangan Kawasan TNWK Lampung Safari Way Kambas *Park and Conservation Center*.
3. Pengembangan kawasan wisata terintegrasi Teluk Lampung; meliputi Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran dan Tanggamus.

Tabel II - 6 Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi Lampung

NO.	KATEGORI	POTENSI	LOKASI	KETERANGAN
1.	Wisata Alam	Pantai	Kabupaten Pesisir Barat, Pesawaran dan Lampung Selatan	rekreasi alam
		Pegunungan	Lampung Barat, Pesawaran, Lampung Selatan	
		Danau	Way Jepara (Lampung Utara), Ranau (Kabupaten Lampung Barat)	
		Air Terjun	Way Kanan dan Lampung Barat	
		Minat Khusus	Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro	mobil dan motor <i>off-road</i>
		Minat Khusus	Kabupaten Pesawaran	<i>paragliding dan gantole</i>
		Minat Khusus	Way Semangka (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus), serta Way Semong (Kabupaten Tanggamus), Way	arung jeram

NO.	KATEGORI	POTENSI	LOKASI	KETERANGAN
			Besai (Kabupaten Lampung Barat), Bandar Lampung	
		Minat Khusus	Way Kambas/Way Kanan (Kabupaten Lampung Timur)	<i>Trekking</i>
		Minat Khusus	Lampung Timur, Tanggamus	pengamatan satwa liar
2.	Wisata Bahari	Minat Khusus	Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku (Lampung Selatan), Pulau Pahawang, Tanjung Putus, Pubu Tegal	selam, mancing, <i>snorkling</i>
		Minat Khusus	Pulau Condong (Lampung Selatan), Pulau Pahawang, Tanjung Putus, Pubu Tegal	selam, mancing, <i>snorkling</i>
		Minat Khusus	Krui (Pesisir Barat)	<i>Surfing</i>
3.	Wisata Budaya	Wisata Sejarah	Sumber Jaya (Lampung Barat)	Situs Masa Pra Sejarah
		Wisata Sejarah	Sukau (Lampung Barat)	Situs masa Hindu dan Budha
		Wisata Sejarah	Pesisir Tengah (Pesisir Barat)	Situs Masa Islam
		Wisata Sejarah	Pasemah (Lampung Selatan)	Prasasti Batu Tulis Kerajaan Sriwijaya
		Wisata Sejarah	Pugung Raharjo (Lampung Timur)	Situs masa Pra Sejarah
		Wisata Sejarah	Tulang Bawang	Situs Kerajaan Tulang Bawang
		Wisata Ziarah	Lampung Selatan	Makam Radin Intan II
		Wisata Ziarah	Pesisir Tengah (Lampung Barat)	Makam Islam
		Wisata Ziarah	Way Kanan	Makam Raja-raja Way Kanan
		Wisata Ziarah	Goa Maria (Pringsewu), Makan KH. Gholib (Pringsewu)	Ziarah umat Katholik
4.	Wisata Buatan	Wisata Museum	Kota Bandar Lampung	Museum Lampung
		Wisata Museum	Gedong Tataan	Museum Transmigrasi
		Wisata Museum	Kota Bandar Lampung	Gedung Juang 45
		Wisata Monumen	Bakauheni (Lampung Selatan)	Menara Siger
		Wisata Monumen	Kota Bandar Lampung	Monumen Krakatau
		Wisata Taman Rekreasi	Kota Bandar Lampung	Taman Bumi Kedaton, Taman Budaya Lampung dan Lembah Hijau

a. Banjir

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai atau pecahnya bendungan.

Tabel II - 7 Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	26.326	Tinggi
2	Tanggamus	42.033	Sedang
3	Lampung Selatan	70.032	Tinggi
4	Lampung Timur	255.051	Tinggi
5	Lampung Tengah	380.268	Tinggi
6	Lampung Utara	188.770	Sedang
7	Way Kanan	264.609	Sedang
8	Tulang Bawang	307.150	Tinggi
9	Pesawaran	49.171	Sedang
10	Pringsewu	34.822	Sedang
11	Mesuji	202.391	Tinggi
12	Tulang Bawang Barat	126.726	Tinggi
13	Pesisir Barat	55.070	Sedang
14	Bandar Lampung	10.092	Sedang
15	Metro	6.179	Sedang
PROVINSI LAMPUNG		2.018.690	TINGGI

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

b. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Pada umumnya gelombang ekstrim dan abrasi terjadi karena gelombang angin yang timbul akibat tiupan angin di permukaan laut. Gelombang dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transport sedimen dalam arah tegak lurus di sepanjang pantai. Angin yang bertiup dengan kecepatan dan arah tertentu di permukaan laut akan menimbulkan riakan (gerakan) air yang semula kecil menjadi besar dan kemudian menjadi gelombang. Energi gelombang yang datang tegak lurus dari arah utara pantai mengikis kawasan tersebut sehingga menimbulkan abrasi yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan perubahan garis pantai.

Tabel II - 8 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Tanggamus	4.775	Sedang
2	Lampung Selatan	5.302	Sedang
3	Lampung Timur	2.564	Sedang
4	Tulang Bawang	1.796	Sedang
5	Pesawaran	3.940	Sedang
6	Pesisir Barat	4.786	Tinggi
7	Bandar Lampung	515	Sedang
PROVINSI LAMPUNG		23.678	TINGGI

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

c. Gempa Bumi

Gempa Bumi merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor geologi. Gempa Bumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba.

Tabel II - 9 Potensi Luas Bahaya Gempabumi di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	214.278	Tinggi
2	Tanggamus	279.859	Tinggi
3	Lampung Selatan	70.032	Sedang
4	Lampung Timur	394.580	Tinggi
5	Lampung Tengah	380.268	Sedang
6	Lampung Utara	257.047	Tinggi
7	Way Kanan	367.375	Tinggi
8	Tulang Bawang	311.079	Tinggi
9	Pesawaran	136.949	Sedang
10	Pringsewu	60.899	Sedang
11	Mesuji	218.400	Tinggi
12	Tulang Bawang Barat	120.100	Tinggi
13	Pesisir Barat	270.265	Tinggi
14	Bandar Lampung	17.660	Sedang
15	Metro	8.854	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		3.107.645	TINGGI

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

d. Kebakaran Hutan dan Lahan

Perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali maupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Perhitungan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dilihat berdasarkan jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah.

Tabel II - 10 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	58.780	Tinggi
2	Tanggamus	40.923	Tinggi
3	Lampung Selatan	20.859	Tinggi
4	Lampung Timur	134.246	Tinggi
5	Lampung Tengah	69.619	Tinggi
6	Lampung Utara	27.712	Tinggi
7	Way Kanan	135.733	Sedang
8	Tulangbawang	131.045	Tinggi
9	Pesawaran	17.088	Tinggi
10	Pringsewu	6.092	Tinggi
11	Mesuji	109.123	Tinggi
12	Tulang Bawang Barat	34.655	Sedang
13	Pesisir Barat	203.990	Tinggi
14	Bandar Lampung	136	Tinggi
15	Metro	36	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		990.037	TINGGI

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

e. Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi merupakan bencana yang disebabkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Pengelolaan teknologi tinggi yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak kegagalan ataupun kecelakaan yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Penghitungan indeks bahaya kegagalan teknologi mengacu kepada beberapa parameter. Parameter tersebut

adalah kapasitas industri dan jenis industri: manufaktur (logam) dan kimia.

Tabel II - 11 Tabel Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Selatan	2.633	Tinggi
2	Lampung Tengah	11.620	Tinggi
3	Lampung Utara	334	Sedang
4	Bandar Lampung	1.915	Tinggi
5	Metro	519	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		17.021	Tinggi

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

f. Kekeringan

Kekeringan adalah suatu kondisi dalam kurun waktu yang panjang, bulan atau tahun, dimana suatu daerah mengalami kekurangan air. Pada umumnya, hal ini terjadi ketika daerah tersebut secara terus-menerus mengalami hujan di bawah rata-rata.

Tabel II - 12 Tabel Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	214.278	Tinggi
2	Tanggamus	279.861	Sedang
3	Lampung Selatan	70.032	Sedang
4	Lampung Timur	394.580	Tinggi
5	Lampung Tengah	380.268	Tinggi
6	Lampung Utara	257.047	Tinggi
7	Way Kanan	367.375	Tinggi
8	Tulangbawang	311.082	Tinggi
9	Pesawaran	136.959	Sedang
10	Pringsewu	60.899	Sedang
11	Mesuji	218.400	Tinggi
12	Tulang Bawang Barat	120.100	Tinggi
13	Pesisir Barat	270.264	Sedang
14	Bandar Lampung	17.660	Sedang
15	Metro	8.854	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		3.107.659	TINGGI

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

g. **Epidemi dan Wabah Penyakit**

Epidemi, wabah, atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar. Epidemii atau wabah dan KLB merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Pada skala besar epidemii ini dapat menyebabkan korban jiwa.

Tabel II - 13 Tabel Potensi Luas Bahaya Epidemii dan Wabah Penyakit di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Tanggamus	2.036	Sedang
2	Lampung Selatan	11.936	Tinggi
3	Lampung Timur	17	Tinggi
4	Lampung Tengah	16.988	Tinggi
5	Way Kanan	205	Tinggi
6	Pesawaran	3.879	Tinggi
7	Pringsewu	10.520	Tinggi
8	Mesuji	2	Tinggi
9	Bandar Lampung	3.782	Tinggi
10	Metro	12	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		49.377	SEDANG

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

h. **Letusan Gunung Api**

Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung terjadi pada tahun 1883. Setelah meletusnya gunung Krakatau tersebut, saat ini Gunung Api Anak Krakatau yang terletak di Kabupaten Lampung masih aktif dan bahkan seringkali mengalami erupsi.

Tabel II - 14 Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung api Krakatau di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Selatan	2.651	Rendah
PROVINSI LAMPUNG		2.651	RENDAH

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

i. **Cuaca Ekstrim**

Cuaca ekstrim merupakan fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer. Perhitungan potensi bahaya letusan cuaca ekstrim dilihat berdasarkan parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan.

Tabel II - 15 Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	184.611	Sedang
2	Tanggamus	172.770	Sedang
3	Lampung Selatan	69.906	Sedang
4	Lampung Timur	265.094	Sedang
5	Lampung Tengah	380.268	Sedang
6	Lampung Utara	247.253	Sedang
7	Way Kanan	362.516	Sedang
8	Tulangbawang	303.472	Sedang
9	Pesawaran	99.087	Sedang
10	Pringsewu	60.555	Sedang
11	Mesuji	179.934	Sedang
12	Tulang Bawang Barat	120.100	Sedang
13	Pesisir Barat	130.353	Sedang
14	Bandar Lampung	17.601	Sedang
15	Metro	9.568	Sedang
PROVINSI LAMPUNG		2.603.088	SEDANG

j. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran.

Tabel II - 16 Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	116.197	Tinggi
2	Tanggamus	131.727	Tinggi
3	Lampung Selatan	17.721	Tinggi
4	Lampung Timur	343	Tinggi
5	Lampung Tengah	19.269	Tinggi
6	Lampung Utara	26.405	Tinggi
7	Way Kanan	23.942	Tinggi
8	Pesawaran	52.103	Tinggi
9	Pringsewu	10.676	Tinggi
10	Pesisir Barat	88.781	Tinggi
11	Bandar Lampung	3.223	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		490.387	TINGGI

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019.

k. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai.

Tabel II - 17 Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	2.515	Tinggi
2	Tanggamus	2.060	Tinggi
3	Lampung Tengah	6.808	Tinggi
4	Lampung Utara	30	Tinggi
5	Way Kanan	13.888	Tinggi
6	Pesisir Barat	4.015	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		29.316	TINGGI

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019.

l. Tsunami

Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempa bumi

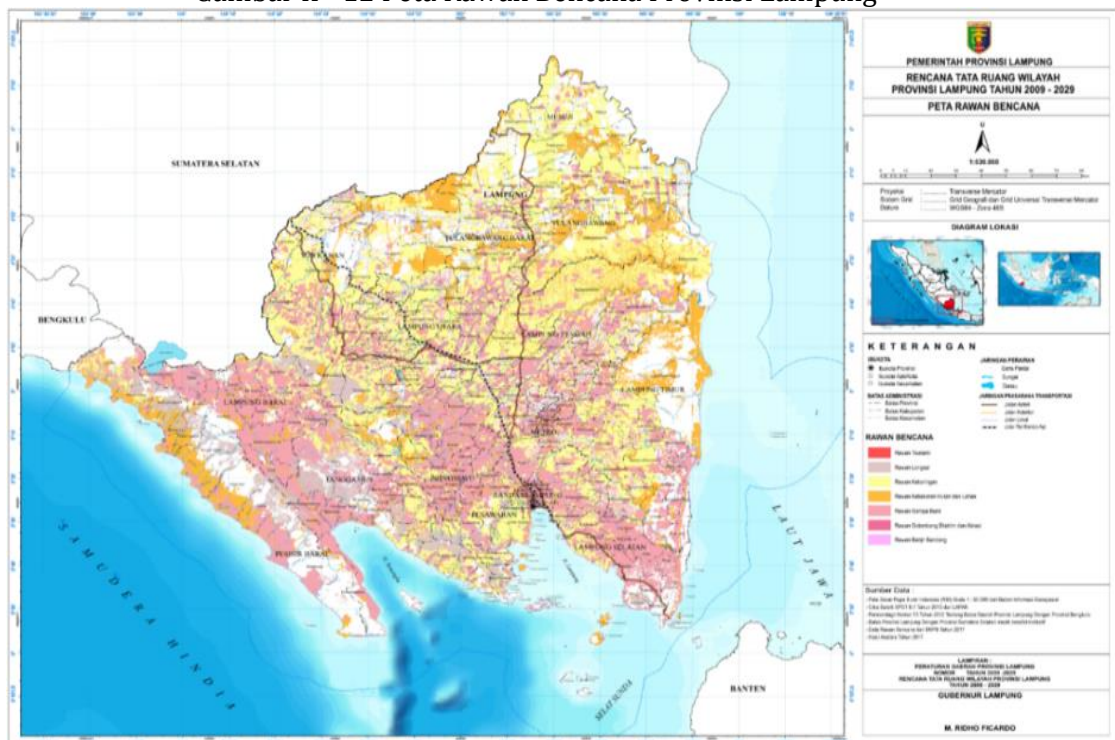
di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 60 km dan magnitudo lebih dari 7 SR.

Tabel II - 18 Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Tanggamus	2.791	Tinggi
2	Lampung Selatan	4.596	Tinggi
3	Lampung Timur	1	Tinggi
4	Pesawaran	926	Tinggi
5	Pesisir Barat	2.639	Tinggi
6	Bandar Lampung	198	Tinggi
PROVINSI LAMPUNG		11.151	TINGGI

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019.

Gambar II - 12 Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung



Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

2.1.1.8. Kondisi Demografi

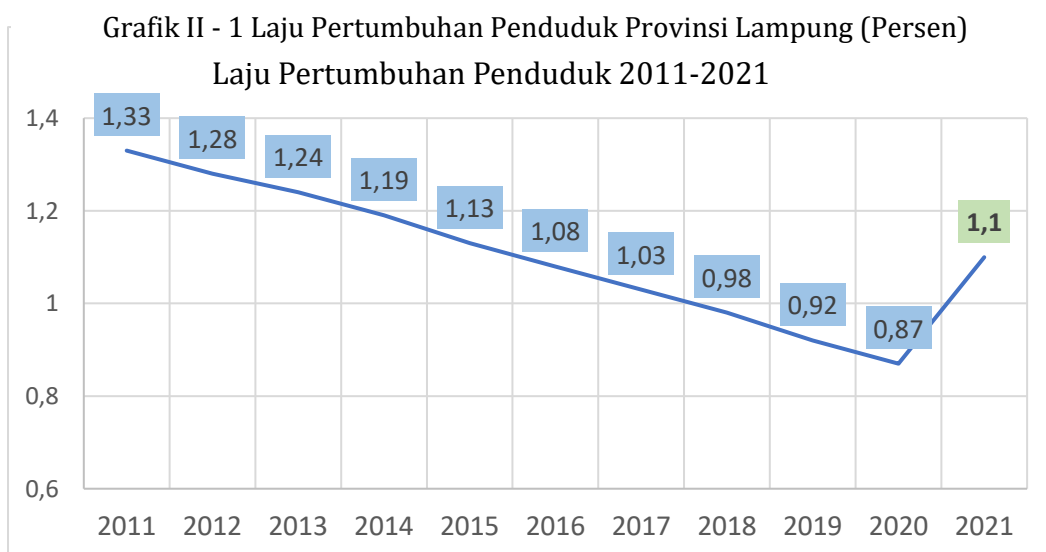
Kondisi Demografi sebuah wilayah dapat memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Komposisi Umur Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk yang dilakukan antara periode tahun 1971 sampai dengan tahun 2020 dapat diketahui Komposisi Umur Penduduk selama tahun 1971 – 2020 (dalam persen). Proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun dari 48,04 persen pada tahun 1971 menjadi 23,74 persen pada tahun 2020. Dalam periode yang sama, penduduk usia kerja 15-64 tahun meningkat dari 50,57 persen menjadi 70,31 persen. Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 1,39 persen menjadi 5,95 persen.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Provinsi Lampung selama 10 tahun terakhir dari tahun 2011 – 2021 cukup stabil dan terkendali, menunjukkan kecenderungan penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 1,33 tahun 2011 menjadi 0,87 tahun 2020 tapi sedikit meningkat pada 2021. Hal ini menjadi indikasi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam pengendalian kuantitas penduduk.



Sumber : BPS, 2022

Jumlah dan Distribusi Penduduk

Jumlah Penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebanyak 9.081.792 jiwa yang tersebar pada 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Berdasarkan sebarannya, jumlah penduduk yang terbesar berada pada Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.477.395 jiwa disusul oleh Kota Bandar Lampung sebanyak 1.184.949 jiwa dan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1.118.115 jiwa. Sedangkan Kabupaten dengan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebanyak 163.641 jiwa atau 1,80 persen penduduk Povinsi Lampung. Untuk tingkat kepadatan penduduk Lampung, adalah sebesar 270,49 Jiwa per Km². Wilayah terpadat di Provinsi Lampung adalah oleh Kota Bandar Lampung dengan tingkat kepadatan sebesar 6.450 Jiwa per Km² kemudian disusul Kota Metro sebesar 2.319 Jiwa per Km² dan Kabupaten Pringsewu sebesar 662 Jiwa per Km². Sebaran penduduk Provinsi Lampung di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II - 19 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016-2021

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%	Kepadatan Penduduk Per Km ² *)
1	Lampung Barat	295.689	298.286	300.703	302.828	302.140	302.749	3,33	143,08
2	Tanggamus	580.383	586.624	592.603	598.299	640.280	645.807	7,11	222,54
3	Lampung Selatan	982.885	992.763	1.002.285	1.011.286	1.064.300	1.071.727	11,80	483,01
4	Lampung Timur	1.018.424	1.027.476	1.036.193	1.044.320	1.110.340	1.118.115	12,31	289,11
5	Lampung Tengah	1.250.486	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.050	1.477.395	16,27	324,78
6	Lampung Utara	609.304	612.100	614.701	616.897	633.100	634.117	6,98	238,71
7	Way Kanan	437.530	441.922	446.113	450.109	473.580	476.871	5,25	135,05
8	Tulang Bawang	435.125	440.511	445.797	450.902	430.020	430.630	4,74	138,58
9	Pesawaran	431.198	435.827	440.192	444.380	477.470	481.708	5,30	376,45
10	Pringsewu	390.486	393.901	397.219	400.187	405.470	406.823	4,48	661,53
11	Mesuji	196.913	198.092	199.168	200.198	227.520	229.772	2,53	104,42
12	Tulang Bawang Barat	266.973	269.162	271.206	273.215	286.160	287.707	3,17	224,52
13	Pesisir Barat	151.288	152.529	153.743	154.895	162.700	163.641	1,80	54,66
14	Bandar Lampung	997.728	1.015.910	1.033.803	1.051.500	1.166.070	1.184.949	13,05	6.449,76
15	Metro	160.729	162.976	165.193	167.411	168.680	169.781	1,87	2.319,10
	Provinsi Lampung	8.205.141	8.289.577	8.370.485	8.447.737	9.007.850	9.081.792	100,00	270,49

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2022, data diolah

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

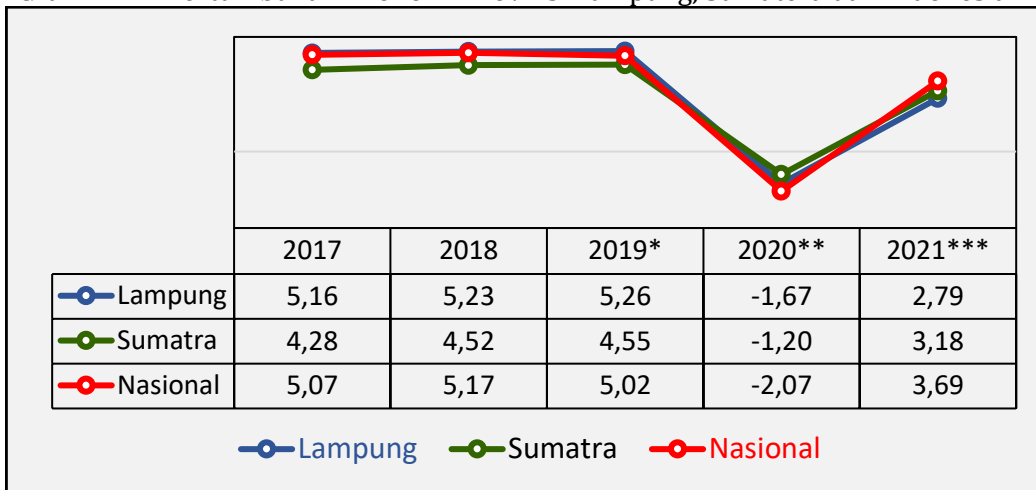
2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan perekonomian tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, korporasi atau perusahaan, pemerintah dan unit lembaga swasta nirlaba) dengan cara mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu, adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Selama periode 2017-2021, Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung sebelum pandemic Covid 19 memperlihatkan *trend* yang terus meningkat dari 5,16 persen di tahun 2017 menjadi 5,26 persen pada tahun 2019. Selama periode ini Provinsi Lampung selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional dan Sumatera. Namun sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020, perekonomian Lampung mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai minus 1,67 persen dan mulai membaik tumbuh positif di tahun 2021 sebesar 2,79 persen.

Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional (3,69) dan Sumatera (3,18). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada Tahun 2021 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp. 371.903,17 Miliar dan Rp. 247.001,67 Miliar.

Grafik II - 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Dari sisi produksi, pertumbuhan kumulatif tertinggi terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 8,26 persen. Selanjutnya Konstruksi tumbuh sebesar 6,95 persen dan Pengadaan Air tumbuh sebesar 6,94 persen. Selain itu lapangan usaha yang juga tumbuh cukup besar adalah Informasi dan Komunikasi serta Industri Pengolahan yang tumbuh masing-masing sebesar 6,17 persen dan 4,57 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan, terutama terjadi pada Pengadaan Listrik dan Gas serta Pertambangan dan Penggalian dengan kontraksi masing-masing sebesar -6,80 persen dan -5,28 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung tahun 2021 (ADHB), masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peranan sebesar 28,39 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 19,65 persen; Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,70 persen; serta Konstruksi sebesar 9,89 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 69,63 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan (*source of growth*), Lapangan Usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,97 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 0,84 persen, dan Konstruksi sebesar 0,68 persen.

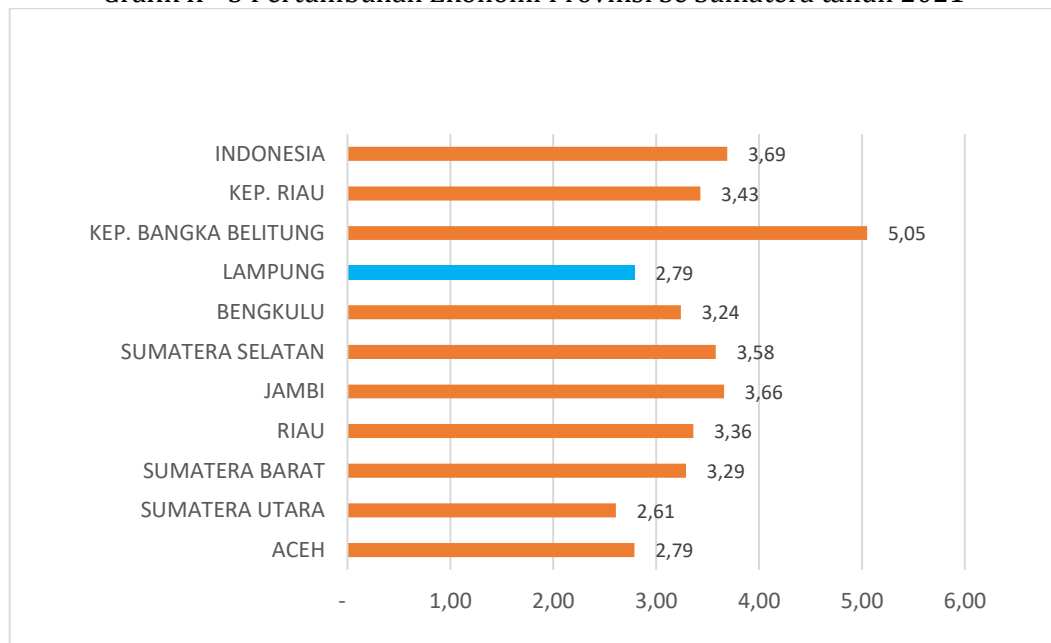
Sementara itu, sumber pertumbuhan dari lapangan usaha lainnya sebesar 0,29 persen.

Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 2,79 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 13,78 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,94 persen; Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,63 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,67 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,47 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 11,26 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran (ADHB), masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Lampung yaitu sebesar 61,84 persen; diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 47,00 persen; Komponen PMTB sebesar 33,78 persen; Komponen PK-P sebesar 7,91 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,71 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,22 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 52,47 persen

Jika dibandingkan dengan daerah provinsi setara dalam lingkup regional Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2021 berada pada posisi terendah kedua bersama Provinsi Aceh dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,79. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Sumatera dapat dilihat pada grafik II-1.

Grafik II - 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se Sumatera tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 5 kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi, yaitu Kabupaten Lampung Tengah (-1,02%), Kabupaten Lampung Barat (1,14%), Kabupaten Way Kanan (-1,16), diikuti Kabupaten Pesisir Barat (1,17%) dan Kabupaten Pringsewu (1,21%). Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel II-17.

Tabel II - 20 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

WILAYAH	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bandar Lampung	6.28	6.2	6.21	-1.85	3.07
Metro	5,66	5,68	5.58	-1.79	2.9
Tulang Bawang	5,45	5,42	5,41	-1,36	2.88
Lampung Tengah	5,27	5,33	5,35	-1,02	2.88
Pesisir Barat	5,33	5,33	5,37	-1,17	2.07
Tulang Bawang Barat	5,55	5,27	5.36	-1.32	2.89
Lampung Utara	5,21	5,31	5,33	-1,45	2.82
Mesuji	5,20	5,30	5,26	-1,35	2.84
Lampung Barat	5,03	5,09	5,19	-1,14	2.58

WILAYAH	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2017	2018	2019	2020	2021
Way Kanan	5,11	5,18	5,17	-1,16	2.9
Lampung Selatan	5,46	5,23	5,13	-1,73	2.68
Pringsewu	5,11	5,01	5,04	-1,21	2.91
Tanggamus	5,19	5,01	5,02	-1,77	2.3
Pesawaran	5,01	5,05	5,00	-1,26	2.08
Lampung Timur	4,58	3,71	3,81	-2,29	2.89
Provinsi Lampung	5,16	5,23	5.26	-1.67	2.79
Nasional	5,07	5,17	5.02	-2.07	3.69

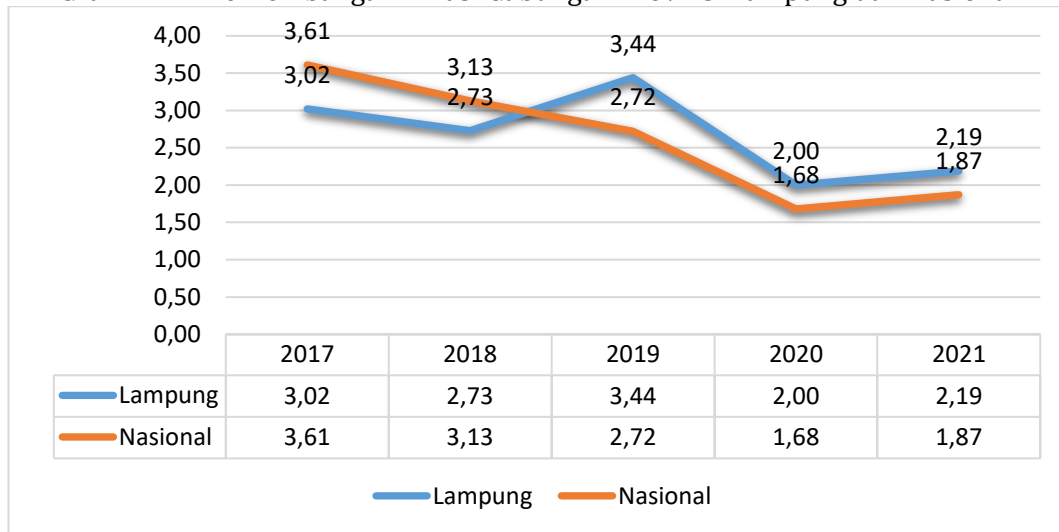
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.2.2. Inflasi Daerah

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.

Sepanjang periode 2017–2021 inflasi umum tahunan Lampung berada kisaran 2,00–3,44. Sementara nasional pada kisaran 1,68–3,61. ini artinya inflasi nasional dan Lampung masih tergolong rendah. Inflasi tertinggi Lampung terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 3,44% dan terendah pada tahun 2020 yang mencapai 2,00%. Selama 3 tahun terakhir, inflasi tahunan Lampung berada di atas angka inflasi nasional.

Grafik II - 4 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.3. PDRB per Kapita

PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan. PDRB Perkapita Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun secara signifikan cenderung mengalami peningkatan dari 37 juta tahun 2017 menjadi 40,95 juta pada tahun 2021. Penurunan PDRB Perkapita pada tahun 2020 dan 2021 dibanding tahun 2019 menunjukkan bahwa pada kemampuan masyarakat Lampung mengalami sedikit penurunan dalam hal untuk mengonsumsi suatu produk. Apabila dibanding secara nasional, PDRB Perkapita Lampung juga masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita Nasional yang tercatat sebesar 62,96 Juta Rupiah pada tahun 2021.

Secara umum, dalam kurun waktu 2020-2021, PDRB per kapita Provinsi Lampung menunjukkan penurunan yang disebabkan karena memang menurunnya aktivitas perekonomian baik dari sisi produksi maupun pengeluaran akibat dampak Covid 19.

Grafik II - 5 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Lampung dan Nasional, 2022

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung lima tahun terakhir menunjukkan Kabupaten Tulang Bawang mempunyai PDRB Perkapita tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,8 persen. Setelah itu diikuti Kabupaten Lampung Barat dan Mesuji masing-masing sebesar 4,10 persen dan 3,31 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Lampung Tengah dan Bandar Lampung, masing-masing 0,8 persen dan 1 persen. Pada Tahun 2021, Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar (Rp. 56,12 juta), lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung (Rp. 40,95 juta).

Tabel II - 21 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota ADHB se-Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Tulang Bawang	45,09	48,37	51,07	53,69	56,12
Bandar Lampung	49,30	53,00	56,22	50,75	51,90
Lampung Tengah	48,32	52,17	55,37	48,86	50,32
Mesuji	45,09	49,01	51,93	45,81	47,41
Lampung Selatan	38,60	41,63	44,13	41,70	43,31
Tulang Bawang Barat	36,61	39,56	41,86	39,97	41,57
Lampung Utara	33,55	36,07	38,51	37,55	39,21
Metro	33,63	35,67	37,68	37,36	38,74
Lampung Timur	35,18	38,48	39,80	36,71	38,32

Pesawaran	32,11	34,43	36,43	34,05	34,97
Way Kanan	27,40	29,38	31,02	29,59	30,75
Pesisir Barat	25,88	27,86	30,25	28,89	30,06
Pringsewu	24,59	26,20	27,85	27,56	28,67
Tanggamus	22,87	24,54	26,03	24,22	25,30
Lampung Barat	20,50	22,02	23,40	23,61	24,71
Provinsi Lampung	37,00	39,86	42,17	39,35	40,95

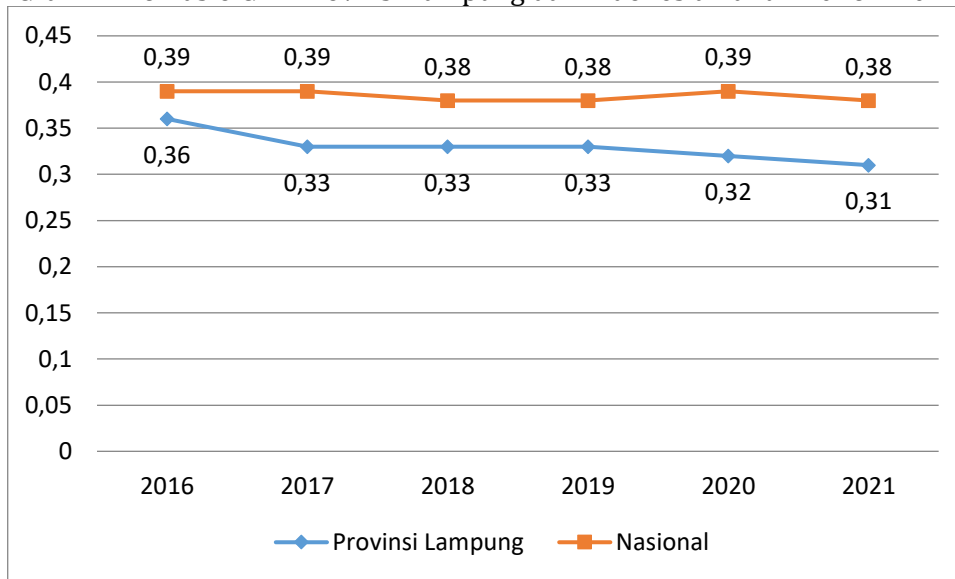
Sumber : BPS 2022

2.1.2.4. Ketimpangan Pendapatan

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2016 hingga 2021, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,358 tahun 2016 menjadi 0,314 pada Tahun 2021, dan berada dibawah rata-rata Nasional (0,381). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antarkelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

Grafik II - 6 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2021



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

Distribusi dan Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Struktur ekonomi dapat dilihat dalam konteks kewilayahan, yakni dengan mengamati kontribusi PDRB masing-masing kabupaten/kota terhadap pembentukan total PDRB Provinsi Lampung. Pada Tahun 2021, kontribusi terbesar disumbang Kabupaten Lampung Tengah sebesar 19,80 persen, disusul Kota Bandar Lampung dengan kontribusi sebesar 16,38 persen serta Kabupaten Lampung Selatan dengan kontribusi sebesar 12,36. Sedangkan Kabupaten dengan kontribusi terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 1,31 persen disusul Kota Metro 1,75 persen serta Kabupaten Lampung Barat 1,99 persen.

Tabel II - 22 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terhadap Total PDRB Tahun 2017 – 2021 (Persen)

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lampung Barat	1,98	1,96	1,97	1,99	1,99
2	Tanggamus	4,34	4,33	4,33	4,31	4,35
3	Lampung Selatan	12,38	12,40	12,40	12,35	12,36
4	Lampung Timur	11,68	11,73	11,55	11,35	11,41
5	Lampung Tengah	19,70	19,70	19,71	19,82	19,80
6	Lampung Utara	6,64	6,60	6,60	6,63	6,62
7	Way Kanan	3,91	3,89	3,88	3,90	3,90
8	Tulang Bawang	6,42	6,40	6,40	6,44	6,44

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
9	Pesawaran	4,52	4,50	4,50	4,52	4,49
10	Pringsewu	3,13	3,10	3,10	3,11	3,11
11	Mesuji	2,89	2,89	2,89	2,90	2,90
12	Tulang Bawang Barat	3,18	3,18	3,18	3,19	3,19
13	Pesisir Barat	1,28	1,28	1,30	1,31	1,31
14	Bandar Lampung	16,19	16,28	16,43	16,42	16,38
15	Metro	1,77	1,76	1,75	1,75	1,75
	Jumlah	100	100	100	100	100

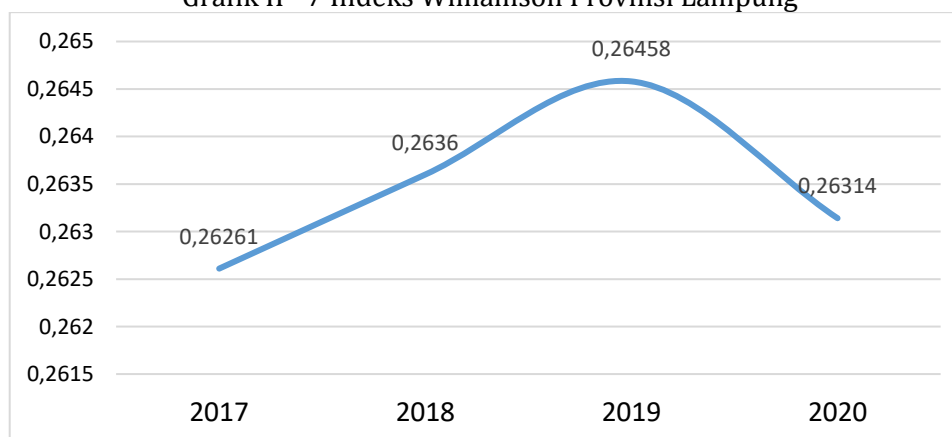
(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

2.1.2.5. Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson)

Kesenjangan antar wilayah di Provinsi Lampung tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk diantaranya kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah Indeks Williamson. Skala nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat tidak merata (sangat timpang).

Grafik II - 7 Indeks Williamson Provinsi Lampung



Sumber : BPS 2022, data diolah

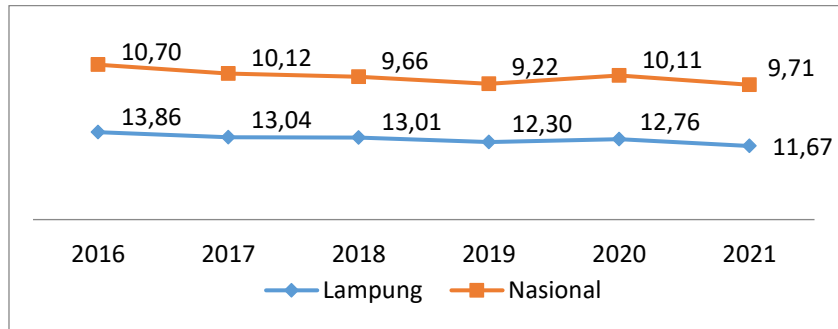
Indeks *Williamson* Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2017-2018 cenderung sedikit naik. Nilai indeks pada tahun 2017 sebesar 0,26261 meningkat menjadi 0,26458 di tahun 2019 dan menurun di tahun 202 sebesar 0,26314. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang rendah (kurang dari 0,35).

2.1.2.6. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 12,76 persen di tahun 2020 menjadi 11,67 persen di 2021, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin secara Nasional yang pada tahun 2021 berada pada angka 9,71 persen. Selama periode Maret-September, Provinsi Lampung berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin 76,91 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sebanyak 84,12 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 11,67 persen menurun 0,95 poin terhadap Maret 2021 dan 1,09 poin terhadap September 2020.

Grafik II - 8 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir empat kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Tabel II-20 menunjukkan pada September 2021 jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 770,54 ribu jiwa. angka tersebut tercatat menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 831,86 ribu jiwa dan di wilayah perkotaan juga mengalami penurunan yaitu dari sebesar 259,28 ribu jiwa tahun 2020 menjadi 236,48 ribu jiwa tahun 2021.

Tabel II - 23 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2021 (Ribu Jiwa)

LOKASI	2017	2018	2019	2020	2021
Kota	211,97	230,20	224.69	259,28	236,48
Desa	871,77	861,40	816.79	831,86	770,54
Kota + Desa	1.083,74	1.091,60	1041.48	1.091,14	1007,02

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Selanjutnya berdasarkan tabel II-21, kondisi kemiskinan ditingkat Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara sebanyak 19,63 persen, Kabupaten Pesawaran sebesar 15,11 persen dan Kabupaten Lampung Timur sebesar 15,08 yang merupakan 3 (tiga) Kabupaten dengan jumlah persentase

penduduk miskin terbanyak di Provinsi Lampung, ketiga kabupaten masih menduduki posisi yang sama dari tahun 2020 tidak ada perubahan hanya nilainya saja semakin meningkat di tahun 2021

Tabel II - 24 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2016 - 2021 (Persen)

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung Barat	14,32	13,54	12,92	12,52	12,82
Tanggamus	13,25	12,48	12,05	11,68	11,81
Lampung Selatan	15,16	14,86	14,31	14,08	14,19
Lampung Timur	16,35	15,76	15,24	14,62	15,08
Lampung Tengah	12,9	12,62	12,03	11,82	11,99
Lampung Utara	21,55	20,85	19,9	19,3	19,63
Way Kanan	14,06	13,52	13,07	12,9	13,09
Tulang Bawang	10,09	9,7	9,35	9,33	9,67
Pesawaran	16,48	15,97	15,19	14,76	15,11
Pringsewu	11,3	10,5	10,15	9,97	10,11
Mesuji	7,66	7,55	7,47	7,33	7,54
Tulang Bawang Barat	8,11	8,1	7,75	7,39	8,32
Pesisir Barat	15,61	14,98	14,48	14,29	14,81
Bandar Lampung	9,94	9,04	8,71	8,81	9,11
Metro	9,89	9,14	8,68	8,47	8,93
Provinsi Lampung	13,69	13,14	12,62	12,34	12,62

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

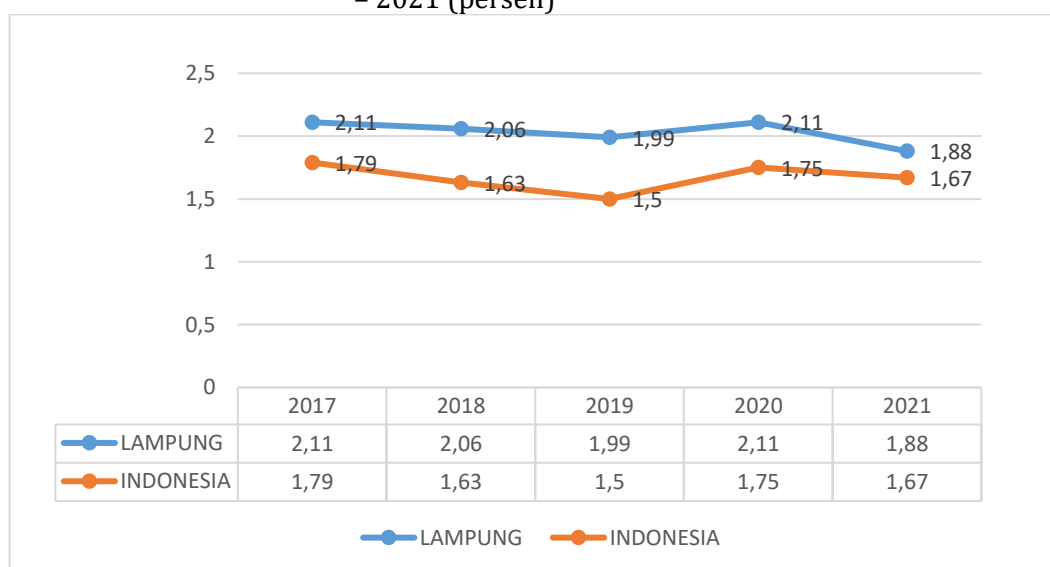
Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 2,11 di tahun 2017 menjadi 1,88 pada September 2021. Pada periode Maret – September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan

dari 1,881 menjadi 1,849. Penurunan nilai P1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P1 Nasional yang pada tahun 2021 berada pada angka 1,67.

Grafik II - 9 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung tahun 2016 - 2021 (persen)



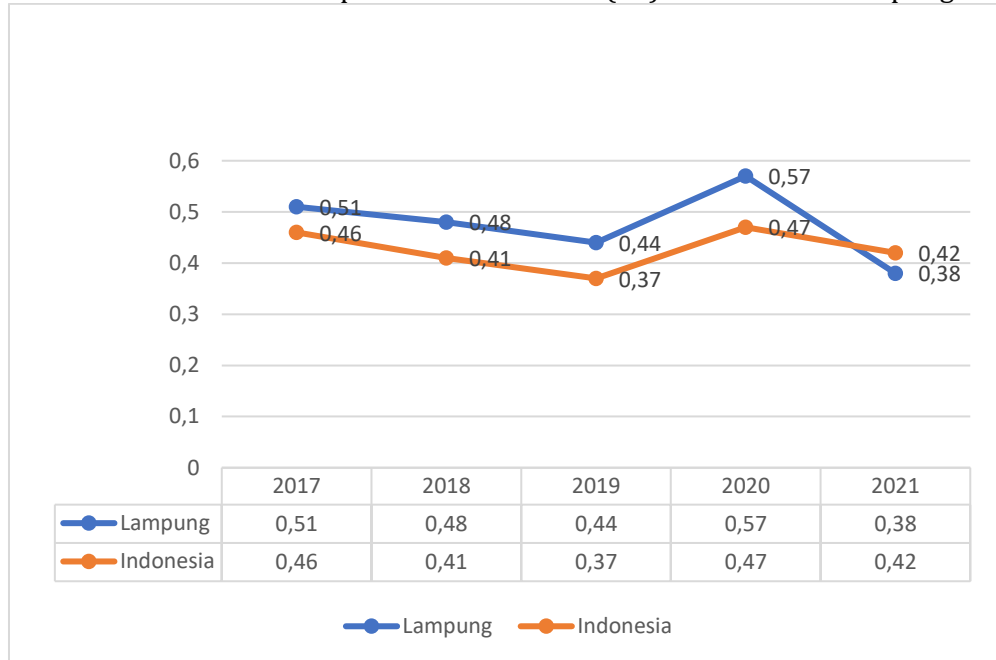
Sumber: BPS Susenas, 2022 diolah

Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 0,70 di 2016 menjadi 0,384 di 2021. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret - September 2021 juga mengalami penurunan dari 0,416 menjadi 0,384. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Bila dibandingkan secara nasional, Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung masih berada di bawah P2 Nasional yang sebesar 0,42.

Grafik II - 10 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

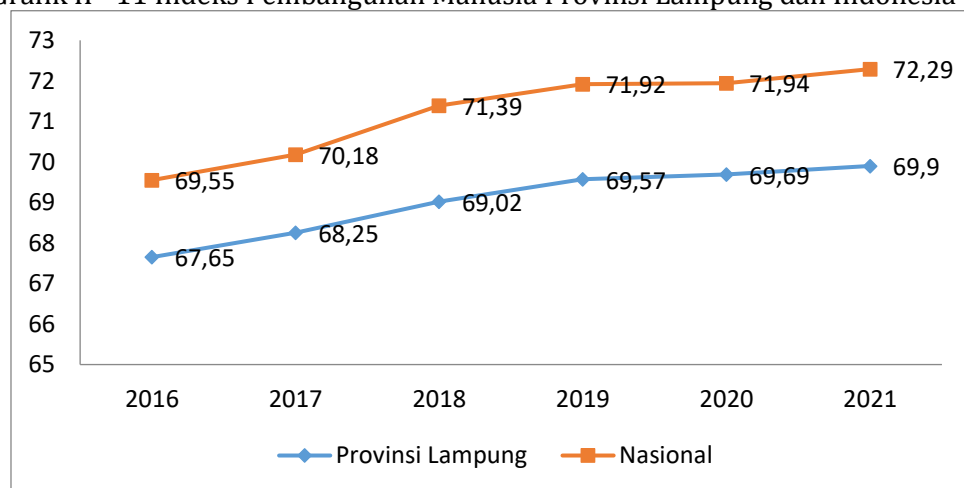
2.1.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan harus dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report, 1990).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Selama periode tahun 2016 s.d. 2021 IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 67,65 di tahun 2016 menjadi 69,90 di tahun 2021. Namun, peningkatan IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 72,29. Peningkatan IPM pada Tahun 2021 di Provinsi Lampung terjadi pada semua dimensi baik umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standard hidup layak. Berbeda pada peningkatan IPM Tahun 2020 yang hanya didukung peningkatan pada dimensi umur panjang dan sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standard hidup layak mengalami penurunan. Pada 2021, standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil perkapita (yang disesuaikan) meningkat dari Rp. 9,982 Juta pada Tahun 2020 menjadi Rp. 10.083 Juta, semakin mendekati nominal sebelum terjadinya Pandemi Covid 19.

Grafik II - 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Dari sisi pendidikan, pada tahun 2021 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,73 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,65 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,03 tahun, dari 8,05 tahun menjadi 8,08 tahun pada tahun 2021. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021

memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,73 tahun, lebih lama 0,08 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 1,61 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2011, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Lampung adalah 69,12 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 70,73 tahun. Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, UHH Lampung tahun 2020 dan 2021 mengalami perlambatan.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2021, HLS Lampung telah meningkat rata-rata 1,45 persen per tahun, sementara RLS meningkat rata-rata 0,98 persen per tahun. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, RLS dan HLS masih dapat tumbuh meskipun dengan perlambatan.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Lampung mencapai Rp10,04 juta per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,56 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda Lampung, pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah di tahun 2020 mengalami penurunan.

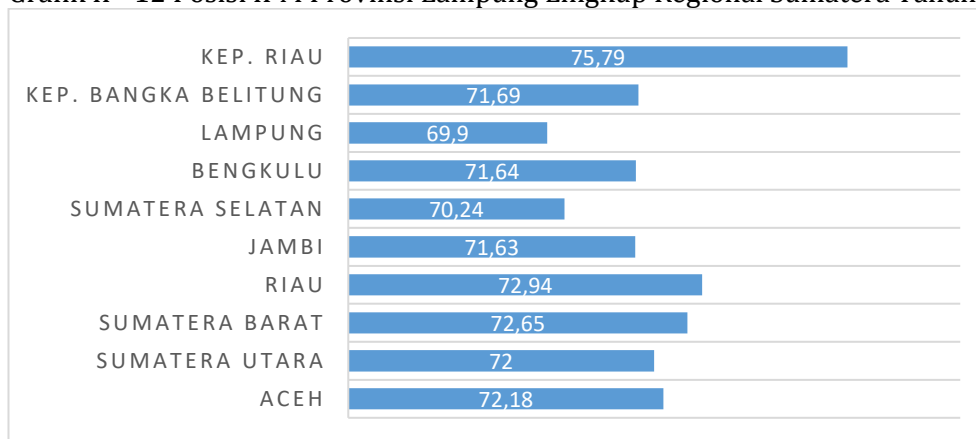
Tabel II - 25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Berdasarkan Komposit 2017-2021

Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	69.95	70.18	70.51	70.65	70.73
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.46	12.61	12.64	12.65	12.73
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.79	7.82	7.92	8.05	8.08
Standard Hidup Layak						
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp. 000	9,413	9,858	10,114	9,982	10,038
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		68.25	69.02	69.57	69.69	69.90

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Pada lingkup nasional, capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (72,29). Di lingkup regional Sumatera, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2021 berada pada posisi terendah. Untuk memacu ketertinggalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten terus melanjutkan program dan kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan.

Grafik II - 12 Posisi IPM Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Seiring dengan meningkatnya IPM provinsi, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota,

tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Mesuji (64,04), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Bandar Lampung (77,58). Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2021 adalah sebanyak 4, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan 11 kabupaten lainnya berstatus “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$), dan sudah tidak ada lagi yang berstatus “rendah” ($\text{IPM} < 60$). Sejak tahun 2016, tidak ada lagi kabupaten dengan status pembangunan manusia “rendah” setelah IPM Kabupaten Mesuji meningkat statusnya dari “rendah” menjadi “sedang”.

Tabel II - 26 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016 – 2021

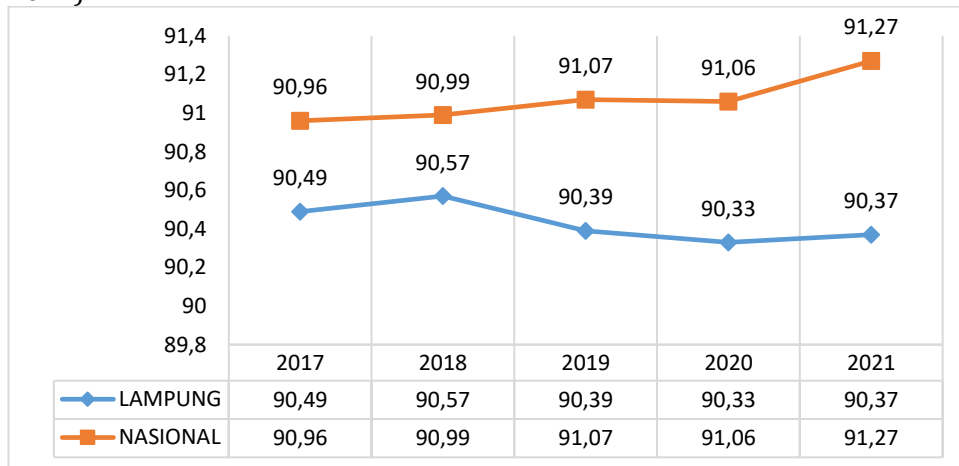
Wilayah	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Lampung Barat	65,45	66,06	66,74	67,50	67,80	67,90
Kabupaten Tanggamus	64,41	64,94	65,67	66,37	66,42	66,65
Kabupaten Lampung Selatan	66,19	66,95	67,68	68,22	68,36	68,49
Kabupaten Lampung Timur	67,88	68,05	69,04	69,34	69,37	69,66
Kabupaten Lampung Tengah	68,33	68,95	69,73	70,04	70,16	70,23
Kabupaten Lampung Utara	65,95	66,58	67,17	67,63	67,67	67,89
Kabupaten Way Kanan	65,74	65,97	66,63	67,19	67,44	67,57
Kabupaten Tulang Bawang	66,74	67,07	67,7	68,23	68,52	68,73
Kabupaten Pesawaran	63,47	64,43	64,97	65,75	65,79	66,14
Kabupaten Pringsewu	68,26	68,61	69,42	69,97	70,30	70,45
Kabupaten Mesuji	60,72	61,87	62,88	63,52	63,63	64,04
Kabupaten Tulang Bawang Barat	63,77	64,58	65,3	65,93	65,97	66,22
Kabupaten Pesisir Barat	61,5	62,2	62,96	63,79	63,91	64,30
Kota Bandar Lampung	75,34	75,98	75,63	77,33	77,44	77,58
Kota Metro	75,45	75,87	76,22	76,77	77,19	77,49
Provinsi Lampung	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69	69,90

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.8. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Lampung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan dari 90,30 tahun 2016 menjadi 90,33 tahun 2020 namun angka ini masih dibawah angka nasional. Meskipun dibawah nasional, dengan adanya peningkatan nilai IPG tersebut, mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten berusaha untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Lampung.

Grafik II - 13 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia (2016 – 2021)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Peningkatan IPG Provinsi Lampung diikuti juga dengan peningkatan IPG Kabupaten/Kota, tercatat pada tahun 2021 dari 15 Kabupaten/kota terdapat 6 Kabupaten/Kota yang nilai IPG nya berada diatas Provinsi yaitu ; Kota Metro, Bandar Lampung, Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, dan Pringsewu. Sedangkan Kabupaten dengan tingkat IPG terendah adalah Kabupaten Mesuji sebesar 84,37.

Tabel II - 27 Persentase IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021

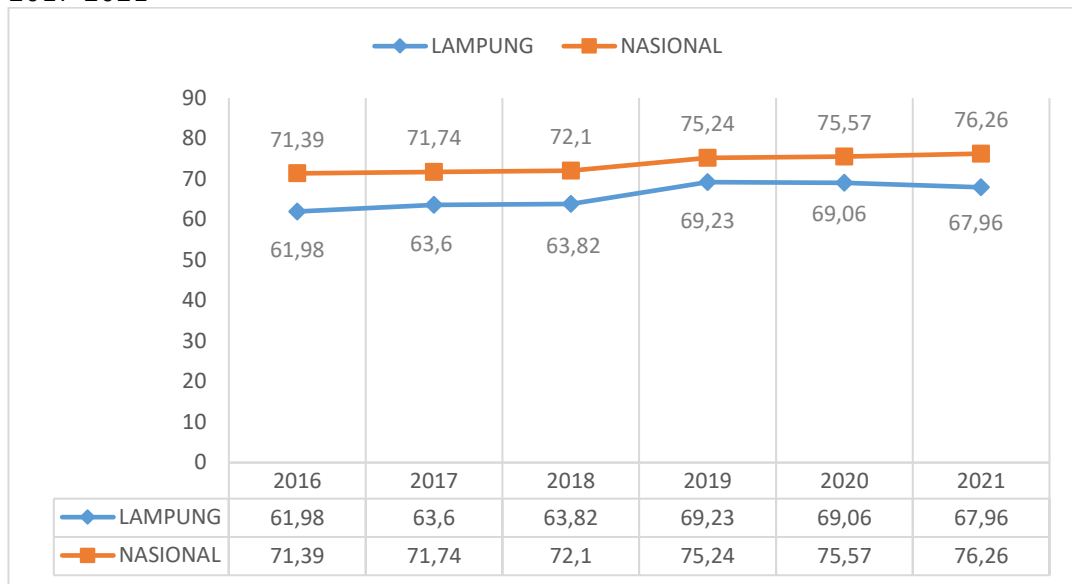
Kabupaten/Kota	Tahun					
	2015	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung Barat	91,65	92,47	92,74	92,55	92.95	93.00
Tanggamus	89,79	90,71	91,14	90,88	91.13	90.98
Lampung Selatan	88,89	89,52	89,87	89,54	89.6	89.61
Lampung Timur	87,51	87,85	88,67	88,78	88.83	88.78
Lampung Tengah	89,08	89,23	89,57	89,88	89.87	89.94
Lampung Utara	87,85	88,69	89,34	89,48	89.46	89.58
Way Kanan	87,54	87,85	88,25	88,22	88.19	88.32
Tulang Bawang	88,08	88,51	88,69	89,17	89.31	89.56
Pesawaran	86,13	87,25	87,57	87,30	87.2	87.22
Pringsewu	92,37	92,26	92,59	92,37	92.33	92.29
Mesuji	84,38	83,82	84,49	84,22	84.17	84.37
Tulang Bawang Barat	87,93	88,08	88,53	88,45	88.56	88.96
Pesisir Barat	92,07	92,84	93,40	93,22	93.21	93.51
Kota Bandar Lampung	93,69	93,53	93,55	93,96	93.86	93.93
Kota Metro	94,64	94,97	94,98	95,02	95.55	95.89
LAMPUNG	89,89	90,49	90,57	90,39	90.33	90.37

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.9. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. IDG Provinsi Lampung tahun 2021 adalah 67,96, berada di bawah rata-rata IDG Nasional sebesar 76,26. *Trend* IDG Provinsi Lampung tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik II - 14 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Dilingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kabupaten dengan IDG tertinggi adalah Kota Metro sebesar 76,98 diikuti oleh Kabupaten Pesawaran sebesar 72,21 dan Kota Bandar Lampung sebesar 71,88. Sedangkan IDG terendah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 51,25.

Tabel II - 28 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung Barat	60,47	63,84	68,21	68,24	69,14
Tanggamus	69,77	69,90	56,97	56,80	56,39
Lampung Selatan	57,66	58,14	59,40	59,59	59,27
Lampung Timur	60,01	60,73	63,42	63,13	63,14
Lampung Tengah	55,75	53,52	62,22	61,96	61,01
Lampung Utara	60,90	61,41	64,87	65,21	64,94
Way Kanan	68,46	65,30	61,46	60,72	61,82
Tulang Bawang	62,78	62,52	65,94	64,10	64,76
Pesawaran	70,51	67,03	72,59	72,21	73,70
Pringsewu	62,95	63,81	67,05	67,32	65,86
Mesuji	61,40	61,71	69,27	68,89	68,45
Tulang Bawang Barat	62,74	59,74	51,46	51,25	52,10

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Pesisir Barat	64,34	63,90	56,21	56.02	54.93
Kota Bandar Lampung	62,11	62,39	71,54	71.88	71.69
Kota Metro	78,92	78,75	77,02	76.98	74.23
LAMPUNG	63,60	63,82	69,23	69.06	67,96

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.10. Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja, Penduduk Yang Berkerja dan Pengangguran

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami trend yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Lampung. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 6,48 juta orang, naik sebanyak 81,6 ribu orang dibanding Agustus 2020 dan naik sebanyak 41,1 ribu orang jika dibanding Februari 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 69,35 persen (4,49 juta orang), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri atas 4,28 juta orang penduduk yang bekerja dan 210,6 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2020 yaitu kondisi dimana sudah terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia, terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 5,3 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 4,2 ribu orang dan pengangguran meningkat sebanyak 1,1 ribu orang. Sementara itu apabila dibandingkan kondisi Februari 2021 jumlah angkatan kerja berkurang sebanyak 124,7 ribu orang. Penduduk bekerja turun sebanyak 125,4 ribu orang dan pengangguran naik sebanyak 0,7 ribu orang. Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang serupa. TPAK pada Agustus 2021 sebesar 69,35 persen, yaitu turun sebesar 0,8 persen poin dibanding Agustus 2020 dan turun 2,38 persen poin dibanding Februari 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya

persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tabel II - 29 Kondisi Makro Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2015-2021

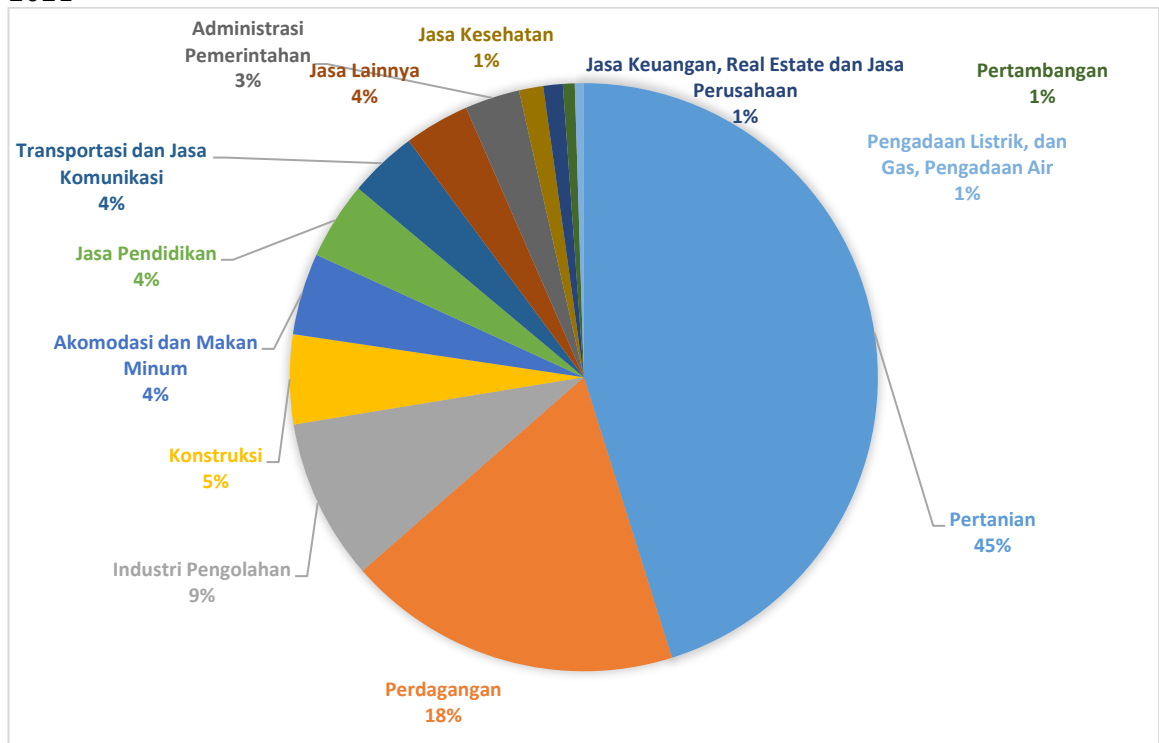
STATUS KETENAGAKERJAAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penganggur	196,9	190,3	176,3	171,7	171,5	209,6	210,6
Bukan angkatan Kerja	2.009,90	1.799,50	1.931,20	1.842,60	1.900,70	1.909,9	1.986,2
Persentase angkatan kerja yang bekerja	94,86	95,38	95,67	95,94	95,56	95,33	95,31
TPAK	65,59	69,61	67,83	69,67	69,09	70,16	69,35

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Distribusi Tenaga Kerja

Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan kontribusi terhadap PDRB pada Tahun 2021 sebesar 28,39%, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 19,67% dan sektor perdagangan berkontribusi sebesar 11,70%. Untuk itu, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung juga didominasi oleh ketiga sektor tersebut yakni, serapan tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 43,59%, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 19,36%. Adapun sektor industri pengolahan menyerap 9,29% dari total penduduk bekerja.

Grafik II - 15 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Kerja, Februari 2021



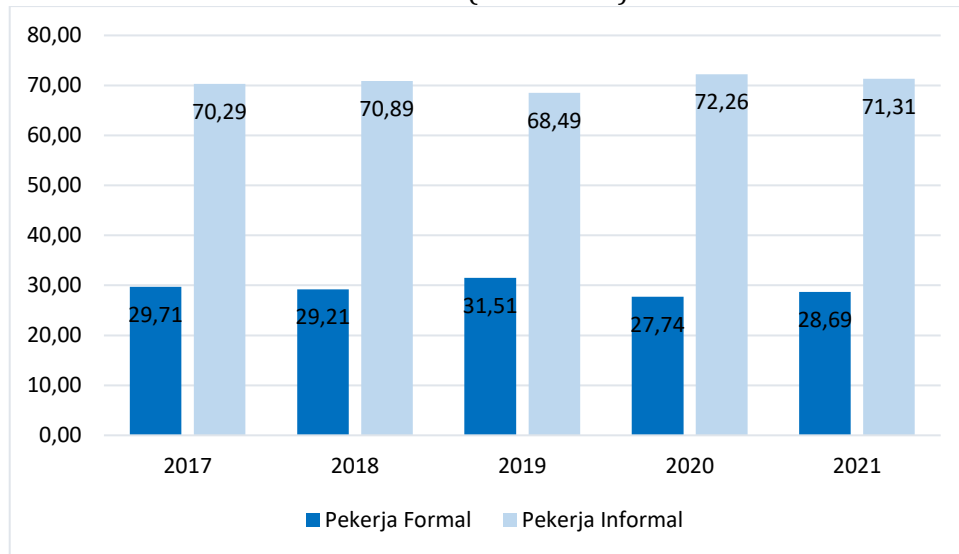
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Distribusi tenaga kerja dapat juga dilihat dari status pekerjaan. Terdapat 7 status pekerjaan yaitu (1) berusaha sendiri, (2) berusaha dibantu buruh tidak tetap, (3) berusaha dibantu buruh tetap, (4) buruh/karyawan, (5) pekerja bebas di pertanian, (6) pekerja bebas di nonpertanian dan (7) pekerja keluarga/tidak dibayar. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama diatas, kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan termasuk Kategori pekerja formal dan sisanya termasuk dalam kategori pekerja informal.

Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2021, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak

3,06 juta orang (71,31%), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 1,23 juta orang (28,69%). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2021 turun sebesar 0,95 persen jika dibandingkan Agustus 2020, tetapi apabila dibandingkan Februari 2021 pekerja informal turun sebesar 0,65 persen.

Grafik II - 16 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal- Informal (2017-2021)



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada periode 2016-2019, TPT di Provinsi Lampung selalu menurun dari 4,62 persen menjadi 4,03 persen di Tahun 2019. Namun sejak Pandemi Covid 19 di Tahun 2020, TPT Provinsi Lampung meningkat menjadi 4,67 dan terus meningkat menjadi 4,69 di Tahun 2021. Namun bila dibandingkan secara nasional, selama periode 2016-2021, TPT Provinsi Lampung selalu berada di bawah TPT Nasional (6,49) pada Tahun 2021.

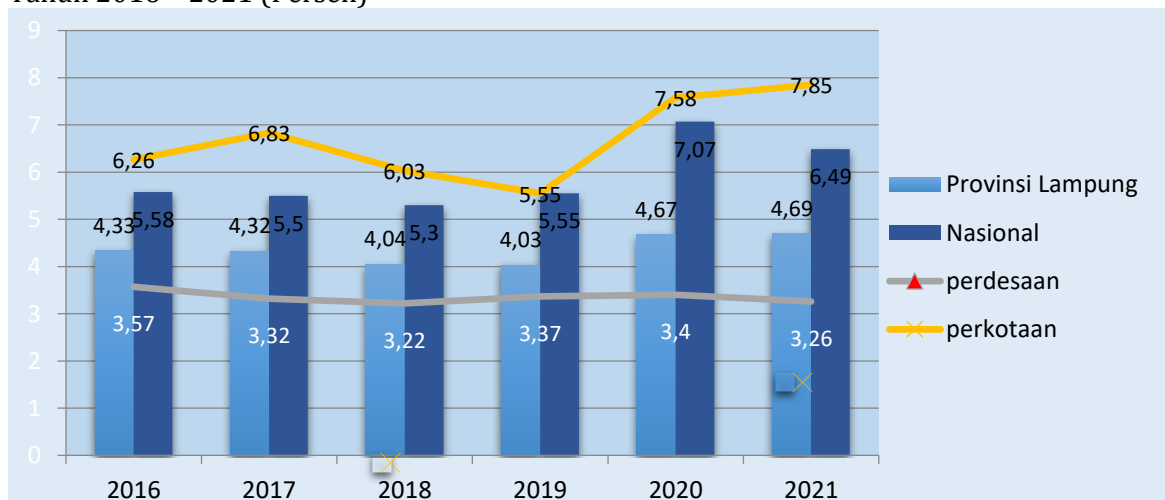
Tabel II - 30 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung (%)	4,62	4,33	4,06	4,03	4,67	4,69
Indonesia (%)	5,61	5,5	5,34	5,28	7,07	6,49

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Pada Agustus 2021, TPT perkotaan sebesar 7,85 persen lebih tinggi lebih dari dua kali TPT di daerah pedesaan (3,26 persen). Dibandingkan Agustus 2020, TPT perkotaan naik sebesar 0,27 persen sedangkan TPT pedesaan turun sebesar 0,14 persen. Jika dibandingkan Februari 2021, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,2 persen poin sedangkan TPT pedesaan naik sebesar 0,29 persen poin. Hal ini disebabkan menurunnya aktivitas industry dan perdagangan akibat pandemic Covid 19 serta masih cukup tingginya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di pedesaan.

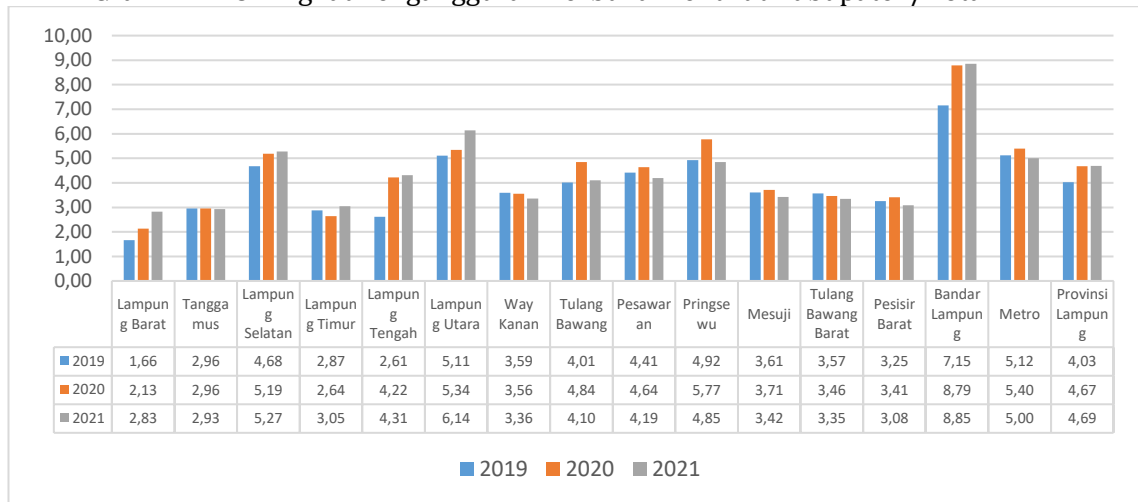
Grafik II - 17 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2021 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Di tingkat kabupaten/kota TPT tertinggi berada di Kota Bandar Lampung yang mencapai 8,85 persen diikuti Lampung Utara (6,14), Lampung Selatan (5,27%) dan Kota Metro yang mencapai 5,00 persen. Wilayah lain yang berada pada rata-rata Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pringsewu, Pesawaran dan Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Sedangkan Lampung Barat berada di posisi terendah untuk kategori TPT dengan angka 2,83 persen.

Grafik II - 18 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.11. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap Pendapatan didapat dari PAD dibagi jumlah pendapatan. Rasio Target PAD terhadap target APBD dari tahun 2015 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi, diawali 47,40% di tahun 2015 dan sebesar 43,62% di tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada Tabel II-31.

Tabel II - 31 Rasio PAD terhadap APBD Provinsi Lampung Tahun 2015-2021

Thn	Target APBD (Rp.)	Target PAD (Rp.)	Rasio Target PAD thd Target APBD %	Realisasi APBD (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Rasio Realisasi PAD thd Realisasi APBD %
2015	4,987,226,142,596	2,363,789,222,943	47.40	4,789,035,573,578	2,247,288,679,813	46.93
2016	5,825,907,142,160	2,739,699,673,189	47.03	5,585,023,474,025	2,365,097,213,971	42.35
2017	7,725,116,345,282	3,080,908,289,668	39.88	6,822,818,640,215	2,759,859,176,654	40.45
2018	7,935,916,843,959	3,565,784,165,917	44.93	7,137,049,975,851	2,902,313,507,327	40.67
2019	7,371,432,528,025	2,987,249,600,061	40.52	7,277,774,464,693	3,029,324,859,696	41.62
2020	7.354.235.707.663	2.949.184.797.051	40,10	7.381.124.107.714	2.863.527.923.556	38,80
2021	7,538,150,772,809	3,336,257,494,574	44.26	7,484,454,616,938	3,264,656,067,658	43.62

Sumber: Bapenda/BPKAD, 2021

2.1.2.12. Opini BPK

Pemerintah Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2016-2021 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pemberian penilaian Opini WTP

diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dalam perbaikan dan peningkatan terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Capaian SAKIP Provinsi Lampung pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun 2015, yaitu dari predikat **CC** tahun 2015 menjadi predikat **B** pada tahun 2016. Untuk tahun selanjutnya Provinsi Lampung terus mendapatkan Predikat B. Pada Tahun 2021, predikat B didapatkan dengan Nilai 66,04.

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari Nilai 21,37 (D) pada tahun 2015 menjadi 56,13 (CC) pada tahun 2016. Sedangkan untuk hasil penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2017 dan 2018 sebesar 57,63 (C) dan 58,49 (CC) dan sejak Tahun 2019-2021, Nilai RB Provinsi Lampung meningkat menjadi CC senilai 58,38 pada Tahun 2021.

2.1.2.13. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator kualitas konsumsi pangan dijabarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang sangat tergantung oleh keberagaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Skor PPH ini digunakan sebagai perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Pemanfaatan data konsumsi pangan dalam perencanaan pangan menjadi sangat penting, mengingat data tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi permintaan pangan sebagai cerminan preferensi, ketersediaan dan daya beli aktualnya. Disamping itu, data konsumsi pangan dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi pencapaian ketahanan pangan dari sisi konsumsi (tingkat konsumsi, dan skor PPH), serta evaluasi kemampuan produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat.

Tabel II - 32 Skor PPH Provinsi Lampung Tahun 2014-2021

Keterangan	2014	2015*	2016*	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kecukupan Energi (Kkal/kap/hr)	2062,4	1841,5	1856,5	1963,9	2091,5	2037,5	2.068	
Persen AKE	103,1	92,1	92,8	97,1	104,3	112,29	98,5	
Angka Kecukupan Protein (Gram/kap/hr)	54,6	49,6	50,3	54,46	63,3	58	58,1	
Persen AKP	105	95,4	96,7	104,7	104,6	101,9	102	
Skor PPH	83,4	79,3	78	90,6	90,4	91,1	88,3	85,3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Pertanian dan Hortikultura Provinsi Lampung 2022

Data menunjukkan, skor PPH Lampung tahun 2014 mendapatkan nilai yang baik sebesar 83,4, namun terus menurun hingga menjadi 78 di tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2017 meningkat sehingga mencapai 90,6 dan tahun 2018 mengalami penurunan mencapai 90,4, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 91,1 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 85,3. Skor PPH ini menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan di Lampung.

2.1.2.14. Penguatan Cadangan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap orang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya ditulis UU 18/2012) mengamanatkan agar ketahanan pangan nasional dibangun berdasarkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Indonesia sebagai negara agraris yang juga merupakan negara maritim, mempunyai potensi sumber pangan yang relatif berlimpah. Oleh karena itu, sumberdaya alam yang tersedia perlu dikelola secara optimal untuk kemaslahatan seluruh rakyatnya. Dalam konteks kemandirian pangan, Pemerintah melaksanakan program swasembada untuk lima bahan pangan pokok, yaitu untuk beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Mengingat

bahwa produksi beberapa komoditas pangan, seperti beras, jagung dan kedelai bersifat musiman, maka untuk menjamin ketersediaan pangan menurut waktu dan tempat, diperlukan pengelolaan cadangan pangan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pangan diluar musim panen, dan atau sumber pangan bagi daerah-daerah yang bukan merupakan sentra produksi pangan.

Pada Tahun 2020 produksi padi Lampung secara Nasional berada pada urutan ke 6 dengan capaian produksi sebesar 2,595 Juta Ton. Produksi Jagung sebesar 2,57 Juta Ton atau peringkat 3 Nasional, Singkong 5,07 Juta Ton atau peringkat 1 Nasional, produksi Nanas 699,24 Ribu Ton dan Pisang 1,21 Juta Ton yang merupakan terbesar Nasional, produksi kopi 118,14 Ribu Ton atau peringkat 2 Nasional, produksi Lada sebesar 15, 23 Ribu Ton terbesar ke 2 Nasional, Kakao 59,06 Ribu Ton terbesar ke 6 Nasional, Tebu terbesar ke 2 Nasional dengan produksi 771,289 Ribu Ton. Begitu pula komoditas peternakan, produksi daging sapi Lampung memiliki kontribusi sebesar 2,67 % terhadap produksi daging sapi nasional, produksi udang Lampung berada pada urutan ke-5 Nasional dengan capaian produksi tahun 2019 sebesar 65.955,58 Ton, dan capaian produksi pada tahun 2020 sebesar 127.258 ton.

Tabel II - 33 Ketersediaan Bahan Pangan Provinsi Lampung berdasarkan Atap Tahun 2016-2021

No.	Komoditas	2016		2017		2018		2019		2020	
		produksi	surplus/ minus	Produksi	produksi	produksi	surplus/ minus	produksi	surplus/ minus	produksi	surplus/ minus
1	Beras	2,355,419.00	1,467,655	2,489,323	1,226,022	1,226,022	1,666,860	1,226,022	1,896,705	1.497.058	772.026,80
2	Jagung	1,720,196.00	1,525,040	2,518,895	2,113,202	2,113,202	2,176,657	2,113,202	2,321,178	1.044.963	1.036.125,43
3	Kedelai	9,960.00	-92.41	8,027	12,318	12,318	(37,339)	12,318	(4,294)	1.994	-92846
4	Kc. Tanah	4,842.00	1,633	4,401	4,043	4,043	1,634	4,043	2,263	3.989	2364
5	Kc. Hijau	1,347.00	264	1,265	1,096	1,096	227	1,096	106	1.521	618
6	Ubi Kayu	6,481,382.00	5,457,744	5,451,312	4,929,044	4,929,044	4,245,841	4,929,044	5,735,377	4.843.283	4.796.314
7	Ubi Jalar	23,603.00	3,957	22,78	17,545	17,545	(2,655)	17,545	(6,193)	22.755	1.077
8	Daging Sapi	12,609.00	6,177	12,991	13,475	13,475	11,794	13,475	11,794	21.213	19.677,28
9	Daging Ayam ras/buras	47,303.00	6,656	50,045	42,487	42,487	24,436	42,487	24,436	39.089,04	12.262,83

10	Telur (ayam, itik)	51,893.00	59,937	79,783	80,116	80,116	991	80,116	991	93,040,08	20,487,18
11	Gula Pasir	788,783.00	35,915	788,783	630,440	630,440	547,359	630,440	547,359	631,152,00	555,280,54
12	Bawang Merah	2,567.00	-314.6	2,821	36,282	36,282	(27,152)	36,282	(27,939)	3,263,00	-21498
13	Minyak Goreng	130187	1412	129,167	542,902	542,902	421,248	542,902	421,248	542,901,60	431,803,14
14	Cabe Merah	47,883.00	20,732	50,203	401,010	401,010	25,631	401,010	32,796	99,920,07	79,242,49

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Pertanian dan Hortikultura Provinsi Lampung 2021

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Pendidikan

2.1.3.1.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah dengan melihat proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis serta terbuka terhadap pengetahuan. Melihat pencapaiannya AMH Provinsi Lampung tahun 2017-2021 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 berada pada angka 96,89 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 menjadi 97,28 sejalan dengan kenaikan Angka Melek Huruf Nasional yang pada tahun 2021 sebesar 96,04. Kenaikan Angka Melek Huruf ini dikarenakan semakin tingginya minat penduduk di Provinsi Lampung untuk memiliki kemampuan membaca dan menulis serta terbuka terhadap pengetahuan. Hal ini terlihat dari meningkatnya minat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis untuk ikut serta dalam program kejar paket A. Grafik Trend Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II - 19 Trend Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Walaupun Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dan telah berada di atas angka nasional, akan tetapi Provinsi Lampung masih menempati peringkat terakhir se-Sumatera. Keadaan ini sangat memperhatikan, sedangkan Pemerintah Provinsi Lampung sudah menerapkan program wajib belajar 9 tahun yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945 pada pasal 31. Sedangkan Provinsi dengan angka melek huruf tertinggi di Sumatera adalah Sumatera Barat dengan nilai 99,26%.

Tabel II - 34 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2017-2021

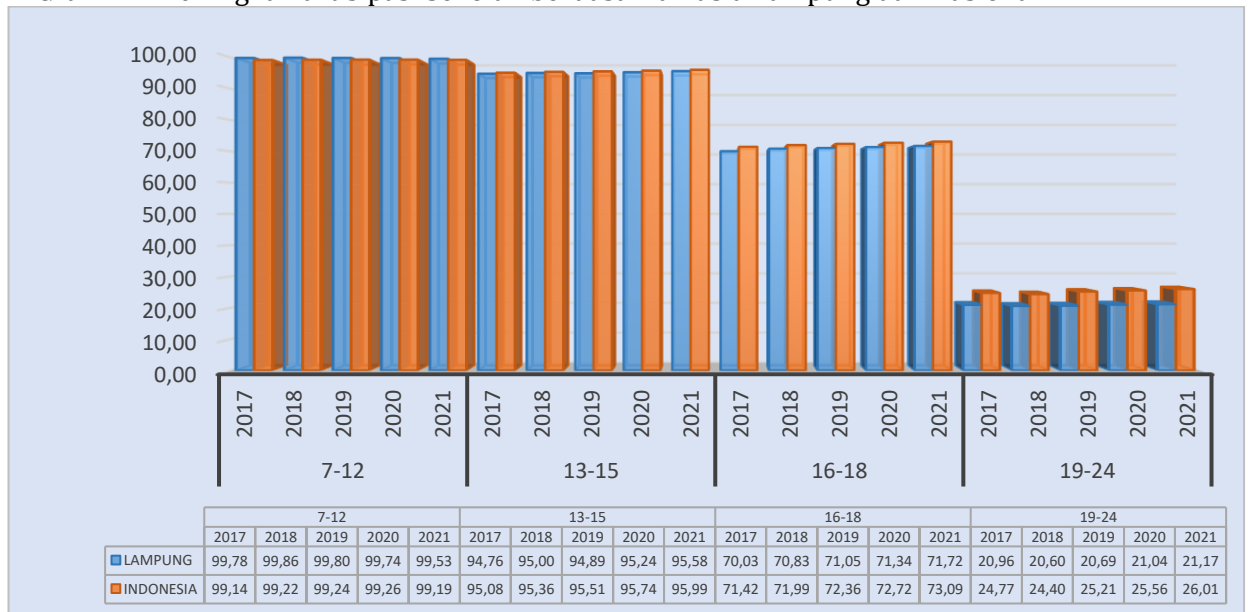
Provinsi	Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
INDONESIA	95.5	95.66	95.9	96	96.04
LAMPUNG	96.89	96.93	97.11	97.24	97.28
BENGKULU	97.9	97.91	98.01	98.01	97.88
JAMBI	98.09	98.15	98.2	98.19	98.08
KEP. BANGKA BELITUNG	97.79	97.76	98.09	98.08	98.1
ACEH	97.94	98.03	98.21	98.25	98.24
SUMATERA SELATAN	98.54	98.66	98.76	98.75	98.78
KEP. RIAU	98.83	98.87	99	99	99.09
SUMATERA UTARA	98.89	99.07	99.15	99.16	99.19
RIAU	99.17	99.2	99.21	99.23	99.2
SUMATERA BARAT	98.85	99.07	99.17	99.17	99.26

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Angka Partisipasi Sekolah

Ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun hal tersebut tidak berarti meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Adapun APS penduduk Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II - 20 Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan usia Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Berdasarkan pengamatan pada grafik di atas, secara keseluruhan APS Provinsi Lampung terus meningkat pada setiap tahunnya hingga tahun 2020 terkecuali APS kelompok umur 07-12 yang selama 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 99,86 hingga tahun 2021 menjadi 99,53, hal tersebut juga sejalan dengan penurunan APS pada kelompok usia 07-12 periode 2021 ditingkat rata-rata Nasional, yaitu pada tahun 2020 sebesar 99,26 persen menurun menjadi 99,19 persen ditahun

2021. Salah satu penyebab penurunan Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2021 pada kelompok umur 7-12 tahun karena pandemi Covid-19.

Walaupun APS tingkat 16-18 tahun mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi besarnya tetap rendah, yaitu hanya mencapai 71,72 persen dan berada di bawah angka Nasional (73,09 persen). Jika diteliti lebih lanjut, rendahnya APS Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan menengah atas lebih disebabkan pada faktor motivasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Jarak sekolah dan biaya pendukung pendidikan merupakan dua faktor utama yang diduga menjadi penyebab rendahnya minat penduduk.

Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera menempati urutan ke 3 terbawah pada hampir setiap tingkatan umur. Hal ini terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II - 35 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Tingkatan Umur se-Sumatera Tahun 2021

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (A P S) Tahun 2021			
	19-24	16-18	13-15	7-12
INDONESIA	26.01	73.09	95.99	99.19
SUMATERA UTARA	27.05	78.66	96.99	99.32
KEP. BANGKA BELITUNG	18.02	68.15	93.17	99.47
LAMPUNG	21.17	71.72	95.58	99.53
SUMATERA BARAT	36.41	84.07	96.63	99.61
KEP. RIAU	19.83	84.4	98.85	99.62
SUMATERA SELATAN	18.81	71.53	94.85	99.65
RIAU	28.79	77.81	95.66	99.65
JAMBI	24.14	72.5	96.39	99.66
ACEH	32.61	83.28	98.42	99.67
BENGKULU	30.46	79.75	97.49	99.76

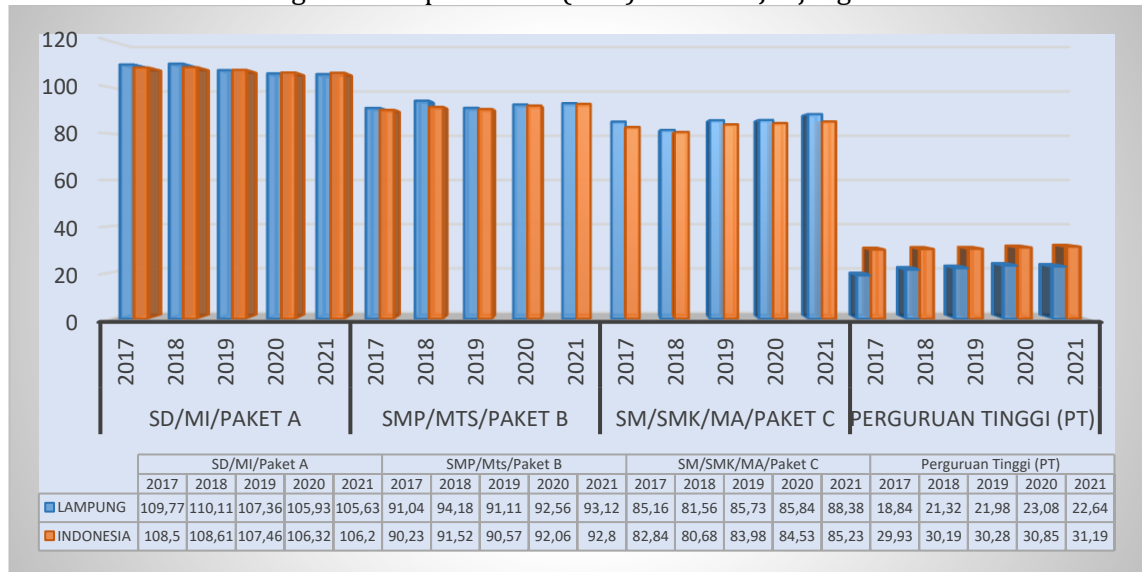
Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

2.1.3.1.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang

Pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Grafik II - 21 Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan



Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 APK jenjang SD dan Perguruan Tinggi mengalami penurunan dari tahun 2020, sedangkan APK SMP dan SMA mengalami peningkatan dari tahun 2020. Penurunan APK SD dan PT tersebut di pengaruhi oleh faktor Covid-19 baik dari sektor kesehatan maupun sektor ekonomi yang mempengaruhi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SD maupun Perguruan Tinggi. Besaran APK SD maupun APK Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung juga berada di bawah angka Nasional, sedangkan APK SMP dan SMA Provinsi Lampung berada di atas angka Nasional.

Sejalan dengan rendahnya Angka Partisipasi Kasar Provinsi Lampung di jenjang SD dan Perguruan Tinggi, maka APK pada jenjang ini juga rendah bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, yaitu menempati urutan ke 2 terbawah, setelah Provinsi Riau pada jenjang SD dan setelah Kepulauan

Bangka Belitung pada jenjang Perguruan Tinggi, yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II - 36 Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SMA dan PT se-Sumatera Tahun 2021

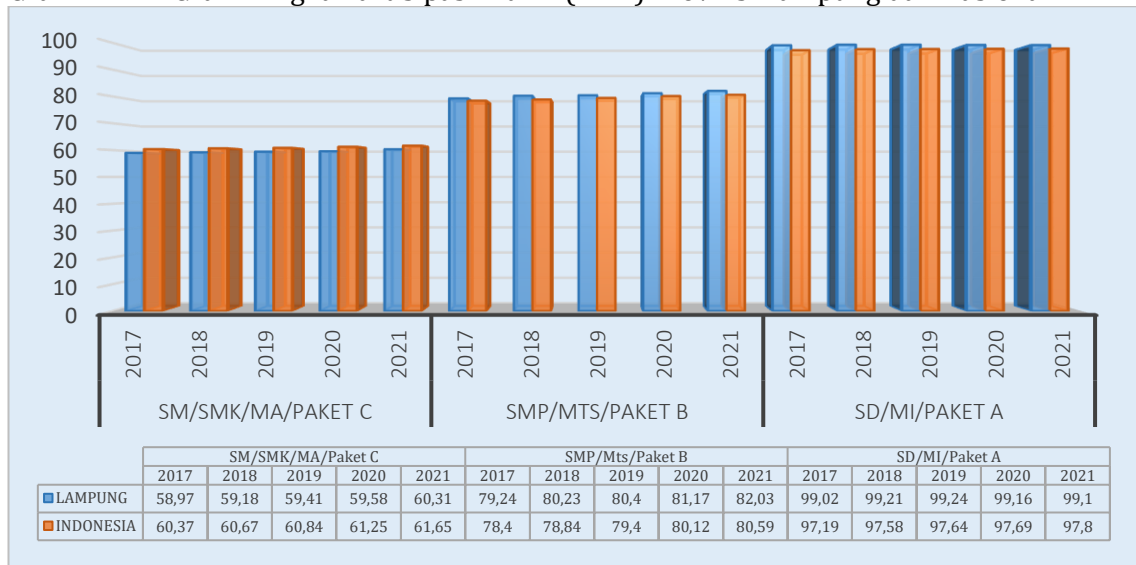
Provinsi	SD/ MI / Paket A	SMP / Mts / Paket B	SM/SMK/MA /Paket C	Perguruan Tinggi (PT)
RIAU	105.52	95.25	84.11	35.97
LAMPUNG	105.63	93.12	88.38	22.64
INDONESIA	106.2	92.8	85.23	31.19
KEP. RIAU	106.6	94.12	86.31	27.59
KEP. BANGKA BELITUNG	107.16	88.44	86.49	15.23
SUMATERA UTARA	107.85	91.87	96.75	31.1
ACEH	108.1	97.74	92.63	44.65
SUMATERA BARAT	108.66	93.24	90.38	44.25
BENGKULU	109.31	92.11	93.79	38.66
JAMBI	109.48	88.96	84.47	30.74
SUMATERA SELATAN	111.39	89.44	82.3	26.32

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

2.1.3.1.4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Grafik II - 22 Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Dari grafik di atas, terlihat bahwa proporsi anak usia sekolah di Provinsi Lampung yang bersekolah tepat waktu pada setiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin tinggi serta fasilitas pendidikan di Provinsi Lampung semakin memadai dan semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Pada tahun 2021, APM Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SD dan SMP berada di atas rata-rata Nasional, sedangkan APM Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SMA masih berada di bawah rata-rata Nasional. APM Provinsi Lampung Tahun 2021 pada jenjang SD mengalami penurunan sebesar 0,06 persen bila dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini kemungkinan juga disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan orangtua menunda untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar.

Sejalan dengan rendahnya Angka Partisipasi Murni Provinsi Lampung di jenjang SMA, maka APK pada jenjang ini juga rendah bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, yaitu menempati urutan ke 2 terbawah, setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II - 37 Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA dan PT se-Sumatera

Provinsi	SM/SMK/MA/Paket C	SMP/Mts/Paket B	SD/MI/Paket A
KEP. BANGKA BELITUNG	58.79	74.6	97.89

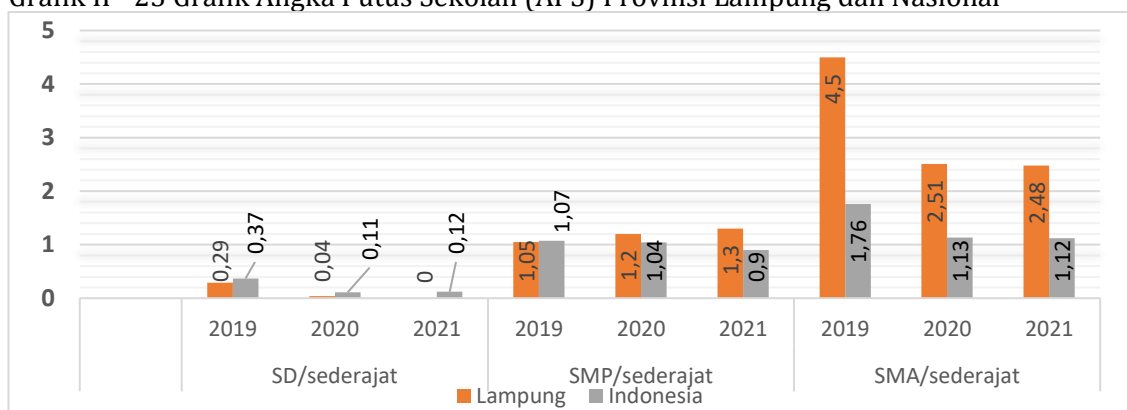
LAMPUNG	60.31	82.03	99.1
SUMATERA SELATAN	60.53	78.31	98
JAMBI	61.56	79.88	99.41
INDONESIA	61.65	80.59	97.8
RIAU	64	80.52	97.85
BENKULU	66.08	80.25	98.61
SUMATERA UTARA	67.99	81.13	97.69
SUMATERA BARAT	68.99	78.75	98.82
ACEH	70.8	86.95	98.95
KEP. RIAU	73.36	86.6	99.26

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

2.1.3.1.5. Angka Putus Sekolah

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) adalah persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama. APS digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan, serta keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Penilaian berdasarkan proporsi anak kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan sekolah.

Grafik II - 23 Grafik Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2020-2022, diolah

Berdasarkan grafik di atas, Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung pada jenjang SD berada di bawah angka Nasional, akan tetapi pada jenjang SMP dan SMA secara umum berada di atas angka Nasional. Angka Putus Sekolah jenjang SMP mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 mencapai 1,3 persen. Sedangkan Angka Putus Sekolah jenjang SMA mengalami penurunan

hingga mencapai 2,48 persen. Angka ini masih terbilang tinggi karena target capai Kementerian Pendidikan tidak boleh lebih dari 1 persen. Tingginya Angka Putus Sekolah di jenjang SMP dan SMA sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi, selain karena tidak ada biaya untuk bersekolah, anak-anak ini juga dituntut untuk mencari nafkah bagi keluarga.

Sejalan dengan tingginya Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung di jenjang SMP dan SMA, maka Angka Putus Sekolah pada jenjang SMA juga tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, yaitu menempati urutan ke 2 tertinggi, setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan pada jenjang SMP menjadi Provinsi yang Angka Putus Sekolahnya tertinggi di Sumatera seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II - 38 Tabel Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan se-Sumatera Tahun 2021

PROVINSI	SD/SEDERAJAT	SMP/SEDERAJAT	SMA/SEDERAJAT
Aceh	0,04	n/a	0,58
Sumatera Barat	0,11	0,60	0,76
Riau	0,11	1,16	0,98
Indonesia	0,12	0,9	1,12
Sumatera Selatan	0,11	0,82	1,14
Sumatera Utara	0,08	0,74	1,19
Jambi	n/a	0,75	1,35
Bengkulu	n/a	0,65	1,76
Lampung	n/a	1,30	2,48
Kep. Bangka Belitung	n/a	1,28	3,45
Kep. Riau	n/a	n/a	n/a

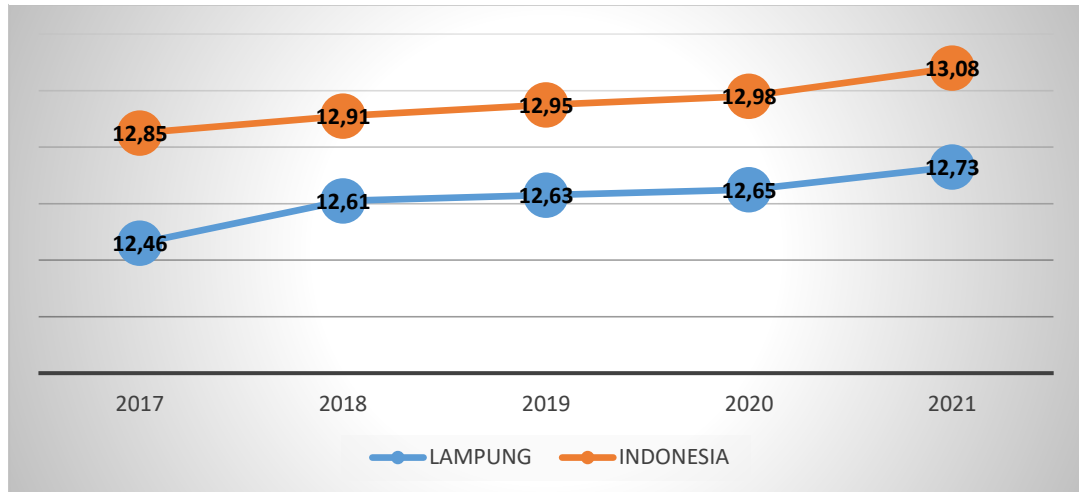
Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2022, diolah

2.1.3.1.6. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat

digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik II - 24 Trend Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021



Angka Harapan Lama Sekolah di Lampung sejak tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Lampung yang lebih baik. Pada tahun 2021, HLS Provinsi Lampung telah mencapai 12,73, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,73 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini masih berada dibawah angka Nasional yaitu 13,08.

Sejalan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung yang masih berada di bawah angka Nasional, di Sumatera pun HLS Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-3 terbawah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Untuk itu diperlukan kerja keras lagi di dunia pendidikan di Provinsi Lampung agar dapat mengejar ketertinggalan.

Tabel II - 39 Tabel Angka Harapan Lama Sekolah se-Sumatera Tahun 2017-2021

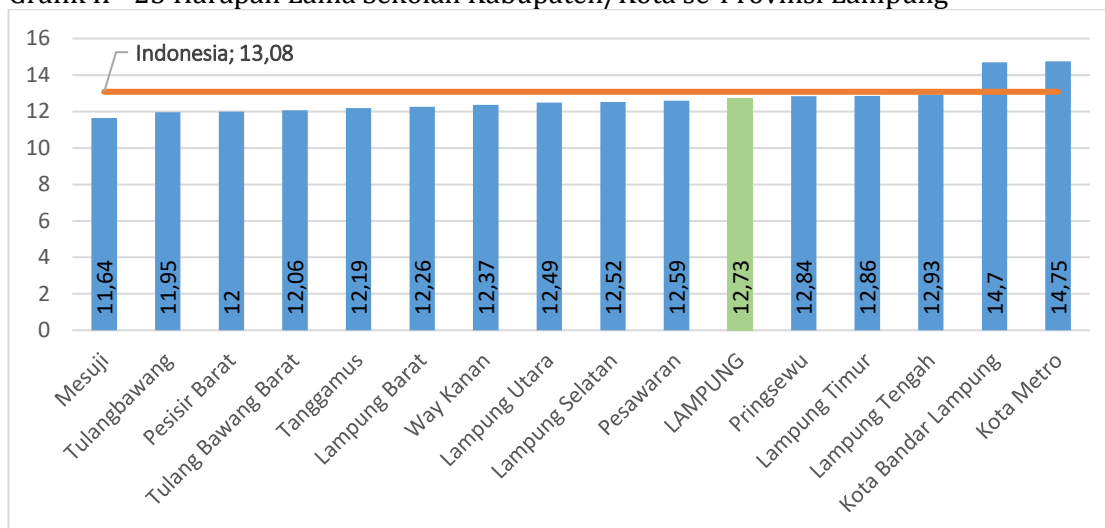
Provinsi/Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
KEP. BANGKA BELITUNG	11.83	11.87	11.94	12.05	12.17
SUMATERA SELATAN	12.35	12.36	12.39	12.45	12.54
LAMPUNG	12.46	12.61	12.63	12.65	12.73

Provinsi/Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
KEPULAUAN RIAU	12.81	12.82	12.83	12.87	12.98
JAMBI	12.87	12.9	12.93	12.98	13.04
INDONESIA	12.85	12.91	12.95	12.98	13.08
RIAU	13.03	13.11	13.14	13.2	13.28
BENGGULU	13.57	13.58	13.59	13.61	13.67
SUMATERA BARAT	13.94	13.95	14.01	14.02	14.09
ACEH	14.13	14.27	14.3	14.31	14.36

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2021, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional. Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang HLS nya tinggi dan melampaui capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 14,75 dan Kota Bandar Lampung 14,0 tahun. Kabupaten dengan HLS terendah adalah Kabupaten Mesuji. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji lebih memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja membantu orangtua pada sektor pertanian.

Grafik II - 25 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

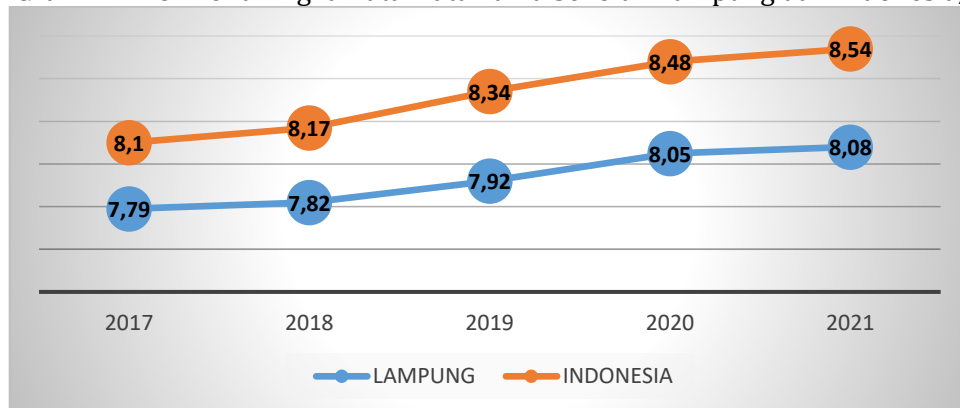


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022, diolah

2.1.3.1.7. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah.

Grafik II - 26 Trend Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Indonesia,



Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Berdasarkan pengamatan grafik di atas, RLS Provinsi Lampung terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, RLS Provinsi Lampung sebesar 8,08 artinya secara rata-rata penduduk Lampung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,08 tahun. Namun angka tersebut masih di bawah rata-rata Nasional yang sebesar 8,54.

Sejalan dengan angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung yang masih rendah, maka posisi Lampung pun masih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Sumatera. Pada tahun 2021, Provinsi Lampung menempati peringkat terbawah se Sumatera. Untuk mengatasi hal ini maka

perlu dilakukan akselerasi dalam meningkatkan RLS di Provinsi Lampung karena hal ini akan mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia yang dua kompositnya berada di bidang pendidikan, yaitu HLS dan RLS.

Tabel II - 40 Rata-Rata Lama Sekolah se-Sumatera dan Nasional Tahun 2017-2021

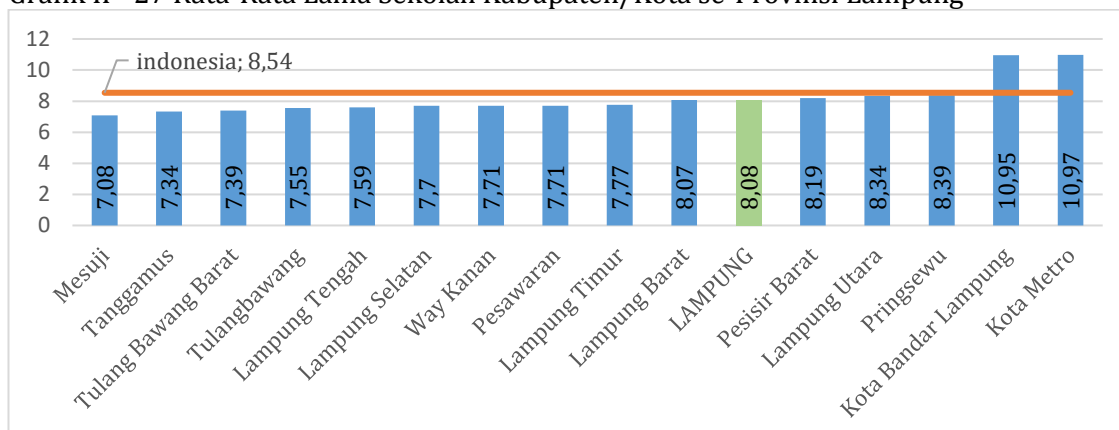
Provinsi/Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
LAMPUNG	7.79	7.82	7.92	8.05	8.08
SUMATERA SELATAN	7.99	8	8.18	8.24	8.3
INDONESIA	8.1	8.17	8.34	8.48	8.54
JAMBI	8.15	8.23	8.45	8.55	8.6
BENGKULU	8.47	8.61	8.73	8.84	8.87
SUMATERA BARAT	8.72	8.76	8.92	8.99	9.07
RIAU	8.76	8.92	9.03	9.14	9.19
ACEH	8.98	9.09	9.18	9.33	9.37
SUMATERA UTARA	9.25	9.34	9.45	9.54	9.58
KEPULAUAN RIAU	9.79	9.81	9.99	10.12	10.18

Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2021, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional. Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang RLS nya tinggi dan melampaui capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 10,97 dan Kota Bandar Lampung 10,95 tahun. Kabupaten dengan RLS terendah adalah Kabupaten Mesuji. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji lebih memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja membantu orangtua pada sektor pertanian.

Upaya peningkatan nilai rata-rata lama sekolah dan menghilangkan kesenjangan merupakan hal yang sulit dilakukan mengingat perbedaan orientasi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Namun demikian, sinergitas seluruh elemen dalam upaya peningkatan rata-rata lama sekolah dapat meningkatkan capaian yang lebih baik.

Grafik II - 27 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung



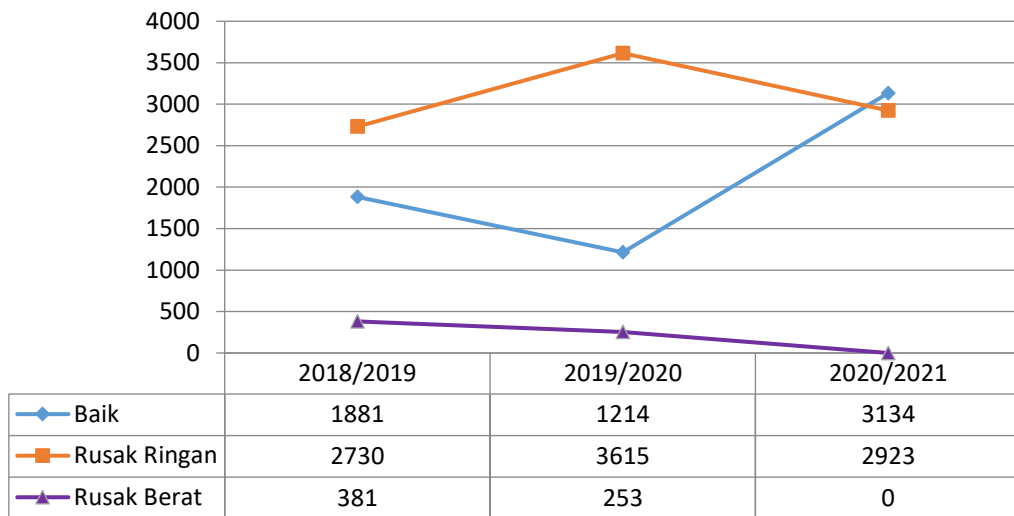
Sumber : BPS Indonesia, 2022, diolah

2.1.3.1.8. Sarana Dan Prasarana

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pada Tahun Ajaran 2019/2020, keadaan sarana dan prasarana di tingkat SMA menurun, akan tetapi pada Tahun Ajaran 2020/2021 keadaan menjadi lebih baik, terlihat dari jumlah sarana dan prasarana yang baik meningkat sedangkan sarana dan prasarana yang rusak ringan menurun dan yang rusak berat mencapai angka 0 (nol). dapat dikategorikan dalam kondisi baik, meskipun tingkat kerusakan ringan masih cukup tinggi yaitu dari 2.534 sekolah (Tahun 2015) meningkat menjadi 2.780 sekolah di Tahun 2017. Hal ini menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan tingkat SMA karena siswa SMA dapat menikmati sarana prasarana yang lebih baik. Walaupun terjadi penurunan jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan, namun jumlahnya masih banyak, yaitu 2923 unit. Untuk itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat.

Grafik II - 28 Rasio Sarana dan Prasarana SMA di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021

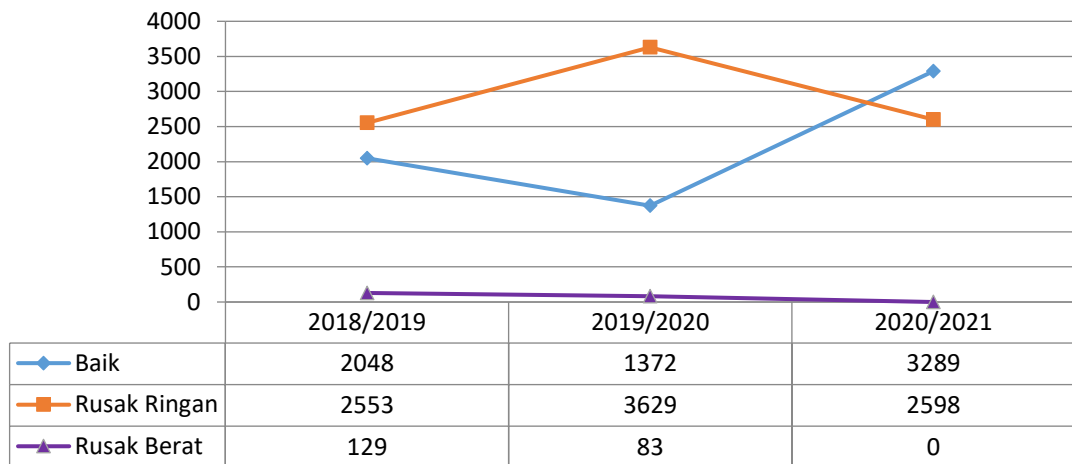


Sumber: Pusdatin Kemdikbud, 2022, diolah

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pola sarana dan prasarana sekolah SMK mirip dengan kondisi SMA, dimana pada Tahun Ajaran 2019/2020, keadaan sarana dan prasarana di tingkat SMK menurun, akan tetapi pada Tahun Ajaran 2020/2021 keadaan menjadi lebih baik, terlihat dari jumlah sarana dan prasarana yang baik meningkat sedangkan sarana dan prasarana yang rusak ringan menurun dan yang rusak berat mencapai angka 0 (nol). dapat dikategorikan dalam kondisi baik, meskipun tingkat kerusakan ringan masih cukup tinggi yaitu dari 2.534 sekolah (Tahun 2015) meningkat menjadi 2.780 sekolah di Tahun 2017. Hal ini menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan tingkat SMA karena siswa SMA dapat menikmati sarana prasarana yang lebih baik. Walaupun terjadi penurunan jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan, namun jumlahnya masih banyak, yaitu 2.598 unit. Untuk itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat.

Grafik II - 29 Rasio Sarana dan Prasarana SMK di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021

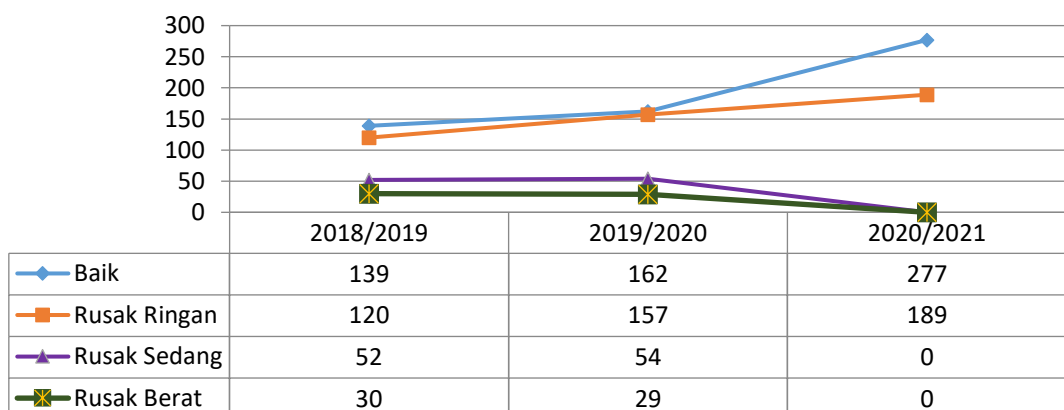


Sumber: Pusdatin Kemdikbud, 2022, diolah

Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sejak Tahun Ajaran 2019/2020 sampai dengan Tahun Ajaran 2020/2021, jumlah sarana dan prasarana SLB baik, selalu bertambah, akan tetapi jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan juga meningkat. Jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat. Akan tetapi jumlah sarana dan prasarana yang rusak sedang dan berat menurun bahkan mencapai angka 0 (nol).

Grafik II - 30 Rasio Sarana dan Prasarana SLB di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021

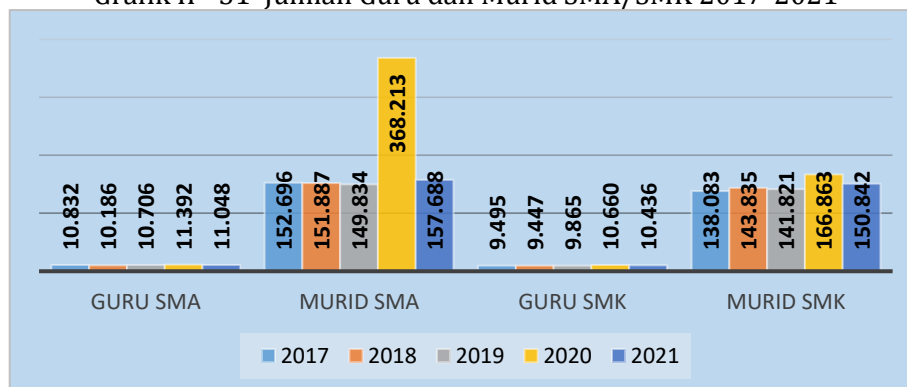


Sumber: Pusdatin Kemdikbud, 2022, diolah

Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK

Berdasarkan data murid baik SMA maupun SMK dari tahun 2017-2021 secara signifikan mengalami peningkatan pada tahun 2020, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021 walaupun tetap berada di atas besaran tahun 2019, yaitu 157.688 murid SMA dan 150.842 murid SMK. Jumlah guru SMA dan SMK juga mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan menurun kembali pada tahun 2021, yaitu menjadi 11.048 guru SMA dan 10.436 guru SMK. Walaupun terjadi peningkatan jumlah guru SMA dan SMK pada tahun 2020, tetapi tidak sebanding dengan penambahan jumlah siswa pada tahun 2020. Secara rinci jumlah guru dan murid dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II - 31 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK 2017-2021



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2020 dan Dapodik, Desember 2021

Rasio Guru Terhadap Siswa

Perbandingan jumlah guru per jumlah siswa untuk jenjang SMA selalu mengalami naik turun per tiap tahunnya, pada tahun 2017 rasio nya 1:14 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dan kembali naik pada tahun 2019, lalu turun kembali pada tahun 2020 dan naik kembali lagi pada tahun 2021 menjadi 1:14. Hal yang sama juga dialami pada rasio perbandingan guru dengan murid pada jenjang SMK, dimana pada tahun 2017 sebesar 1:14, dan terjadi perbaikan pada tahun 2019, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2020 tetapi besarnya kembali naik seperti tahun 2019, yaitu 1:14. Penurunan rasio guru dan murid pada tahun 2020 disebabkan karena terjadi

peningkatan jumlah siswa yang cukup signifikan, sedangkan penambahan guru pada tahun tersebut sangat kecil.

Walaupun data ini menunjukkan bahwa rasio antara guru dengan siswa sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan (rasio guru SMA dan murid 1:20 dan rasio guru SMK dengan murid 1:15) tetapi perlu diperhatikan bahwa jumlah guru yang dihitung seluruh guru baik PNS maupun non PNS. Sedangkan apabila dihitung berdasarkan guru yang PNS, maka rasio ini akan turun jauh, sehingga tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.

Tabel II - 41 Perbandingan Jumlah guru dan Siswa 2017 - 2021

Perbandingan	2017	2018	2019	2020	2021
Guru: Siswa SMA	1:14	1:15	1:14	1:32	1:14
Guru: Siswa SMK	1:15	1:15	1:14	1:16	1:14

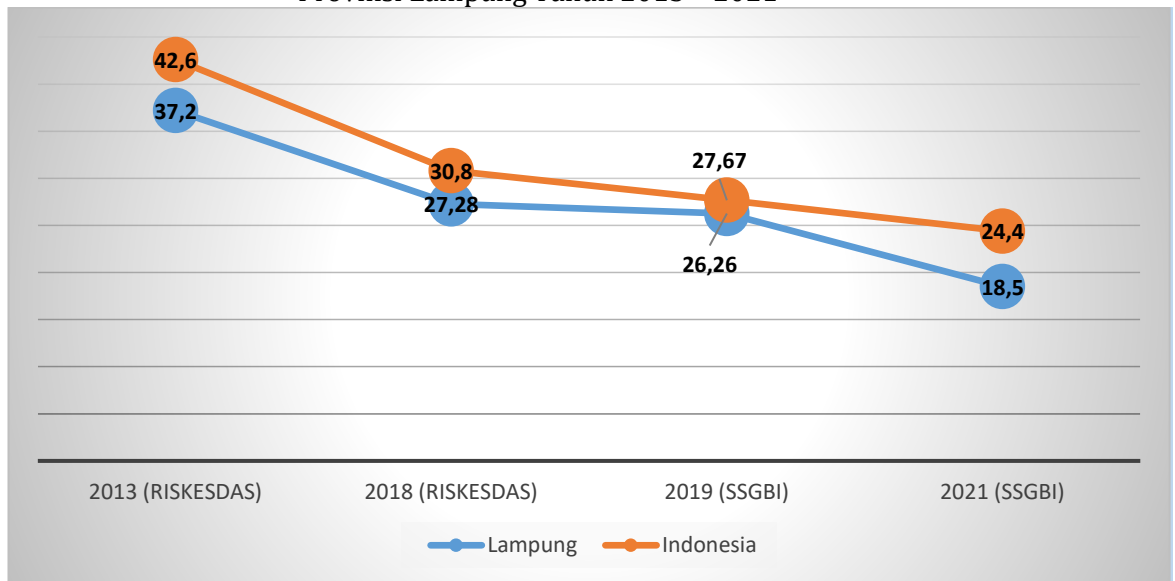
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022

2.1.3.2. Kesehatan

2.1.3.2.1. Stunting

Status gizi balita sangat pendek dan pendek (Stunting) merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Pencapaian prevalensi stunting pada balita di Provinsi Lampung pada tahun 2013 - 2021 berdasarkan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2021 mengalami tren yang positif, dimana pada tahun 2021 Provinsi Lampung telah mencapai target yang ditetapkan (21,1 persen) yaitu 18,5 persen. Penurunan yang cukup signifikan ini diperoleh karena aksi konvergensi stunting penurunan stunting yang telah dilakukan di Provinsi Lampung sejak tahun 2018.

Grafik II - 32 Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2021

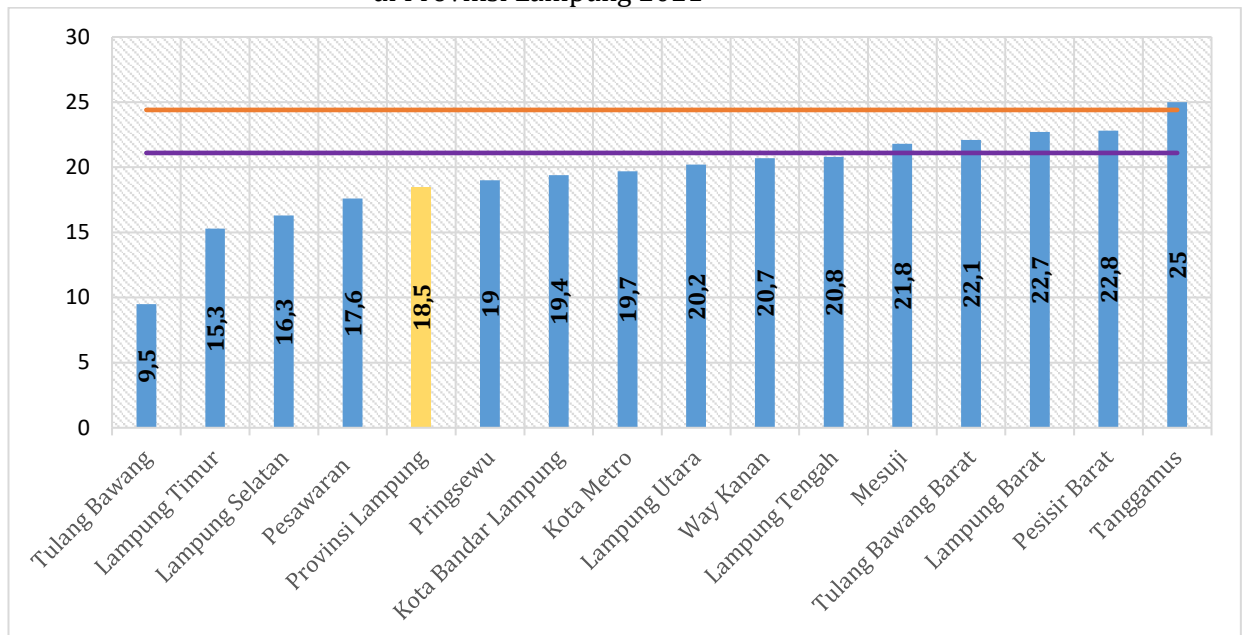


Sumber : Data Dinas Kesehatan, 2022

Aksi konvergensi penurunan stunting dilakukan oleh semua pihak, baik seluruh OPD provinsi maupun kabupaten/kota hingga tingkat desa, instansi vertikal dan lintas sektor terkait lainnya. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menetapkan 3 Kabupaten/Kota lokus penurunan stunting, yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur dan pada tahun 2019 ditetapkan Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten lokus. Pada tahun 2020 Pemerintah pusat menambahkan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Pesawaran sedangkan pada tahun 2021 ditambahkan 4 Kab/Kota yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Way Kanan, Pringsewu dan Kota Bandar Lampung. Untuk Tahun 2022 ditetapkan sisanya, yaitu 5 kabupaten/kota lainnya, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Kota Metro, sehingga pada tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah menjadi kabupaten/kota lokus penurunan stunting.

Aksi konvergensi penurunan stunting memberikan efek positif dalam penurunan stunting seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Prevalensi stunting per kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat terlihat pada grafik berikut:

Grafik II - 33 Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2021



Sumber: SSGBI Tahun 2021

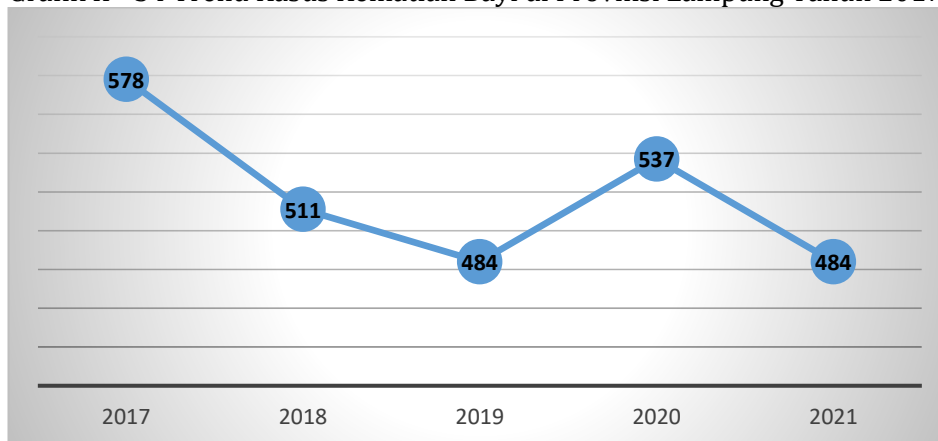
Dari grafik terlihat bahwa masih terdapat 5 Kabupaten/Kota yang belum mencapai target prevalensi stunting tahun 2021, yaitu Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus. Dari ke-5 Kabupaten tersebut, hanya Kabupaten Tanggamus yang telah melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021, tetapi angka stuntingnya masih tinggi. Untuk itu diharapkan Kabupaten Tanggamus untuk lebih fokus lagi dalam melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting. Sedangkan 4 kabupaten lainnya akan melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting pada tahun 2022, diharapkan setelah melakukan aksi konvergensi tersebut, angka stunting di Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat dan Pesisir Barat akan menurun.

2.1.3.2.2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Kematian bayi terjadi pada masa bayi perinatal (0-6 hari), diikuti kematian pada masa bayi neonatal (7 – 28 hari) dan masa bayi (>28 hari - < 1 tahun).

Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Lampung sejak Tahun 2017-2021 selalu mengalami penurunan akan tetapi pada Tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah kasus dari 484 kasus pada Tahun 2019 menjadi 537 kasus dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 484 kasus. Kondisi pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus kematian bayi di Provinsi Lampung pada Tahun 2020 tinggi, akan tetapi dengan seiringnya melandainya kasus Covid-19 pada tahun 2021 maka jumlah kasus kematian bayi juga ikut menurun. Penyebab kasus kematian bayi terbanyak disebabkan karena asfiksia (keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir) dan karena BBLR (berat badan lahir rendah) serta faktor lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, terlihat trendnya kasus kematian bayi seperti terlihat pada grafik berikut ini:

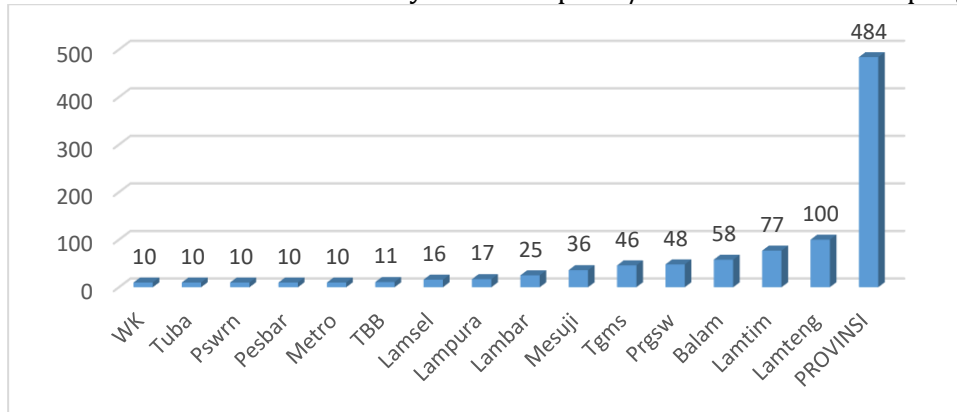
Grafik II - 34 Trend Kasus Kematian Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2022

Berdasarkan Kasus Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2021, kasus kematian bayi terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 100 kasus, kemudian Kabupaten Lampung Timur sebanyak 77 kasus dan Bandar Lampung sebanyak 58 kasus, sedangkan wilayah dengan kasus kematian bayi terkecil adalah Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Kota Metro dengan 10 kasus kematian Bayi.

Grafik II - 35 Kasus kematian Bayi Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung



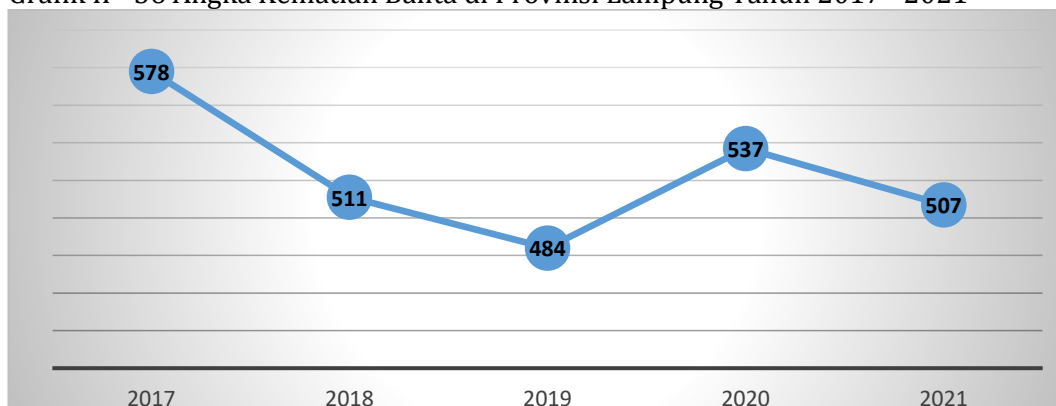
Sumber : Data Dinas Kesehatan 2022

2.1.3.2.3. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (Akaba) adalah jumlah kematian anak umur 0- <5 tahun per 1000 kelahiran hidup. Akaba menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi penyakit infeksi dan kecelakaan.

Jumlah kasus kematian balita di Provinsi Lampung dari Tahun 2017-2019 mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yang cukup berarti hingga mencapai 537 kasus, kejadian ini diperparah dengan munculnya kasus Covid-19. Pada tahun 2021 jumlah kasus kematian balita mengalami penurunan, walaupun masih belum mencapai angka pada tahun 2019, yaitu menjadi 507 kasus.

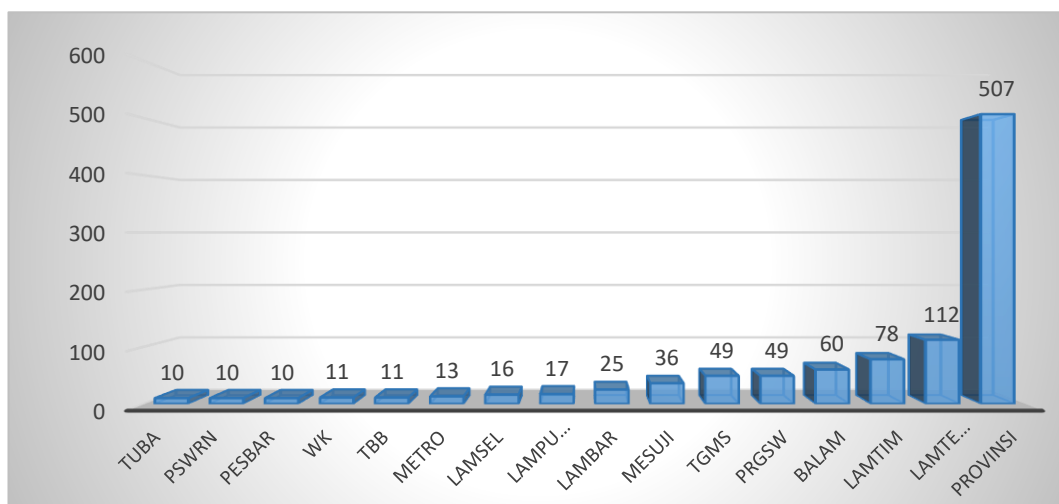
Grafik II - 36 Angka Kematian Balita di Provinsi Lampung Tahun 2017 –2021



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2022

Kasus kematian balita berdasarkan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung tahun 2021, kasus kematian Balita terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 112 kasus, Kabupaten Lampung Timur 78 kasus dan Kota Bandar Lampung sebanyak 60 kasus. Kasus terendah yaitu hanya 10 kasus kematian balita berada di Kabupaten Tulang Bawang, Pesawaran dan Pesisir Barat. Jumlah kasus kematian balita dan kasus kematian bayi tidak terlalu berbeda jauh dan kabupaten/kota dengan kasus tertinggi pada kasus kematian bayi juga menjadi kabupaten/kota dengan kasus tertinggi pada kematian balita. Artinya kematian balita didominasi pada umur kurang dari 1 tahun, sedangkan kematian balita umur 1-5 tahun sangat sedikit.

Grafik II - 37 Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Prov.Lampung, 2022

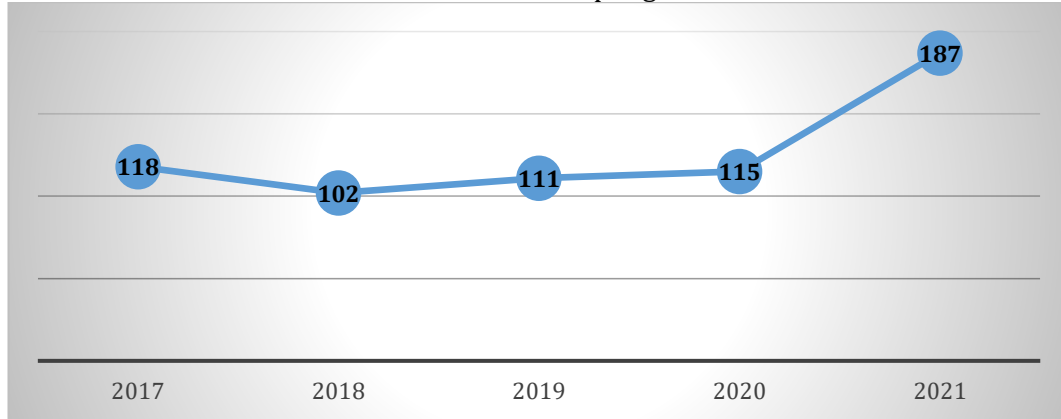
2.1.3.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan status kesehatan ibu serta kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.

Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, jumlah kasus kematian ibu terus meningkat, hingga mencapai 187 kasus pada tahun 2021. Peningkatan kasus ini juga disebabkan karena kasus Covid-19, dimana ibu hamil terpapar kasus

Covid sehingga meningkatkan resiko kematian. Peningkatan jumlah kasus kematian ibu tiap tahunnya dapat terlihat pada grafik di bawah ini:

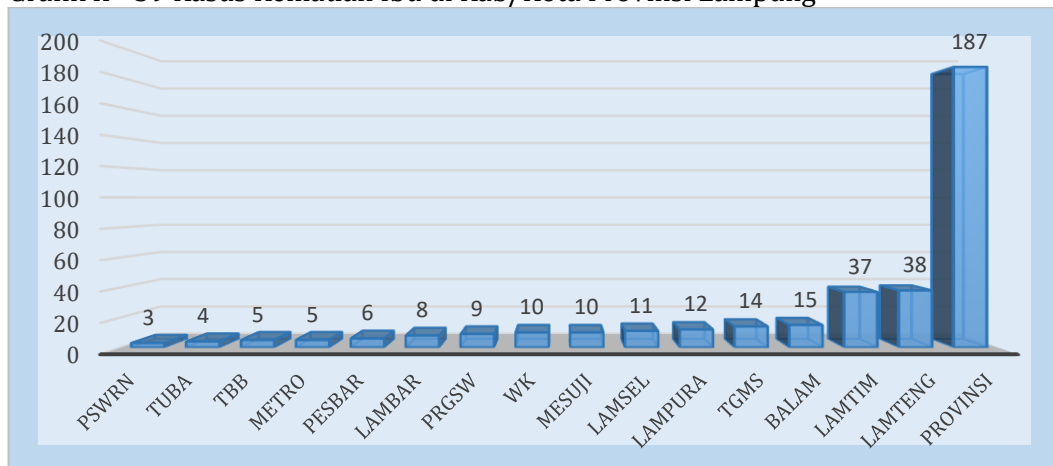
Grafik II - 38 Kasus Kematian Ibu Provinsi Lampung Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2022

Sejalan dengan kasus kematian bayi dan balita, pada kasus kematian ibu di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2021, yang terbanyak juga terjadi di Kabupaten Lampung Tengah (38 kasus), Lampung Timur (37 kasus) dan Kota Bandar Lampung (15 kasus). Permasalahan kesehatan di 3 kabupaten/kota ini harus segera dibenahi agar jumlah kasus kematian ibu, kematian bayi dan kasus kematian balita di kabupaten/kota ini dapat diturunkan. Distribusi kasus kematian ibu di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II - 39 Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota Provinsi Lampung

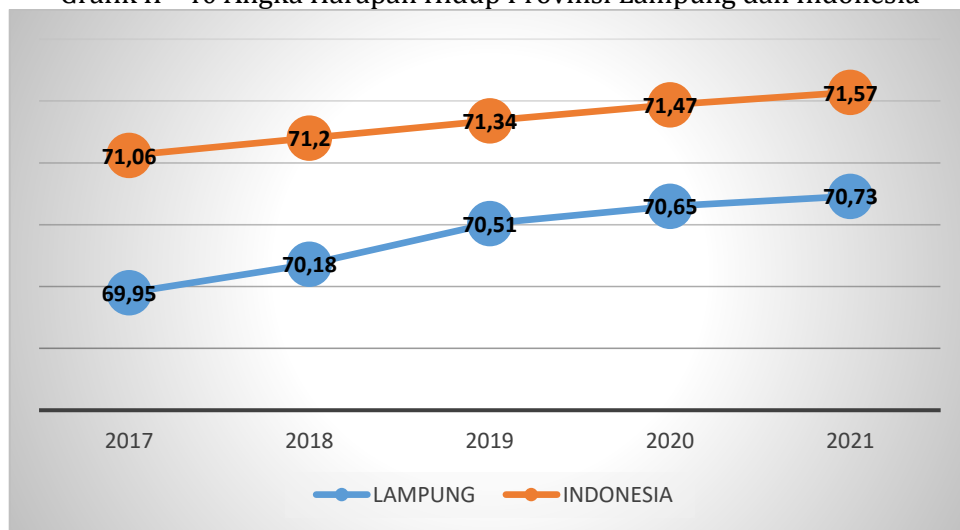


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi, 2022

2.1.3.2.5. Angka Harapan Hidup

Selama 5 tahun terakhir Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Provinsi Lampung terus meningkat dari 69,95 pada tahun 2017, menjadi 70,73 pada tahun 2021, meski terus meningkat, AHH Provinsi Lampung masih di bawah rata-rata AHH Nasional. Kesadaran penduduk akan persoalan kesehatan dan ketersediaan akses kesehatan menjadi faktor dominan meningkatnya angka harapan hidup disuatu daerah.

Grafik II - 40 Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Indonesia



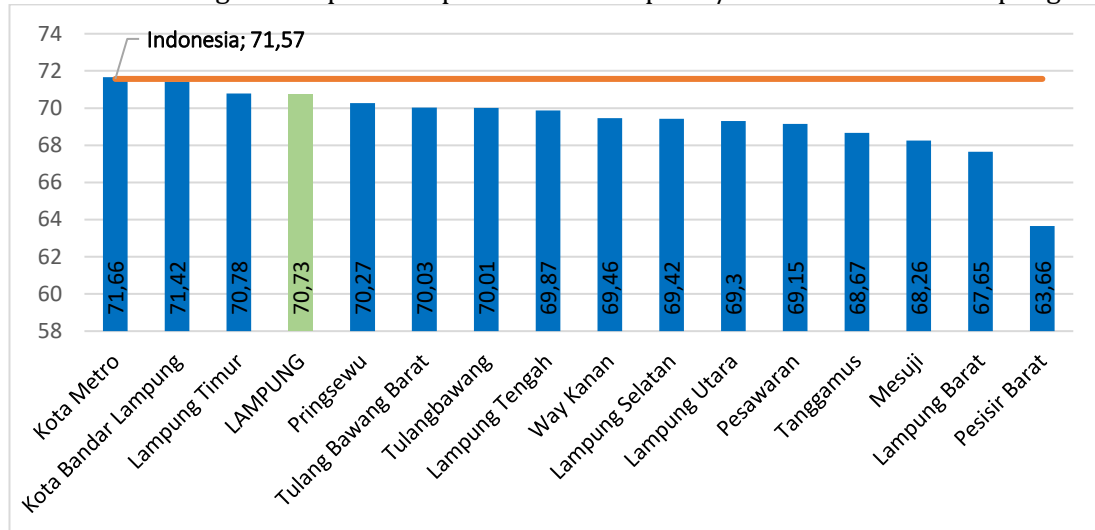
Sumber : BPS Indonesia, 2021, diolah

Tabel II - 42 Angka Harapan Hidup se-Sumatera dan Nasional Tahun 2017-2021

PROVINSI	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
SUMATERA UTARA	68.37	68.61	68.95	69.1	69.23
BENGKULU	68.59	68.84	69.21	69.35	69.42
SUMATERA BARAT	68.78	69.01	69.31	69.47	69.59
ACEH	69.52	69.64	69.87	69.93	69.96
SUMATERA SELATAN	69.18	69.41	69.65	69.88	69.98
KEPULAUAN RIAU	69.48	69.64	69.8	69.96	70.12
LAMPUNG	69.95	70.18	70.51	70.65	70.73
KEP. BANGKA BELITUNG	69.95	70.18	70.5	70.64	70.73
JAMBI	70.76	70.89	71.06	71.16	71.22
INDONESIA	71.06	71.2	71.34	71.47	71.57
RIAU	70.99	71.19	71.48	71.6	71.67

Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-4 tertinggi di Sumatera, walaupun begitu besarnya masih berada di bawah angka Nasional. Hanya Provinsi Riau yang AHH nya berhasil melampaui angka Nasional.

Grafik II - 41 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kota Metro (71,66), Kota Bandar Lampung (71,42), dan Kabupaten Lampung Timur (70,78) berada di atas AHH Provinsi Lampung sedangkan Kabupaten dengan AHH terendah adalah Kabupaten Lampung Barat sebesar 67,65 dan Pesisir Barat sebesar 63,66. Disparitas nilai AHH ini menunjukkan bahwa Roadmap Peningkatan IPM Provinsi Lampung akses kesehatan serta tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk di Provinsi Lampung cukup baik, namun demikian pada kabupaten yang jauh dari perkotaan dan terpencil, tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk masih belum memadai.

2.1.3.2.6. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas)

Puskesmas adalah konsep dasar pelayanan kesehatan primer yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (jenjang tingkat pertama). Puskesmas memiliki tujuan

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal.

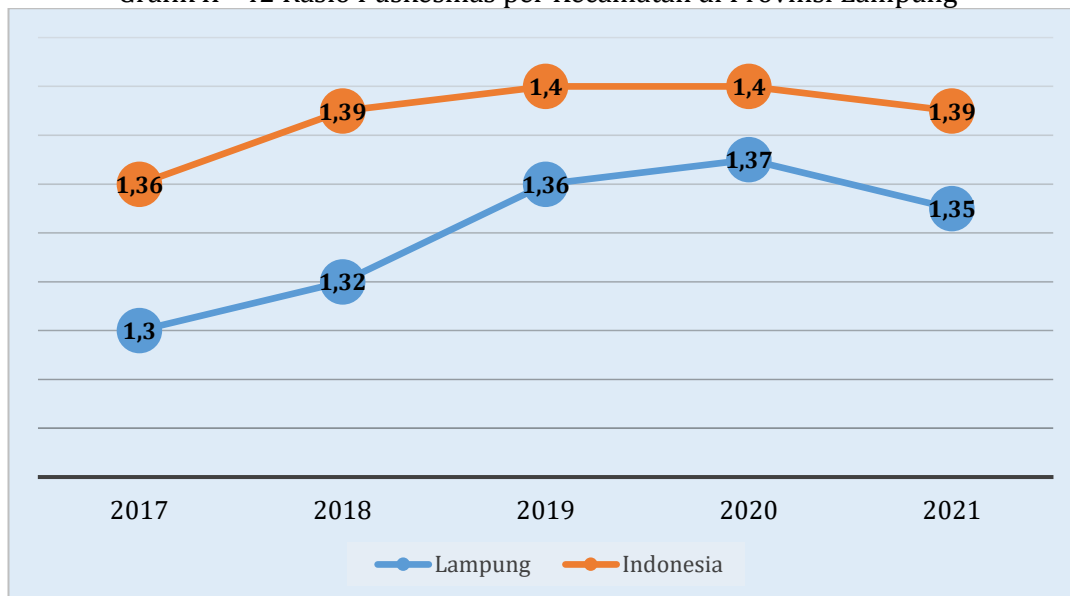
Jumlah Puskesmas terus bertambah setiap tahunnya, dari 299 unit pada tahun 2017 meningkat menjadi 315 unit pada tahun 2021. Namun demikian, peningkatan jumlah Puskesmas tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap Kecamatan, dimana rasio ideal adalah 1 Puskesmas menanggapi 1 Kecamatan. Seiring dengan penambahan jumlah Puskesmas, rasio Puskesmas terhadap kecamatan di Provinsi Lampung juga terus meningkat setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2021 terjadi penurunan, baik di tingkat Provinsi Lampung maupun di tingkat nasional. Pada tahun 2021, rasio puskesmas di tingkat Provinsi Lampung mencapai 1,35 dan tingkat nasional mencapai 1,39. Walaupun rasio puskesmas di tingkat Provinsi Lampung berada di bawah angka nasional, namun angka ini telah mencapai rasio ideal.

Tabel II - 43 Jumlah Puskesmas Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

Provinsi	Jumlah Puskesmas				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung	299	302	310	312	315

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2022

Grafik II - 42 Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung



Sumber: Profil Kesehatan, 2022

2.1.3.2.7. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit)

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/PER/I/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan penyelenggaraan, yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah adalah unit pelaksana teknis dari instansi pemerintah (Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Lainnya). Rumah sakit daerah adalah pelaksana teknis dari daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota). Sedangkan rumah sakit swasta adalah badan hukum yang bersifat nirlaba. Peraturan tersebut juga mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus

adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Jumlah Rumah Sakit di Lampung dari tahun 2017 s.d 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki RSUD hanya 14 daerah, pada tahun 2021 seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah memiliki RSUD sendiri dan jumlahnya telah mencapai 17 RSUD di 15 kabupaten/kota. Sedangkan untuk jumlah RS Swasta, pada tahun 2017 berjumlah 46 yang terdiri dari 31 RS Umum dan 15 RS Khusus, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 59 Rumah Sakit terdiri dari 39 RS Umum dan 20 RS Khusus. Pada tahun 2021 terjadi pengurangan jumlah RS Khusus sebanyak 3 RS, dimana pada tahun 2020 berjumlah 23 berkurang menjadi 20 RS.

Tabel II - 44 Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

No.	Parameter	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Sakit Pemerintah	19	20	20	20	22
	a RSUD Provinsi	2	2	2	2	2
	b RSUD Kabupaten/Kota	14	15	15	15	17
	c RS. Khusus Provinsi	1	1	1	1	1
	d RS. Polri	1	1	1	1	1
	e RS. Tentara	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Swasta	46	57	58	59	59
	a RS. Umum	31	36	36	36	39
	b RS. Khusus	15	21	22	23	20

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2022

Standar terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia dari tahun 2015-2020 sekitar 1 per 1.000 penduduk. Pada Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 tercantum, bahwa jumlah tempat tidur di Provinsi Lampung sudah tercukupi, yaitu mencapai 1,0 walaupun masih

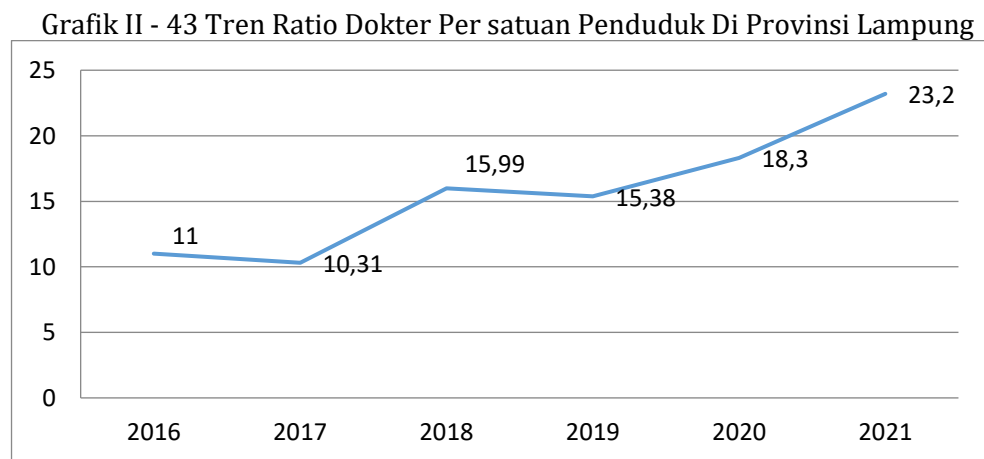
berada di bawah angka nasional (1,4). Sedangkan untuk tahun 2021, terdapat jumlah tempat tidur sebanyak 8.254, sehingga rasio tempat tidur dirumah sakit Provinsi Lampung sebesar 0,91.

2.1.3.2.8. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia yang peranan dan keberadaannya sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Banyak faktor yang dapat dilihat dari tenaga kesehatan yaitu tingkat pendidikan, profesionalisme dan kompetensinya. Tenaga kesehatan merupakan faktor input dalam pelaksanaan program kesehatan.

Rasio Dokter

Capaian rasio dokter di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 11 naik menjadi 15,99 pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 18,3 pada tahun 2020.



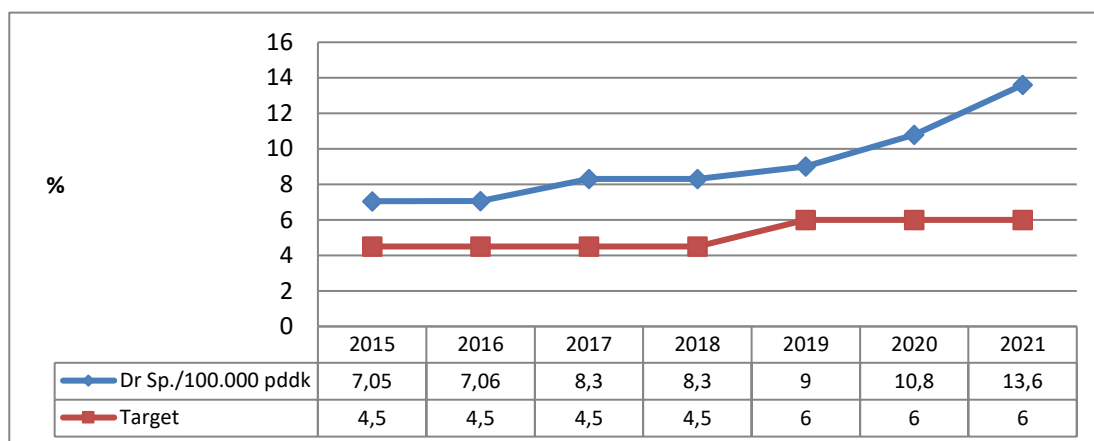
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2021

Selain melihat rasio dokter umum dengan 100.000 penduduk perlu juga dilihat rasio dokter umum terhadap sarana puskesmas. Rasio dokter umum terhadap puskesmas tahun 2017 yaitu 1,65 artinya setiap puskesmas memiliki rata-rata satu hingga dua dokter.

Rasio Dokter Spesialis terhadap 100.000 Penduduk

Tahun 2021 Rasio Dokter spesialis di Provinsi Lampung terhadap 100.000 penduduk, mencapai 13,6 dokter spesialis per 100.000 penduduk angka ini telah mencapai target Nasional yang diharapkan.

Grafik II - 44 Tren Rasio Spesialis di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2015 - 2021

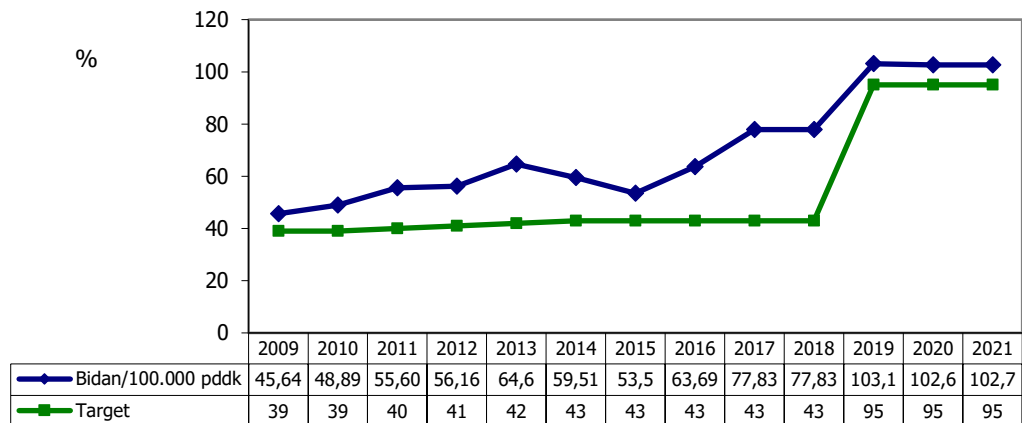


Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2021

Rasio Bidan Terhadap 100.000 Penduduk

Tahun 2019 rasio bidan terhadap 100.000 penduduk baru mencapai 103,6 bidan per 100.000 penduduk. Angka ini telah mencapai target dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Rasio Bidan terhadap penduduk selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat, rasio pada tahun 2019 adalah 103,6% artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh sekitar 103 bidan.

Grafik II - 45 Rasio Bidan di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2015-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2021

2.1.3.2.9. Pandemi Covid – 19 di Provinsi Lampung

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang setelah diidentifikasi bahwa pneumonia tersebut sebagai jenis baru corona virus (Novel Corona Virus) dan WHO resmi menetapkan penyakit novel corona virus dengan sebutan *Corona virus Disease (COVID-19)*. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia. Penyebaran Covid 19 di Provinsi Lampung pertama kali dilaporkan pada tanggal 18 Maret 2020 setelah ditemukan satu pasien positif Covid 19.

Situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung sampai tanggal 4 Januari 2022 sudah dapat dikendalikan namun belum sepenuhnya aman, meskipun kasus sudah sangat rendah. Masih ditemukan kasus baru sebanyak 68 kasus pada bulan Desember 2021 di 12 Kabupaten Kota dan 1 kasus kematian di 1 kabupaten. Akan tetapi bulan Januari sd tanggal 4 Januari 2022 belum ada kasus baru dan kasus kematian. Angka kesembuhan sudah mencapai lebih dari 91,54% dengan CFR/Case Fatality Rate kumulatif (kasus meninggal dunia) sebanyak 7,69% sedangkan proporsi kasus aktif hanya ada 0,77%.

Tabel II-1
Situasi Covid-19 Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021

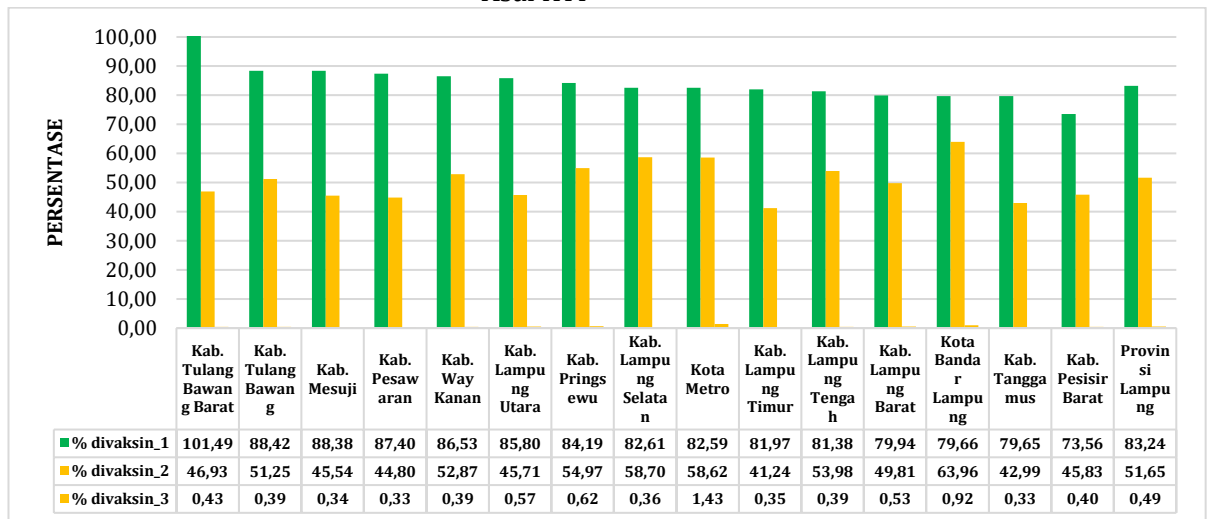
NO	KAB KOTA	KASUS KONFIRMASI											
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Bandar Lampung	1,176	730	417	392	354	464	2,214	2,107	586	98	27	16
2	Lampung Selatan	234	138	100	126	208	347	1,290	1,241	147	55	15	4
3	Lampung Timur	384	292	113	201	232	491	2,181	1,438	242	77	7	5
4	Lampung Utara	314	169	99	286	286	344	1,230	527	126	32	8	1
5	Metro	255	115	84	189	201	253	558	710	254	80	2	3
6	Tulang Bawang	36	48	47	38	50	23	161	212	26	26	2	0
7	Tulang Bawang Barat	108	10	22	30	43	41	329	466	72	32	2	3
8	Mesuji	37	11	7	23	27	22	98	244	40	33	0	1
9	Tanggamus	193	41	16	39	25	220	914	691	79	38	5	3
10	Pringsewu	131	90	82	145	178	437	1,197	1,338	234	32	7	1
11	Pesawaran	170	93	48	151	186	280	744	573	99	41	6	2
12	Pesisir Barat	37	60	77	28	10	83	338	172	19	23	2	0
13	Lampung Barat	191	129	81	92	148	154	1,122	628	236	65	2	0
14	Lampung Tengah	420	586	291	194	251	287	655	665	197	60	7	28
15	Way Kanan	32	14	-	22	23	29	64	575	33	20	5	1
	Lampung	3,718	2,526	1,484	1,956	2,222	3,475	13,095	11,587	2,390	712	97	68

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2022

Kasus Covid-19 terus mengalami penurunan di tiap bulannya dan penurunan terbesar terlihat pada bulan November dan Desember. Pada bulan Desember masih ditemukan kasus baru di 12 Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 maka Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan vaksinasi Covid-19 yang merupakan kolaborasi dengan masyarakat. Vaksinasi telah dilakukan melalui 3 dosis, dimana capaian vaksinasi dosis I di seluruh Kabupaten/Kota per tanggal 3 Januari 2022 telah mencapai di atas 70% bahkan di tingkat Provinsi telah mencapai 83,24 persen. Sedangkan dosis II di Kabupaten/Kota rata-rata telah mencapai 41,24 – 63,96 persen dengan capaian Provinsi Lampung mencapai 51,65 persen. Untuk dosis ke III, capaiannya hanya 0,49%. Grafik cakupan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Lampung dapat terlihat dari grafik di bawah ini.

Grafik II - 46 Cakupan Vaksinasi Covid-19 Per Tanggal 3 Januari 2022 Berdasarkan Asal KTP



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2022

2.1.3.3. Pertanian

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung selama kurun waktu jangka menengah 5 (lima) tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Menjaga stabilitas harga, menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Lampung;
2. Meningkatkan Ketersediaan Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
3. Meningkatkan Ketersediaan Produksi Hortikultura Berkelanjutan.

Tabel II - 45 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Dinas KPTPH, 2021

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Pangan			
1.1	Capaian Indek Ketahanan Pangan	Indeks	77	78,25
1.2	Stabilisasi harga pangan	Koefisien	cv ≤ 5	1,27
1.3	Persentase (%) penurunan daerah rawan pangan	Persen	1	2,63
1.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (TPB).	Persen	86	85,3
1.5	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji.	Persen	98,5	100
2	Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)			
2.1	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Ubi Kayu)	Persen	100	99,48

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
2.2	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai Besar, Bawang Merah, Nanas, Pisang dan Manggis)	Persen	100	134,37

Sumber: Dinas TPH & KP Provinsi Lampung 2022

Secara umum, pembangunan ketahanan pangan yang telah dilakukan mampu meningkatkan status ketahanan pangan di Provinsi Lampung, ditunjukkan dengan peningkatan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 74,98 di tahun 2018 menjadi 76,98 di tahun 2019 dan 77,33 di tahun 2020, dan 78,25 di tahun 2021. Salah satu keberhasilan pembangunan pertanian di Provinsi Lampung adalah sebagai daerah sentra/penghasil padi (peringkat 6 Nasional dan peringkat 2 di Sumatera) juga sebagai sentra/penghasil jagung (peringkat 3 Nasional).

Tabel II - 46 Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan, 2021

No.	Komoditas Unggulan	Sasaran (ton)	Produksi (ton)*	Persentase capaian
1	2	3	4	5
1	Padi	2.705.290	2.474.828	91,48
2	Jagung	2.675.403	2.941.027	109,93
3	Ubi Kayu	6.146.948	5.965.031	97,04
Persentase capaian tanaman pangan				99,48

Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2022

Ket: * Angka Perkiraan Produksi

Berdasarkan Angka Sementara KSA-BPS pada tahun 2021 perkiraan capaian produksi padi di Provinsi Lampung mengalami penurunan 6,62 % jika dibandingkan dengan produksi tahun 2020. Perkiraan produksi padi tahun 2021 sebesar 2,47 ton GKG dan produksi padi 2020 sebesar 2,65 juta ton GKG atau mengalami penurunan 180 ribu ton dari tahun 2020. Perkiraan produktivitas rata-rata padi Lampung 2021 sebesar 50,44 ton/ha, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan produktivitas 2020 sebesar 4,86 ton/ha.

Turunnya perkiraan produksi padi 2021 disebabkan oleh berkurangnya luas tanam padi seluas **54.456** hektar atau penurunan 9,99 % dibandingkan dengan luas panen padi 2020. Salah satu faktor yang

mempengaruhi berkurangnya luas tanam adalah adanya perbaikan/normalisasi saluran induk pada Daerah Irigasi Way Rarem sejak awal tahun 2020, dan dengan adanya pandemi Covid 19 terjadi pengurangan anggaran sehingga penyelesaian perbaikan/normalisasi saluran hingga tahun 2022.

Grafik II - 47 Perbandingan Luas Panen Padi Lampung-Indonesia Tahun 2019-2021 (ha)



Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2022

Grafik II - 48 Produksi Padi Lampung – Indonesia Tahun 2019 – 2021 (ton)

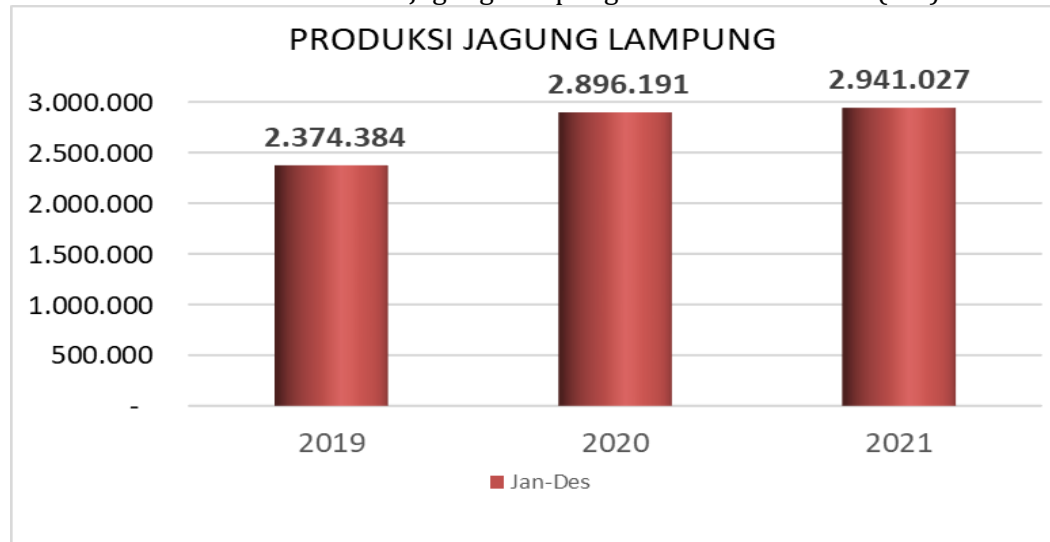


Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2022

Perkiraan produksi jagung Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebesar 2,94 juta ton, atau mengalami peningkatan sebesar 1,55 % dari Produksi jagung tahun 2020 sebesar 2,89 juta ton. Peningkatan produksi ini sebagai akibat dari harga jagung yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan

tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2021 banyak petani yang melakukan budidaya jagung.

Grafik II - 49 Produksi Jagung Lampung Tahun 2019 – 2021 (ton)



Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2022

Tabel II - 47 Persentase Capaian Produksi Tanaman Hortikultura, 2021

No.	Komoditas Unggulan	Sasaran (ton)	Produksi (ton)*	Persentase capaian
1	2	3	4	5
1	Cabai Besar	39.885	33.329	83,56
2	Bawang Merah	2.251	1700	75,52
3	Nenas	664.899	807.996	121,52
4	Pisang	1.221.045	1.128.955	92,46
5	Manggis	4.178	12.483	298,78
Persentase capaian tanaman hortikultura				134,37

Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2022

Ket: * Angka Perkiraan Produksi

Untuk kinerja bidang hortikultura, perkiraan produksi cabe besar 2021 menurun dari target yang harus dicapai. Capaian produksi 33.329 ton dari target 39.885 ton sehingga capaian kinerjanya 83,56%. Salah satu faktor penyebab turunnya produksi cabe merah antara lain pada saat panen, harga rendah/turun sehingga petani mengalami kerugian dan kesulitan modal untuk tanam musim berikutnya, yang menyebabkan petani beralih tanam ke komoditas lain yang biaya tanamnya lebih ringan dan yang umur panennya lebih singkat.

Perkiraan produksi bawang merah pada tahun 2021 juga tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, target 2.251 ton terealisasi 1.700 ton (75,52%). Sedangkan untuk komoditi nenas dan manggis sebagai komoditas ekspor mengalami peningkatan produksi pada tahun 2021.

Dalam menyelenggarakan fungsi produksi tanaman pangan dan hortikultura, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Menurunnya sumber-sumber air untuk kepentingan pertanian;
2. Konversi lahan yang tak terkendali;
3. Lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh serta pengembangan kelembagaan petani;
4. Terjadi pola deagrarianisasi dalam kebijakan pembangunan nasional. Misalnya, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak digunakan untuk pembangunan sektor pertanian tetapi lebih banyak digunakan untuk sektor non pertanian;
5. Kebijakan nasional untuk pelestarian dan pengembangan plasma nuffa yang menjadi ciri khas tanaman masing-masing wilayah belum signifikan sehingga banyak potensi lokal yang hilang;
6. Sinkronisasi sektor pertanian dan pariwisata yang dilakukan pemerintah masih belum terjalin dengan baik;
7. Sinkronisasi sektor pertanian dan pariwisata yang dilakukan pemerintah masih belum terjalin dengan baik; dan
8. Belum ada keseragaman data tentang persediaan beras atau pangan sehingga terjadi perbedaan dan menimbulkan perdebatan antara Kementan, Kemendag dan Bulog.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura antara lain:

1. Implementasi Kartu Petani Berjaya (KPB) dalam mempermudah dan memperlancar petani dalam berusaha tani padi
2. Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dan peningkatan indeks pertanaman
3. Pembangunan/pengembangan jaringan irigasi pertanian, pembuatan embung, pompanisasi, dan sumur bor.

4. Optimalisasi Lahan Rawa
5. Bantuan benih tanaman pangan dan hortikultura
6. Pengamanan Produksi dengan menekan populasi serangan OPT
7. Peningkatan dan pengembangan budidaya padi semai kering
8. Dukungan alsintan pra tanam, panen dan pascapanen
9. Merubah pola pertanian tradisional menuju pertanian modern
10. Dukungan pengairan dari Way Rarem dan Way Sekampung

2.1.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan data PT. PLN (Persero) UID Lampung konsumsi energi listrik Provinsi Lampung pada bulan Mei Tahun 2021 mencapai sekitar konsumsi 4.278,62 GWh dengan kapasitas terpasang 1.418,55 MW. Pembangunan sektor energi di Provinsi Lampung dapat dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi tahun 2020 sebesar 96,50 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 96,32 persen, namun demikian Pertumbuhan kebutuhan energi listrik di Provinsi Lampung pun cukup besar dengan rata-rata sekitar 10,04% per tahun. Kebutuhan listrik Lampung dengan beban puncak mencapai 1.027,5 MW dan cadangan daya 391,55 MW, sedangkan kemampuan pembangkit listrik di provinsi Lampung saat ini 968,55 MW sehingga defisit sebesar 350 – 450 MW. Untuk memenuhi kebutuhan listrik ini, provinsi Lampung masih dibantu oleh jaringan transinterkoneksi Sumatera Selatan yaitu melalui P3BS (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera). Yang merupakan unit bisnis operasional PLN yang bergerak di bidang Transmisi, yang bertugas menginterkoneksi energi Listrik dari pusat pembangkit menuju pusat beban dalam sistem interkoneksi Sumatera.

Gambar II-10
Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Lampung



Sumber Peta : RUPTL Tahun 2018 -2027 PT.PLN

Defisit energi yang dialami oleh Provinsi Lampung ini salah satu penyebabnya yaitu karena pasokan yang dimiliki terus berkurang . Alternatif solusi terhadap permasalahan energi ini adalah dengan menyusun formulasi strategi dan kebijakan yang jelas dan terarah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) berpedoman pada upaya-upaya konservasi dan diversifikasi energi diturunkan dalam naskah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) merupakan sebuah kebijakan dari Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor.

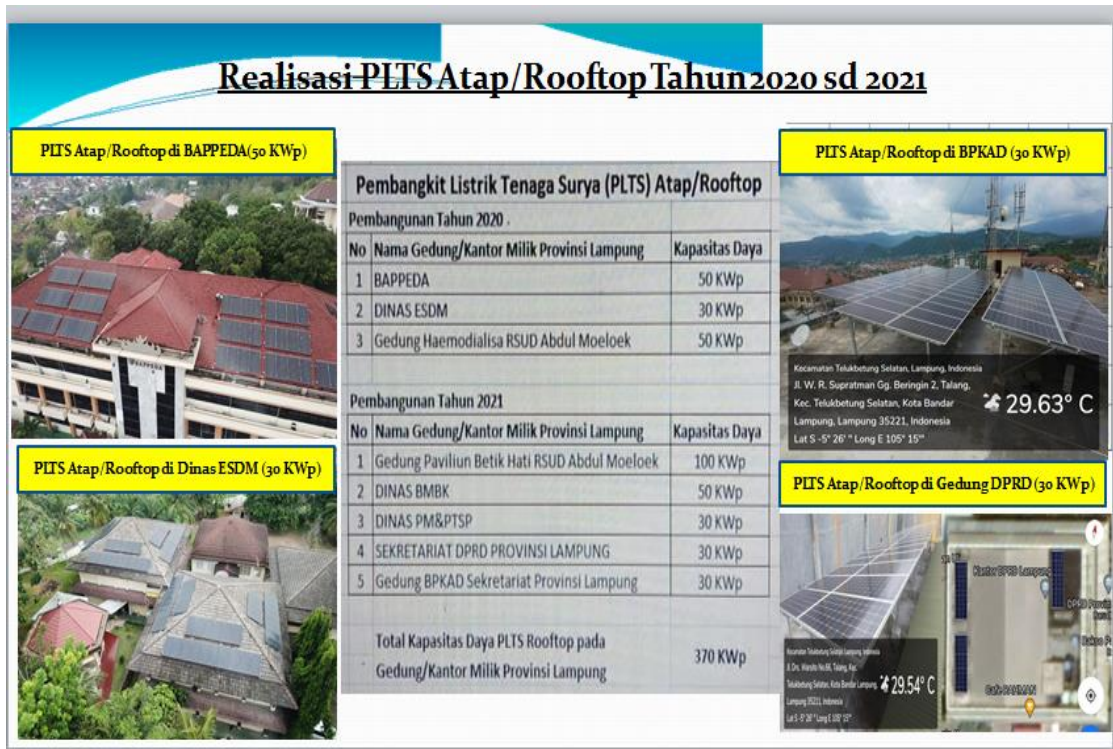
Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Rancangan Umum Energi Daerah berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah yang dipublikasikan pada 25 September 2019. Dalam Perda tersebut hasil analisis permodelan energi dengan skenario RUED menunjukkan jika konsumsi energi Lampung

diproyeksikan akan terus bertambah dari 2.082 ribu TOE pada Tahun 2015 menjadi 3.826 ribu TOE pada Tahun 2025 dan 12.106 pada tahun 2050 atau meningkat sekitar 5,2% pertahun dengan tiga sektor energi final tertinggi dari sektor industri, transportasi dan sektor rumah tangga.

Pada tahun 2015 bauran EBT Provinsi Lampung masih sangat kecil yaitu kurang dari 11% dan setelah dilakukan skenario RUED ini maka bauran EBT di proyeksikan akan meningkat menjadi 36% pada Tahun 2025 dan pada tahun 2050 sebesar 47%. Sedangkan capaian bauran EBT Provinsi Lampung pada tahun 2020 baru sebesar 18,55%. Untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) maupun PLTS Rooftop dan penggunaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), selain itu juga pemanfaatan tenaga air, Biogas, Biomass.

Dalam upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber energi di bangunan-bangunan perkantoran, maka dikembangkan Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan menggunakan modul surya fotovoltaik yang dipasang di atap bangunan (rooftop). Total kapasitas terpasang dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021 sebesar 0,37 MW.

Realisasi PLTS Rooftop Tahun 2020 - 2021



Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung 2021

Sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan instalasi biogas tidak kurang dari 1.184 unit kepada masyarakat di Provinsi Lampung. Sebaran Pemanfaatan Biogas Di Provinsi Lampung Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II - 48 Tabel Sebaran Pemanfaatan Biogas Di Provinsi Lampung Tahun 2020

Kapasitas Biogas Rumah Tangga		Ukuran Digester (m3)	Jumlah Unit	m3/tahun
Lokasi				
1	Desa/Kec/Kab/Kota Metro	77	149	3.441,90
2	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Barat	29	17	147,9
3	Desa/Kec/Kab/Kota Pesawaran	36	27	291,6
4	Desa/Kec/Kab/Kota Tanggamus	33	27	267,3
5	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Selatan	86	134	3.457,20
6	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Timur	51	269	4.115,70
7	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Tengah	89	316	8.437,20
8	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Utara	3	11	9,9
9	Desa/Kec/Kab/Kota Way Kanan	3	11	9,9
10	Desa/Kec/Kab/Kota Pringsewu	19	76	433,2
11	Desa/Kec/Kab/Kota Pesisir Barat	12	50	180
12	Desa/Kec/Kab/Kota Mesuji	3	11	9,9

Kapasitas Biogas Rumah Tangga			Jumlah Unit	m3/tahun
Lokasi		Ukuran Digester (m3)		Produksi Biogas (m3/hari)
13	Desa/Kec/Kab/Kota Tulang Bawang	9	11	29,7
14	Desa/Kec/Kab/Kota Tulang Bawang Barat	29	75	652,5
Total Konsumsi (m3/tahun)			1184	7.841.623,50

Sumber : Dinas ESDM 2021

Capaian rasio elektrifikasi rumah tangga tahun 2021 telah mencapai 97,07% dari target 96%. Dari data terlihat bahwa capaian kinerja telah mencapai 101,11%. Sedangkan capaian Persentase Desa Teraliri Listrik pada Tahun 2021 adalah sebesar 99,47%, dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 2.625 desa dari total desa yang ada di Provinsi Lampung yang berjumlah 2.640 desa. Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya dalam menaikkan capaian persentase desa teraliri listrik tersebut.

Tabel II - 49 Cakupan Pelayanan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap p 2024
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Rasio elektrifikasi rumah tangga	96,50	96,00	97,07	101,11	99,00	98,05
2.	Persentase Desa Teraliri Listrik	99,39	99,43	99,47	100,04	100	99,43

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung, 2022

Dalam rangka upaya pemerataan pelayanan ketenagalistrikan pada daerah-daerah terpencil khususnya di pulau-pulau terpencil telah dilakukan:

- Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) dusun Kalayang Pulau Pahawang dilengkapi jaringan tegangan menengah sepanjang 9,74 kms dan Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 11,26 serta didukung 4 gardu distribusi kapasitas 100 kVA
- Pulau Sebesi Pembangunan PLTD kapasitas 3 x 100 KV
- Di Pulau Legundi telah di bangun PLTD kapasitas 2 x 50 KV, Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasista 18 Kilowatt

peak (Kwp), untuk memenuhi kebutuhan energi listrik 66 kepala keluarga (KK) di Siuncal, Desa Pulau Legundi, Kabupaten Pesawaran

2.1.3.5. Pariwisata

Di tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan yang terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ditargetkan sebanyak 3.000.000 orang per tahun dan realisasinya sebesar 97,97% atau sebanyak 2.939.152 orang per tahun. Jika dibandingkan dengan capaian ditahun 2020, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini di tahun 2021 mencapai 0,9% dengan realisasi sebesar 100,2%. Peningkatan ini dipastikan akibat mulai berkurangnya dampak dari pandemic covid-19.

Secara nasional, kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2021 meningkat sebesar 6,68 %. Peningkatan ini terjadi akibat mulai longgarnya pembatasan perjalanan yang ditetapkan negara-negara di dunia akibat semakin menurunnya pandemic Covid-19. Semakin menurunnya dampak pandemic ini tidak hanya berpengaruh pada wisatawan mancanegara saja, tapi juga pada pergerakan wisatawan nusantara.

Berdasarkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Lampung realisasi di tahun 2021 tidak mencapai target yaitu selama 1,97 hari dari target 2,1 hari. Namun jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020 terjadi peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan sebesar 0,1 hari. Begitu juga dengan rata-rata pengeluaran wisatawan, terjadi penurunan di tahun 2021 jika dibandingkan dengan realiasasi di tahun 2020 dengan selisih capaian sebesar Rp. 37.000,-. Untuk capaian di tahun 2021 hanya terseralisasi sebesar 97,6% dari target di tahun 2021.

Tabel II - 50 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Sektor Pariwisata

No.	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	2.913.053 orang	3.000.000 orang	2.939.152 orang	97,97	15.000.000 orang	26.099 orang

2.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,87 hari	2,1 hari	1,97 hari	93,80	2,88 hari	0,1 hari
3.	Rata-rata pengeluaran wisatawan	Rp. 695.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 732.000,-	97,60	Rp. 900.000,-	Rp. 37.000,-

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov Lampung, 2022

Berdasarkan data dari jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dan menurun cukup drastis pada tahun 2020 karena pandemic covid 19. Selisih jumlah wisatawan mancanegara dalam periode 5 tahun yang berkunjung ke Provinsi Lampung adalah sebesar 243.615 orang wisatawan. Sedangkan untuk selisih jumlah wisatawan nusantara dari tahun 2017 sampai 2021 adalah sebesar 8.458.432 orang.

Tabel II - 51 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, 2017 - 2021

No.	TAHUN	WISATAWAN		TOTAL
		NUSANTARA	MANCANEGERA	
1.	2017	11.395.827	245.372	11.641.199
2.	2018	11.933.207	274.742	14.207.949
3.	2019	10.445.855	298.063	10.743.918
4.	2020	2.911.406	1.647	2.913.053
5.	2021	2.937.395	1.757	2.939.152

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2022

Upaya promosi dan pembangunan pariwisata di Provinsi Lampung untuk menarik wisatawan yang berkunjung tetap dilakukan di tahun 2021 dengan membangun Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni Harbour City. Kawasan ini dirancang dengan konsep *Integrated Tourism Complex*, dimana beberapa *specific-magnet* yang dibangun akan menjadi destinasi dan daya tarik pariwisata pada kawasan dimaksud, sekaligus menjadi Hub dalam sistem jaringan pariwisata.

Sejak tahun 2020 sampai 2021, banyak progress yang telah dilaksanakan dalam percepatan pembangunan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City, yaitu :

1. Kawasan Pariwisata Bakauheni Harbour City sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.
2. Pembahasan final masterplan dan feasibility Study (FS) Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City.
3. Lahan yang belum dikuasai pada Vision Masterplan, saat ini sudah dikuasai oleh PT. GKI. PT. GKI sudah menyatakan bersedia masuk dalam konsorsium Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City.
4. Telah dilaksanakan *Grand Breaking* Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City oleh Wakil Menteri BUMN dan Gubernur Lampung. *Grand Breaking* meliputi Pembangunan Masjid BSI, Revisi Menara Siger, Pembangunan UMKM Menara Center, Kreatif Hub dan *Housing Development Entrepreneur Center* (HDEC)

2.1.3.6. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan di bidang kelautan dan perikanan menunjukkan peningkatan kualitas. Selama kurun waktu 5 tahun, produksi perikanan Budidaya Provinsi Lampung cenderung berfluktuasi dengan trend peningkatan dari 158.977ton pada tahun 2017 menjadi 182.258ton** pada tahun 2021. Sedangkan pada sektor perikanan tangkap, mengalami perkembangan fluktuatif, dengan trend menurun. Pada tahun 2017 sektor perikanan tangkap menghasilkan 126.702ton kemudian terus naik menjadi 157.209 pada tahun 2019 dan kembali turun menjadi 141.777ton** pada tahun 2021. Secara rinci kinerja bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

Tabel II - 52 Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2017 - 2021

NO.	Jenis Perikanan	TAHUN (TON)				
		2017	2018	2019	2020	2021 **
1.	Perikanan Budidaya	158.977	160.582	181.129	153.894	182.258
2.	Perikanan Tangkap	126.702	141.537	157.209	144,638	141.777
	Total Produksi	285.679	302.119	338.338	298.532	324.036

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2021 (** Angka Sementara)

2.1.3.7. Pembangunan Rendah Karbon (Emisi Gas Rumah Kaca)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021, Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK). Dokumen ini sangat diperlukan mengingat target penurunan emisi GRK nasional pada tahun 2020 hanya dapat dicapai jika dilakukan secara bersama dan dengan kontribusi dari pemerintah di daerah.

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang sedang giat membangun, khususnya bidang ekonomi tentunya akan banyak menghasilkan sumber emisi GRK. Berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, peternakan, industri, transportasi, dan pengelolaan limbah tentu saja akan mengemisikan GRK. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 pasal 7, kegiatan yang menghasilkan emisi GRK terdiri atas 6 (enam) sektor yaitu energi, limbah, proses produksi dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan, dan sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gas Rumah Kaca sendiri terdiri dari 6 (enam) jenis gas, yaitu: karbondioksida (CO₂), dinitro oksida (N₂O), metana (CH₄), sulfur-heksaflorida (SF₆), perflorokarbon (PFCs), dan hidroflorokarbon (HFCs).

Pokja RAD-GRK Provinsi Lampung yang terdiri dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah melakukan inventarisasi sumber emisi GRK dan menghitung tingkat emisi GRK untuk seluruh sektor yang potensial menghasilkan emisi GRK serta pelaporan PEP RAD-GRK secara online. Rencana aksi mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung diharapkan akan mampu menurunkan emisi GRK. Penurunan emisi GRK tahun 2021 sebesar 6,74% atau setara dengan 19.760.690,17 ton CO₂ eq.

Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi Sektor Pertanian & Peternakan

Aksi Mitigasi dari Subsektor Pertanian tahun 2021 menurunkan emisi sebesar 0,188% atau setara dengan 6.584.309,20 ton CO₂-eq. Diprediksikan pada tahun 2030 akan menurunkan emisi sebanyak 7.908.650,65 ton CO₂-eq atau sebesar 0,156 % dengan aksi mitigasi antara lain:

1. Optimasi Lahan
2. Pelatihan dan Penerapan Metode SRI (*System of Rice Intensification*)
3. Pengaturan Pola dan Teknik Pengairan
4. Pengembangan Embung
5. Peningkatan Penggunaan Pupuk Organik dan Biomasa

Adapun untuk Aksi Mitigasi dari Subsektor peternakan tahun 2021 menurunkan emisi sebesar 0,0152% atau setara dengan 702.561,75 ton CO₂-eq. Diprediksikan pada tahun 2030 akan menurunkan emisi sebanyak 721.435,59 ton CO₂-eq atau sebesar 0,050 % dengan aksi berikut:

1. Pengembangan Pengolahan Biogas Limbah Ternak
2. Pengembangan Teknologi Pakan Ternak Fermentasi
3. Pengembangan Pengolahan Pupuk Organik

Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi Sektor Kehutanan

Sasaran utama terkait penurunan emisi sektor kehutanan adalah meningkatkan luasan atau kualitas tutupan lahan yang akan berperan dalam penyerapan emisi GRK dan mengurangi perubahan lahan yang menghasilkan emisi GRK. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perhutanan Sosial
2. Meningkatkan Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam
3. Memantapkan Status Kawasan Hutan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
4. Pemanfaatan lahan tidur dan lahan kurang produktif diubah sebagai kawasan sentra produksi pertanian dan perkebunan sesuai potensi komoditas
5. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Untuk mengimplementasikan kebijakan penurunan emisi GRK, strategi yang ditempuh meliputi :

1. Melakukan penanaman untuk meningkatkan penyerapan emisi GRK
2. Melakukan penurunan perambahan dan pembinaan masyarakat sekitar kawasan hutan
3. Melakukan penataan batas & pembangunan unit KPH
4. Melakukan pemanfaatan lahan tidur dan kurang produktif untuk meningkatkan pendapatan dan penyerapan emisi GRK
5. Melakukan rehabilitasi hutan mangrove yang rusak

Berdasarkan kebijakan dan strategi yang dilakukan maka Program dan Kegiatan di Provinsi Lampung yang diusulkan menjadi aksi mitigasi adalah sebagai berikut :

1. Gerakan Lampung Menghijau (GELAM)
2. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Pengembangan Kebun Bibit Rakyat (KBR)
4. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat: Hutan adat, Hutan Kemasyarakatan (HKM) & Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
5. Perlindungan dan Pengamanan hutan, melalui kegiatan patrol pengamanan, pencegahan kebakaran hutan, penurunan perambah dan berbagai macam kegiatan & penyuluhan
6. Pengelolaan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
7. Peningkatan Promosi Kehutanan dan Pembinaan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
8. Peningkatan Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman.

Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi Sektor Energi

Emisi dari bidang energi meliputi emisi penggunaan bahan bakar fosil dan pemakaian listrik di sektor industri, rumah tangga, komersial dan pemerintah. Konsumsi energi di Provinsi Lampung akan seiring meningkat dengan pertumbuhan penduduk dan laju ekonomi. Pada Tahun 2021 penggunaan energi di Provinsi Lampung menghasilkan emisi 11.450.000,00

CO₂-eq setara dengan 10,83%. Diprediksi tahun 2030 akan menghasilkan emisi sebesar 17.870.000 CO₂-eq setara dengan 12,087%.

Skenario yang paling mempengaruhi besarnya emisi GRK sektor energi di Provinsi Lampung adalah faktor pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk secara signifikan akan mempengaruhi peningkatan pemakaian energi. Hal tersebut juga akan memacu pertumbuhan sektor lainnya seperti (industri, transportasi dan lain-lain). Dan sebagai konsekuensi, maka pemakaian energi di sektor lain juga akan meningkat.

Faktor yang mempengaruhi Produksi GRK pada Sektor Energi di luar energi pada Industri dan Transportasi :

1. Konsumsi Energi Rumah Tangga dengan menghitung pemakaian minyak tanah dan LPG
2. Konsumsi Energi pada Pembangkit Listrik (PLN): PLTD dan PLTU

Terkait rencana aksi yang diusulkan oleh satker penanggung jawab sektor energi (Dinas ESDM Provinsi Lampung) telah merencanakan langkah-langkah strategis terkait rencana penurunan emisi sebagai tabel berikut:

1. Bantuan PLTS
2. Bantuan PLTMH
3. Bantuan PLTBayu
4. Bantuan Biogas
5. Sosialisasi Koordinasi Hemat Energi dan Konservasi Energi
6. *Road Map* Biogas (Sosialisasi)

Jika tidak ada upaya mitigasi di sektor transportasi, maka diperkirakan emisi GRK dari sektor ini akan meningkat hingga sebesar hampir 4 (empat) kali lipat dalam jangka waktu 10 tahun. Oleh karena itu, Provinsi Lampung berupaya untuk melakukan aksi mitigasi yang pada dasarnya mengadopsi rencana mitigasi GRK nasional. Adapun rencana aksi mitigasi di sektor transportasi Provinsi Lampung akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan angkutan umum berbasis sistem transit (BRT)
2. Manajemen Parkir untuk mengurangi pengguna kendaraan pribadi

3. Peremajaan Armada Angkutan Umum

Pada industri-industri yang menggunakan banyak energi pada saat melakukan proses produksi, Dinas Perindustrian memberikan usulan mitigasi yang lebih terkait kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas produksi yang bertujuan untuk meminimalisir emisi CO₂ yang dihasilkan. Berikut Rencana Aksi Mitigasi Sektor Industri di Provinsi Lampung:

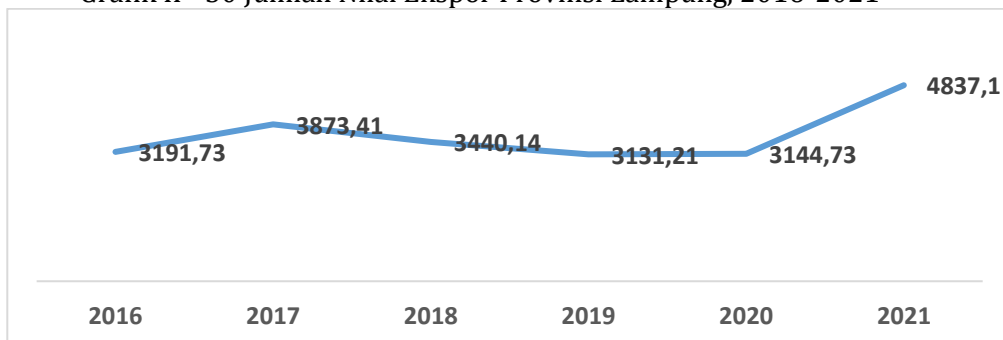
1. Kegiatan sistem monitoring & manajemen energi di sector industri.
2. Penggunaan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan
3. Penggunaan bahan bakar alternatif (biomasa) pada proses produksi di sektor industri.
4. Proses daur ulang hasil produk dan limbah
5. Peningkatan Efisiensi dan Mutu Proses Produksi.

2.1.3.8. Perdagangan

1) *Ekspor*

Perkembangan ekspor sampai dengan tahun 2017 baik dilihat dari nilainya menunjukkan peningkatan dan setelah fluktuasi cenderung turun sampai tahun 2019 dan meningkat kembali sampai dengan tahun 2021 dengan nilai Ekspor sebanyak US\$ 4.837,1.

Grafik II - 50 Jumlah Nilai Ekspor Provinsi Lampung, 2016-2021



Sumber : Dinas Perindag Provinsi Lampung 2021

Perkembangan Ekspor jangka waktu 2 tahun terakhir (2020 – 2021) secara kumulatif mengalami peningkatan sebesar US\$ 1.692 juta.

Peningkatan tertinggi terjadi pada komoditi unggulan Minyak sawit/CPO naik sebesar 57,9 persen, diikuti dengankomoditas molasses naik 42,01 persen. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II - 53 Ekspor Provinsi Lampung Berdasarkan Komoditas Unggulan Tahun 2020-2021 (US\$ Juta)

NO	KOMODITI UNGGULAN	Tahun 2020	Tahun 2021	Persentase
		Nilai (dalam juta \$)	Nilai (dalam juta \$)	
1	MINYAK SAWIT/CPO	1.057	1.668,9	57,90
2	KOPI ROBUSTA	367,0	393,7	7,29
3	NANAS/TURUNAN	283,1	350,9	23,93
4	UDANG BEKU/OLAHAN	213,3	242,9	13,91
5	PULP	170,9	206,5	20,88
6	KARET SIR 20	108,5	121,0	11,54
7	LADA HITAM	56,2	44,2	(21,39)
8	MOLASSES	55,0	78,0	42,01
9	KELAPA KERING /SEGAR	5,8	4,6	(20,92)
10	BIJI KAKAO	0,1	0	(100,00)
LAINNYA		828,0	1.726	34,27
TOTAL EKSPOR		3.144,8	4.837,1	

Sumber : Dinas Perindag Provinsi Lampung 2022

Berdasarkan negara tujuan, ekspor terbesar provinsi Lampung Tahun 2021 yaitu China dengan nilai ekspor US \$ 925,27 juta atau 19,13 % dari total ekspor Lampung tahun 2021. Selanjutnya United State merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua dengan nilai ekspor US\$ 832,46 atau 17,21 % dari total ekspor Lampung tahun 2021. Negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Lampung lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II - 54 Ekspor Provinsi Lampung berdasarkan Negara Tujuan, 2020-2021

NEGARA TUJUAN	Tahun 2020	Tahun 2021	Persentase
	Nilai (dalam juta \$)	Nilai (dalam juta \$)	
UNITED STATES	504.256.653,3	832.454.731,3	17,21
CHINA	327.631.379,9	925.265.460,0	19,13
PAKISTAN	253.031.187,9	359.915.792,3	7,44
INDIA	305.432.884,2	144.958.070,6	3,00
JAPAN	116.840.407,5	194.700.192,5	4,03
KOREA	77.369.558,3	139.545.564,8	2,88
NETHERLANDS	186.505.764,9	283.186.683,2	5,85
ITALY	249.771.830,5	414.018.940,2	8,56
PHILIPPINES	94.409.418,5	248.345.512,2	5,13
ASEAN LAINNYA	220.926.186,2	274.610.345,9	5,68
LAINNYA	808.586.601	1.020.089.122	21,09
TOTAL EKSPOR	3.144.761.872,4	4.837.090.415	

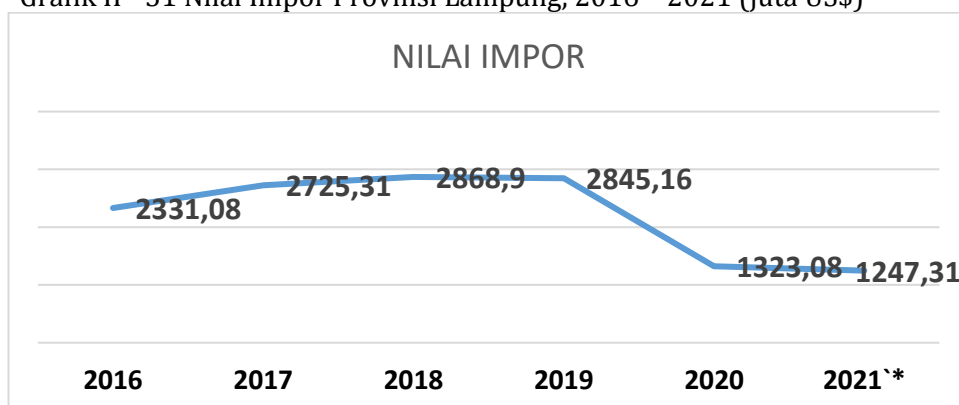
Sumber : Dinas Perindag Provinsi Lampung 2022

2) Impor

Jumlah impor di Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebesar 1.247,31.

Perkembangan Impor dari tahun 2019 cenderung menurun sebagai akibat dari covid-19, pada tahun 2020 penurunan impor cukup besar yaitu sebesar 53 persen dari jumlah impor pascatahun 2019. Sejalan dengan semakin berkurang dampak dari covid-19 jumlah impor menunjukkan peningkatan dimana data jumlah impor tahun 2021 sampai dengan bulan Juli sudah mencapai US\$ 1247,31 dan diprediksi sampai akhir 2021 jumlah impor akan melebihi jumlah impor tahun 2020.

Grafik II - 51 Nilai Impor Provinsi Lampung, 2016 - 2021 (juta US\$)



Sumber : Dinas Perindag Provinsi Lampung 2022

Ket : * Data sampai bulan Juli

3) Neraca Perdagangan

Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Lampung dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuatif. Walaupun fluktuatif, nilai ekspor lebih besar dari nilai impor setiap tahunnya. Neraca perdagangan Tahun 2020 mengalami surplus sebesar 1.821,65 dimana Ekspor 3.144,73 lebih besar dari impor 1.323,08.

Tabel II - 55 Neraca Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2016 s/d 2020

TAHUN	EKSPOR (dalam juta \$)	IMPOR (dalam juta \$)	NERACA PERDAGANGAN
2016	3191,73	2331,08	860,65
2017	3873,41	2725,31	1148,1
2018	3440,14	2868,9	571,24
2019	3131,21	2845,16	286,05
2020	3144,73	1323,08	1821,65

Sumber : Dinas Perindag Provinsi Lampung 2022

4) Jumlah Sertifikasi Mutu Barang Ekspor

Jumlah Sertifikasi mutu barang yang telah diterbitkan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Ekspor Dinas Perdagangan Provinsi Lampung pada Tahun 2021 sebanyak 1.476 Sertifikat yang terdiri dari; Kopi sebanyak 1.330 Sertifikat, Lada sebanyak 100 Sertifikat, Coklat sebanyak 2 Sertifikat, Kayu Manis sebanyak 6 Sertifikat, Gabah sebanyak 13 Sertifikat, Beras sebanyak 12 Sertifikat, Jagung sebanyak 3 Sertifikat, Karet sebanyak 4 Sertifikat dan Kalibrasi Ceratester sebanyak 6 Sertifikat.

2.1.3.9. Perindustrian

Kondisi industri pengolahan di Provinsi Lampung secara umum menunjukkan peningkatan produksi sepanjang tahun 2017-2019, namun pada tahun 2020 industri pengolahan turun sebesar 5,27 persen dan pada tahun 2021 membaik dan kembali naik hingga 4,57 persen. Walaupun secara total industri pengolahan pada tahun 2021 mengalami kenaikan, akan tetapi sebagian besar jenis industri pengolahan mengalami penurunan. Industri pengolahan yang mengalami kenaikan adalah industri makanan dan minuman; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kertas dan barang dari kertas; industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri mesin dan perlengkapan; industri alat angkutan; dan industri barang galian bukan logam.

Tabel II - 56 PDRB Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Harga Konstan Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Harga Konstan-2010				
		2017	2018	2019	2020	2021
Industri Pengolahan		39.633.960,82	43.218.138,58	46.778.086,94	44.314.281,84	46.337.644,28
1.	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	18.291,11	19.595,74	20.103,98	18.775,44	18.646,91
2.	Industri Makanan dan Minuman	28.480.886,40	32.933.093,87	37.264.343,16	35.555.787,30	37.509.497,83
3.	Industri Pengolahan Tembakau	22.268,08	23.838,96	24.455,91	21.029,71	18.422,79
4.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	23.025,16	24.621,04	27.370,07	23.077,41	24.437,87
5.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-

Lapangan Usaha		Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Harga Konstan-2010				
		2017	2018	2019	2020	2021
6.	Industri Kayu dan sejenisnya	533.857,32	457.641,23	481.915,87	355.261,17	268.938,30
7.	Industri Kertas dan Sejenisnya	336.494,76	349.518,97	367.267,28	343.450,94	362.529,93
8.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2.701.425,47	2.205.670,88	1.941.788,61	1.822.532,39	1.922.236,90
9.	Industri Karet, Plastik dan Sejenisnya	3.646.108,19	4.001.324,93	3.921.257,09	3.741.751,07	3.636.307,73
10.	Industri Barang Galian Bukan Logam	2.122.461,33	1.388.755,02	876.505,31	791.362,79	795.950,76
11.	Industri Logam Dasar	148.281,94	155.184,56	165.338,35	172.703,99	170.309,31
12.	Industri Barang Logam dan Sejenisnya	294.507,83	317.183,81	317.351,84	277.998,84	276.617,15
13.	Industri Mesin dan Perlengkapan	991.139,13	1.011.400,99	1.022.312,08	881.055,81	1.028.468,75
14.	Industri Alat Angkutan	127.874,66	131.642,57	132.465,42	120.638,05	130.138,73
15.	Industri Furnitur	132.285,77	140.946,82	156.581,49	132.872,37	119.202,32
16.	Industri Pengolahan Lainnya	55.053,69	57.719,17	59.030,48	55.984,55	55.939,01

Sumber: BPS Lampung, 2022

Industri yang berkontribusi paling besar di Provinsi Lampung adalah industri makanan dan minuman, dimana industri ini rata-rata berkontribusi selama 5 tahun terakhir sebesar 77,78 persen dimana pada tahun 2021 kontribusi industri makanan dan minuman sebesar 80,95 persen dari total industri pengolahan.

Dari total 16 sub sektor industri pengolahan, sub sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling besar pada tahun 2021 adalah industri makanan dan minuman (5,49), hal ini disebabkan oleh bahan baku industri makanan dan minuman yang berlimpah. Selain industri makanan dan minuman, industri lain yang memiliki rata-rata pertumbuhan diatas 5 (lima) persen adalah industri tekstil dan pakaian jadi (5,90); industri kimia, farmasi dan obat tradisional (5,47); Industri kertas dan barang dari kertas (5,56); Industri Mesin dan Perlengkapan (16,73); serta Industri Alat Angkutan (7,88).

2.1.3.10. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Transportasi merupakan kunci utama pengembangan wilayah. Tujuan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan membuka daerah-daerah ekonomi potensial yang terisolir, sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas. Tantangan pembangunan bidang infrastruktur jalan adalah tingginya tingkat kerusakan jalan yang mencapai 7-10% pertahun. Permasalahan kerusakan jalan selama ini disebabkan oleh overload kendaraan, konstruksi yang tidak sesuai kriteria kelas jalan dan dipicu oleh genangan air di badan jalan akibat minimnya saluran drainase. Permasalahan 'pembangunan jalan yang tidak terintegrasi dengan saluran drainase' merupakan issue Provinsi Lampung maupun nasional. Hal ini disebabkan karena pembangunan drainase membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit sementara kemampuan pendanaan relative terbatas, sehingga pembangunan jalan lebih berfokus untuk mengejar target panjang jalan/jalan mantab.

Tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah yang dijabarkan dalam sasaran tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang didukung oleh indikator kinerja utama kemantapan jalan provinsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2015-2020 adalah sebagaimana tabel berikut;

Tabel II - 57 Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2020

Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Kemantapan Jalan Provinsi	75,92 %	74,00 %	1.276,5	75,386 %	78,00%	94,87%

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2022 diolah

Berdasarkan tabel II-53 tingkat kemantapan jalan Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebesar 75,386 % dari target yang ditetapkan sebesar 74 %. Jika dilihat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, pelaksanaan kinerja pembangunan dalam bidang infrastruktur dan sarana transportasi meliputi pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan belum sesuai dengan yang diharapkan hal ini juga terkait dengan keterbatasan anggaran dalam penanganan jalan, sebagaimana terjadi refocusing anggaran pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga anggaran penanganan fisik jalan sebesar ± Rp. 520 Milyar mengalami refocusing menjadi ± Rp.364 Milyar.

Pada Tahun 2021 panjang jalan Provinsi Lampung sepanjang 1.693,273 Km dengan target penanganan jalan sepanjang 169 Km. Kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat sepanjang 440,25 Km dan Kondisi baik dan sedang sepanjang 1.253 Km. Dari Kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat tersebut hanya tertangani sepanjang 54,22 Km terdiri atas 30,09 Km Pekerjaan Pembangunan Jalan dan 23,31 Km berupa pekerjaan rehabilitasi jalan. Sedangkan penanganan jalan untuk pemeliharaan rutin pada kondisi baik dan sedang hanya dapat mencakup sepanjang 446,21 Km sehingga terdapat kondisi jalan sepanjang 1192,84 Km belum tertangani.

Tabel II - 58 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2021

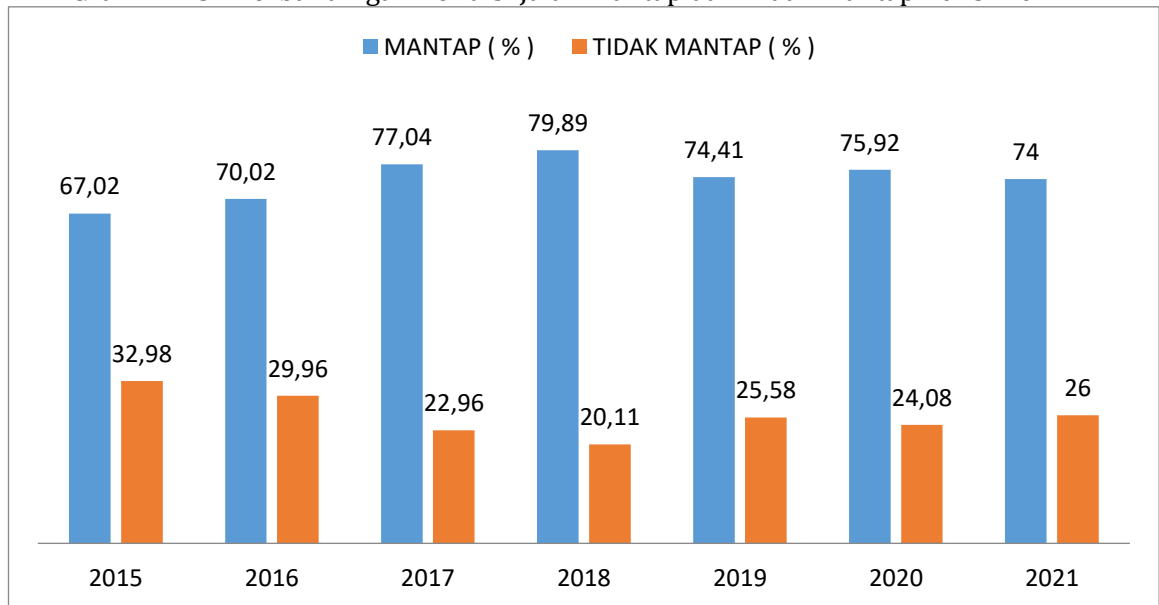
TAHUN	MANTAP (%)	TIDAK MANTAP (%)	KENAIKAN (%)
2015	67,02	32,98	1,97
2016	70,02	29,96	3,00
2017	77,04	22,96	7,02
2018	79,89	20,11	2,85
2019	74,41	25,58	-5,47
2020	75,92	24,08	1,51
2021	74	26	-1,92

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2020 diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi ruas jalan provinsi Lampung tahun 2015-2021 kondisi mantap terus mengalami peningkatan dari 67,02% tahun 2015 menjadi 74% pada tahun 2021. Hal ini juga diikuti dengan menurunnya kondisi jalan tidak mantap dari 32,98% tahun 2015 menjadi 26%

pada tahun 2021. Peningkatan kondisi ruas jalan mantap dan tidak mantap dapat dilihat pada grafik II-45.

Grafik II - 52 Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap 2015–2021



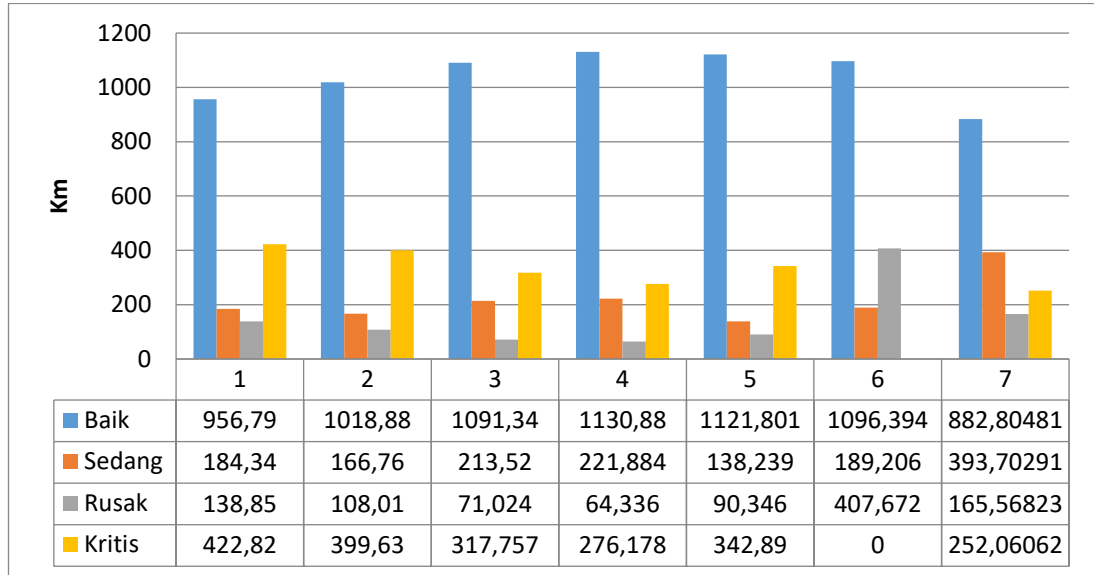
Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2022 diolah

Jika dilihat dari kondisi jalan menurut tingkat kerusakan, maka dapat dijelaskan bahwa kondisi jalan provinsi dengan kondisi baik mengalami peningkatan dari 1.134 Km pada tahun 2015 menjadi 1.253.022 Km pada tahun 2021. Untuk kondisi rusak juga mengalami penurunan dari 558,44 tahun 2015 menjadi 440,25 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang konsisten dalam berkomitmen untuk menangani ruas jalan provinsi menjadi lebih baik. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penanganan infrastruktur Jalan Provinsi meliputi :

- Pembangunan jalan sepanjang ±22,92 km
- Rehabilitasi Jalan Sepanjang ± 52,5 Km
- Pembangunan Jembatan sebanyak 7 unit
- Rehabilitasi Jembatan sebanyak 8 unit
- Pemeliharaan Rutin Jalan melalui UPTD sepanjang 717,71 Km
- Pemeliharaan Jembatan melalui UPTD sepanjang 17.118 m

Secara rinci dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini:

Grafik II - 53 Perbandingan Kondisi Jalan menurut Tingkat Kerusakan, Tahun 2015-2021



Sedangkan, untuk kemantapan kondisi jalan negara tahun 2019 mencapai 91,01% dari panjang ruas jalan nasional sepanjang 1.292,25 km. Perbandingan kondisi jalan nasional di Provinsi Lampung kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II - 59 Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Lampung, 2020

Tahun	Panjang Ruas Nasional (km)	Kondisi			
		Mantap		Tidak Mantap	
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
		Km	Km	Km	Km
2020	1,292.25	401.83	791.97	54.38	48.43
% Mantap		92.07			
% Tidak Mantap				7.93	

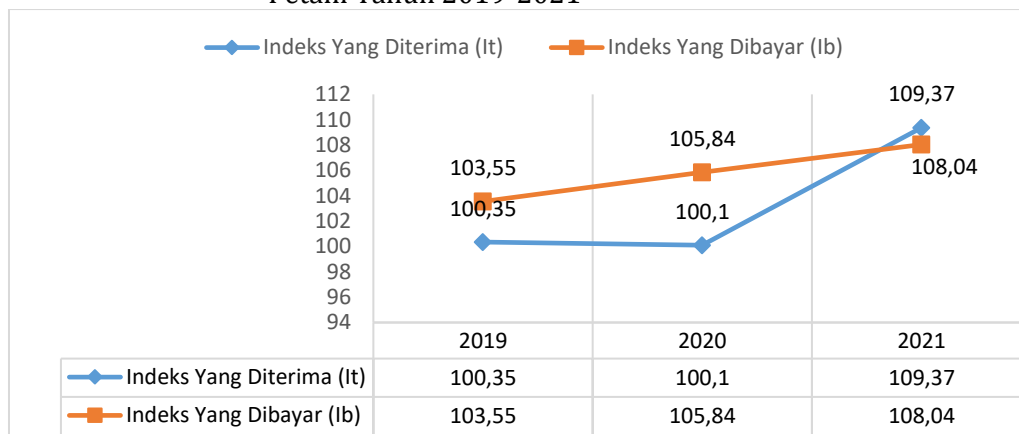
Sumber: BPJN Lampung 2020

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP dihitung dari rasio Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB). Penghitungan IB mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani termasuk bahan makanan, sekolah, berobat, membeli sandang, papan, biaya produksi dan lainnya. NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2021 sebesar 101,23. Hal ini dapat terlihat dari Indeks Yang Diterima (109,37) melebihi Indeks Yang Dibayar Petani (108,04). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan NTP pada Tahun 2021, daya beli petani di Provinsi Lampung semakin kuat yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan petani.

Grafik II - 54 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2021

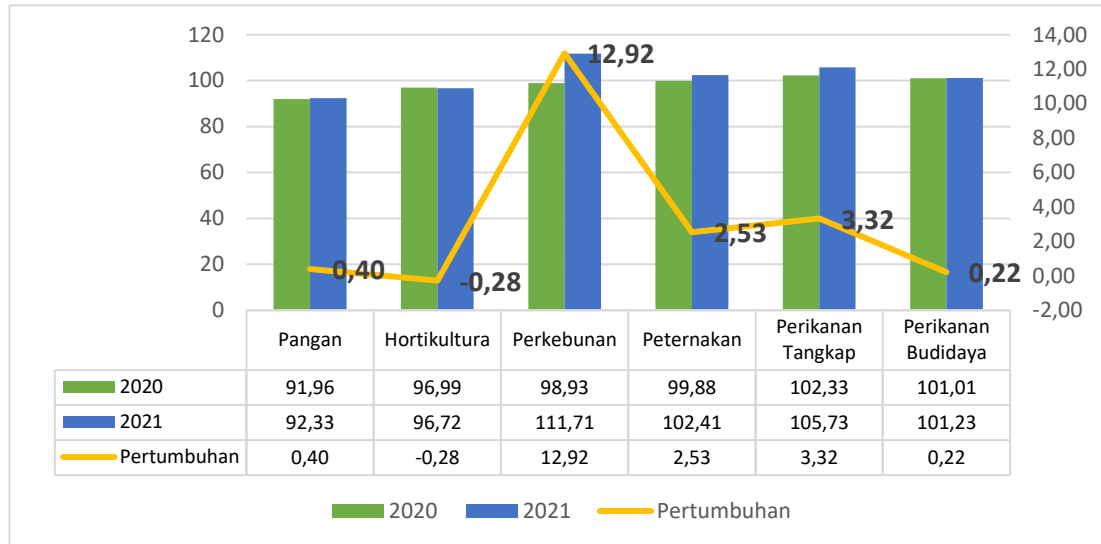


Sumber: BPS, Provinsi Lampung, 2022

Kemudian secara sektoral, pertumbuhan NTP terbesar terjadi pada subsektor perkebunan sebesar 12,92% (yoy) dari 98,93 (Tahun 2020) menjadi 111,71 (Tahun 2021). Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan terbesar adalah hortikultura yaitu sebesar -0,28% (yoy) sejalan dengan konsumsi masyarakat yang masih rendah diiringi dengan distribusi hasil panen yang kurang optimal sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dan

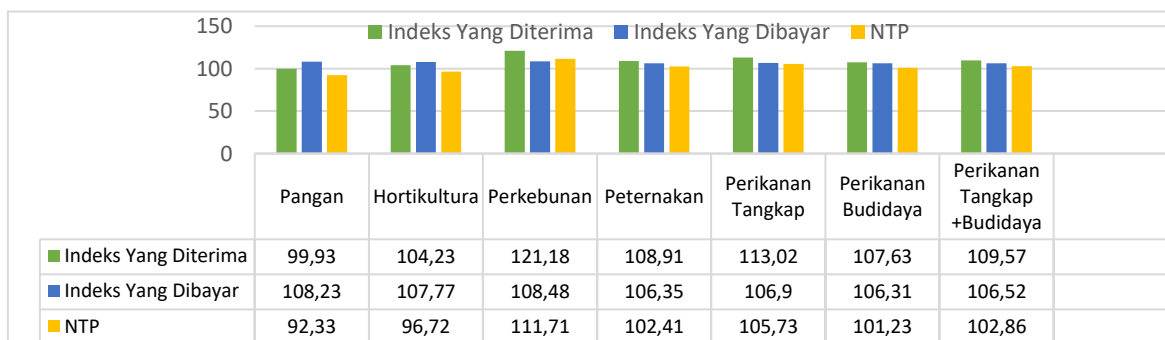
pembatasan mobilitas, faktor cuaca serta harga produk hortikultura yang fluktuatif.

Grafik II - 55 Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2020-2021



Selain sub sektor perkebunan, NTP sub sektor Perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peternakan juga memiliki nilai yang cukup baik sedangkan NTP dari Padi dan Palawija menyumbang NTP terkecil yaitu sebesar 92,33.

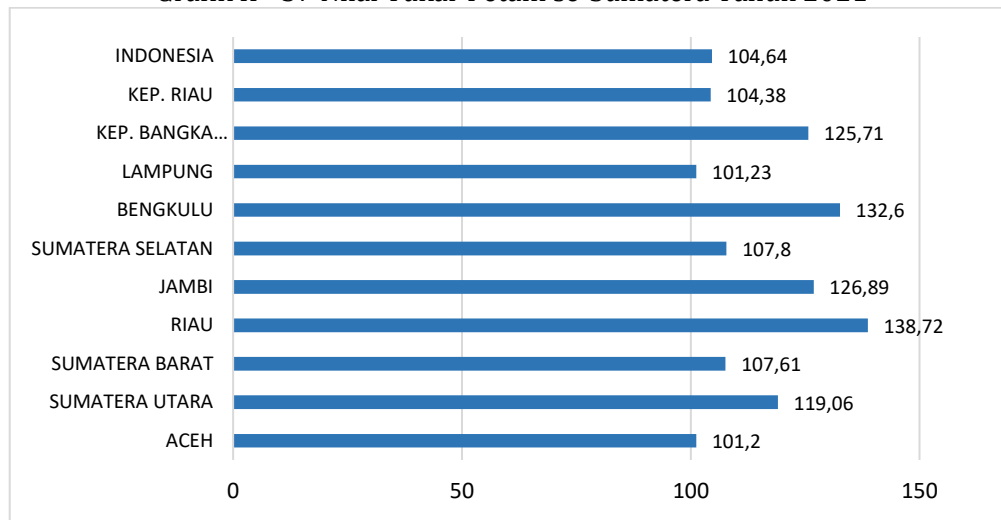
Grafik II - 56 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2021



Secara spasial, bila dibandingkan dengan wilayah regional Sumatera, NTP Provinsi Lampung berada di posisi terendah kedua. NTP tertinggi dimiliki oleh Provinsi Riau dengan NTP sebesar 138,72 dan Provinsi Bengkulu (132,6) diikuti dengan Provinsi Jambi (126,89). Nilai Tukar Petani wilayah Sumatera

ditampilkan pada Grafik II-16.

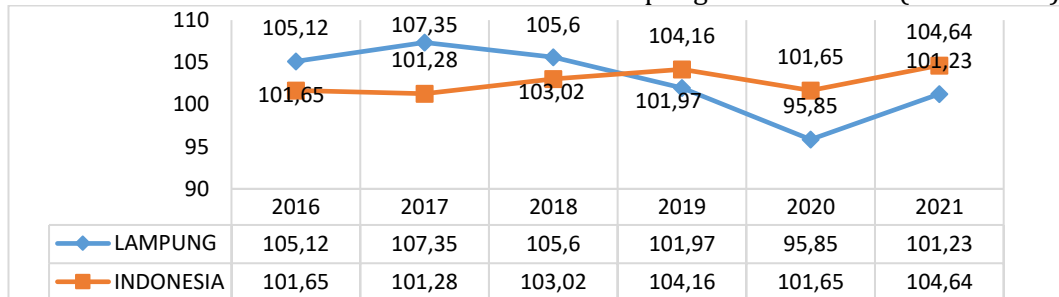
Grafik II - 57 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2021



Sumber: BPS 2022

Bila dibandingkan secara Nasional, NTP Provinsi Lampung dari tahun 2016 sampai tahun 2018 selalu berada diatas NTP Nasional, bahkan pada Tahun 2017, NTP Provinsi Lampung mencapai 107,35. Namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan dan berada dibawah Nasional sampai dengan Tahun 2021, dan mulai mengalami peningkatan dengan NTP senilai 101,23.

Grafik II - 58 Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia (2016-2021)



Sumber: BPS 2022

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2021 Provinsi Lampung

2.2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, terdapat 20 Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama. Terjadi penyederhanaan terhadap indikator sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Lampung dari 33 indikator menjadi hanya 20 indikator. Penyederhanaan indikator ini bertujuan untuk mempermudah penilaian terhadap pencapaian keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung melalui target kinerja setiap tahunnya. Penyederhanaan dilakukan dengan menggabungkan/menyatukan beberapa indikator yang dinilai sempit dan menggantinya dengan indikator yang lebih luas. Sedangkan indikator sasaran yang digabungkan, dipindahkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD tahun 2021 di evaluasi terhadap realisasi dan kinerja yang dilakukan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II - 60 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021			OPD PENGAMPU
					Target	Realisasi	Kinerja (%)	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	69	73,1	73,3	72,44	98,83	Biro Kesra / RSJ
2	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	72	72,79	73	72,79	99,71	Kesbangpol
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	-	54,3	54,8	55,38	101,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	B (60-70)	CC (58,38)	97,3	Biro Perekonomian/Biro OTDA/Biro Umum/Badan Penghubung/Biro organisasi/ biro adbang/Inspektorat/Bappeda/Disdukcapil/BKD/BPSDM/ Dinas

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021			OPD PENGAMPU
					Tar get	Realisasi	Kinerja (%)	
								Perpustakaan dan Arsip /Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
5	Angka Harapan Hidup (AHH)	Indeks	B	70,65	70,8	70,73	99,90	Dinas Kesehatan/RSJ/RSUAM, Dinas PPPA
6	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	72,1	12,65	12,66	12,73	101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	12,64	8,05	8,10	8,08	99,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Indeks	7,8	4,67	4-4,5	4,69	95,78	Dinas Tenaga Kerja
9	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	-	65,07	67,66	-	-	Dinas PPPA, Dinsos, Kesehatan, Dinas Pendidikan
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Persen	64,24	69,06	69,10	67,96	98,35	Dinas PPPA
11	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	-	70,69	74	75,386	101,87	Dinas BMBK/Dinas Perhubungan
12	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	-	90,21	91,20	91,22	100,02	Dinas PKPCK
13	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	Persen	94	96,5	96	99,94	104,1	Dinas ESDM
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-	-1,67	2,5-3,5	2,79	111,6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian/Dinas KPTPH/Dinas Perikanan/Dinas Perternakan & Kesehatan Hewan/Dinas Kehutanan /Dinas Perkebunan.
15	Nilai Tukar Petani	Indeks	106,98	94,73	101-102	101,23	100,23	Dinas KPTPH, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan,
16	Laju Inflasi	Persen	3,0 - 3,5	2	3±1	2,19	127	Dinas KPTPH, Dinas Perdagangan .
17	Angka Kemiskinan	Persen	11,1	12,76	12,76-12,4	11,67	108,54	Dinas KPTPH, Dinas Sosial, Dinas PMDT.
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,63	66,95	68,23	68,56	100,48	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, DKP.
19	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	-	6,86	6,74	6,74	100	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, sektor lahan (dinas KPTPH), sektor energi(ESDM DINAS PERHUBUNGAN , DINAS PERINDUSTRIAN), sektor limbah (PKPCK).

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021			OPD PENGAMPU
					Target	Realisasi	Kinerja (%)	
20	Indeks Resiko Bencana	Indeks	144,7	146,78	142,9	145,42	98,24	BPBD, Dinkes, Dinsos, BMBK, PSDA, PKPCK.

Pencapaian kinerja Indikator kinerja Utama pada tahun 2021, rata-rata telah mencapai di atas 91% dengan kriteria sangat tinggi. Walaupun begitu, masih terdapat 8 indikator yang belum mencapai target yang diinginkan, yaitu: Indeks Kerukunan Beragama, Indeks Demokrasi Indonesia, Nilai Reformasi Birokrasi, Angka harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Resiko Bencana (IRB)

2.2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penyajian indikator indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Capaian Indikator Kinerja Daerah tahun 2021 di evaluasi terhadap realisasi dan kinerja yang dilakukan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II - 61 Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Tahun 2021

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	B	CC*	97,3	Sangat Tinggi	Biro Organisasi

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Nilai SAKIP (TPB)	Predikat	B	B*	100	Sangat Tinggi	Biro Organisasi
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor/nilai	82	82	100,00	Sangat Tinggi	Biro Organisasi
4	Nilai SKM untuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Skor/nilai	3,1	3,1	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
5	Nilai SKM untuk Fasilitasi Pelayanan Penataan produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta pembinaan dan pengawasan produk hukum	Skor/nilai	3,1	3,1	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
6	Nilai SKM untuk Pelayanan Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Kerumahtangaan di Sekretariat Daerah	Skor/nilai	3,1	3,1	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
7	Nilai SKM Pelayanan Kepada Pimpinan	Skor/nilai	3,1	3,1	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
8	Persentase OPD yang nilai Hasil evaluasi Kinerjanya B	persen	68	68	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
9	Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	persen	97,33	75,11	77,17	Tinggi	Biro Kesejahteraan Rakyat
10	Prosentase Bahan Kebijakan umum pembinaan, Pemahaman, Pengamalan keagamaan dan Lembaga Keagamaan	Persen	88,5	88,5	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
11	Persentase Pelayanan Kerumahtangaan yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	90	99,23	110,26	Sangat Tinggi	Biro Umum
12	Persentase Pelayanan Ketatausahaan Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pimpinan yang dilaksanakan	Persen	90	98,27	109,19	Sangat Tinggi	Biro Umum
13	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah yang Dilakukan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persen	90	98,3	109,22	Sangat Tinggi	Biro Umum

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Skor LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Nilai (skor)	Tinggi	Tinggi	100	Sangat Tinggi	Biro Pem Otda
15	Persentase Perangkat Daerah yang evaluasi kinerja anggarannya baik	persen	75,00	91,6	122,13	Sangat Tinggi	Biro Adbang
16	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan	%	91	102,2	112,31	Sangat Tinggi	Biro PBJ
17	Persentase pelayanan keprotokolan	%	91	91	100,00	Sangat Tinggi	Biro Administrasi Pimpinan
18	Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah dalam peningkatan kualitas Kinerja OPD	persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Biro Perekonomian
19	% Tingkat kepuasan masyarakat Lampung terhadap pelayanan Badan Penghubung	persen	75	78	104,00	Sangat Tinggi	Badan Penghubung
20	Persentase perumusan kebijakan umum, koordinasi, supervisi, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian	persen	85	85	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
1	Pendidikan						
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/Sederajat	Angka	94,83	87,59	92,37	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat	Angka	66,24	63,55	95,94	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan						
2.1	Prevalensi stunting	persen	23,08	18,5	124,76	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
2.2	Jumlah Kasus Kematian Ibu	kasus	170	187	90,91	Tinggi	Dinas Kesehatan
2.3	Jumlah Kasus Kematian Bayi	kasus	590	489	120,65	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
2.4	Angka Keberhasilan pengobatan TB paru (success rate)	persen	90	94	104,44	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
2.5	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa	Orang	733	667	91,00	Sangat Tinggi	Rumah Sakit Jiwa Daerah

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Daerah Provinsi Lampung						
2.6	Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	Akreditasi Tingkat Utama	Akreditasi Tingkat Dasar	46,67	Sangat Rendah	Rumah Sakit Jiwa Daerah
2.7	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	Persen	80	75	93,75	Sangat Tinggi	Rumah Sakit Jiwa Daerah
2.8	Akreditasi rumah sakit		Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 85%	Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 85%	100,00	Sangat Tinggi	RSUAM
2.9	Nilai SPM	persen	83%	83%	100,00	Sangat Tinggi	RSUAM
2.10	Tingkat Layanan Sub Spesialis	persen	70%	70%	100,00	Sangat Tinggi	RSUAM
2.11	Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan	persen	82%	82%	100,00	Sangat Tinggi	RSUAM
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	persen	74	75	101,35	Sangat Tinggi	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
3.2	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi kewenangan provinsi dengan IP>2	persen	40	40	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
4.1	Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaatan ruang thp rencana tata ruang	Persen	83	100	120,48	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
4.2	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	Persen	82,03	82,27	100,29	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
4.3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	Persen	77,47	77,49	100,02	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.4	Persentase Jumlah Kawasan kumuh Provinsi yang tertangani	Persen	70,61	71,11	100,70	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
4.5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	persen	96,87	100	103,23	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan	Persen	65	65	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP
5.2	Persentase Penanganan tindak/kasus kriminalitas yang terselesaikan	Persen	65	65	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP
5.3	Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Nilai	5,45	4,8	88,07	Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.4	Persentase Peningkatan Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Wilayah	persen	45	100	222,22	Sangat Tinggi	Biro Pem Otda
5.5	Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	persen	100	97,75	97,75	Sangat Tinggi	Biro Pem Otda
5.6	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Persen	80	100	125,00	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.7	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	persen	72,25	74,09	102,55	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Sosial						
6.1	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persen	1,7	1,7	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
6.2	Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan	Persen	20	20	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)						
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	Tenaga Kerja						
1.1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Persen	96,24	95,31	99,03	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
1.2	Persentase tenaga kerja di perusahaan yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan	Persen	82	80,97	98,74	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persen	2,82	4,59	162,77	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2	Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung	Persen	86,67	86,67	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pangan						
3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77	78,25	101,62	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH
3.2	Stabilisasi harga pangan	Koefisien	$cv \leq 5\%$	1,27	393,70	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH
3.3	Persentase (%) penurunan daerah rawan pangan	persen	1,00	2,63	263,00	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH
3.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (TPB)	Persen	86	85,3	99,19	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH
3.5	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	persen	98,5	100	101,52	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Lingkungan Hidup						
4.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	58,34	57,77	99,02	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
4.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,24	85,46	101,45	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
4.3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	72,71	79,56	109,42	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
4.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	38,67	33,54	86,73	Tinggi	Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup
4.5	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	Persen	7,71	15,23	197,54	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
4.6	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Persen	87	94,32	108,41	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
5.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	77	103,31	134,17	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5.2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	48	53	110,42	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
6.1	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village	Persen	16,58	16,58	100,00	Sangat Tinggi	Dinas PMDT

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	Persentase Desa Mandiri	Persen	3,33	3,33	100,00	Sangat Tinggi	Dinas PMDT
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
7.1	Cakupan KB Aktif	Persen	66,88	74,52	111,42	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Perhubungan						
8.1	Rasio Konektivitas Angkutan Sesuai Kewenangan Provinsi	Rasio	0,69	0,68	98,55	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
8.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	83	72,62	87,49	Tinggi	Dinas Perhubungan
8.3	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Persen	30	29	96,67	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
9	Komunikasi dan Informatika						
9.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,9 (Baik)	2,76	95,17	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
9.2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	57 (cukup informatif)	87,98	154,35	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
9.3	Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kualifikasi	Cukup Informatif	Cukup Informatif	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
9.4	Skoring LPPD Provinsi din Tingkat Nasional	Skor	Tinggi	Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
9.5	Persentase peliputan dan rilis kegiatan pimpinan daerah	persen	90	90	100,00	Sangat Tinggi	Biro Administrasi Pimpinan
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	persen	2,16	2,28	105,56	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM
10.2	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	persen	33,54	35,17	104,86	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM
11	Penanaman Modal						
11.1	Realisasi investasi	Trilyun	11 Trilyun	13,05	118,64	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Kepemudaan dan Olahraga						
12.1	Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-event Nasional	Persen	35	50	142,86	Sangat Tinggi	Dinas Pemuda dan Olahraga
12.2	Persentase Peran Serta Pemuda Berprestasi	Persen	51,16	73,08	142,85	Sangat Tinggi	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	Statistik						
13.1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor yang Update	persen	80	80	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
14	Persandian						
14.1	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan sertifikat elektronik dan terintegrasi dengan BSSN	Persen	4	4	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
15	Kebudayaan						
15.1	Persentase Warisan Seni dan budaya yang tersertifikasi nasional	persen	68,75	67,5	98,18	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Perpustakaan						
16.1	Persentase pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan	Persen	30	142	473,33	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	Kearsipan						
17.1	Persentase Arsip yang difilekan berbasis TIK	Persen	25	50	200,00	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
							an dan Kearsipan
	LAYANAN URUSAN PILIHAN						
1	Pariwisata						
1.1	Presentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	32,5	8,9	27,38	Sangat Rendah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.2	Presentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	Persen	32,5	9,7	29,85	Sangat Rendah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.3	Presentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	Persen	32,5	4,8	14,77	Sangat Rendah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.4	Nilai sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) dalam PDRB Provinsi Lampung	Nilai	3,25	2,16	66,46	Sedang	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Pertanian						
2.1	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Ubi Kayu)	persen	100	99,48	99,48	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH
2.2	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai Besar, Bawang Merah, Nenas, Pisang dan Manggis)	Persen	100	91,3	91,30	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH
2.3	Jumlah produksi lada rakyat	TON	15.235	15.412	101,16	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan
2.4	Jumlah produksi kopi robusta rakyat	TON	116.039	117.311	101,10	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan
2.5	Jumlah produksi tebu rakyat	TON	186.804	148.549	79,52	Tinggi	Dinas Perkebunan
2.6	Jumlah produksi Karet rakyat	TON	162.272	192.601	118,69	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan
2.7	Jumlah produksi kakao rakyat	TON	60.345	57.507	95,30	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8	Jumlah produksi kelapa sawit rakyat	TON	197.004	197.639	100,32	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan
2.9	Jumlah produksi kelapa dalam rakyat	TON	84.951	81.475	95,91	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan
2.10	Jumlah Populasi Ternak	Potong					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	-Sapi Potong		832.677	860.951	103,40	Sangat Tinggi	
	- Ayam Pedaging		84.599.700	94.254.495	111,41	Sangat Tinggi	
	- Ayam Petelur		9.455.209	13.230.147	139,92	Sangat Tinggi	
2.11	Jumlah Produksi Daging (Ayam dan Sapi)	potong	108.286	108.286	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.12	Jumlah Produksi Telur	Telur	169.474	195.204	115,18	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Kehutanan						
3.1	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dipulihkan Baik dengan Mekanisme Alam, Rehabilitasi maupun Restorasi	persen	2,55	2,63	103,14	Sangat Tinggi	Dinas Kehutanan
4	Energi dan Sumber Daya Mineral						
4.1	Rasio Dusun Berlistrik	Rasio	52	52,96	101,85	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Perdagangan						
5.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	5	4,57	91,40	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.2	Nilai Ekspor Non Migas	Nilai	3,33	4,83	145,05	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.3	Andil Inflasi Bahan Makanan	Persen	≤1,5	1,1	136,36	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Perindustrian						

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	5,3	8,26	155,85	Sangat Tinggi	Dinas Perindustri dan Perdagangan
7	Kelautan dan Perikanan						
7.1	Prosentase Produksi Perikanan	Persen	100	90	90,00	Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
7.2	Prosentase Ekspor Perikanan	Persen	100	84,7	84,70	Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PENUNJANG URUSAN						
1	Keuangan						
1.1	Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Opini	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaa n Keuangan Asset Daerah
1.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	12,66	14,86	117,38	Sangat Tinggi	Badan Pendapatana Daerah
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan	Persen	84	85,02	101,21	Sangat Tinggi	Badan Pendapatana Daerah
2	Pengawasan						
2.1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	Level (Skor)	3 (3,01)	3	100	Sangat Tinggi	INSPEKTO RAT
2.2	Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	Persen	82%	96	117,07	Sangat Tinggi	INSPEKTO RAT
2.3	Persentase Peraturan daerah (Perda) yang ditetapkkn.	Persen	60	58,3	97,17	Sangat Tinggi	INSPEKTO RAT
2.4	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	INSPEKTO RAT
2.5	Presentase Bantuan Hukum yang di fasilitasi	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	INSPEKTO RAT
2.6	Level Kematangan/Maturitas as PBJ	Level	3	3		Sangat Tinggi	INSPEKTO RAT

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana)	Persen	80	80	100	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
3	Perencanaan Pembangunan						
3.1	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Sangat Tinggi	BAPPEDA
3.2	Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	Persen	30%	23,92	79,73	Tinggi	BAPPEDA
3.3	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	Persen	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	BAPPEDA
3.4	Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	Persen	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	BAPPEDA
3.5	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	Persen	85%	85%	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
4	Penelitian dan Pengembangan					Sangat Tinggi	
4.1	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di desiminasikan	Persen	80	80	100	Sangat Tinggi	Badan Penelitian dan Pengembangan
4.2	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
5.1	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi	Persen	65	64,56	99,32	Sangat Tinggi	BKD
5.2	Persentase Peningkatan Kualitas	Persen	58	50	86,20	Tinggi	BKD

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021				PD
			TARGET	CAPAIAN	% KINERJA	KRITERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik						
5.3	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	Persen	25,34	25,34	92,71	Sangat Tinggi	BPSDM
5.4	Nilai Akreditasi Penyelenggaraan Diklat	Nilai	B	B	100	Sangat Tinggi	BPSDM
	ASPEK DAYA SAING						
1	Fokus Iklim Berinvestasi						
1.1	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai	84	82,94	98,73	Sangat Tinggi	Biro Organisasi
1.2	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	10,8 trilyun	13,05 trilyun	120,8	Sangat Tinggi	DPMPSTP

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung pada aspek Kesejahteraan Masyarakat tahun 2021 berada di atas $91 \leq 100\%$ (sangat tinggi) hanya 1 (satu) indikator dengan kriteria tinggi yaitu $76\% \leq 90\%$. Indikator yang berkriteria tinggi adalah indikator Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan dari Biro Kesejahteraan Rakyat dengan capaian kinerja 77,17%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 terjadi refocusing terhadap anggaran kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan sehingga target kegiatan yang ditetapkan tidak tercapai.

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung pada aspek Pelayanan Umum pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar tahun 2021 berada di atas $91 \leq 100\%$ (sangat tinggi) dan hanya 2 (dua) indikator dengan kriteria capaian tinggi $76\% \leq 90\%$, yaitu indikator Jumlah Kasus Kematian Ibu dan indikator Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana serta 1 indikator dengan kriteria capaian sangat rendah $\leq 50\%$ yaitu indikator Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit.

Indikator Jumlah Kasus Kematian Ibu tidak tercapai dikarenakan peningkatan jumlah kasus kematian ibu yang mencapai 187 orang, disebabkan karena Covid-19 sebanyak 82 ibu hamil (47%) meninggal, meninggal karena perdarahan sebanyak 39 ibu hamil (22%), dan meninggal karena hipertensi dalam kehamilan sebanyak 37 ibu hamil (15%).

Indikator Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana tidak tercapai karena beberapa hal, diantaranya:

- Refocusing Anggaran baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota untuk Penanganan Covid-19
- Dalam proses pengumpulan data yang dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2021, hanya 5 Kabupaten/Kota diantaranya: Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pringsewu, dari 15 Kabupaten/Kota yang mengirimkan data
- Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berpengaruh pada proses Pengumpulan dan Verifikasi data Indeks Kapasitas Daerah di Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pengumpulan dan Verifikasi Indeks Kapasitas Daerah belum di Anggarkan secara Khusus di Provinsi, maupun di Kabupaten/Kota.

Indikator Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit tidak tercapai dengan kriteria sangat rendah (46,67%) dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan RI nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit yang ditetapkan pada Tanggal 16 Juli 2020, maka penilaian akreditasi di RSJD Provinsi Lampung tidak dapat dilaksanakan sehingga capaian yang ditetapkan untuk tahun 2021 ini sama seperti tahun lalu yaitu Akreditasi Tingkat Dasar.

Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tahun 2021 rata-rata diatas $91 \leq 100\%$ (sangat tinggi) hanya pada beberapa indicator seperti Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi yang capaiannya diatas $96 \leq 90\%$ (tinggi).

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan Kanal akan mengurangi luas tutupan lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan. Memperhatikan hal tersebut, maka variabel data dalam IKEG merupakan aktor koreksi dalam menghitung nilai IKL. Faktor koreksi tersebut selanjutnya disebut berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Lampung.

Tahun 2021 didominasi berada dibawah target dan hanya terdapat 3 kabupaten/kota yang mencapai target yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Timur. Capaian indeks kualitas lahan berada di bawah target diduga karena pembukaan hutan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, industri yang berakibat pada pengurangan tutupan hutan yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu kegiatan dan program perhutanan sosial, agroforestry dan rehabilitasi lahan hutan yang dapat membantu memperbaiki kualitas lingkungan di Provinsi Lampung.

Capaian Urusan Pilihan tahun 2021 rata-rata sangat tinggi hanya pada urusan Pariwisata capaiannya sangat rendah dan sedang dikarenakan pada Tahun 2021 masih adanya pandemi CORONA (COVID-19) yang berimbas terbesar pada sektor jasa khususnya di pariwisata dengan adanya pembatasan kerumunan, pembatasan penerbangan serta event-event pariwisata yang tidak dilaksanakan. Saat ini telah dilaksanakan Sosialisasi kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota dan *Stakeholder* mengenai Keputusan Menteri Kesehatan No.H.K.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat, tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 sehingga dapat menerapkan SOP Protokol kesehatan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di usahanya masing-masing.

Capaian indikator urusan penunjang pemerintahan hampir seluruhnya masuk dalam kriteria sangat tinggi. Hanya 2 (dua) indikator yang masuk kategori tinggi (76%-90%), yaitu Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dan indikator Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik. Hal ini disebabkan karena anggaran yang tidak mencukupi.

Capaian Penunjang Urusan, secara keseluruhan untuk realisasi capaian Tahun 2021, sebagian besar memiliki nilai sangat tinggi. Nilai sangat tinggi dicapai oleh semua IKD yaitu IKU Renstra masing-masing Perangkat Daerah yaitu: BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Bappeda, Balitbangda dan BPSDM. Dari 2 IKU Renstra BKD yaitu "Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi" juga bernilai Sangat Tinggi, hanya satu indikator yaitu "Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik" yang bernilai tinggi dengan nilai capaian 86,20%. Pada akhirnya, seluruh Perangkat Daerah pengampu Penunjang Urusan telah berhasil merealisasikan Target IKU Perangkat Daerah yang pada akhirnya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pembiayaan pemerintah, dan neraca perdagangan. Melambatnya perekonomian akibat pandemic covid serta melemahnya neraca perdagangan, menjadikan investasi sebagai komponen penting untuk mendukung perekonomian. Peran investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja, mengubah ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi berbasis produksi, meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak, mendorong pemerataan ekonomi, serta mendorong kemudahan berusaha. Nilai Realisasi Investasi di Provinsi Lampung pada Tahun 2021 realisasi sebesar 13,05 Trilyun melebihi dari target sebesar 10,8 Trilyun sehingga capaian Tahun 2021 sebesar 120,80%.

2.2.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Provinsi Lampung Tahun 2021, diperoleh rekapitulasi data capaian kinerja pelaksanaan Renja PD sebagai berikut :

Tabel II - 62 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2021 Provinsi Lampung

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA SMK dan SLB yang Berakreditasi minimal B	75	2.424.935.771.038	69	544.251.271.000	69	425.376.121.837	100,0	78,2	69	425.376.121.837	92,0	17,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	01.01.04	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Persentase jumlah guru honor murni yang menerima insentif jenjang pendidikan menengah dan khusus	66	47.479.476.400	60	12.439.800.000	60	12.365.900.000	100,0	99,4	60	12.365.900.000	90,9	26,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	02.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya	92	8.275.998.000	40	2.195.000.000	40	1.952.682.498	100,0	89,0	40	1.952.682.498	43,5	23,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	02.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase warisan budaya tak benda yang difilemkan (dokumenter)	77	4.516.608.000	37	1.000.000.000	37	999.305.000	100,0	99,9	37	999.305.000	47,5	22,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13					
5	02.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Warisan Seni Dan Budaya Yang Tersertifikasi Nasional	80	1.020.321.600	69	200.000.000	69	168.239.000	100,0	84,1	69	168.239.000	85,9	16,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	02.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	57	13.253.374.000	15	3.325.000.000	15	3.253.938.400	100,0	97,9	15	3.253.938.400	25,7	24,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7	01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase terlaksananya program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	32.952.017.817	100	3.856.680.603	95	3.375.509.950	95,5	87,5	95	3.375.509.950	95,5	10,2	Rumah Sakit Jiwa	
8	01.02.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Dya Manusia	100	1.439.846.600	100	72.074.000	95	38.580.900	95,3	53,5	95	38.580.900	95,3	2,7	Rumah Sakit Jiwa	
9	01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevelansi Wasting	4,51	33.780.244.000	8	2.805.784.650	8	2.534.040.942	100,0	90,3	8	2.534.040.942	77,2	7,5	Dinas Kesehatan	
10	01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga	47	52.661.231.946	33	40.621.231.946	33	23.695.290.163	100,0	58,3	33	23.695.290.163	70,2	45,0	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Manusia Kesehatan	Kesehatan Sesuai Standar														
11	01.02.04	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi Alkes dan Makanan Minuman	100	1.401.000.000	90	150.000.000	90	135.424.868	100,0	90,3	90	135.424.868	90,0	9,7	Dinas Kesehatan	
12	01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kenijakan Gemas	75	2.092.130.491	48	419.429.491	48	325.017.700	100,0	77,5	48	325.017.700	64,0	15,5	Dinas Kesehatan	
13	01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Telaksananya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	100	295.571.104.786	100	66.695.043.946	35	17.956.429.266	35,2	26,9	35	17.956.429.266	35,2	6,1	Rumah Sakit Abdul Moeloek	
14	01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM	100	2.377.602.500	100	492.303.000	44	150.000.000	44,4	30,5	44	150.000.000	44,4	6,3	Rumah Sakit Abdul Moeloek	
15	02.11.02	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	510.690.600	100	3.288.000	100	3.288.000	100,0	100,0	100	3.288.000	100,0	0,6	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13					
16	02.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100	4.463.082.800	100	3.379.984.000	100	3.330.032.424	100,0	98,5	100	3.330.032.424	100,0	74,6	Dinas Lingkungan Hidup	
17	02.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Regional	100	1.495.474.900	100	81.526.000	100	5.400.000	100,0	6,6	100	5.400.000	100,0	0,4	Dinas Lingkungan Hidup	
18	02.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase sanksi terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan Lingkungan Hidup	100	1.655.449.400	100	78.046.000	100	71.690.800	100,0	91,9	100	71.690.800	100,0	4,3	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x100%	12	13					
19	02.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal	100	319.364.000	100	16.276.000	100	15.876.000	100,0	97,5	100	15.876.000	100,0	5,0	Dinas Lingkungan Hidup	
20	02.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	724.964.000	100	40.830.600	100	40.830.600	100,0	100,0	100	40.830.600	100,0	5,6	Dinas Lingkungan Hidup	
21	02.11.10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Ketersediaan Informasi Perencanaan Lingkungan Hidup	100	2.531.426.000	100	297.188.000	100	152.232.000	100,0	51,2	100	152.232.000	100,0	6,0	Dinas Lingkungan Hidup	
22	02.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Regional	100	4.075.094.800	100	408.747.000	100	386.728.000	100,0	94,6	100	386.728.000	100,0	9,5	Dinas Lingkungan Hidup	
23	01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	78	925.197.681.601	78	409.265.036.872	100	371.649.255.951	128,2	90,8	100	371.649.255.951	128,2	40,2	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
24	01.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Target Orang yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	100	8.101.965.200	41	1.379.491.500	27	900.675.600	65,3	65,3	27	900.675.600	27,0	11,1	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				100		100		100		9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13			
25	01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi dan infrastruktur SDA lainnya yang terlayani pada wilayah kewenangan provinsi	100	141.177.307.966	100	112.176.229.874	100	96.054.977.997	100,0	85,6	100	96.054.977.997	100,0	68,0	Dinas Pengelolaan SDA	
26	01.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Minum	Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang ada	100	15.405.000.000	100	500.000.000	100	471.488.000	100,0	94,3	100	471.488.000	100,0	3,1	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
27	01.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penanganan cakupan rumah tangga bersanitasi layak	100	4.300.000.000	100	1.730.394.000	100	2.435.492.700	100,0	140,7	100	2.435.492.700	100,0	56,6	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
28	01.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		100	1.900.000.000	100	100.000.000	100	99.723.000	100,0	99,7	100	99.723.000	100,0	5,2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
29	01.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	100	38.698.592.000	100	8.471.192.000	100	11.518.122.223	100,0	136,0	100	11.518.122.223	100,0	29,8	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x100%	12	13					
30	01.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	100	217.247.483.548	100	58.459.430.100	100	55.405.465.381	100,0	94,8	100	55.405.465.381	100,0	25,5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
31	01.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	100	11.722.351.190	100	2.528.969.900	67	2.363.487.898	66,7	93,5	67	2.363.487.898	66,7	20,2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
32	01.03.12	Program Penyelenggara an Penataan Ruang	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100	11.400.000.000	100	1.207.035.618	100	1.060.967.435	100,0	87,9	100	1.060.967.435	100,0	9,3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
33	01.04.02	Program Pengembang an Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	6.400.000.000	100	2.742.116.200	100	1.250.413.200	100,0	45,6	100	1.250.413.200	100,0	19,5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
34	01.04.03	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan tertangani	100	49.600.000.000	100	6.010.731.800	100	5.815.262.155	100,0	96,7	100	5.815.262.155	100,0	11,7	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
35	01.04.05	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan	Persentase PSU dibangun di kawasan permukiman sesuai kebutuhan	100	151.471.294.337	100	17.139.018.000	100	24.671.525.357	100,0	143,9	100	24.671.525.357	100,0	16,3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
		Utilitas Umum (Psu)														dan Cipta Karya	
36	2.10.06	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA	100	2.950.000.000	100	231.542.280	100	152.627.400	100,0	65,9	100	152.627.400	100,0	5,2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
37	01.05.03	Program Penanggulan an Bencana	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100	57.697.048.072	100	19.638.147.500	98	23.219.010.979	97,9	118,2	98	23.219.010.979	97,9	40,2	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	
38	01.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100	17.673.506.200	100	4.634.115.400	88	5.083.082.799	87,5	109,7	88	5.083.082.799	87,5	28,8	Satpol PP	
39	01.06.02	Program Pemberdayaa n Sosial	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	100	2.656.132.021	100	368.965.400	50	314.734.300	50,0	85,3	50	314.734.300	50,0	11,8	Dinas Sosial	
40	01.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	100	1.057.115.716	100	208.200.000	100	204.035.531	100,0	98,0	100	204.035.531	100,0	19,3	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x100%	12	13					
41	01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100	40.392.484.112	100	7.614.433.960	98	7.446.574.902	97,5	97,8	98	7.446.574.902	97,5	18,4	Dinas Sosial	
42	01.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100	2.096.285.072	100	540.800.000	100	539.554.300	100,0	99,8	100	539.554.300	100,0	25,7	Dinas Sosial	
43	01.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100	3.134.017.599	100	645.752.000	100	608.516.000	100,0	94,2	100	608.516.000	100,0	19,4	Dinas Sosial	
44	01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	100	1.577.058.756	100	404.040.000	100	368.487.700	100,0	91,2	100	368.487.700	100,0	23,4	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13						
45	02.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Akirasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	86	737.000.000	80	50.000.000	80	49.590.000	100,0	99,2	80	49.590.000	93,0	6,7	Dinas Tenaga Kerja	
46	02.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas bersertifikat	100	15.395.200.000	100	1.760.551.750	100	1.655.393.050	100,0	94,0	100	1.655.393.050	100,0	10,8	Dinas Tenaga Kerja	
47	02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja yang Mendapat Layanan Penempatan	75	4.875.302.600	60	525.000.000	60	413.111.475	100,0	78,7	60	413.111.475	80,0	8,5	Dinas Tenaga Kerja	
48	02.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Pemisahan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	100	3.085.000.000	100	384.640.000	100	362.687.000	100,0	94,3	100	362.687.000	100,0	11,8	Dinas Tenaga Kerja	
49	02.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerjaa dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan	100	3.325.000.000	100	519.592.250	100	340.902.850	100,0	65,6	100	340.902.850	100,0	10,3	Dinas Tenaga Kerja	
50	02.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	100	2.014.345.000	100	388.145.000	93	388.139.000	93,3	100,0	93	388.139.000	93,3	19,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Pemberdayaan Perempuan														Perlindungan Anak	
51	02.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100	5.346.298.000	100	1.273.390.950	33	1.176.392.367	32,7	92,4	33	1.176.392.367	32,7	22,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
52	02.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kab/Kota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga	100	2.369.934.400	100	416.100.400	100	573.348.236	100,0	137,8	100	573.348.236	100,0	24,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
53	02.08.05	Pengelolaan Program Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date	100	2.177.093.200	100	359.027.200	100	357.725.450	100,0	99,6	100	357.725.450	100,0	16,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
54	02.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	100	2.924.532.000	100	494.532.000	100	489.509.100	100,0	99,0	100	489.509.100	100,0	16,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
55	02.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100	768.598.000	100	111.098.000	100	111.098.000	100,0	100,0	100	111.098.000	100,0	14,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				8	488.652.000	8	48.652.000	8	52.593.500	100,0	108,1	8	52.593.500	107,9	10,8		
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
56	02.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmmet Need)	8	488.652.000	8	48.652.000	8	52.593.500	100,0	108,1	8	52.593.500	107,9	10,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
57	02.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pembinaan Keluarga Berencana	100	416.302.000	100	61.302.000	100	58.302.000	100,0	95,1	100	58.302.000	100,0	14,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
58	02.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100	1.066.086.000	47	176.086.000	47	169.406.000	100,6	96,2	47	169.406.000	47,0	15,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
59	02.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Stabilisasi Harga Pangan (koefisien)	10	1.322.508.000	10	131.451.000	10	129.988.800	100,0	98,9	10	129.988.800	100,0	9,8	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
60	02.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	87	8.314.600.000	86	2.146.000.000	86	1.942.162.200	100,6	90,5	86	1.942.162.200	98,9	23,4	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13					
61	02.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah kerawanan pangan	100	949.200.000	100	200.000.000	100	199.966.000	100,0	100,0	100	199.966.000	100,0	21,1	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
62	02.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase tingkat kewan pangan segar yang diuji	94	5.418.959.100	91	910.557.500	91	866.849.200	100,0	95,2	91	866.849.200	96,8	16,0	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
63	03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembang an Sarana Pertanian.	Persentase penyediaan dan pengembang sarana pertanian	100	32.206.158.500	100	13.247.567.200	100	13.082.527.400	100,0	98,8	100	13.082.527.400	100,0	40,6	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
64	03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembang Prasarana Pertanian	100	77.271.104.000	100	17.733.089.800	100	18.861.880.190	100,0	106,4	100	18.861.880.190	100,0	24,4	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
65	03.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulang an Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian	100	2.629.369.600	100	250.000.000	100	249.921.700	100,0	100,0	100	249.921.700	100,0	9,5	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
66	03.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pengelolaan Penyuluhan Pertanian	100	17.295.000.000	100	1.843.067.200	100	1.809.829.139	100,0	98,2	100	1.809.829.139	100,0	10,5	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13					
67	02.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kab/Kota se- Provinsi Lampung	100	32.206.158.500	100	6.858.790.000	100	53.198.281	100,0	0,8	100	53.198.281	100,0	0,2	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	
68	02.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se- Provinsi Lampung	100	77.271.104.000	100	9.564.430.000	100	87.590.100	100,0	0,9	100	87.590.100	100,0	0,1	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	
69	02.12.04	Program Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependuduka n	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kab/Kota se- Provinsi Lampung	100	2.629.369.600	100	16.302.800.000	80	128.480.902	80,0	0,8	80	128.480.902	80,0	4,9	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	
70	02.12.04	Program Pengelolaan Profil Kependuduka n	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung	100	17.295.000.000	100	9.102.400.000	100	83.747.000	100,0	0,9	100	83.747.000	100,0	0,5	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	
71	01.12.05	Program Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	25	10.051.341.000	25	1.340.329.499	25	1.285.161.000	100,0	95,9	25	1.285.161.000	100,0	12,8	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Transmigrasi	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13						
72	02.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama antar Desa 5 (lima) kerjasama	25	793.000.000	25	141.646.000	25	128.449.000	100,0	90,7	25	128.449.000	100,0	16,2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	
73	02.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan Smart Village	25	9.684.667.200	25	2.969.524.585	25	2.844.562.464	100,0	95,8	25	2.844.562.464	100,0	29,4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	
74	03.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	100	714.646.000	100	106.134.200	100	53.737.800	100,0	50,6	100	53.737.800	100,0	7,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	
75	03.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina di 2 (dua) kawasan transmigrasi	100	774.180.000	100	138.060.000	100	115.752.000	100,0	83,8	100	115.752.000	100,0	15,0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	
76	03.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase identifikasi sarana dan prasarana di 1 (satu) kawasan transmigrasi	100	800.778.120	100	150.194.530	100	106.356.230	100,0	70,8	100	106.356.230	100,0	13,3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	
77	02.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan LLAJ	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100	8.803.302.300	100	1.469.716.500	100	1.383.354.700	100,0	94,1	100	1.383.354.700	100,0	15,7	Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x100%	12	13					
78	02.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pengelolaan pelayaran	100	2.030.800.000	80	210.000.000	80	91.039.300	100,0	43,4	80	91.039.300	80,0	4,5	Dinas Perhubungan	
79	02.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase pengelolaan perkeretaapian	100	295.000.000	100	45.000.000	100	4.416.000	100,0	9,8	100	4.416.000	100,0	1,5	Dinas Perhubungan	
80	02.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemprov. Lampung	100	38.874.779.360	80	6.887.801.000	80	14.070.270.517	100,0	204,3	80	14.070.270.517	80,0	36,2	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
81	02.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah yang mengimplemen- tasi layanan Aplikasi Informatika Provinsi Lampung	100	50.237.255.702	80	13.878.966.658	80	13.399.201.888	100,0	96,5	80	13.399.201.888	80,0	26,7	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
82	02.20.02	Program Penyelenggara- an Statistik Sektoral	Persentase Pengumpulan pengolahan dan analisis data statistik sektoral dilingkup Provinsi Lampung	95	1.277.990.732	80	95.444.000	80	147.714.138	100,0	154,8	80	147.714.138	84,2	11,6	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
83	02.21.02	Program Penyelenggara- an Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen	95	1.312.154.300	85	118.983.200	85	167.603.400	100,0	140,9	85	167.603.400	89,5	12,8	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
			keamanan informasi														
84	02.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah	79	650.000.000	57	6.294.300	57	61.789.000	99,8	981,7	57	61.789.000	72,5	9,5	Dinas Koperasi dan UMKM	
85	02.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu)	27	10.814.784.000	27	260.093.310	27	2.550.689.500	100,0	980,7	27	2.550.689.500	100,0	23,6	Dinas Koperasi dan UMKM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13					
86	02.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	24	2.097.840.000	14	39.276.680	14	392.359.800	100,0	999,0	14	392.359.800	60,0	18,7	Dinas Koperasi dan UMKM	
87	02.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil (Rasio)	2,5	5.372.840.000	0,5	117.283.500	0,5	1.063.516.800	100,0	906,8	1	1.063.516.800	20,0	19,8	Dinas Koperasi dan UMKM	
88	02.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha (Persen)	11	1.854.000.000	4	39.350.300	4	391.803.000	100,0	995,7	4	391.803.000	38,4	21,1	Dinas Koperasi dan UMKM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x100%	12	13					
89	02.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi(NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi	100	2.859.500.000	40	787.783.000	40	746.500.000	100,0	94,8	40	746.500.000	39,6	26,1	Dinas Koperasi dan UMKM	
90	02.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan Dan Pengawasan Yang dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi	100	950.000.000	31	94.539.000	31	90.395.000	100,0	95,6	31	90.395.000	30,7	9,5	Dinas Koperasi dan UMKM	
91	02.18.02	Program Pengembang n Iklim Penanaman Modal	Laju pertumbuhan investasi	7	3.658.827.635	7	482.624.000	7	395.672.225	100,0	82,0	7	395.672.225	100,0	10,8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
92	02.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Peringkat tujuan investasi nasional	7	2.786.170.000	7	626.170.000	7	610.049.250	100,0	97,4	7	610.049.250	100,0	21,9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
93	02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan dan non perizinan	14	3.455.393.000	14	755.393.000	14	635.925.925	100,0	84,2	14	635.925.925	100,0	18,4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
			sesuai dengan peraturan														
94	02.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal secara elektronik	100	843.536.000	100	143.536.000	100	143.536.000	100,0	100,0	100	143.536.000	100,0	17,0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
95	2.18.06	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional	100	2.061.493.000	100	50.746.700.000	100	507.497.000	100,0	1,0	100	507.497.000	100,0	24,6	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
96	2.19.02	Program Pengembang an Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	100	15.161.890.800	88	451.488.110.000	88	5.085.526.100	100,0	1,1	88	5.085.526.100	88,2	33,5	Dinas Pemuda dan Olahraga	
97	02.19.03	Program Pengembang an Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan yang ditingkatkan	100	66.071.268.054	50	30.489.620.000	50	26.823.183.524	100,0	88,0	50	26.823.183.524	50,0	40,6	Dinas Pemuda dan Olahraga	
98	02.19.04	Program Pengembang an Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang ditingkatkan	100	180.993.500	55	65.038.000	55	130.076.000	100,0	200,0	55	130.076.000	55,0	71,9	Dinas Pemuda dan Olahraga	

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13					
99	02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pembinaan perpustakaan	20	6.426.711.152	20	113.370.500	20	521.879.100	100,0	460,3	20	521.879.100	100,0	8,1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
100	02.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	10	780.000.000	10	20.000.000	10	124.580.000	100,0	622,9	10	124.580.000	100,0	16,0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
101	02.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip	100	4.300.000.000	100	65.000.000	100	103.907.400	100,0	159,9	100	103.907.400	100,0	2,4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
102	03.25.03	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	184.1 86	42.823.932.000	151.870	8.665.900.000	151. 870	7.629.430.735	100,0	88,0	151. 870	7.629.430.735	82,5	17,8	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
103	03.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1) Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	206.9 95	28.028.568.301	161.589	9.353.297.000	161. 589	8.948.640.245	100,0	95,7	161. 589	8.948.640.245	78,1	31,9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
104	03.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume Ekspor Perikanan (kg)	22.7 97.9 11	24.932.418.000	18.361. 350	1.121.349.000	18.3 61.3 50	1.677.668.865	100,0	149,6	18.3 61.3 50	1.677.668.865	80,5	6,7	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
105	03.25.02	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi	100	6.905.500.000	80	1.857.678.100	80	993.736.516	100,0	53,5	80	993.736.516	80,0	14,4	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
106	03.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran	100	6.888.918.000	100	1.121.349.000	100	616.340.555	100,0	55,0	100	616.340.555	100,0	8,9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Kelautan dan Perikanan	hukum bidang kelautan dan perikanan														
107	03.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang difasilitasi pengembangannya	95	22.872.506.400	80	6.267.556.700,00	67	5.386.355.001	83,4	85,9	67	5.386.355.001	70,2	23,5	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
108	03.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	95	9.951.279.016	80	2.687.036.000,00	75	729.281.200	93,8	27,1	75	729.281.200	78,9	7,3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
109	03.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	95	6.934.015.800	80	1.233.608.400,00	80	625.096.200	100,0	50,7	80	625.096.200	84,2	9,0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
110	03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase daya tarik destinasi pariwisata yang difasilitasi pengembangannya	5	22.872.506.400	4	933.884.000,00	4	112.067.800	100,0	12,0	4	112.067.800	70,0	0,5	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
111	03.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan	Persentase Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan	100	23.666.105.173	100	7.507.974.700	100	6.969.824.894	100,0	92,8	100	6.969.824.894	100,0	29,5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		n Sarana Pertanian	Sarana Peternakan														
112	03.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan	100	14.140.994.000	100	1.799.318.500	100	1.717.545.196	100,0	95,5	100	1.717.545.196	100,0	12,1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
113	03.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	100	2.329.276.400	50	620.962.800	50	609.593.600	100,0	98,2	50	609.593.600	50,0	26,2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
114	03.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	100	473.400.000	100	125.050.000	100	122.275.880	100,0	97,8	100	122.275.880	100,0	25,8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
115	03.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase UMKM Subsektor Peternakan yang Dibina	100	214.266.100	100	28.942.100	100	44.536.000	100,0	153,9	100	44.536.000	100,0	20,8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
116	03.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	100	2.423.915.900	100	261.006.400	95	256.566.400	95,4	98,3	95	256.566.400	95,4	10,6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13					
117	3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulang an Bencana Pertanian Provinsi	Persentase penurunan serangan hama dan penyakit	25	3.161.022.500	25	302.372.400	25	257.664.300	100,0	85,2	25	257.664.300	100,0	8,2	Dinas Perkebunan	
118	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian	Persentase penyediaan benih bermutu dan sarana pertanian	5	2.975.000.000	5	6.045.434.993	5	174.220.100	100,0	2,9	5	174.220.100	100,0	5,9	Dinas Perkebunan	
119	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	3	34.071.891.093	3	461.022.500	3	5.346.226.693	100,0	1.159,6	3	5.346.226.693	100,0	15,7	Dinas Perkebunan	
120	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase penilaian usaha perkebunan	30	1.268.000.000	30	175.000.000	100	146.989.000	333,3	84,0	100	146.989.000	333,3	11,6	Dinas Perkebunan	
121	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan mutu produk pertanian	20	12.945.562.750	20	1.768.617.500	100	1.259.534.800	500,0	71,2	100	1.259.534.800	500,0	9,7	Dinas Perkebunan	
122	03.28.02	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaa n Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	20	18.696.858.600	5	13.936.281.100	5	12.764.874.400	100,0	91,6	5	12.764.874.400	25,0	68,3	Dinas Kehutanan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x100%	12	13					
123	03.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Luas Tutupan Lahan (ha)	87	33.047.764.500	87	6.217.015.753	87	6.022.492.958	100,0	96,9	87	6.022.492.958	100,0	18,2	Dinas Kehutanan	
124	03.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Luas lahan Konservasi yang di pulihkan	100	6.938.784.500	100	3.479.972.800	100	3.787.747.749	100,0	108,8	100	3.787.747.749	100,0	54,6	Dinas Kehutanan	
125	03.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	100	1.608.883.000	25	1.789.442.700	25	1.711.756.200	100,0	95,7	25	1.711.756.200	25,0	106, 4	Dinas Kehutanan	
126	03.29.02	Program Pengolaan Aspek Kegeologian	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	100	2.900.000.000	30	142.669.000	30	142.309.000	100,0	99,7	30	142.309.000	30,2	4,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
127	03.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	60	2.006.340.000	30	222.794.000	30	211.093.600	100,0	94,7	30	211.093.600	50,0	10,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
128	03.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Bauran Energi Daerah	100	11.136.569.535	31	445.646.000	31	444.850.530	100,0	99,8	31	444.850.530	30,5	4,0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
129	03.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	100	9.346.920.000	40	5.523.528.600	40	1.153.353.800	100,0	20,9	40	1.153.353.800	40,0	12,3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
130	03.30.03	Program Peningkatan Sarana		-	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Distribusi Perdagangan															
131	03.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	5	2.200.000.000	5	511.080.000	5	506.482.000	100,0	99,1	5	506.482.000	100,0	23,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
132	03.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Pelaku usaha yang menjadi eksportir	10	2.528.000.000	10	362.696.000	10	340.900.000	100,0	94,0	10	340.900.000	100,0	13,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
133	03.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah sosialisasi pengetahuan tentang perlindungan konsumen	20	4.473.540.000	13	405.330.000	13	376.129.600	100,0	92,8	13	376.129.600	62,5	8,4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
134	03.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan	100	4.166.000.000	100	43.795.000	100	93.778.000	100,0	214,1	100	93.778.000	100,0	2,3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
135	03.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase rata-rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIP	200	30.877.255.000	150	8.491.448.000	150	4.634.165.850	100,0	54,6	150	4.634.165.850	75,0	15,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
136	03.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar	25	1.020.000.000	10	178.569.000	10	177.844.200	100,0	99,6	10	177.844.200	40,0	17,4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13					
137	03.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pengelolaan data dan informasi industri	45	607.198.000	30	50.000.000	30	17.810.000	100,0	35,6	30	17.810.000	66,7	2,9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
138	04.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD dan LKPJ) Tepat Waktu	100	6.243.123.268	100	1.382.123.000	100	1.028.234.500	100,0	74,4	100	1.028.234.500	100,0	16,5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
139	04.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pekerjaan Yang Selesai ditenderkan	94	11.702.317.393	100	2.665.649.000	100	2.210.953.200	100,0	82,9	100	2.210.953.200	106,4	18,9	Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
140	04.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase jumlah perangkat daerah yang dokumen DPA nya baik, pelaksanaan program/kegiatannya sesuai perencanaannya	100	5.231.222.068	100	1.577.500.000	100	1.550.791.340	100,0	98,3	100	1.550.791.340	100,0	29,6	Biro Administrasi Pembangunan	
141	04.01.04	Program kesejahteraan rakyat	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	100	2.762.447.700	100	33.104.628.600	95	24.701.097.738	95,5	74,6	95	24.701.097.738	95,5	894,2	Biro Kesejahteraan Rakyat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13					
142	04.01.02	Program Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana dan Pelayanan Publik) yang Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	100	6.287.549.400	100	1.187.802.600	100	852.443.800	100,0	71,8	100	852.443.800	100,0	13,6	Biro Organisasi	
143	08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	100	4.245.765.300	15	799.866.600	82	765.150.900	544,5	95,7	82	765.150.900	81,7	18,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
144	08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	73	3.415.890.400	72	296.444.300	64	222.531.500	89,0	75,1	64	222.531.500	88,1	6,5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9	10	11	12						
145	08.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	30	1.443.972.000	15	149.395.000	15	143.831.000	100,0	96,3	15	143.831.000	50,0	10,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
146	08.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	100	2.227.400.000	15	370.989.000	15	365.389.000	100,0	98,5	15	365.389.000	15,0	16,4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
147	08.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	90	3.695.375.200	80	310.097.250	62	108.039.217	78,0	34,8	62	108.039.217	69,3	2,9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
148	06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	88	30.917.790.000	82	6.503.151.000	82	4.034.710.458	100,0	62,0	82	4.034.710.458	93,2	13,0	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
149	06.01.03	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100	4.514.698.000	100	898.096.000	100	512.385.465	100,0	57,1	100	512.385.465	100,0	11,3	Inspektorat	
150	05.07.02	Program pelayanan penghubung	Persentase Pelayanan Badan Penghubung yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	100	5.707.165.180	100	1.146.884.000	100	820.868.600	100,0	71,6	100	820.868.600	100,0	14,4	Badan Penghubung	
151	05.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan ke PD/Stakeholder lainnya	100	12.064.319.282	100	2.090.914.500	100	2.062.683.100	100,0	98,6	100	2.062.683.100	100,0	17,1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
152	05.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM yang ditingkatkan	100	52.432.919.989	100	14.426.321.240	100	8.372.560.397	100,0	58,0	100	8.372.560.397	100,0	16,0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
153	05.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	100	61.409.314.209	100	7.745.753.786	98	5.898.579.632	97,7	76,2	98	5.898.579.632	97,7	9,6	Badan Kepegawaian Daerah	
154	05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	100	78.507.609.500	100	14.664.215.500	100	13.358.831.707	100,0	91,1	100	13.358.831.707	100,0	17,0	Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13					
155	05.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah	100	27.300.332.982	100	5.697.048.900	100	5.305.323.410	100,0	93,1	100	5.305.323.410	100,0	19,4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
156	05.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100	6.000.537.110.823	100	1.321.752.152.591	95	1.128.073.408.757	95,1	85,3	95	1.128.073.408.757	95,1	18,8	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
157	05.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	100	22.612.550.651	100	2.318.172.400	75	864.602.300	74,6	37,3	75	864.602.300	74,6	3,8	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
158	05.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung	100	30.039.527.166	100	4.506.882.430	100	1.556.392.300	100,0	34,5	100	1.556.392.300	100,0	5,2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Sampai Dengan Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
			kinerja pembangunan daerah														
159	04.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	167.984.759.868	100	155.434.922.112	94	176.634.048.749	94,4	113,6	94	176.634.048.749	94,4	105, 1	Sekretariat DPRD	
160	04.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Keselarasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang Ditindaklanjuti	100	8.106.714.503	100	1.608.585.400	104	935.036.600	104,2	58,1	104	935.036.600	104,2	11,5	Biro Perekonomia n	
161	04.01.05	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	- Persentase rancangan produk hukum daerah dan provinsi yang di harmonisasikan	100	6.191.347.218	100	1.209.373.100	100	1.273.420.648	100,0	105,3	100	1.273.420.648	100,0	20,6	Biro Hukum	

2.3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategi Daerah

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup memberi harapan, hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, Provinsi Lampung sebagai wilayah transit atau penyangga lintas pulau, sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang tetap memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, lintas sektor, lintas wilayah, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Lampung meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, kualitas SDM, pendapatan regional, daya dukung lingkungan, dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan adanya pandemi Covid-19 yang bukan hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat akan tetapi berdampak kepada perekonomian terangkum dalam uraian sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- Belum tercapainya program wajib belajar 9 tahun, rata-rata lama sekolah penduduk Lampung pada tahun 2021 adalah 8,08 tahun masih dibawah angka nasional sebesar 8,54.
- Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Lampung telah mencapai 12,73, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,73 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini masih berada dibawah angka Nasional yaitu 13,08.
- Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung sebesar 97,28 mengalami peningkatan dan telah berada di atas angka nasional (96,04), akan tetapi Provinsi Lampung masih menempati peringkat terakhir se-Sumatera.
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat 16-18 tahun mengalami

peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi besarnya tetap rendah, yaitu hanya mencapai 71,72 persen dan berada di bawah angka Nasional (73,09 persen). Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera menempati urutan ke 3 terbawah.

- Angka Partisipasi Murin (APM) Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SMA sebesar 60,31 masih berada di bawah rata-rata Nasional sebesar 61,65.
- Angka Putus Sekolah jenjang SMA mengalami penurunan hingga mencapai 2,48 persen. Angka ini masih terbilang tinggi karena target capai Kementerian Pendidikan tidak boleh lebih dari 1 persen
- Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
- Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan.

b. Bidang Kesehatan

- Angka prevalensi stunting Provinsi Lampung tahun 2021 mengalami penurunan hingga mencapai 18,5 jauh dibawah angka nasional 24,4 akan tetapi masih diperlukan kerja keras agar target stunting tahun 2024, yaitu sebesar 14% dapat tercapai.
- Angka Kematian Bayi (AKB) sepanjang tahun 2021 mencapai 484 kasus dan Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 187 kasus sehingga diperlukan tindakan agar kasus kematian bayi dan ibu dapat ditekan.
- Meski Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung terus meningkat, AHH Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar 70,73 masih di bawah rata-rata AHH Nasional sebesar 71,57.
- Rendahnya aksesabilitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan.

c. Bidang Pertanian

- Upaya peningkatan produksi dan hilirisasi hasil produksi pertanian. Provinsi Lampung adalah sebagai daerah sentra/penghasil padi (peringkat 6 Nasional dan peringkat 2 di Sumatera) juga sebagai

sentra/penghasil jagung (peringkat 3 Nasional).

- Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, permodalan dan pemasaran.

d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- **Rasio elektrifikasi** rumah tangga tahun 2021 telah mencapai 97,07% dan capaian Persentase Desa Teraliri Listrik pada Tahun 2021 adalah sebesar 99,47%.
- Namun, masih adanya deficit kebutuhan listrik sebesar 350-450 Watt. Kebutuhan listrik Lampung dengan beban puncak mencapai 1.027,5 MW dan cadangan daya 391,55 MW, sedangkan kemampuan pembangkit listrik di provinsi Lampung saat ini 968,55 MW.

e. Bidang Pariwisata

- Menurunnya jumlah wisatwan dari 10.743.918 pada tahun 2019 menjadi hanya sekitar 2.939.152 pada tahun 2021 karena factor pandemic Covid-19.
- **Kontribusi Sektor Pariwisata** dalam perekonomian Lampung masih relatif kecil sebesar 2,16% dalam PDRB Provinsi Lampung.

f. Bidang Kelautan dan Perikanan

- Penurunan produksi komoditas unggulan perikanan budidaya, antara lain udang, kerapu, dan rajungan.
- Harga Pakan Pabrikan yang cenderung meningkat karena ketergantungan dengan bahan baku impor (tepung ikan).
- Penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan budidaya serta ancaman serangan penyakit.

g. Bidang Perdagangan

- Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Lampung mengalami fluktuatif . Walaupun fluktuatif, nilai ekspor lebih besar dari nilai impor setiap tahunnya. Neraca perdagangan Tahun 2020 mengalami surplus sebesar 1.821,65 dimana Ekspor 3.144,73 lebih besar dari impor 1.323,08.

h. Bidang Perindustrian

- **Pemulihan sektor industri akibat dampak pandemi Covid-19** dengan membangkitkan kembali Industri Kecil Menengah (IKM). Industri yang berkontribusi paling besar di Provinsi Lampung adalah industri makanan dan minuman, dimana pada tahun 2021 kontribusi industri makanan dan minuman sebesar 80,95 persen dari total industri pengolahan.

i. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Lampung merupakan wilayah perlintasan antarprovinsi dan antarpulau, sehingga beban jalan menjadi lebih tinggi; namun kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mampu memberi dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitas barang/jasa dan orang dalam mendukung perekonomian. Kondisi jalan mantap sampai dengan tahun 2021 sudah mencapai 74 persen, namun masih perlu terus ditingkatkan.

j. Bidang Lingkungan Hidup

- Masih tingginya tingkat kerusakan hutan dan luas lahan kritis di Provinsi Lampung yang berpotensi mengakibatkan bencana alam. Hutan sebagai penyangga sumber daya air dan keragaman hayati memerlukan penanganan secara berkelanjutan guna mendukung kelangsungan hidup manusia sebagai pelaku dan objek pembangunan;
- Masih belum optimalnya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatnya kualitas tutupan lahan.

k. Kapasitas Fiskal Daerah

- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertumbuhan PAD pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sebesar 14,27 persen dari sebesar Rp 2.842.286.479 pada 2020 menjadi -Rp. 3.247.848.123 pada tahun 2021. Peningkatan tersebut bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu fungsi *budgeter* penting untuk meningkatkan penerimaan daerah, diperlukan langkah optimalisasi

penerimaan pajak yang dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi daerah guna mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung daya saing daerah.

l. Bidang Koperasi dan UMKM

- Masih minimnya jumlah Koperasi yang aktif melakukan kegiatan ekonomi kerakyatan
- Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang Koperasi;
- Keterbatasan permodalan dan terbatasnya pangsa pasar Koperasi dan UMKM
- Belum tersedianya jaringan bisnis yang handal untuk melakukan pemasaran hasil produksi pelaku UMKM.

m. Bidang Penanggulangan Bencana

- Tingginya potensi bencana di Provinsi Lampung
- Kurangnya kesiapsiagaan perugas dalam penanganan bencana
- Sarana prasarana dalam penanggulangan bencana belum memadai;
- Belum adanya Keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana;

n. Bidang Hukum, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat

- Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas;
- Potensi konflik tanah antarmasyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah;
- Pemahaman yang terbatas terhadap kebhinekaan menimbulkan ancaman disintegritas kebangsaan;
- Potensi perilaku menyimpang, ajaran sesat, maupun ancaman terorisme dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

o. Bidang Kebudayaan

- Masih banyaknya warisan budaya tak benda yang belum tersertifikasi;
- Masih banyaknya warisan budaya benda sebagai objek diduga cagar budaya yang belum ditetapkan sebagai benda cagar budaya;

- Kurangnya perlindungan dan pelestarian, serta pemanfaatan nilai kebudayaan dalam pembangunan;
- Kurangnya tenaga ahli yang memahami tentang kebudayaan (Pamong Budaya);
- Masih rendahnya apresiasi generasi muda terhadap perlindungan dan pelestarian kebudayaan.

p. Bidang Pemuda dan Olahraga menghadapi masalah:

- Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda dalam berwirausaha;
- Kurangnya pembinaan terhadap generasi muda dalam hal kepemimpinan dan kepeloporan;
- Terbatasnya ketersediaan sarana olah raga berskala nasional di sentra-sentra pembinaan;
- Terbatasnya tenaga keolahragaan yang berkualifikasi memadai;
- Belum tertatanya sistem maupun pola pembinaan dan pembibitan terhadap atlet;
- Belum terfasilitasinya kegiatan olahraga secara berkesinambungan yang melibatkan masyarakat.

q. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung
- Masih lemahnya perlindungan dari tindak kekerasan bagi perempuan dan anak serta belum terpenuhinya hak hak anak. Belum optimalnya penanganan masalah *trafficking* terhadap perempuan dan anak.

r. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
- Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
- Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;
- Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan;

- Minimnya penggunaan dan pemanfaatan iptek masyarakat pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
- Penguatan lembaga ekonomi masyarakat yang masih kurang optimal.

s. Bidang Sosial

- Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung masih tinggi
- Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Pemenuhan SPM sosial pada panti sosial belum maksimal karena kondisi panti sosial yang dimiliki Provinsi Lampung yang kurang baik
- Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin.
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (**DTKS**) sebagai basis data yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bansos PKH dan BPNT tidak dapat digunakan sebagai basis data intervensi program penurunan kemiskinan karena tidak lagi memiliki indikator sosial ekonomi
- Belum tersedianya data penerima program dan integrasi program intervensi kemiskinan
- Kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan individu lainnya.

t. Bidang Ketenagakerjaan

- Dampak Covid 19 menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran di Provinsi Lampung
- Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
- Keterbatasan tenaga pengajar/instruktur Balai Latihan Kerja.
- Sarana dan prasarana peralatan praktek pada Balai Latihan Kerja yang terbatas dan perlu peremajaan.

u. Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

- Terbatasnya inovasi daerah yang dapat diimplementasikan untuk

mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung

v. Bidang Otonomi Daerah, Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- Perlunya sinkronisasi implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
- Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;
- Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur;
- Pendataan aset belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi;
- Pendapatan daerah dari BUMD masih sangat terbatas;
- Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat.

w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
- Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman, ketertiban masyarakat, radikalisme karena latarbelakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

2.3.2. Isu Strategis

1. Bidang Ekonomi :

- **Pemulihan dan penguatan ekonomi Lampung pasca pandemic Covid-19.** Selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19 capaian ekonomi Lampung cukup baik rata diatas 5% dan selalu diatas pertumbuhan nasional, namun masuk dalam masa pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, tahun 2020 berkontraksi hingga mencapai -1,67%. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung menunjukkan tren positif mencapai 2,79%, akan tetapi belum mencapai angka pertumbuhan sebelum Covid-19.
- **Komoditas ekspor Provinsi Lampung masih terbatas pada komoditas berbasis sumber daya alam,** sehingga belum mampu

memiliki daya saing maupun nilai tambah yang tinggi serta ketergantungan harga komoditas di pasar global. Namun demikian, neraca perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2021 mengalami surplus senilai 1.490,6 juta US \$, namun nilai tersebut menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020.

- **Laju pertumbuhan Investasi/PMTB belum optimal** untuk pertumbuhan ekonomi Lampung.
- **Sektor Pertanian berkontribusi terbesar** dalam Struktur Ekonomi Lampung (rata-rata \pm 30 %), akan tetapi Tingkat Pertumbuhan relatif lambat dan mengalami tren penurunan dari 0,68% (2020) menjadi -0,40% (2021).
- **Kontribusi Sektor Pariwisata dalam perekonomian Lampung masih relatif kecil** dikarenakan belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata Lampung sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian daerah, sehingga perlu dioptimalkan dan dibangkitkan kembali dari dampak pandemi Covid-19.
- **Sektor industri pengolahan kembali membaik dan tumbuh positif** pada tahun 2021 (4,57) setelah sebelumnya berkontraksi -5,27 pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, oleh karena itu untuk mempercepat transformasi ekonomi, mendorong investasi dan peningkatan daya saing daerah, perlu dilakukan percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung.
- **Inflasi Gabungan Provinsi Lampung 5 tahun terakhir terkendali dalam rentang target**, perlu terus dijaga untuk mendorong daya beli masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan
- **Antisipasi terhadap Faktor Eksternal** seperti ketidakpastian ekonomi global, kondisi geo-politik, perang dagang, dan wabah penyakit

2. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia :

- **Indek Pembangunan Manusia (IPM)** meningkat dari 66,69 (2020) menjadi 69,9 (2021). Namun masih cukup rendah di bandingkan Nasional dan wilayah Sumatera.
- **Tingkat Kemiskinan mengalami tren penurunan** dari 12,76 persen (2020) menjadi 11,67 persen (2021). *Akan tetapi*, masih cukup tinggi dibanding rata-rata Nasional (9,71).
- **Masih tingginya angka prevalensi stunting** tahun 2021 yaitu 18,5 yang diharapkan dapat turun menjadi 14 pada tahun 2024.
- **Ketimpangan Antar kelompok Pendapatan/ Indeks Gini** mengalami penurunan dari 0,32 pada tahun 2020 menjadi 0,31 pada tahun 2021, angka ini lebih baik dari Nasional (0,38).
- **Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi:** Pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintahan
- **Kesetaraan Perempuan dalam Pembangunan** yang dilihat dari Indeks Pembangunan Gender, semakin membaik dari 90,33 (2020) meningkat menjadi 90,37 (2021), sudah berada di atas angka nasional tahun 2021 (91,27) namun masih perlu terus diupayakan meningkat.

3. Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup :

- **Kesenjangan pertumbuhan wilayah timur dengan barat** (diperlukan infrastruktur penghubung (ruas utara, tengah dan selatan) yang memenuhi persyaratan untuk menghubungkan jalan lintas nasional (barat, tengah dan timur).
- **Optimalisasi nilai manfaat Jalan Tol Trans Sumatera**, diperlukan penanganan exit toll yang terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat mengungkit perekonomian wilayah sekitar
- **Tingkat kemandapan Jalan Provinsi** membaik dari 70,02 %

(2016) menjadi 74 % (2021); masih terkendala dengan terbatas kemampuan pembiayaan penanganan ruas jalan

- **Pelayanan Dasar terkait Akses Masyarakat** terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak dan Aman masih memerlukan strategi dan pembiayaan:
 - ❖ Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman.
 - ❖ Kawasan Kumuh dan/atau serta Permukiman Kumuh.
 - ❖ Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan standar rumah MBR;
 - ❖ Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- **Irigasi sebagai pendukung Sektor Pertanian :**
 - ❖ Luas baku jaringan irigasi kewenangan provinsi 21.045 Ha mengalami kerusakan mencapai 10%.
 - ❖ Krisis cadangan air pada 3 bendungan (Batutegi, Way Rarem, dan Way Jepara) karena *catchment area* yang rusak.
- **Lampung sebagai daerah rawan bencana** memerlukan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah yang antisipatif bencana.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Provinsi Lampung baik dari faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Provinsi Lampung.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk Tahun 2023 didasarkan pada kinerja ekonomi pada Tahun 2020-2021, rencana target Tahun 2022 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2023. Pasca Pandemi Covid-19, kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung diarahkan pada penguatan ekonomi untuk mendorong akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.

3.1.1. Kinerja Makro Ekonomi Daerah

3.1.1.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Merujuk data PDRB harga berlaku, perekonomian Provinsi Lampung meningkat dari Rp. 306,70 Triliun menjadi Rp. 356,68 Triliun pada periode 2017-2019. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 sempat menekan kapasitas perekonomian Lampung menjadi Rp. 353,53 Triliun. Melalui serangkaian implementasi kebijakan pada aspek kesehatan, sosial dan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat; perekonomian Lampung tahun 2021 mulai membaik. PDRB (ADHB) Lampung di tahun 2021 mencapai Rp. 371,90 Triliun membaik dari tahun 2020 (masa bencana Covid-19). Demikian pula tinjauan PDRB berdasarkan Harga Konstan (ADHK 2010), PDRB Provinsi Lampung pada tahun 2021 mencapai Rp. 247 Triliun meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 240,29 Triliun.

Tabel III - 1 Nilai PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

TAHUN	ADHK (Juta Rupiah)	ADHB (Juta Rupiah)
2017	220.626.096,76	306.700.430,70
2018	232.165.986,99	332.446.070,68
2019	244.380.371,81	356.676.828,00
2020	240.306.857,37	353.530.039,00
2021	247.001.670,00	371.903.172,00

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

Secara spasial, kapasitas perekonomian Lampung menunjukkan peran yang cukup strategis di Pulau Sumatera maupun nasional. Pada periode 2017-2021, secara rata-rata peran ekonomi Lampung pada **lingkup Pulau Sumatera** berada pada kisaran **10,11 - 10,50 persen**, dimana pada masa Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mampu berkontribusi sebesar 10,50 persen; dan berkontribusi **2,19 - 2,24 persen** secara **nasional**. Kontribusi tertinggi justru terjadi di tahun 2020 dimana pandemic Covid-19 sedang mewabah di berbagai wilayah tanah air.

Tabel III - 2 Kontribusi PDRB (ADHB) Prov. Lampung terhadap PDRB Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2017-2021

TAHUN	Nilai PDRB (ADHB) Prov. Lampung (Rp. Triliun)	Kontribusi Lampung terhadap Sumatera (%)	Kontribusi Lampung terhadap Nasional (%)
2017	306,70	10,27	2,23
2018	332,45	10,30	2,22
2019	356,68	10,45	2,22
2020	353,53	10,50	2,24
2021	371,90	10,11	2,19

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.2 Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha

Meninjau PDRB menurut sisi Lapangan Usaha, perekonomian Lampung pada periode tahun 2017 s.d. 2021 didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu : sektor Pertanian (kisaran 28-30 persen); sektor Industri Pengolahan (kisaran 19-20 persen); dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran (kisaran 11 persen); diikuti dengan peran sektor Transportasi/Pergudangan; sektor Pertambangan; dan sektor Informasi & Komunikasi.

Hasil pengamatan terhadap kecenderungan kontribusi kelompok lapangan usaha pada periode 2017 s.d. 2021, menunjukkan bahwa:

- Kontribusi kelompok Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung menurun; dari sekitar 30 % di tahun 2017 dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun menjadi sekitar 28 % di tahun 2021.
- Sepanjang tahun 2017-2021 kontribusi kelompok Industri Pengolahan berada pada kisaran 19 - 20 %. Porsi tertinggi Sektor Industri Pengolahan terjadi di tahun 2019 (sebelum Covid-19) yang sebesar 20%. Di tahun 2020 (pemberlakuan PSBB saat Pandemi Covid-19) peran Sektor Industri Pengolahan sedikit menurun menjadi 19,42 %, dan kembali meningkat menjadi 19,65 % di tahun 2021 sejalan dengan kebijakan pelonggaran aktifitas di sektor ekonomi.

- Pada pengamatan tahun 2017-2021, kontribusi kelompok Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; secara relatif berada pada level 11%. Secara historis, kontribusi terbesar tertinggi sektor ini terjadi di tahun 2019 (sebelum Covid-19) yang sebesar 11,59 %. Di tahun 2020 (berlakunya PSBB saat Pandemi Covid-19) peran Sektor Perdagangan sedikit menurun menjadi 11,18 %, dan kembali meningkat menjadi 11,70 % di tahun 2021 seiring bergairahnya aktifitas ekonomi pasca pandemi.
- Terjadinya pandemic Covid-19 di tahun 2020, telah meningkatkan kontribusi Jasa Layanan kesehatan di tahun 2020-2021. Demikian pula halnya dengan kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi, meningkat secara signifikan sejalan dengan banyaknya pola aktifitas masyarakat dilaksanakan dengan memanfaatkan layanan teknologi informasi secara masif.

Tabel III - 3 Distribusi PDRB ADHB Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	ADHB				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,57	29,90	28,79	29,78	28,39
B. Pertambangan dan Penggalian	5,65	5,74	5,55	5,01	5,58
C. Industri Pengolahan	19,02	19,50	20,00	19,42	19,65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,14
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11
F. Konstruksi	9,34	9,48	9,53	9,38	9,89
G. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	11,04	11,16	11,59	11,18	11,70
H. Transportasi dan Pergudangan	5,28	5,18	5,24	5,03	4,97
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,58	1,63	1,57	1,48
J. Informasi dan Komunikasi	3,92	3,93	3,99	4,32	4,26
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,21	2,15	2,09	2,19	2,22
L. Real Estat	2,91	2,84	2,96	3,00	2,91
M,N. Jasa Perusahaan	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	3,51	3,45	3,39	3,63	3,58
P. Jasa Pendidikan	2,78	2,82	2,92	3,10	3,05

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	ADHB				
	2017	2018	2019	2020	2021
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social	0,95	0,94	0,95	1,07	1,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,90	0,92	0,95	0,91	0,85
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.3 Struktur PDRB menurut Pengeluaran

PDRB (ADHB) Menurut Pengeluaran menggambarkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri. PDRB Menurut Pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga; (2) Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga; (3) Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah; (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto; (5) perubahan inventori; dan (6) Ekspor Netto (ekspor dikurangi impor).

Merujuk tinjauan data PDRB menurut sisi Pengeluaran, struktur perekonomian Lampung pada periode tahun 2017 s.d. 2021 ditopang dari Konsumsi Rumah Tangga (pada kisaran 60 %), diikuti dengan PMTB (kisaran 31-33 %) dan konsumsi belanja pemerintah (pada kisaran 7 – 8 %), dengan *share* kegiatan ekspor yang lebih rendah dibanding kegiatan impor selama periode pengamatan. Pada lingkup perdagangan global, meskipun porsi impor meningkat, namun porsi ekspor juga terus mengalami peningkatan yang menggembirakan dari sekitar 38 % di tahun 2017 menjadi sekitar 47% di tahun 2021. Secara keseluruhan, struktur perekonomian menurut kelompok pengeluaran pada periode pengamatan tersebut belum banyak berubah secara signifikan.

Tabel III - 4 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (ADHK) Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	ADHK				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	59,47	60,38	61,77	62,28	61,84
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,48	1,66	1,73	1,69	1,71
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,68	8,39	8,19	8,29	7,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,46	32,79	33,47	32,85	33,78
5. Perubahan Inventori	0,42	0,50	0,11	0,53	0,22
6. Ekspor	38,62	41,14	40,26	40,59	47,00
7. Impor	40,14	44,85	45,51	46,24	52,47
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.4 Rasio PMTB dan ICOR

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam suatu perekonomian dapat menggambarkan besarnya nilai investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang terjadi di suatu wilayah. Secara umum, peran investasi dalam perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan trend yang meningkat dari 31,46 % di tahun 2017 menjadi 33,78 % pada 2021 (meskipun sempat terjadi perlambatan di tahun 2020). Berkenaan dengan hal itu, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Lampung tahun 2017 hingga 2019 juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Namun, sejalan dengan merebaknya pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga 2021, Nilai ICOR Provinsi Lampung mengalami perlambatan hingga menyentuh angka 12,22 di tahun 2021. Nilai ICOR tersebut tentunya memberi sinyal bahwa untuk menghasilkan 1 (satu) unit output maka kebutuhan input juga semakin bertambah; yang tentunya kurang efisien secara ekonomi.

Tabel III - 5 Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR Provinsi Lampung Tahun 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio PMTB terhadap PDRB	31,46	32,79	33,48	32,95	33,78
ICOR	6,73	6,86	6,78	-19,32	12,22

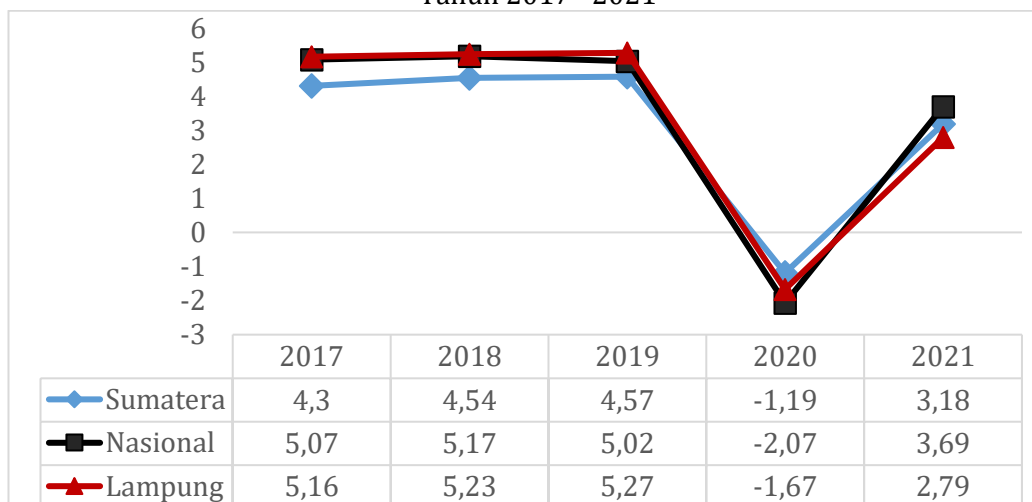
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2016-2019 perekonomian Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan yang cukup baik, meningkat dari tahun ke tahun dari 5,14% di tahun 2016 menjadi 5,26 % pada Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan pada periode tersebut adalah sebesar 5,19 % per tahun. Terjadinya pandemi global Covid-19 pada tahun 2020 telah menekan target-target pembangunan di bidang ekonomi baik pada skala global, nasional hingga ke tingkat daerah. Catatan statistik menunjukkan bahwa perekonomian Lampung di tahun 2020 terkontraksi menjadi minus 1,67 %.

Meski demikian, bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung masih lebih baik dibandingkan perekonomian Nasional yang tertahan pada angka minus 2,07 %. Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi dan mulai terkendalinya Covid-19 pada skala global dan nasional, perekonomian Lampung pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 2,79 % beriring dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,69 % maupun perekonomian pulau Sumatera yang sebesar 3,18 % pada periode yang sama.

Grafik III - 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung Tahun 2017- 2021



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.6 Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi Lampung menurut lapangan usaha tahun 2021 mengalami perbaikan seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional. Ekonomi Provinsi Lampung Triwulan IV tahun 2021 terhadap triwulan III tahun 2021 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar minus 6,37 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 8,49 persen, diikuti Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 6,68 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 2,79 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,26 persen.

Tabel III - 6 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha (persen, ADHK 2010) Tahun 2017- 2021

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	ADHK				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,86	0,97	1,34	0,66	-0,4
B. Pertambangan dan Penggalian	6,39	2,03	2,7	-3,5	-5,28
C. Industri Pengolahan	6,18	9,04	8,24	-5,25	4,57
D. Pengadaan Listrik dan Gas	38,43	6,54	9,35	-0,6	-6,8
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya	7,15	3,59	5,29	5,06	6,94
F. Konstruksi	10,96	8,35	6,01	-2,05	6,95
G. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	6,51	6,87	7,2	-6,64	8,26
H. Transportasi dan Pergudangan	6,6	5,96	8,08	-5,61	2,27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,03	10,49	9,1	-5,01	-1,54
J. Informasi dan Komunikasi	10,74	8,14	7,96	8,02	6,17
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,5	2,27	2,85	3,76	2
L. Real Estat	5,96	3,5	5,88	-1,73	1,31
M,N. Jasa Perusahaan	5,87	2,19	3,97	-1,43	1,05
O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	4,19	5,84	4,78	4,94	4,21
P. Jasa Pendidikan	5,05	9,09	8,33	4,11	1,22
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social	4,77	6,29	6,81	10,93	3,89
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,92	9,32	8,08	-4,59	-2,15

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	ADHK				
	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB	5,16	5,23	5,26	-1,67	2,79

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.7 Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi Lampung menurut pengeluaran Tahun 2021 mengalami peningkatan setelah mengalami kontraksi yang cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar minus 1,67 persen. Ekonomi Provinsi Lampung triwulan IV-2021 dibanding triwulan III-2021 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,37 persen, yang didorong oleh pertumbuhan negatif komponen ekspor sebesar 4,02 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,60 persen.

Pada tahun 2021, seluruh Komponen Pengeluaran mengalami pertumbuhan tumbuh sebesar 2,79 persen (c-to-c). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 13,78 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,94 persen dan Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,63 persen;

Tabel III - 7 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010)
Tahun 2017 -2021

Komponen Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	ADHB				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5,54	5,69	5,63	-1,64	1,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,19	16,29	10,15	-4,16	3,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,14	1,7	2,88	-1,47	0,47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,93	9,99	5,18	-5,53	3,94
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	5,77	11,64	5,06	-4,17	13,78
7. Impor	7,67	14,26	4,10	-5,43	11,62
Pertumbuhan PDRB	5,16	5,23	5,26	-1,67	2,79

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.8 Pendapatan Perkapita

Merujuk data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada kurun waktu tahun 2017 s.d. 2019 PDRB Perkapita penduduk Lampung meningkat dari Rp. 37 Juta menjadi Rp. 42,17 juta. Selanjutnya, berkenaan dengan melemahnya perekonomian di tahun 2020, nilai PDRB Perkapita Provinsi Lampung juga menurun menjadi Rp. 39,35 Juta. Meski demikian, seiring dengan membaiknya perekonomian daerah, nilai PDRB Perkapita penduduk Lampung di tahun 2021 mencapai Rp. 40,95 Juta meningkat dibanding dengan tahun 2020. Meninjau periode waktu pengamatan tersebut, besaran nilai PDRB Perkapita Provinsi Lampung tersebut masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita secara nasional.

Tabel III - 8 PDRB Perkapita Provinsi Lampung (ADHB) Tahun 2017 - 2021

Tahun	PDRB Perkapita (ADHB) Provinsi Lampung (Juta Rupiah)
2017	37,00
2018	39,86
2019	42,17
2020	39,35
2021	40,95

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

Lebih lanjut, dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tampak bahwa PDRB Perkapita penduduk Lampung pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 26,615 Juta dan meningkat hingga ke tahun 2019 yang sebesar Rp. 28,895 juta. Namun, catatan nilai tersebut sempat tertekan di tahun 2020 menjadi Rp. 26,744 juta ; dan kembali meningkat menjadi Rp. 27,197 juta di tahun 2021. Adapun, nilai PDRB per Kapita Provinsi Lampung pada periode 2017-2021 tersebut masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita secara nasional.

Tabel III - 9 PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional (ADHK) Tahun 2017 – 2021

Tahun	Pendapatan Perkapita (ADHK) Provinsi Lampung (Juta Rupiah)	Pendapatan Perkapita (ADHK) Nasional (Juta Rupiah)
2017	26,615	37,851
2018	27,741	39,341
2019	28,895	41,022
2020	26,744	39,779
2021	27,197	40,776

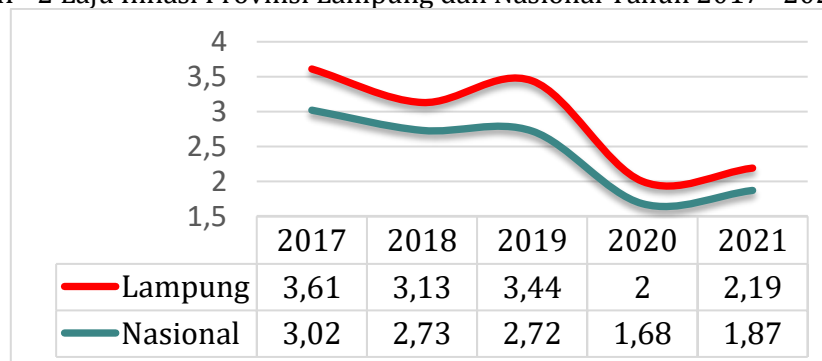
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.9 Inflasi Daerah

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.

Sepanjang periode 2017-2021 inflasi umum secara tahunan di Provinsi Lampung berada pada kisaran 2,00 - 3,61 persen, sementara tingkat inflasi nasional berkisar 1,68 - 3,02 persen. Secara umum, laju inflasi Lampung dan Nasional masih stabi dan cukup terkendali. Inflasi tertinggi Provinsi Lampung terjadi di tahun 2017 yang tercatat 3,61% dan terendah di tahun 2020 pada tingkat 2 %. Selama lima tahun terakhir, tingkat inflasi tahunan Lampung berada di atas laju inflasi nasional.

Grafik III - 2 Laju Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017– 2021



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

3.1.1.10 Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah (Indeks Wiliamson)

Pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, pada prakteknya dapat dapat berdampak pada munculnya ketimpangan/ketidakmerataan. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait antara lain ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur, kapasitas ekonomi daerah, keadaan geografis dan demografis wilayah dan lain sebagainya. Indeks Williamson merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Indeks Ketimpangan Antar Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
	0,26261	0,26360	0,26458	0,26314	Data belum di publikasi oleh BPS

Sumber; BPS Lampung 2022 (Data indeks wiliamson terakhir 2020, belum ada data terbaru)

Secara umum, ketimpangan ekonomi antar wilayah (IndeksWilliamson) periode tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa dinamika ketimpangan masih pada kisaran 0,262 s.d. 0,264 dimana nilai indeks tertinggi terjadi di tahun 2019 yang sebesar 0,26458 dan kembali menurun di tahun 2020 menjadi 0,26314. Secara teoritis, tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Lampung masih dalam kategori rendah, yang dapat diartikan bahwa perekonomian antarwilayah relatif merata.

3.1.1.10 Rangkuman Kinerja Ekonomi Lampung Tahun 2020-2021

Terjadinya pandemi global Covid-19 pada awal tahun 2020 telah menekan target-target pembangunan di bidang ekonomi secara cukup tajam pada skala global, nasional hingga ke tingkat daerah. Dalam waktu yang singkat, dampak pandemi Covid-19 telah mengubah arah perekonomian secara drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran; dan telah berdampak pula pada menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat secara umum.

Mengawali tahun 2021, perekonomian Lampung terus menunjukkan trend perbaikan menuju arah yang positif. Meskipun masih mengalami kontraksi sebesar minus 2,10 persen (yoy) pada Triwulan I-2021, perekonomian Lampung bangkit dan tumbuh positif sebesar 5,15 persen pada Triwulan II-2021 dan 3,05 persen pada Triwulan III tahun 2021 sejalan dengan optimisme masyarakat dan pelaku usaha terhadap keberhasilan implementasi vaksinasi COVID-19, pelonggaran aktifitas di beberapa sektor ekonomi dan sosial yang tetap memperhatikan protokol kesehatan, maupun dukungan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta peningkatan ekspor sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung di beberapa negara mitra dagang dan tren peningkatan harga komoditas yang mendongkrak nilai ekspor komoditas Lampung.

Pada Triwulan III-2021 perekonomian Lampung tumbuh sebesar 3,05% (yoy), meskipun melambat bila dibandingkan triwulan II-2021 yang tumbuh sebesar 5,15% (yoy). Realisasi pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III-2020 yang tercatat terkontraksi 2,41% (yoy). Dari **sisi pengeluaran**, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan III-2021 didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, serta komponen pengeluaran lainnya yang masih tumbuh positif. Kinerja sektor eksternal tercatat positif didorong oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor yang juga tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan. Kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang memiliki pangsa terbesar terhadap perekonomian Lampung tumbuh sebesar 2,01% (yoy) pada triwulan III 2021, melambat dibandingkan triwulan II-2021 yang tumbuh sebesar 5,06% (yoy). Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga yang melambat dipengaruhi oleh terbatasnya mobilitas masyarakat akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Konsumsi Pemerintah tumbuh 2,00% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,70% (yoy). Sejalan dengan itu, Konsumsi LNPRT tumbuh 1,02% (yoy), lebih rendah dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,38% (yoy). Selain itu, kinerja investasi pada triwulan III 2021 tumbuh lebih rendah

sebesar 3,63% (yoy) dibandingkan 4,47% (yoy) pada triwulan II 2021. Di **sisi lapangan usaha (LU)**, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2021 ditopang oleh tetap kuatnya kinerja kinerja Industri Pengolahan dan Perdagangan yang tumbuh masing-masing sebesar 7,23% (yoy) dan 10,23% (yoy). Sementara itu, meskipun sempat tumbuh positif pada periode triwulan sebelumnya, pada triwulan III-2021 ini lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki pangsa terbesar terhadap PDRB Provinsi Lampung tercatat terkontraksi minus 1,53% (yoy).

Pada Triwulan IV-2021, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,15% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 3,00% (yoy). Realisasi pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV 2020 yang tercatat terkontraksi sebesar 2,25% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2021 didorong oleh peningkatan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kinerja PMTB/Investasi pada triwulan IV 2021 juga tumbuh sebesar 6,41% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (3,63%, yoy). Di sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 ditopang oleh kinerja positif dari LU utama Lampung yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan LU Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 16,81% (yoy) dan 14,63% (yoy).

Secara keseluruhan, perekonomian Lampung tahun 2021 tercatat meningkat sebesar 2,79 persen (yoy), lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi hingga minus 1,67 persen. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan nasional yang didukung oleh perluasan Vaksin Covid-19 dan penerapan protocol Kesehatan di setiap sektor kehidupan masyarakat

Geliat perekonomian juga diikuti dengan membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka di Lampung meningkat dari 4,67 persen pada Agustus 2020 menjadi 4,69 persen pada bulan Agustus 2021. Demikian pula dengan angka kemiskinan, yang

bergerak dari 12,76 persen pada September 2020 menjadi 11,67 persen pada September 2021. Di tengah kondisi perekonomian 2021 yang mulai membaik, dinamika perkembangan tingkat harga di Provinsi Lampung masih dalam rentang batas yang terkendali, dimana inflasi gabungan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2021 tercatat sebesar 2,19 persen.

Secara keseluruhan tahun 2022, perekonomian Lampung diprakirakan berada pada kisaran 4,47%–5,29%, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2021 yang tumbuh sebesar 2,79%. Pemulihan ekonomi global dan nasional diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2022, di tengah termoderasinya pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang. Namun demikian, terdapat risiko yang perlu terus di waspadai yang bersumber dari meningkatnya penyebaran Covid-19 varian Omicron.

Disisi pengeluaran, akselerasi pemulihan ekonomi akan didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, mobilitas masyarakat yang relatif lebih tinggi, dan semakin terjaganya stabilitas makroekonomi. Prakiraan pertumbuhan konsumsi sejalan dengan pulihnya aktivitas ekonomi, peningkatan omset penjualan, perbaikan disposable income, perbaikan keyakinan konsumen, dan pelanggaran mobilitas masyarakat. Capaian realisasi program vaksinasi yang terus meningkat turut mendukung peningkatan mobilitas masyarakat yang mendorong perekonomian Provinsi Lampung. Hal ini berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerja sejalan dengan semakin berkurangnya dampak penyebaran Covid-19 terhadap pasar tenaga kerja. Perkiraan ekonomi yang membaik tersebut yang diimbangi dengan peningkatan serapan tenaga kerja akan mendorong peningkatan omset kegiatan usaha sehingga berdampak pada peningkatan disposable income masyarakat yang mendorong konsumsi rumah tangga dan peningkatan investasi.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil kajian KPw BI Provinsi Lampung, terdapat peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap

peningkatan penjualan, tingkat upah, jumlah tenaga kerja, harga jual, dan investasi pada tahun 2022 jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sejalan dengan adanya perkiraan peningkatan kinerja LU utama Provinsi Lampung. Ekspektasi pelaku usaha tersebut juga didukung oleh beberapa faktor pendorong peningkatan kinerja LU Utama Provinsi Lampung, yaitu meningkatnya kapasitas produksi tanaman pangan, terjaganya produksi tanaman sawit di tengah harga acuan CPO dunia yang tetap tinggi, serta berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Lampung, yaitu logistik kereta api Lahat – Muara Enim – Prabumulih Tarahan. Dari sisi pendapatan masyarakat, perkiraan peningkatan disposable income sejalan dengan perkiraan peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan upah minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2022

Seiring terakselerasinya pemulihan ekonomi, terdapat beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penghambat pertumbuhan, diantaranya penyebaran Covid-19 varian Omicron di Indonesia yang terjadi pada tahun 2022 serta perkiraan tertahannya pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor karena berakhirnya pelonggaran ketentuan uang muka bagi pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) paling sedikit 0% dan adanya penyesuaian diskon Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) pada tahun 2022, meski terdapat beberapa penyesuaian besaran insentif PPnBM pada kendaraan yang berjenis low-cost green car (LCGC) pada setiap triwulan tahun 2022.

Disisi Lapangan Usaha (LU), perekonomian Lampung masih bertumpu pada tiga LU utama yakni LU pertanian, kehutanan, dan perikanan, LU industri pengolahan, serta LU perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian Lampung akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Lampung di tahun 2022. Peningkatan kinerja komponen permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga, akan tercermin pada akselerasi pertumbuhan yang terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Industri Pengolahan, serta LU Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan akibat dari peningkatan kegiatan usaha yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Setelah berkontraksi pada tahun 2021, output LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2022 diperkirakan mengalami peningkatan, **Lapangan Usaha pertanian, perikanan dan kehutanan pada tahun 2022 diindikasikan dapat tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.** Hal ini akan didorong oleh peningkatan produktivitas kegiatan pertanian yang didukung oleh proses pengairan yang lebih optimal sejalan dengan telah selesainya proyek rehabilitasi saluran irigasi sentra pertanian di tahun 2021 pada Januari 2022. Selain itu, terdapat perkiraan peningkatan produksi kelapa sawit akibat pengelolaan perkebunan yang lebih baik seiring semakin terkendalinya penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung. Adapun peningkatan permintaan kelapa sawit yang lebih tinggi didukung oleh meningkatnya permintaan oleofood dan kebutuhan CPO untuk biodiesel di dalam negeri. Potensi peningkatan output yang lebih tinggi juga didukung oleh berbagai program Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tanaman pangan melalui penyaluran sarana pasca panen sejumlah 70 unit, pengembangan kawasan ubi kayu seluas 1.200 Ha, pengembangan kawasan padi seluas 4.000 Ha, pengembangan kawasan padi biofortifikasi seluas 900 Ha, serta bantuan benih padi inbrida (25kg/Ha) pada lahan seluas 35.000 Ha.

Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang dapat menghambat potensi pertumbuhan output LU pertanian, diantaranya adalah fenomena La Nina dengan intensitas rendah sampai dengan sedang pada triwulan IV 2021 dan triwulan I 2022, El Nino pada paruh kedua tahun 2022, serta harga pupuk dan pestisida yang diperkirakan tetap tinggi pada paruh pertama tahun 2022 sebagai dampak dari adanya gangguan rantai pasokan, permintaan yang lebih tinggi, serta kenaikan biaya pengiriman dan input.

Sejalan dengan peningkatan kinerja LU Pertanian, pemulihan kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan berlanjut pada keseluruhan tahun 2022,

dan berpotensi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh perkiraan peningkatan produksi crude palm oil (CPO) karena pengelolaan perkebunan yang lebih baik dan optimalnya operasional pabrik didukung oleh dampak La Nina yang relatif terkendali jika dibandingkan dengan kondisi di Malaysia yang dilanda banjir pada triwulan I-2022. Permintaan CPO juga diperkirakan mengalami peningkatan seiring berlanjutnya pemulihan sektor Horeca dan adanya peningkatan alokasi kuota biodiesel B30 menjadi 10 juta kiloliter pada tahun 2022. Adapun produksi gula kristal dan rafinasi juga diperkirakan mengalami peningkatan, sejalan dengan kuota perizinan impor (PI) gula rafinasi untuk tahun 2022 yang tercatat sebesar 3,4 juta ton, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuota tahun 2021 (3,1 juta ton).

Hasil liaison KPw BI Provinsi Lampung juga mendukung perkiraan peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan dimana responden (korporasi) liaison menyatakan optimismenya atas peningkatan utilisasi faktor produksi dan permintaan domestik yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan output yang lebih tinggi diperkirakan tertahan oleh risiko terhambatnya aktivitas produksi dan tertahannya peningkatan permintaan di tengah peningkatan kasus baru varian omicron Covid-19 pada triwulan I 2022. Selain itu, kebijakan DMO dan DPO untuk CPO yang diterapkan pada Januari 2022 berpotensi menghambat pertumbuhan output industri pengolahan CPO, terutama bagi pelaku usaha yang hanya menjual produknya ke pasar domestik dan tidak memiliki perkebunan sawit terintegrasi.

Pemulihan kinerja LU Perdagangan pada tahun 2022 diperkirakan berlanjut dan juga berpotensi tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang lebih tinggi tersebut didorong oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik sejalan dengan meningkatnya optimisme konsumen terhadap perekonomian ke depan serta peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan penjualan yang didukung oleh akselerasi program vaksinasi dan booster

vaksin Covid-19.

Beberapa faktor yang turut mendukung peningkatan volume perdagangan diantaranya penerapan standar emisi Euro 4 pada kendaraan diesel dan meredanya krisis chip semikonduktor global yang mendorong peningkatan produksi kendaraan bermotor dan alat-alat elektronik. Peningkatan ekspektasi dan volume perdangan tersebut juga akan tercermin dari mobilitas masyarakat tahun 2022 yang diperkirakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021, terutama pada momen Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri dan Nataru (Natal dan Tahun Baru) tahun 2022. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2022 diperkirakan tertahan akibat adanya penyebaran Covid-19 varian omicron serta berakhirnya pelonggaran ketentuan uang muka bagi pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) paling sedikit 0% dan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100% pada 31 Desember 2021, meskipun terdapat penyesuaian pada insentif PPnBM pada setiap triwulan di tahun 2022.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Trend positif pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang tahun 2021 tentunya akan menjadi momentum untuk mendorong keberlanjutan ekonomi daerah di tahun 2022 saat ini dan tahun 2023 mendatang. Keadaan tersebut turut pula didukung dengan optimisme perekonomian global dan nasional yang terus menuju perbaikan pasca Covid-19 di tahun 2020. Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5 persen yang akan didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor Indonesia yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Selain itu keberhasilan program vaksinasi, pengendalian atas pelonggaran sektor ekonomi dan aktifitas sosial, dan stimulus lanjutan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2022 serta hadirnya perbaikan kinerja perekonomian di tahun 2021 menjadi modal

untuk semakin bangkitnya pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 dan optimisme yang lebih baik di tahun 2023.

Meski demikian, pemerintah daerah meyakini bahwa pengendalian dan penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan tetap menjadi kunci keberhasilan menuju kebangkitan ekonomi. Oleh karenanya, sikap waspada terus dikedepankan, mengingat hingga saat ini ancaman gelombang ke-3 virus Covid-19 masih ada di tengah masyarakat. Akselerasi program vaksinasi secara masif dan peningkatan protokol kesehatan secara simultan akan terus dilanjutkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan prospek ekonomi dalam jangka pendek.

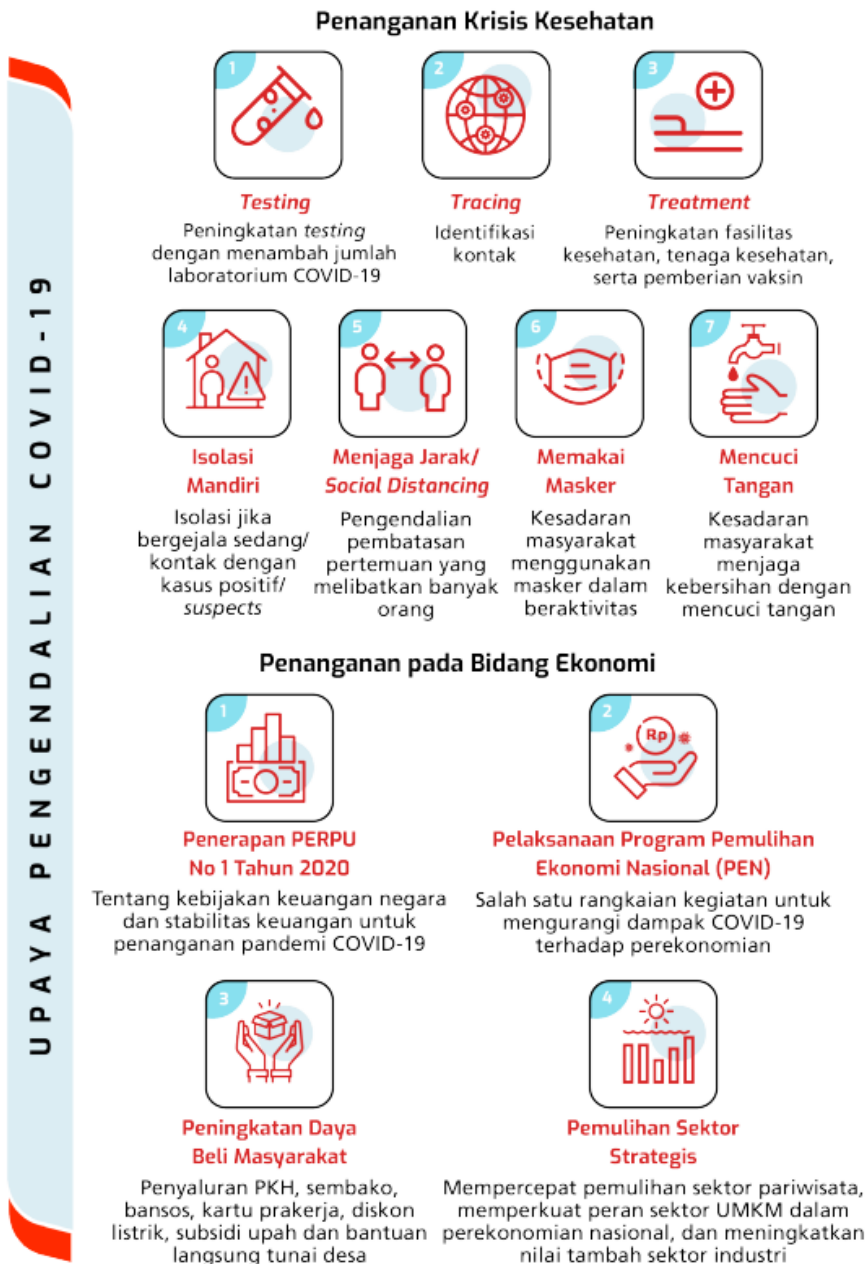
Di samping itu, terdapat resiko pada *sisi eksternal* yang terkait dengan adanya dinamika geopolitik perekonomian global (adanya ketegangan politik antara Rusia- Ukraina-Amerika serta persaingan ekonomi Amerika dan China) perlu menjadi pertimbangan, dimana goncangan (=perlambatan) akan menahan laju permintaan perekonomian global yang dapat berdampak terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Pada *sisi internal*, Pemerintah daerah sangat menyadari bahwa pembangunan yang tengah dan yang akan kita laksanakan ke depan masih menghadapi berbagai tantangan dalam banyak aspek pembangunan. Perekonomian Lampung memerlukan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, dengan ditopang oleh basis ekonomi yang tangguh. Derajat kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan infrastruktur yang handal serta perbaikan kualitas lingkungan harus terus ditingkatkan. Di samping itu, peningkatan kualitas layanan publik dan layanan birokrasi tetap perlu terus dilakukan, yang diikuti dengan pengelolaan alokasi fiskal pembangunan secara lebih disiplin dan produktif. Untuk menjawab tantangan ke depan, dibutuhkan sinergi, inovasi, penguasaan teknologi dan sikap antisipatif.

3.1.3 Kebijakan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* di Daerah.

Dalam Rancangan RKP Tahun 2023 bahwa pelaksanaan pembangunan nasional mengalami tekanan sejak meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Krisis kesehatan tidak dapat dihindari sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian nasional. Kondisi tersebut terjadi secara global yang bersifat unprecedented shock dan belum ada negara yang memiliki pengalaman dalam menanggulangi pandemi tersebut.

Pemerintah Indonesia terus merespons dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemic COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.

Dalam Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2023 Pasal 2 bahwa RKPD Provinsi berpedoman pada RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dalam RKPD Tahun 2023 masih memprioritaskan kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 di daerah.



Sumber : Rancangan RKP 2023

Vaksinasi yang telah dimulai secara gradual sejak tahun 2021 terbukti mampu mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 menuju pencapaian herd immunity. Pelaksanaan vaksinasi, pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi, serta pertumbuhan ekspor yang tinggi memberikan kontribusi pada pemulihan perekonomian yang relatif cepat. Meskipun terjadi lonjakan varian Delta pada pertengahan tahun 2021, namun pertumbuhan

ekonomi pada periode yang sama tetap menunjukkan tren positif. Penguatan ekonomi diperkirakan akan berlanjut selama tahun 2022 dan 2023.

Memperhatikan arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada Rapat Terbatas tanggal 5 Februari 2022, Provinsi Lampung menetapkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kriteria Level 2 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Lampung.

Situasi Pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 sudah terlihat trend kenaikan kasus mulai minggu ke-3 Januari 2022 jumlah kasus bulan Januari sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 sebesar 695 kasus yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Adanya peningkatan kasus baru perlu disikapi dengan positif, karena merupakan kinerja petugas di lapangan yang melakukan skrining secara aktif; termasuk skrining pada Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Satuan Pendidikan untuk menekan penularan dengan segera melakukan Isolasi dan Karantina. Ada kecenderungan peningkatan kasus baru dalam 1 minggu terakhir dan sudah ditemukan Varian Omicron di Provinsi Lampung sebanyak 5 kasus (Berdasarkan hasil WGS yang dikirimkan dari Litbangkes). Terkait adanya omicron di Lampung sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat dengan Satgas COVID-19 tanggal 31 Januari 2022, dilanjutkan dengan Rapat Gubernur Bersama Forkopimda tanggal 4 Februari 2022.

Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ada beberapa kegiatan yang dilakukan :

Kegiatan pada Sektor Hulu :

1. Pengetatan PROTOKOL KESEHATAN dan Pelaksanaan Aplikasi Peduli Lindungi pada Area Publik;
2. Percepatan Vaksinasi untuk mencapai *Herd Immunity*;
3. Surveilans Faktor Risiko : ILI, SARI untuk mendeteksi kasus secara dini;

4. Surveilans PTM di Satuan Pendidikan (RDT Antigen) dan populasi berisiko pada *Closed Residence*;
5. Surveilans GENOM;
6. Mengintensifkan Testing dan Tracing dalam pencarian Kontak Erat;
7. Aktifkan Posko pada PPKM Mikro pada level Kelurahan/RT/RW;
8. Pengetatan pintu masuk.

Kegiatan pada Sektor Hulu :

1. Persiapan Fasilitas Sarana Kesehatan , SDM Kesehatan, Obat-obatan dan Oksigen;
2. Persiapan Sarana Isolasi dan Karantina terpusat (Pemerintah), masyarakat dengan isolasi mandiri sesuai standar;
3. Persiapkan Laboratorium untuk penegakkan diagnostik (saat ini sarana PCR di Lampung sudah ada 13 sarana PCR Pemerintah dan Swasta).

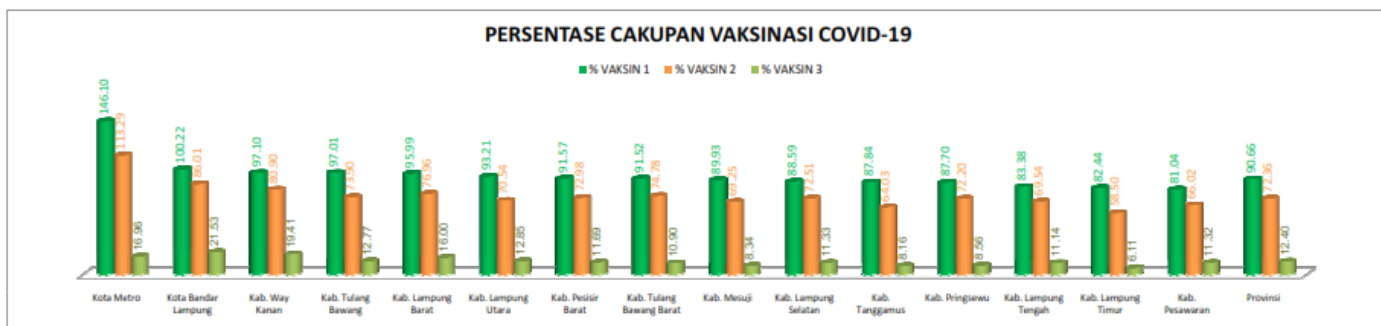
Pada awal tahun 2022, vaksinasi *booster* juga akan mulai dilaksanakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan antibody. Disamping itu, strategi pengendalian COVID-19 terus dilanjutkan melalui :

1. Pelaksanaan 3-TI : Testing, Tracing, Treatment (Isolasi Terpusat dan Karantina)
2. Penegakan disiplin Masyarakat dengan PROTOKOL KESEHATAN atau 3M atau 5 M
3. Akselerasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dengan Kolaborasi PEMERINTAH dengan MASYARAKAT
4. Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di masyarakat
5. Pembatasan Mobilitas Pelaku Perjalanan Pengetatan pintu masuk dari perjalanan Luar negeri dan antar provinsi, Penerapan PPKM
6. Pemantauan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru tiba dari Luar Negeri

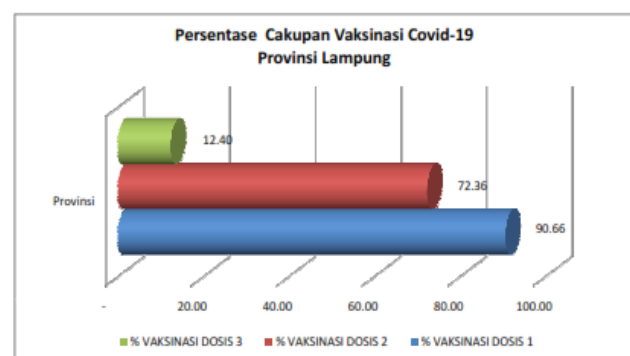
Lebih lanjut, sebagai upaya percepatan *herd immunity* di Provinsi Lampung, dilakukan pula beberapa antara lain :

1. Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi pada publik area, perkantoran, sekolah dan lain-lain, bila ditemukan ada yang belum lengkap dosis vaksinasinya diarahkan ke fasilitas kesehatan atau sentra vaksinasi di tempat (On site)
2. Melakukan vaksinasi dan percepatan *booster* secara onsite dan mobile
3. Menjadikan cakupan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap (2 Dosis) sebagai syarat untuk melakukan :
 - Acara keagamaan dan acara sosial
 - Pemberian bantuan sosial
 - Syarat Administrasi perjalanan, Pendidikan/beasiswa, area mall, area publik dan administrasi lainnya

Informasi Monitoring Vaksinasi COVID-19 Provinsi Lampung Per Juni 2022



Kab/Kota	Sasaran	SAKSI VAKSINASI DOSIS 1	% VAKSINASI DOSIS 1	SAKSI VAKSINASI DOSIS 2	% VAKSINASI DOSIS 2	SAKSI VAKSINASI DOSIS 3	% VAKSINASI DOSIS 3
Kab. Lampung Barat	220,417	211,587	95.99	169,633	76.96	35,267	16.00
Kab. Lampung Selatan	774,818	686,416	88.59	561,810	72.51	87,769	11.33
Kab. Lampung Tengah	1,096,836	914,501	83.38	762,775	69.54	122,189	11.14
Kab. Lampung Timur	830,734	684,835	82.44	485,938	58.50	50,753	6.11
Kab. Lampung Utara	458,561	427,436	93.21	323,486	70.54	58,948	12.85
Kab. Mesuji	166,216	149,483	89.93	115,100	69.25	13,864	8.34
Kab. Pesawaran	347,394	281,533	81.04	229,343	66.02	39,311	11.32
Kab. Pesisir Barat	115,175	105,464	91.57	84,055	72.98	13,468	11.69
Kab. Pringsewu	299,339	262,515	87.70	216,113	72.20	25,628	8.56
Kab. Tanggamus	471,722	414,360	87.84	302,039	64.03	38,471	8.16
Kab. Tulang Bawang	312,547	303,210	97.01	230,962	73.90	39,902	12.77
Kab. Tulang Bawang Barat	210,123	192,298	91.52	157,136	74.78	22,911	10.90
Kab. Way Kanan	341,283	331,397	97.10	276,087	80.90	66,238	19.41
Kota Bandar Lampung	875,285	877,207	100.22	752,861	86.01	188,407	21.53
Kota Metro	124,776	182,296	146.10	141,353	113.29	21,167	16.96
Provinsi	6,645,226	6,024,538	90.66	4,808,691	72.36	824,293	12.40



Sumber : Control Tower Vaksin KPCPEN-Dinas Kesehatan Prov Lampung, 2022

Dalam rangka upaya pemantapan pemulihan ekonomi, salah satunya adalah melalui Peningkatan Investasi. Penting untuk terus diupayakan peningkatan Investasi dalam rangka percepatan pemantapan pemulihan

ekonomi akibat dampak Covid-19 di Lampung. Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi, pemberian insentif pajak bagi investor, jaminan kepastian hukum berusaha, kepastian biaya pelayanan, promosi investasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendukung usaha, bisnis dan investasi. Beberapa rencana program strategis Provinsi Lampung yang sedang dilakukan untuk mendorong peningkatan Investasi antara lain: Pembangunan Kawasan pariwisata Terpadu Bakauheni, Pembangunan Kawasan Industri Tanggamus, Kawasan Industri Way Pisang, Pengembangan Food Estate dan Rencana Pengembangan Sport Center.

Upaya lain yang dilakukan adalah **Memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan**, sesuai dengan basis ekonomi Lampung, dimana hampir 50 persen penduduk usia kerja berkecimpung pada sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki program “Kartu Petani Berjaya” yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian (hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan). Selanjutnya adalah **Pemulihan sektor UMKM, Industri, Perdagangan, dan Pariwisata**, untuk optimalisasi sektor-sektor industri unggulan daerah secara bertahap; Untuk menggerakkan ekonomi dan membangkitkan kembali potensi Pariwisata daerah, pemerintah melakukan pembukaan kembali Destinasi Wisata dengan disiplin menerapkan protocol kesehatan terutama destinasi wisata yang beresiko rendah misalnya wisata alam yang banyak terdapat di Provinsi Lampung, yang didukung dengan peningkatan pemasaran destinasi wisata daerah; seraya memastikan bahwa aktifitas tersebut tetap mengedepankan aspek kesehatan.

3.1.4 Strategi dan Sasaran Pembangunan Ekonomi

Pemulihan Ekonomi mensyaratkan adanya keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19. Dengan asumsi bahwa pandemi Covid-19 dapat terkendali, perekonomian Lampung tahun 2023 diarahkan untuk tetap tumbuh sejalan dengan optimisme perekonomian nasional yang terus menuju perbaikan.

Pada **sisi penawaran**, data statistik ekonomi Lampung tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa perekonomian Lampung masih didominasi pada Lapangan Usaha **lingkup pertanian** (dengan *share* sekitar 29 persen). Di tengah masa pandemi Covid-19 yang melanda, porsi (=share) ekonomi dan tingkat pertumbuhan pada sektor pertanian sepanjang tahun 2020-2021, secara simultan menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian daerah secara signifikan. Demikian pula dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat, sektor pertanian menyerap lebih dari 40 persen penduduk yang bekerja. Sejalan dengan kondisi tersebut, guna memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten melaksanakan dan melanjutkan Program Kartu Petani Berjaya (KPB) ditahun-tahun mendatang, dimana petani peserta akan menerima kemudahan berupa ketersediaan pupuk dan alsintan, fasilitasi permodalan, pendampingan manajemen usaha pertanian, termasuk jaminan sosial bagi petani miskin, tidak mampu, serta beasiswa pendidikan keluarga petani miskin dan tidak mampu. Disamping itu, dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian, luncuran program untuk mendorong hilirisasi produk unggulan pertanian juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

Demikian pula dengan Lapangan Usaha **sektor industri pengolahan** dengan pangsa 19,70 persen dan **sektor perdagangan** dengan pangsa mencapai 11,39 persen. Kontribusi ekonomi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan tentunya tidak terlepas dari **peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** di Provinsi Lampung, yang memiliki potensi yang sangat tinggi. Hingga tahun 2019 tercatat bahwa di Provinsi Lampung terdapat 65,4 juta unit UMKM dengan proporsi Mikro sebesar 64,6 juta unit (98,67%), Kecil sebesar 798 ribu unit (1,22%), dan Menengah sebesar 65 ribu unit (0,1%). Dari sisi jumlah tenaga kerja, usaha Mikro mempekerjakan sebanyak 109 juta orang (89,04%), Kecil sebanyak 5,9 juta orang (4,81%), dan Menengah sebanyak 3,7 juta orang (3,07%). Dari sisi kontribusi terhadap PDB

atas dasar harga berlaku, usaha Mikro berkontribusi sebanyak Rp5,9 Milyar (36,77%), Kecil sebanyak Rp1,5 Milyar (9,6%), dan Menengah sebanyak Rp2,1 Milyar (13,7%). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat, kebijakan ekonomi ke depan tetap diarahkan pada penguatan akses keuangan yang inklusif, peningkatan kapasitas SDM dan manajemen serta fasilitasi transformasi ekonomi digital bagi pelaku usaha; sehingga kegiatan UMKM dapat semakin berdaya saing dan membuka peluang akses lapangan kerja bagi Angkatan Kerja yang terus bertambah (usia produktif).

Lebih lanjut, keberlanjutan program pengembangan wilayah yang telah dicanangkan yaitu Bakauheni Harbour City (BHC) akan terus diakselerasi oleh Pemerintah Daerah secara bertahap dengan menggandeng pihak swasta, sehingga akan mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru, berkembangnya potensi ekonomi daerah, yang dapat berdampak *multiplayer effect* pada banyak sektor usaha dan berbagai kalangan pelaku usaha.

Pada **sisi permintaan**, komponen utama penggerak ekonomi Lampung didominasi oleh **konsumsi rumah tangga** dengan pangsa pada kisaran 55-60 persen dari total pengeluaran ekonomi Provinsi Lampung. Meskipun terbatas, kemampuan konsumsi masyarakat di masa pandemi masih tumbuh positif sejalan dengan pembukaan aktivitas ekonomi yang didukung oleh perluasan program vaksinasi, serta perbaikan pendapatan masyarakat secara umum seiring pemulihan ekonomi daerah. Program peningkatan pendapatan dan program bantuan sosial ikut menopang terjaganya kemampuan konsumsi masyarakat tahun 2021. Selain itu, adanya perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang tercatat mengalami peningkatan yakni sebesar 8,91% (yoy) pada triwulan III 2021 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (8,33%; yoy), dimana sektor pertanian menyerap sebagian besar tenaga kerja di Provinsi Lampung dan memiliki kontribusi yang besar (29,94%) pada perekonomian Lampung cukup berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat secara umum. Selanjutnya, kinerja konsumsi rumah tangga akan dipertahankan untuk tumbuh positif seiring dengan meningkatnya optimisme

konsumen terhadap kinerja perekonomian ke depan. Perluasan dan percepatan program vaksinasi untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19, serta penerapan protokol kesehatan diyakini dapat berpengaruh terhadap laju pemulihan ekonomi di berbagai daerah, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga. Disamping itu, guna menahan laju meningkatnya kemiskinan secara makro, pemerintah akan terus melanjutkan program pengendalian inflasi serta lanjutan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat, yang dikombinasikan dengan program bantuan sosial secara tepat waktu dan tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha mikro dan kecil.

Demikian pula konsumsi **Belanja pemerintah** terhadap perekonomian, akan diarahkan pada pelaksanaan pelayanan publik dan Belanja Prioritas yang benar-benar memiliki dampak untuk memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Terkait hal tersebut, distribusi fiskal dari sisi waktu dan disiplin dalam pengelolaan anggaran pemerintah dapat memberi dukungan positif terhadap perekonomian.

Terkait dengan upaya untuk mendorong tetap tumbuhnya **Investasi**, Pemerintah Daerah akan terus menjaga persepsi positif investor swasta, yang dilakukan melalui perbaikan iklim kemudahan berusaha termasuk aspek informasi (transparansi, kemudahan akses, kelengkapan, kekinian dan akurasi); aspek regulasi (kepastian, kejelasan, keselarasan, sederhana dan insentif investasi); aspek komunikasi dan program (strategi promosi dengan public relation yang handal, jejaring investor domestik dan internasional yang luas, serta visi, program dan timeline yang jelas). Disamping itu, upaya-upaya untuk memperkuat sinergi antar Pemerintah Daerah dan stake holder terkait, termasuk mempersiapkan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata dengan dukungan regulasi dan infrastruktur dasar yang memadai sehingga dapat menarik minat investor. Demikian pula dengan kegiatan **ekspor** di daerah. Kinerja ekspor yang membaik di tahun 2021 diperkirakan akan terus menopang pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Hal ini terjadi seiring dengan masih meningkatnya permintaan global dan perbaikan harga

komoditas dunia. Meskipun harga produk di pasar global masih dibayangi dengan ketidakpastian dimasa pandemi, namun ketersediaan produk yang berkualitas dan inovasi produk menjadi hal penting untuk mendorong peningkatan nilai ekspor. Oleh karenanya peningkatan dan perluasan akses pasar melalui penguatan fasilitasi dan informasi ekspor akan terus dilakukan.

Dengan memperhatikan berbagai dinamika global dan nasional, , maka beberapa sasaran kinerja ekonomi dan sosial Provinsi Lampung tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel III - 10 Sasaran Indikator Makro Provinsi Lampung Tahun 2023

No	URAIAN	TARGET TAHUN 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,5-4,5
2	PDRB Perkapita (Juta Rp)	43-44
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	70,3-70,6
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,0-4,3
5	Kemiskinan (Persen)	11,4-11,9
6	Gini Rasio (Poin)	0,302-0,319
7	Inflasi (Persen)	3±1
8	Tingkat Kemantapan Jalan (km)	77
9	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	104-105
10	Persentase Peningkatan PAD (Persen)	4,74
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Persen)	7.066

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, perencanaan pembangunan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan memiliki dasar hukum.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan

tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman kepada RKPD. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD; dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kembali bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS). Lebih lanjut, kebijakan umum keuangan daerah diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, fungsi alokasi dan fungsi distribusi guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah **“PENGUATAN EKONOMI YANG INKLUSIF UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH”** dengan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu : 1) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan; 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 3) Pembangunan infrastruktur; 4) Reformasi Birokrasi; 5) Kehidupan masyarakat yang Religius, Aman, dan Berbudaya; 6) Pengelolaan lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana. Selanjutnya, penyusunan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 telah pula mengintegrasikan 33 Agenda Kerja Gubernur/Wakil Gubernur ke dalam rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah maka kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah akan diarahkan pada: mobilisasi pendapatan yang terukur dan realistis, belanja berkualitas yang berorientasi terhadap pemenuhan pelayanan kepada masyarakat; menjadi alat untuk memelihara dan mendorong perekonomian daerah termasuk pemantapan terhadap pemulihan ekonomi pasca Covid-19; penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; sekaligus pencapaian sasaran prioritas

pembangunan daerah serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara kebijakan sisi perencanaan (RKPD) dengan kebijakan pada sisi penganggaran (R-APBD) yang terintegrasi dan dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2019 dan 2020 serta target pendapatan daerah Provinsi Lampung pada tahun 2021, serta asumsi pendapatan 2022 dan 2023. Sesuai dengan kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023.

Tabel III - 11 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2023

NO	URAIAN (PP No. 58/2005)	REALISASI		NO	URAIAN (PP No. 12/2009)	REALISASI 2021	APBD 2022	PROYEKSI 2023
		2019	2020					
1	PENDAPATAN	7.277.774.464.693,53	7.041.401.501.207,57	1	PENDAPATAN	7.467.646.672.484,51	6.558.085.742.933,00	6.468.952.345.093,00
01.01	Pendapatan Asli Daerah	3.029.324.859.696,53	2.863.527.923.555,57	01.01	Pendapatan Asli Daerah	3.247.848.123.204,51	3.447.849.161.718,00	3.368.158.527.678,00
01.01.01	Pajak Daerah	2.627.888.230.394,00	2.386.345.268.304,00	01.01.01	Pajak Daerah	2.721.138.045.704,00	2.678.859.165.839,00	2.760.298.551.971,00
01.01.02	Retribusi Daerah	11.071.757.866,00	15.176.408.104,00	01.01.02	Retribusi Daerah	27.160.007.996,00	8.424.510.038,00	8.315.825.518,00
01.01.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan	27.837.905.348,92	29.873.630.623,14	01.01.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan	33.335.927.752,08	276.855.820.869,00	115.247.133.261,00
01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	362.526.966.087,61	432.132.616.524,43	01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	466.214.141.752,43	483.709.664.972,00	484.297.016.928,00
01.02	Dana Perimbangan	4.192.583.693.214,00	4.122.603.929.957,00	01.02	Pendapatan Transfer	4.209.156.682.009,00	3.090.977.700.680,00	3.087.055.157.680,00
01.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak	84.263.676.420,00	125.017.499.210,00	01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	4.201.782.231.009,00	3.062.179.175.100,00	3.062.179.175.100,00
01.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak	53.804.116.325,00	32.776.463.916,00	01.02.02	Transfer Antar Daerah	7.374.451.000,00	28.798.525.580,00	24.875.982.580,00
01.02.03	DAU	1.906.780.297.000,00	1.732.551.921.000,00					
01.02.04	DAK	283.772.374.173,00	263.393.488.870,00					
01.02.05	DAK Non Fisik	1.863.963.229.296,00	1.968.864.556.961,00					
01.03	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	55.865.911.783,00	55.269.647.695,00	01.03	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.641.867.271,00	19.258.880.535,00	13.738.659.735,00
01.03.01	Pendapatan Hibah	11.362.590.000,00	8.835.549.695,00	01.03.01	Pendapatan Hibah	10.564.474.321,00	19.258.880.535,00	13.738.659.735,00
01.03.03	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.756.363.000,00	46.434.098.000,00	01.03.02	Dana Darurat	-		
01.03.04	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.746.958.783,00	-	01.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	77.392.950,00		

Sumber : Bappeda, 2022

Struktur pendapatan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah Tahun 2023 diasumsikan mengalami penurunan sebesar 1,36 persen apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2022, penurunan tersebut bersumber diantaranya dari PAD yang ditargetkan turun sebesar 2,31 persen, pendapatan transfer turun sebesar 0,13 persen dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar 28,66 persen.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Lampung merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 menjadi landasan kuat untuk mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2023. Akselerasi tersebut didorong oleh agenda transformasi ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, dan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat trajectory pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.

Proses pemulihan ekonomi global dan domestik secara umum akan berdampak pada kinerja keuangan daerah terutama dari sisi penerimaan. Pada sektor pendapatan daerah, reformasi di bidang perpajakan akan

diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan serta peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBPN.

Adapun langkah-langkah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung pasca pandemi Covid-19 antara lain:

1. Penetapan kebijakan relaksasi pajak daerah berupa pengurangan denda pajak dan keringanan pajak.
2. Memperluas aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia seperti: e-Salam 1 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui ATM) dan e-Salam 2 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui aplikasi berbasis Android), e-Samdes (pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai tingkat pedesaan yang pembayarannya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa/Bumdes), dan Signal (Pembayaran dan Pengesahan Pajak Kendaraan Bermotor secara Digital).
4. Bekerjasama dengan Alfamart dan Indomaret guna mempermudah akses pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5. Menambah unit layanan Samsat Keliling untuk menjangkau daerah terpencil yang berada di Provinsi Lampung.
6. Mengupayakan adanya reward bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk stimulus.
7. Peningkatan Sosialisasi kesadaran membayar pajak melalui door to door yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melibatkan unsur pemerintahan Kecamatan dan aparat desa.
8. Melakukan koordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang serta PT Pertamina Patra Niaga dalam pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

9. Melanjutkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam optimalisasi penerimaan pendapatan pusat dan daerah.
10. Meningkatkan intensitas sosialisasi pembelian bahan bakar minyak dari penyedia yang resmi dan terdaftar.
11. Melakukan pengembangan aplikasi e-PBBKB.
12. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Air Permukaan.
13. Kerjasama dengan Ditlantas Polda Lampung, Dinas Perhubungan, dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat guna mengotimalkan penagihan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing.
14. Mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial, elektronik dan cetak terkait pajak dan retribusi daerah.
15. Melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penyediaan database yang handal dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
16. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan PAD.
17. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan Stakeholder penghasil pendapatan daerah.
18. Bekerjasama dengan BPKAD dan OPD dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan aset daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
19. Optimalisasi penerapan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Retribusi Daerah.
20. Meningkatkan Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan melalui optimalisasi perencanaan dan pengawasan pada tata kelola BUMD, serta
21. Mengoptimalkan Sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah melalui pengelolaan dan penataan aset daerah dan peningkatan profesionalisme BLUD.

Sedangkan dari Sektor Pendapatan Transfer, Provinsi Lampung akan terus berupaya meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat guna mendukung Struktur Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebagai upaya peningkatan fiskal daerah Provinsi Lampung antara lain :

- a. Mendorong penggunaan NPWP lokal pada dunia usaha yang melakukan kegiatan di provinsi lampung yang berpotensi meningkatkan bagi hasil pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Psl 21,
- b. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dimana kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat seiring dengan reformasi administrasi perpajakan Pemerintah Pusat.
- c. Memperkuat koordinasi secara aktif dan intensif dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dana transfer.
- d. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan baik pendapatan dan Belanja serta pelaporan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan mengoptimalkan ruang fiskal daerah, kebijakan pada **sisi Belanja Daerah** tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi untuk memelihara dan mendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi daerah. Disaat yang bersamaan pemerintah daerah juga berkomitmen menindaklanjuti kebijakan *mandatory* dari pemerintah pusat tentang dukungan untuk pemantapan terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Dalam rangka menghadapi adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah; Pemerintah daerah juga konsisten dalam melanjutkan kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran belanja melalui penetapan program dan kegiatan prioritas (*money follow program*) dengan pendekatan berbasis kinerja; yang dilakukan dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas belanja dan meningkatkan disiplin penganggaran, sehingga dapat memberi dukungan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah juga diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian proritas daerah dan nasional.

Selanjutnya, teknis pembahasan dan penyusunan proyeksi Belanja Daerah tahun 2023 dilakukan melalui beberapa langkah pokok, antara lain:

- Melakukan proyeksi terhadap kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar dalam satu tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah seperti : gaji dan tunjangan pegawai, kepala daerah dan anggota dewan; belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, belanja bunga, pembayaran pokok utang daerah, atau belanja sejenis lainnya; termasuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.
- Alokasi belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib yang terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- Belanja Daerah juga dialokasikan untuk melaksanakan sasaran pembangunan serta program prioritas Provinsi Lampung yang telah tercantum dalam visi-misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan mendukung pemulihan ekonomi daerah dan nasional pasca *Covid-19*; yang diselaraskan dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) sekaligus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; termasuk pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

- Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program, kegiatan, atau sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
- Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- Alokasi anggaran program/kegiatan ataupun sub kegiatan pada perangkat daerah juga dipaduserasikan dengan hasil pembahasan usulan Pemkab/Pemkot, Pokok Pikiran DPRD, maupun usul masyarakat pada forum-forum perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.

Pada tahun 2023 mendatang, total Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 6,2 trilyun, terdiri atas : Belanja Operasi sebesar Rp. 4,01 trilyun; Belanja Modal sebesar Rp. 893 Milyar; Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 31,5 milyar ; dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1,32 trilyun. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III - 12 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2023

NO	URAIAN (PP No. 58/2005)	REALISASI		NO	URAIAN (PP No. 12/2009)	REALISASI 2021	APBD 2022	PROYEKSI 2023
		2019	2020					
2	Belanja Daerah	7.058.713.890.790,72	6.967.358.447.958,34	5	Belanja Daerah	7.098.396.074.346,04	7.011.699.025.933,00	6.267.380.101.556,73
02.01	Belanja Tidak Langsung	4.601.397.973.966,79	4.551.254.974.409,56	5.1	Belanja Operasi	5.151.586.135.630,83	4.179.969.568.216,18	4.017.059.780.328,45
02.01.01	Belanja Pegawai	1.761.589.035.076,00	1.731.078.969.141,00	5.1.1	Belanja Pegawai	1.934.793.255.335,00	2.003.181.082.229,69	2.119.479.959.762,78
02.01.02	Belanja Hibah	1.329.394.600.511,00	1.437.518.594.295,00	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.506.811.447.462,71	1.641.319.600.959,29	1.487.906.275.017,67
02.01.03	Belanja Bantuan Sosial	1.030.000.000,00	352.400.000,00	5.1.3	Belanja Bunga	22.161.585.802,00	25.490.000.000,00	3.547.643.288,00
02.01.04	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kabupaten/Kota Dan Pmdes	1.459.179.743.870,73	1.231.408.694.144,94	5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
02.01.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/ Kabupaten/ Kota/ Pmdes Serta Parpol	15.896.272.800,00	-	5.1.5	Belanja Hibah	1.682.979.652.202,12	500.615.433.027,20	391.579.192.260,00
02.01.06	Belanja Subsidi	926.015.480,00	-	5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.840.194.829,00	9.363.452.000,00	14.546.710.000,00
02.01.07	Belanja Bunga	33.382.304.468,00	31.583.615.813,00	5.2	Belanja Modal	850.097.992.024,21	1.492.878.044.644,80	893.861.334.848,58
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	-	119.312.701.296,00	5.3	Belanja Tidak Terduga	126.400.000,00	31.500.000.000,00	31.500.000.000,00
02.02	Belanja Langsung	2.457.315.916.823,93	2.416.103.473.548,78	5.4	Belanja Transfer	1.096.585.546.691,00	1.307.351.413.072,02	1.324.958.986.379,70
02.02.01	Belanja Pegawai	166.083.743.332,00	240.233.396.093,00					
02.02.03	Belanja Barang Dan Jasa	1.277.194.649.465,29	1.423.341.867.179,80					
02.02.04	Belanja Modal	1.014.037.524.021,39	752.528.210.219,89					

Sumber : Bappeda, 2022

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi **Penerimaan Pembiayaan** dan **Pengeluaran Pembiayaan**. Secara umum, kebijakan pembiayaan yang ditempuh akan terkait dengan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan Pendapatan Daerah dan Belanja Belanja yang diuraikan sebelumnya, dalam hal Belanja Daerah diperkirakan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah maka kebijakan Pembiayaan Daerah diarahkan untuk menutup defisit. Terkait hal tersebut, **Penerimaan Pembiayaan** direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Disaat yang bersamaan, **Pengeluaran Pembiayaan** juga akan dialokasikan untuk melaksanakan kewajiban keuangan pemerintah daerah untuk membayar pokok utang kepada pihak ketiga (PT. Sarana Multi Infrastruktur/SMI), **serta penyertaan modal pada BUMD Provinsi Lampung untuk memperkuat skala usaha BUMD, penyerapan tenaga kerja lokal dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**. Secara rinci proyeksi Pembiayaan Daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel III - 13 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2023

NO	URAIAN	REALISASI			TARGET 2022	PROYEKSI 2023
		2019	2020	2021		
3	PEMBIAYAAN	127.852.838.338,84	6.967.358.447.958,34	362.093.411.843,04	453.613.283.000,00	201.572.243.536,00
03.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	213.992.353.291,31	336.132.388.142,31	190.917.079.139,04	644.793.283.000,00	25.000.000.000,00
03.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	86.138.166.352,00	197.176.332.704,00	171.176.332.704,00	191.180.000.000,00	226.572.243.536,00
	PEMBIAYAAN NETTO	127.852.838.338,84	6.967.358.447.958,34	19.740.746.435,04	453.613.283.000,00	201.572.243.536,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)					-

Sumber : Bappeda, 2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun 2023 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 maupun RPJMN Tahun 2020-2024. Diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan ekonomi daerah pasca keluar dari pandemic Covid 19 sekaligus mengejar pencapaian visi dan misi melalui pencapaian target indikator kinerja daerah dan agenda kerja utama yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional maka diperlukan kesinambungan perencanaan pembangunan. Perencanaan tahunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun dengan mencermati capaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan maupun tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, termasuk proyeksi kerangka ekonomi maupun kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Disatu sisi, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2023 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disisi yang lain, penyusunan RKPD Tahun 2023 juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.1 TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024 DAN RKP 2023

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

Sembilan Poin Nawacita Misi Presiden



Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia



Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing



Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan



Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa



Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya



Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga



Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya



Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selanjutnya, RPJMN 2020-2024 sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, maka penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan 9 (sembilan) misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia Maju, yaitu :



- 1** **Pembangunan SDM**

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
- 2** **Pembangunan Infrastruktur**

Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3** **Penyederhanaan Regulasi**

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan dua Undang-Undang (UU) yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
- 4** **Penyederhanaan Birokrasi**

Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural).
- 5** **Transformasi Ekonomi**

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

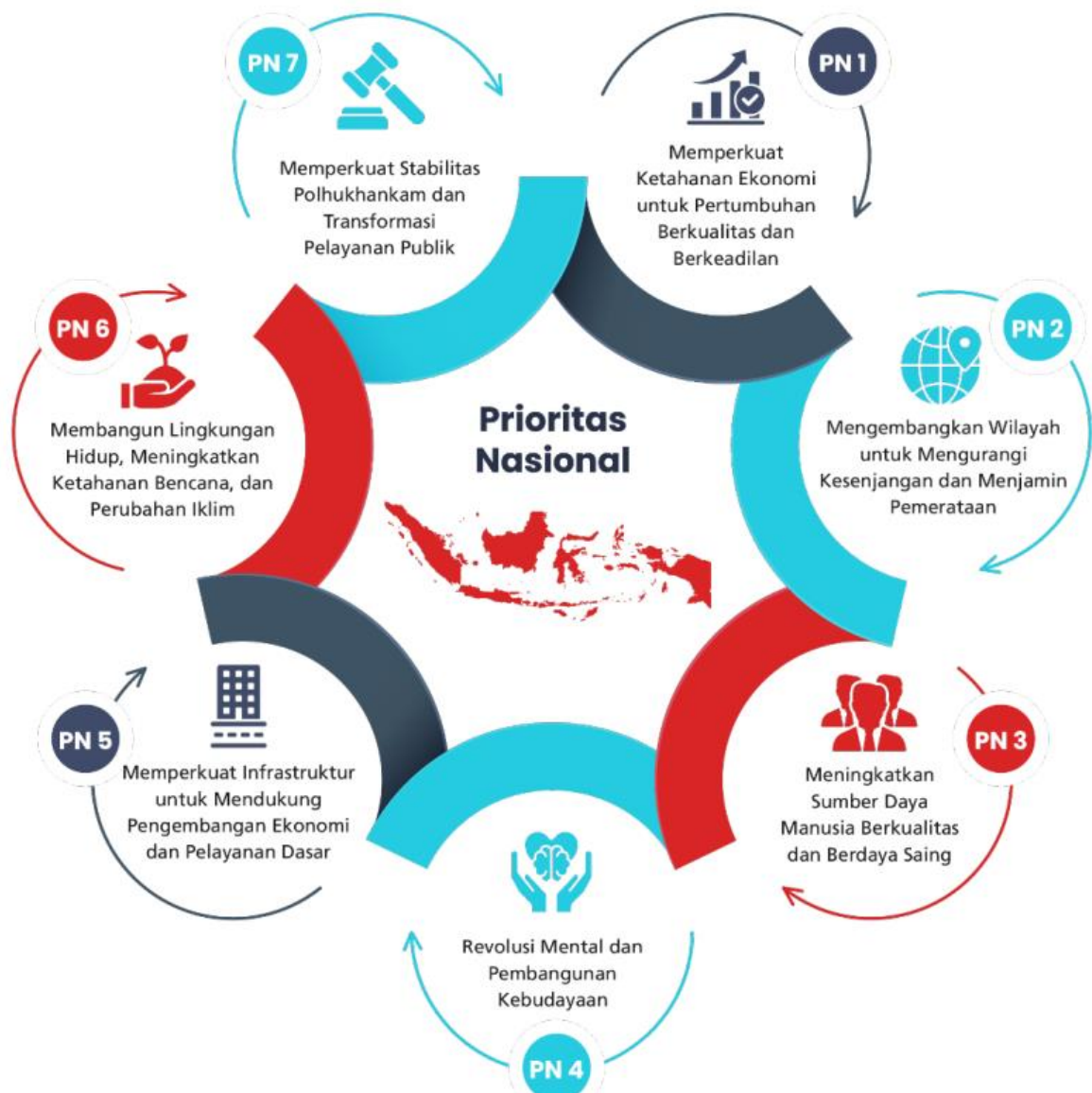
Untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini.



Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 ditampilkan pada infografis di bawah ini.



Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut, maka sasaran makro pembangunan nasional tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel IV - 1 Indikator Sasaran Makro RKP 2023

SASARAN MAKRO RKP 2023	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2023
	- Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9
	- Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yoy)	3 ± 1
	- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0
	- Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0
	- Rasio Gini (nilai)	0,375-0,378
	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29-73,35
	- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02
	- Nilai Tukar Petani (NTP)	103-105
	- Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105-107

Sumber : Rancangan RKP 2023

4.1.2 TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019 - 2024

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, telah ditetapkan bahwa Visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :

“Rakyat Lampung Berjaya”

Dengan visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi *“subyek utama”* dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas, berbudaya dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat yang **aman**. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang **berbudaya**. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang **maju dan berdaya saing**. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang **sejahtera**. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah Tahun 2019 – 2024, sebagai berikut :

1. Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai, melalui Komitmen pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :

- a. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait;
 - b. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;
 - c. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;
 - d. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan;
 - e. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya;
 - f. Memperkuat komunikasi antarlembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - g. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
 - h. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi dalam pembangunan daerah.
2. Misi-2 : Mewujudkan "*good govemance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, melalui komitmen pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
- a. Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik;

- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah;
 - c. Meningkatkan peranserta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi;
 - d. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;
 - e. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan kolaboratif;
 - f. Mendorong peran BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah serta membantu dan mendukung peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan di sektor Pertanian, Pariwisata dan ekaonomi Kreatif, Infrastruktur, Energi, dan Transportasi;
 - g. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta kepastian biaya pelayanan;
 - h. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.
3. Misi-3 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas:
- a. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA), kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan lembaga terkait;
 - b. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama

- dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
- c. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
 - d. Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;
 - e. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (*women trafficking*), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
 - f. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
 - g. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;
 - h. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah, komitmen dalam pelaksanaan melalui pokok-pokok program prioritas :
- a. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
 - b. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan

- meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;
- c. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah serta pemerataan layanan listrik;
 - d. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional);
 - e. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional;
 - f. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga secara merata;
 - g. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah perdesaan;
 - h. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
- a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanian serta untuk pengendalian banjir;
 - b. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, permodalan fasilitasi dan jaminan melalui BUMD Jamkrida, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;
 - c. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikulturan, perkebunan, perikanan, dan peternakan),

- sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
- d. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
 - e. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
 - f. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan dengan BUMD Jamkrida, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;
 - g. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
- a. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
 - b. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
 - c. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - d. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan

- pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- e. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
 - f. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
 - g. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
 - h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (*illegal logging*), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta masyarakat;
 - i. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat.

Pencapaian Visi dan Misi dengan dibarengi komitmen yang dilakukan melalui 33 Agenda Kerja Utama dan dituangkan dalam program dan kegiatan prioritas. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut, sepanjang Tahun 2020 dan 2021 dihadapkan pada kondisi Pandemi COVID-19, yang berdampak luas terhadap kualitas pengelolaan seluruh prioritas pembangunan daerah, yang dipicu oleh penurunan kualitas kesehatan masyarakat yang bersifat global serta implikasinya terhadap kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif serta sektor-sektor penopang di dalamnya. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, baik yang dilaksanakan dalam rangka penanganan dampak Covid-19 maupun prioritas lainnya tergambar dalam Agenda Kerja Utama, yaitu :

Misi 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai

Agenda Kerja :

1. Lampung merawat Indonesia. Memperkuat kerukunan hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.
2. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Lampung mengaji, memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafal Al Quran dengan memberikan bantuan fasilitasi khusus bagi rumah-rumah tahfidz dan pokok pesantren serta mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Lampung.
4. Lampung Kaya Festival. Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan.
5. Lampung Menuju Bebas Narkoba
 - a. Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama;
 - b. memberantas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan;
 - c. Menyelamatkan korban-korban penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi.

Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik

Agenda Kerja :

6. Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan :
 - a. Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi
 - b. Menciptakan sistem penjurusan karir melalui fit dan proper test berbasis kompetensi;
 - c. Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/kota) dan asas keadilan;
 - d. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur. Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokrasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan kinerja;
 - e. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi;
 - f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - g. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha.
7. APBD Rakyat Berjaya :
 - a. Meningkatkan PAD untuk memperluas cakupan pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8. Smart Village
 - a. Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa;
 - b. memfasilitasi digitalisasi administrasi desa;
 - c. *e-participation* : melibatkan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan atau aplikasi.

9. Pendampingan program pembangunan desa
 - a. Memberikan fasilitasi pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola pembangunan desa;
 - b. Memberikan pendampingan hukum untuk para Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Dan Penyandang Disabilitas

Agenda Kerja :

10. Perempuan Berjaya :
 - a. Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga;
 - b. Pengarusutamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya dan ekonomi;
 - c. Memfasilitasi pendampingan hukum bagi perempuan.
11. Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota), dengan :
 - a. Mengembangkan fasilitas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak;
 - b. Merevitalisasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak;
 - c. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak;
 - d. Menyediakan dan memfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempat kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik;
 - e. Memfasilitasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak;
 - f. memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu.
12. Anak Muda Berjaya :
 - a. Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antara kalangan muda berbasis komunitas;

- b. Menggalakan " Gerakan Malu Menganggur" di kalangan muda;
 - c. Mencetak wirausahawan muda;
 - d. Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota.
13. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada:
- a. Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olah raga;
 - b. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi altet berprestasi;
 - c. Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang berkompeten.
14. Lampung Sehat :
- a. Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas;
 - b. Memperkuat peranan Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas bersinergi bersinegi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit;
 - d. Melaksanakan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting;
 - e. Penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan pasca Covid-19 sektor kesehatan.
15. Smart School. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan :
- a. Menyediakan fasilitas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis starup dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMK dan SMA;
 - c. Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatan kapasitas lainnya.
16. Revitalisasi SMK. Meningkatkan SMK ke dunia kerja dengan :
- a. Memperluas kerja magang sebagai kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha;

- b. Mengembangkan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri;
- c. Memfasilitasi kemirtraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri dan investasi.

Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah

Agenda Kerja :

- 17. Infrastruktur Lampung Berjaya
 - a. Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antara Kabupaten/Kota;
 - b. Merevitalisasi dan membangun irigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnya;
 - c. Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 - d. Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
- 18. Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur. Menciptakan sistem dan mekanisme perbaikan infrastruktur secara cepat :
 - a. Berbasis peran serta warga dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses pelaporan, komunikasi dan eksekusi perbaikan infrastruktur;
 - b. Memperkuat sumberdaya manusia dan sumberdaya aparatur dalam penanganan infrastruktur secara cepat, tanggap dan tepat;
 - c. Perbaikan dalam pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong.
- 19. Lampung Terang Berjaya. Memprioritaskan kebijakan pengelolaan energi dengan berfokus kepada :
 - a. Mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan swasembada sumber energi listrik;
 - b. mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya energi baru dan terbarukan berbasis tenaga surya, air dan gas bumi;

- c. kebijakan-kebijakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan ramah pertanian.

Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan

Agenda Kerja :

20. Kartu Petani Berjaya (KPB) Memberikan Jaminan Kepada para Petani untuk mendapat :
 - a. Kepastian mendapat benih/bibit, pupuk, pesitisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani;
 - b. Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani;
 - c. Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani;
 - d. Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagi jenjang pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi.
21. Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi dalam upaya mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian.
22. Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu.
23. Revitalisasi Lada (*Lampung Black Pepper*). Meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan.
24. Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir, serta perluasan pasar dalam negeri.
25. Program Nelayan Berjaya : Menyejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan :
 - a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendamping pemasaran serta penjaminan pasar produksi perikanan;

- b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan;
 - c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia;
 - d. SPBU untuk nelayan. Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan serta pertambakan.
26. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategi bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi lain untuk menjamin kepastian pasar.
27. Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia. Mempercepat pembangunan kepariwisataan dengan :
- a. Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung
 - b. Menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat Agrowisata dan Ekowisata Indonesia
 - c. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata
 - d. Mempercepat pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Seray, Pesisir Tengah (Krui)
28. Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan.
29. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, melalui :
- a. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumber daya dan keunggulan lokal;
 - b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usahan dan pemasaran;
 - c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan;
 - d. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota);
- a. Menyederhanakan perizinan.
30. Lampung Ramah Usaha. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha dengan :

- a. Menyusun kebijakan untuk kemudahan berusaha;
 - b. Menjamin kepastian biaya-biaya pelayanan;
 - c. Memfasilitasi sinergi diantara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan usaha, bisnis dan investasi.
31. Memfasilitasi terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia, bersinergi dengan kementerian Pertahanan dalam merelokasi pusat industri kemaritiman, persenjataan dan kedirgantaraan ke Lampung.

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama

Agenda Kerja :

32. Mengelola Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat :
- a. Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan;
 - b. mengorentasikan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat;
 - c. Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar hutan.
33. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Mengembangkan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara dan menjadikanya sebagai salah satu tujuan agrowisata Nasional.

4.2 TEMA, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 yang bertajuk: **“PENGUATAN EKONOMI YANG INKLUSIF UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH”**.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2023. Penetapan sasaran makro pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini (hasil diskusi antar pemangku kepentingan) dan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan

penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, maka sasaran makro pembangunan dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, diasumsikan sebagai berikut :

Tabel IV - 2 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2023	INDIKATOR	TAHUN 2023
SASARAN MAKRO	- Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5 - 4,5
	- PDRB Perkapita (Juta Rp)	43 - 44
	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	70,3 - 70,6
	- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 - 4,3
	- Kemiskinan (%)	11,4 - 11,9
	- Gini Rasio (Poin)	0,302 - 0,319
	- Inflasi (%)	3 ± 1
	- Tingkat Kemantapan Jalan (Km)	77
	- Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	104 - 105
	- Persentase Peningkatan PAD (%)	4,74
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	7.066	

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu pada sasaran pokok sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional; Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2023 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Gambar IV - 1 Sasaran dan Target Prioritas Pembangunan Tahun 2023

SASARAN DAN TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023	
<p>PRIORITAS 1 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat <input type="checkbox"/> Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Menengah <input type="checkbox"/> Meningkatnya penyerapan tenaga kerja <input type="checkbox"/> Meningkatnya pengarusutamaan Gender <input type="checkbox"/> Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak
<p>PRIORITAS 2 : Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi <input type="checkbox"/> Meningkatkan kesejahteraan petani <input type="checkbox"/> Menjaga stabilitas harga <input type="checkbox"/> Menurunnya Kemiskinan
<p>PRIORITAS 3 : Pembangunan Infrastruktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi <input type="checkbox"/> Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah <input type="checkbox"/> Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi
<p>PRIORITAS 4 : Reformasi Birokrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas Implementasi reformasi birokrasi
<p>PRIORITAS 5 : Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Meningkatnya kerukunan antar umat beragama <input type="checkbox"/> Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah <input type="checkbox"/> Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya
<p>PRIORITAS 6 : Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) <input type="checkbox"/> Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca <input type="checkbox"/> Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. yang dilakukan melalui pendekatan perencanaan secara *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023; Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2023 terhadap RKP 2023 disajikan pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel IV - 3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 terhadap RKP 2023

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
1.	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	1.1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.1	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
					1.2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
					1.3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
					1.4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
					1.5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
		1.6	Pengentasan kemiskinan			
1.4	Meningkatnya pengarusutamaan gender	1.7	Peningkatan produktivitas dan daya saing			
1.5	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak					
2.	Pembangunan Infrastruktur	2.1	Meningkatnya Kondisi	Memperkuat Infrastruktur	2.1	Infrastruktur pelayanan dasar

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
			Kemantapan Jalan Provinsi	untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
		2.2	Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah		2.2	Infrastruktur ekonomi
		2.3	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi		2.3	Infrastruktur perkotaan
					2.4	Energi dan Ketenagalistrikan
					2.5	Transformasi digital
			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2.5	Pembangunan Wilayah Sumatera	
3.	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	3.1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
		3.2	Meningkatkan kesejahteraan petani		3.2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		3.3	Menjaga stabilitas harga		3.3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
		3.4	Menurunnya Kemiskinan		3.4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
					3.5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah(UMKM), dan koperasi
					3.6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
					3.7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
					3.8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
4.	Reformasi Birokrasi	4.1	Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4.1	Konsolidasi Demokrasi
					4.2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
					4.3	Reformasi birokrasi dan tata kelola
					4.4	Menjaga stabilitas keamanan nasional
5.	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	5.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
		5.2	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah		5.2	Meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
		5.3	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya		5.3	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial
					5.4	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter
6.	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	6.1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6.1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		6.2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca		6.2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
		6.3	Pembangunan rendah karbon		6.3	Pembangunan rendah karbon
		6.3	Pembangunan rendah karbon		6.3	Pembangunan rendah karbon

Selanjutnya, penyelarasan prioritas pembangunan RKPd 2023 terhadap Visi dan Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel IV - 4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 terhadap Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024

No.	Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024	Prioritas RKPd 2023	Sasaran RKPd 2023	
			a.	b.
1.	Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	a.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
			b.	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah
			c.	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya
2.	Mewujudkan "Good Governance" untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	a.	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
3	Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	a.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			b.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah
			c.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
			d.	Meningkatnya pengarusutamaan gender
			e.	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak
4.	Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	Pembangunan Infrastruktur	a.	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi
			b.	Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah
			c.	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi
5	Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	a.	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi
			b.	Meningkatkan kesejahteraan petani
			c.	Menjaga stabilitas harga

No.	Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024	Prioritas RKPD 2023	Sasaran RKPD 2023	
	yang seimbang dengan wilayah perkotaan.		d.	Menurunnya Kemiskinan
6	Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	a.	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			b.	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca
			c.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Selain itu, untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah serta mendukung pencapaian prioritas nasional; penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 memadukan arah kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional, antara lain :

A. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
6. Sosial.

Berikut kami sampaikan jenis Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi :

1. Bidang Pendidikan

SPM bidang pendidikan meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
- 2) Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Tabel IV - 5 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pendidikan

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Khusus 2. Pendidikan Menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar jumlah dan kualitas barang/jasa 2. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah; 2. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;

2. Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi terdiri atas :

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Tabel IV - 6 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Kesehatan

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; 2. Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum dan penataan ruang pada Pemerintah Provinsi :

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota; dan
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Tabel IV - 7 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
PEKERJAAN UMUM	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kab/kota; dan2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kab/kota	<ol style="list-style-type: none">1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Setiap Warga Negara yang berdomisili pada kabupaten/kota kekurangan air curah dan akan dilayani oleh penyelenggaraan SPAM setempat melalui sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan

Selain itu, perumusan kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu : Sinkronisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memperhatikan :

- 1) Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi, melalui:
 - a. Penyusunan/pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK);
 - b. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
 - c. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL); dan
 - d. Pelaksanaan Studi Primer, terutama *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA).
- 2) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- 3) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targetting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Kepastian perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 6) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Pengentasan permukiman kumuh;
- 8) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh;

Tabel IV - 8 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
PERUMAHAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan 2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; 2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

5. Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM sosial pada Pemerintah Provinsi terdiri atas:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang sosial yang diperhatikan, antara lain:

- 1) Percepatan penanggulangan kemiskinan;

- 2) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia dalam panti;
- 3) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia di luar panti;
- 4) Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- 5) Program Keluarga Harapan (PKH);
- 6) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- 7) Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB);
- 8) Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT);
- 9) Asistensi Sosial Anak Terlantar;
- 10) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN);
- 11) Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda;
- 12) Basis data terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan; dan
- 13) Pencegahan pemasangan bagi penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Tabel IV - 9 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Sosial

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. rehabsosdas penyandang disabilitas telantar 2. rehabsosdas anak telantar; 3. rehabsosdas lansia telantar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. Standar jumlah dan kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; 2. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
	4. Rehabsosdas tuna sos khususnya gepeng; dan 5. perlinjamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar personel/sum ber daya manusia; dan	3. Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; 4. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam; 5. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

6. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Provinsi adalah yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum lingkup kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah penanganan konflik sosial, antara lain :

- 1) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 3) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan
- 4) Penegakan Peraturan Daerah.

Tabel IV - 10 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
TRANTIBUMLIN MAS	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	Warganegara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

4.3 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PROVINSI LAMPUNG

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan Tahun 2023 juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.

Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan proses revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Berdasarkan substansi revisi tersebut maka Pola Ruang Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di

sekitarnya. Beberapa kawasan andalan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN dan revisi RTRW Provinsi Lampung, yaitu Mesuji, Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, Liwa-Krui dan Laut Krakatau;

2. Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Way Kanan.
 - b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.
 - c. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya.
 - d. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, dan Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan

Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di, Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Metro).

- e. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung.
 - f. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.
3. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain memantapkan ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta alih fungsi hutan yang meliputi wilayah- wilayah sebagai berikut:
- a. Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.
 - b. Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.
 - c. Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.
 - d. Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur.
 - e. Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.
 - f. Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.
 - g. Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.

4. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian yang didasarkan pada:
 - a. Arahan Rencana Kawasan Hutan Produksi
Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Arahan rencana tanaman pangan lahan kering.
Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering meliputi hampir seluruh wilayah tengah dan timur Provinsi Lampung, kecuali disekitar Way Tulang Bawang, daerah pesisir dan bagian selatan Kabupaten Lampung Timur, serta bagian barat Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara.
 - c. Arahan rencana untuk tanaman pangan lahan basah.
Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan basah meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.
 - d. Arahan rencana untuk tanaman tahunan (perkebunan).
Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.
 - e. Arahan rencana kawasan pertambangan
Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi: Wilayah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan,

Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur.

f. Arahan Rencana Kawasan Industri

Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten, yaitu pada lokasi-lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya. Pola yang akan dikembangkan diarahkan pada bagian tengah provinsi ke arah timur provinsi. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

g. Arahan rencana Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung lebih menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBSS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan Lindung.

h. Arahan rencana Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Lampung akan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan rawan bencana serta memiliki daya dukung yang kuat untuk kegiatan permukiman.

Kawasan permukiman diarahkan memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Rencana pengembangan permukiman dari tingkat kepadatannya akan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.
2. Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

RENCANA KAWASAN STRATEGIS

Pola ruang ditinjau berdasarkan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi, sebagai berikut :

a. Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Provinsi Lampung terdapat dua Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan, yaitu :

1. Kawasan Selat Sunda, dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi. Dasar pertimbangan penetapan kawasan tersebut adalah kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tersambungnyanya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu menjadi keterpaduan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi

Banten seperti adanya rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, rencana pembangunan kabel bawah laut di Selat Sunda, dan perairan Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-II) yang merupakan jalur pelayaran nasional dan internasional.

2. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang merupakan yang merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (kawasan lindung nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Koridor Penyelamatan Ekosistem Sumatera Bagian Selatan, berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Gubernur Sumatera (*Save Sumatera Roadmaps 2020*) dan Perpres No 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera pasal 12 ayat 3. Adapun koridor penyelamatan ini meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) – Suaka Margasatwa Gunung Mas.
3. Kawasan Perbatasan Negara Pesisir Barat berhadapan dengan laut lepas/Samudera Hindia dengan fungsi strategis untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan.

b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Dalam upaya mengurangi disparitas pembangunan antara kawasan pusat pertumbuhan (Kota Bandar Lampung) dengan kawasan-kawasan di sekitarnya dan upaya optimalisasi potensi kawasan, maka diperlukan strategi pengembangan wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki peran strategis sebagai motor penggerak bagi pembangunan kawasan-kawasan di sekitarnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi. Beberapa kawasan yang

direncanakan sebagai kawasan strategis provinsi adalah sebagai berikut di bawah ini.

1) **Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi** adalah kawasan yang mempunyai potensi ekonomi, sumber daya alam dan sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi kawasan pusat-pusat pertumbuhan sudah mampu mendorong perkembangan daerah sekitar. Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi ini mencakup :

a. **Kawasan Metropolitan Bandar Lampung**, yang dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten-Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Arah pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini sebagai pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi, mengurangi berbagai persoalan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan ruang-ruang terbuka hijau, menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan, ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi. Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung juga didukung oleh pengembangan beberapa fungsi utama dari sub kawasan di dalamnya, yaitu :

- Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung. Kawasan pelabuhan terpadu terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan, dan antar moda transportasi. Untuk meningkatkan peran

pelabuhan tersebut, di kawasan pelabuhan terpadu Panjang juga dikembangkan sebagai kawasan industri.

- Kawasan Pemerintahan Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengurangi beban spasial Kota Bandar Lampung yang sudah sangat padat dengan berbagai permasalahan kota, Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung yang ada sekarang akan dipindahkan ke Jati Agung (Kabupaten Lampung Selatan).
- Kawasan *Aeropolitan* Natar di Kabupaten Lampung Selatan. Sehubungan dengan rencana pengembangan Kawasan Bandara Raden Inten II sebagai *Aero City* di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diantisipasi adanya rencana pengembangan kawasan *Aeropolitan* Natar yang mengintegrasikan antara Kota Bandar Lampung dengan *Aero City* Raden Inten II, sehingga ke depan dapat menjadi kawasan *aeropolitan*.
- Kawasan Teluk Lampung, akan dikembangkan menjadi kawasan wisata terintegrasi Bakauheni *Harbour City (BHC)*. Kawasan Teluk Lampung tersebut mengintegrasikan destinasi wisata disekitar teluk lampung yang meliputi wisata pantai, wisata budaya dan Taman Hutan Raya WAR. Kawasan Teluk Lampung ini memiliki potensi alam yang beragam sehingga memiliki daya tarik yang kuat bagi para wisatawan.
- Kawasan Pusat Pertahanan dan Keamanan dikembangkan di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang telah memiliki Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Teluk Ratai dan Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir.
- Kawasan Pendidikan Terpadu UNILA – ITERA – UIN Raden Intan II (LARAIN). Kawasan ini terdapat di wilayah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan pendidikan LARAIN ini nantinya diproyeksikan akan

menampung *student body* sekitar 120.000 orang. Untuk mendukung fungsi kawasan pendidikan di Provinsi Lampung,.

b. Kawasan Pariwisata Pantai Barat.

Kawasan ini meliputi Pantai sepanjang 210 Km di Kabupaten Pesisir Barat yang terintegrasi dengan pariwisata Danau Ranau dan Agro Wisata Kopi di Kabupaten Lampung Barat.

2) **Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** adalah kawasan yang memiliki potensi perlindungan bagi flora, fauna, keanekaragaman hayati dan non hayati, keseimbangan ekosistem, dan memiliki tingkat kerawanan bencana. Kawasan strategis aspek lingkungan hidup ini, mencakup :

- a. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong dan Padang Cermin. Tahura ini adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli.
- b. Kawasan Batutegi di Kabupaten Tanggamus. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolaannya

Rencana pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Lampung dalam Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2017-2037, disajikan pada Gambar II-16 di bawah ini.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah Kebijakan Pembangunan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2023 yang berdasarkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

5.1 Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, sesuai dengan kewenangannya; dimana SPPN bertujuan untuk :

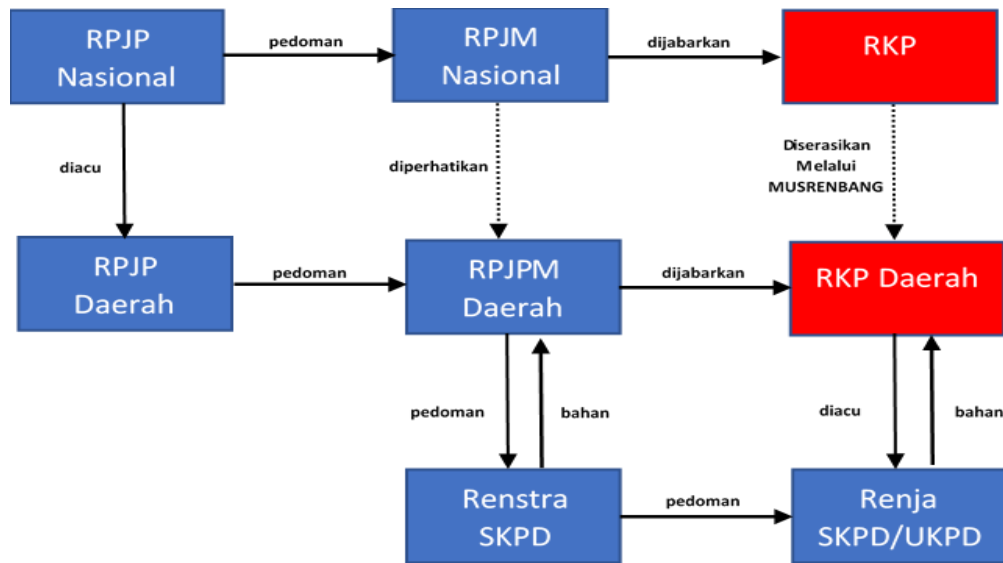
- a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan pula bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Wujud dari seluruh rangkaian proses - tahapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing hirarki penyelenggara negara menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden, dan dilaksanakan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian pula halnya ditingkat pemerintah daerah, menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, dan dilaksanakan secara tahunan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara operasional, regulasi yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Di dalam permendagri tersebut, selain mengatur tentang tata cara penyusunan perencanaan juga memberikan penjelasan keterkaitan antar dokumen perencanaan, sebagai berikut :

Gambar V - 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Lebih lanjut, Pasal 75 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : “Rancangan Awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKP provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKP”.

Dalam rangka sinergitas pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada Tahun 2023 diarahkan untuk sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Tabel V - 1 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKP Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi

Adapun tema dan prioritas pembangunan kabupaten/kota Tahun 2023, sebagai berikut :

1. KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TEMA : *“Percepatan Pembangunan dan Pemulihan Ekonomi melalui Akselerasi Pertumbuhan Sektor-Sektor Potensial Daerah, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Publik”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial;
- b) Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia;
- c) Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana;
- d) Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata
- e) Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas.

2. KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TEMA : *“Percepatan Transformasi Ekonomi dan Reformasi Struktural”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul;

- b) Akselerasi Penurunan Kemiskinan melalui Efektifitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Pariwisata, Tenaga Kerja Perindustrian dan UKM serta Kemudahan Investasi;
- c) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pelayanan Dasar;
- d) Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur; dan
- e) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

3. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TEMA : *“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur serta Inovasi untuk Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- b) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar;
- c) Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi;
- d) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana; dan
- e) Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur.

4. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TEMA : *“Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah Serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
- b) Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup;
- c) Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif;
- d) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel); dan
- e) Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmonisasi sosial masyarakat.

5. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TEMA : “Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Kualitas SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Memacu Pemulihan Ekonomi;
- b) Memacu Pembangunan Infrastruktur;
- c) Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter;
- d) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- e) Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi; dan
- f) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

6. KABUPATEN TANGGAMUS

TEMA : “Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah”

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan;
- b) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- c) Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas;
- d) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah;

- e) Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana; dan
- f) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

7. KABUPATEN WAY KANAN

TEMA : “Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia, Pemulihan Ekonomi, Reformasi Birokrasi, dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang didukung Ketersediaan Infrastruktur”

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan SDM yang Berkualitas;
- b) Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro, dan Pariwisata;
- c) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- e) Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur untuk mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik.

8. KABUPATEN TULANG BAWANG

TEMA : “Peningkatan Kualitas SDM & Infrastruktur Menuju Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah”

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b) Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi;
- c) Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan;
- d) Meningkatkan kesejahteraan kampung;
- e) Terwujudnya SDM yang berkualitas;
- f) Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas; dan

- g) Penataan ruang dan pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan.

9. KABUPATEN PESAWARAN

TEMA : “Mengoptimalkan Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Kemandirian Desa dan Pengentasan Kemiskinan”

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing;
- b) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi;
- c) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas;
- d) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif; dan
- e) Mewujudkan Desa Mandiri sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal.

10. KABUPATEN PRINGSEWU

TEMA : “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Menunjang Pemulihan Ekonomi Daerah”

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b) Pembangunan Manusia yang Berkualitas
- c) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertumpu pada Sektor Strategis
- d) Penataan Kawasan Perkotaan yang Berkelanjutan
- e) Peningkatan Kualitas Tatanan sosial masyarakat

11. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TEMA : “Peningkatan Kualitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Ekonomi Daerah”

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, jarring pengaman social dan perngembangan ekonomi rakyat kreatif;
- b) Pengembangan SDM Berkarakter dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar;
- c) Pengembangan Ekowisata dan Pelestarian BudayaPembangunan infrastruktur;
- d) Pembangunan Infrastruktur; dan
- e) Reformasi Birokrasi.

12. KABUPATEN MESUJI

TEMA : “Penguatan Perekonomian Daerah yang bertumpu pada peningkatan Infrastruktur Pertanian”

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian Dan Wilayah Pedesaan;
- b) Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan;
- c) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Daya Saing Daerah;
- d) Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
- e) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

13. KABUPATEN PESISIR BARAT

TEMA : “Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Memantapkan Infrastruktur Daerah”

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Pembangunan SDM;
- b) Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah;
- c) Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah;
- d) Pengentasan Kemiskinan Daerah;
- e) Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- f) Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

14. KOTA BANDAR LAMPUNG

TEMA : *“Percepatan Pemulihan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Daerah melalui Pembangunan Berkelanjutan”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi;
- b) Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas;
- c) Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
- d) Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal;
- e) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah;
- f) Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan.

15. KOTA METRO

TEMA : *“Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat melalui Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

- b) Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan;
- c) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
- d) Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing.

5.2. Indikator Makro Kabupaten/Kota

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung diharapkan dapat mendukung pencapaian 10 (sepuluh) indikator kinerja makro Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi,
2. Pendapatan Perkapita,
3. Indeks Pembangunan Manusia,
4. Tingkat Pengangguran Terbuka,
5. Kemiskinan,
6. Rasio Gini,
7. Inflasi,
8. Tingkat Kemantapan Jalan,
9. Nilai Tukar Petani (NTP), dan
10. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Target dukungan terhadap 10 (sepuluh) indikator makro dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung periode Tahun 2019-2024 disajikan pada Tabel V-2.

Tabel V - 2 KESELARASAN SASARAN MAKRO RKPD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

NO.	SASARAN MAKRO	KABUPATEN/KOTA															
		Provinsi	L. Utara	L. Barat	Tuba	Tubaba	Mesuji	Way Kanan	Tanggamus	Pringsewu	Lamsel	Pesawaran	Lamtim	Lamteng	Pesbar	Metro	Balam
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5-4,5	2,82-3,01	5,00	3,0	4,20	5,43	3-4	4,00	3,31	4,0-5,0	5 ± 0,5	4,2	4,5-5,5	3,40-3,90	4,5-5,0	4,70-5,70
2	PDRB Perkapita (Juta Rp)	43-44	39,64-40,02	26,786	48,8	43,45	55,454	31,61	27,60	30,00	45,44-46,44	23,59	38,90	54-55	28,60-29,04	42	57,00-59,00
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	70,3-70,6	69,72-70,41	68,95	68,94	66,38	65,01	68,39	66,85	71,00	69,76	70	70,86	70,10-70,50	64,31	78,48	78,00-78,49
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,3-4,0	4,44-4,10	2,60	4,07	3,24	3,30	3,50	2,89	4,00	4,50 - 4,75	4,04	2,89	4,1-4,5	2,80	5,02	8,1
5	Kemiskinan (%)	11,9-11,4	17,9-17,4	12,37	-	8,20	7,0075	11,90	10,84	9,50	13,0-12,5	13,2	14,62	11,4-12	13,65	7,20	91,57
6	Rasio Gini (Poin)	0,302-0,319	>0,31	0,269	0,265	0,216-0,285	0,252	-	0,290	0,295	0,282-0,292	0,3	0,34	0,285-0,302	0,32	0,3271	0,3226
7	Inflasi (%)	3±1	-	-	-	3,00	-	3,0-4,0	-	2,75/+1	3,0 ± 1	4 ± 0,5	-	-	-	3,0 ± 1	3,0 ± 1
8	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	77	65,21	-	-	64,43	24,63	58,51	52,00	36,82	85,75	86,76	60-62	63-65	41,50	92,06	86,31
9	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	104-105	104-105	-	-	101,5	-	-	97,06	-	-	103,33	103,33	-	98,51	-	-
10	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	7,066	-	-	-	4,23	-	-	7,00	-	7,066	-	-	-	10,50	-	-

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 (tahun keempat) pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, dimana dalam penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Visi, Misi, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, dilakukan melalui pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*); oleh karenanya pada bagian pembahasan ini akan dipaparkan pula sinkronisasi program-program prioritas daerah berdasarkan aspek pendekatan perencanaan yang telah dilaksanakan tersebut. Disisi yang lain, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang disampaikan pada Forum Musrenbang Nasional, strategi penyusunan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan tematik- holistik, integratif, dan spasial, dimana:

- Tematik- holistik yaitu pendekatan pembangunan yang memandang pentingnya mempertimbangkan sumber daya pembangunan sebagai satu kesatuan faktor (hulu – hilir) yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- Integratif yaitu pendekatan pembangunan yang menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses teadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
- Spasial yaitu pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan dimensi pemanfaatan ruang dan indikasi lokasi sesuai dengan kewenangan masing-masing hierarki pemerintahan, dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Mengacu pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pemerintahan pada tingkat pemerintah provinsi mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu : 1) Urusan Pemerintahan Wajib, meliputi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; serta 2) Urusan Pemerintahan Pilihan.

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 dan terakhir melalui pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 yang memuat Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Uraian pokok pada bab ini terdiri dari ; (1) Program Prioritas Berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagaimana Undang-Undang 23 Tahun 2014; (2) Sinkronisasi Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah; (3) Program Prioritas Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah; (4) Sinkronisasi Program Prioritas Daerah Provinsi Lampung dengan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

6.1 Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berikut ditampilkan tabel mengenai pagu indikatif berdasarkan urusan pemerintahan

Tabel VI-1

Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PENDIDIKAN	1,746,344,691,046.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	954.854.974.046,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	779.687.817.000,00
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11.801.900.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	KEBUDAYAAN	7.465.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.300.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	415.000.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	400.000.000,00
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	350.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.000.000.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.216.074.451,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.017.683.751,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.198.390.700,00
3	Dinas Sosial	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	SOSIAL	39.407.835.753,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.146.027.666,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	526.682.950,00
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	249.999.500,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10.833.813.022,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.370.059.665,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	947.505.677,00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	333.747.273,00
4	Dinas Tenaga Kerja	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	TENAGA KERJA	31.990.707.909,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.561.707.909,00
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	142.000.000,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.550.000.000,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	825.000.000,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	422.000.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	490.000.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	420.855.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	70.000.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	84.967.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	265.888.000,00
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.071.455.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.457.983.000,00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	882.615.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.054.584.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	585.780.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	191.243.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	637.012.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	262.238.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	LINGKUNGAN HIDUP	18.788.387.800,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.373.853.900,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	53.569.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.277.011.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.306.481.000,00
	PROGRAM PEN GEND ALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	303.848.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.000.000,00
	PROGRAM PEN GEND ALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN	96.136.900,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	160.078.000,00
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	36.191.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000,00
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	81.219.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.200.124.163,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.654.561.713,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	86.300.000,00
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.210.879.450,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	159.261.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	89.122.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16,547,951,396.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.747.951.396,00
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	200.000.000,00
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.300.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.300.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	TRANSMIGRASI	1,000,000,000,00
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	650.000.000,00
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	200.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PERHUBUNGAN	23.962.617.300,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.246.538.897,05
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.435.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	246.078.402,95
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	35.000.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39.053.043.607,48
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.918.389.707,48
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	12.248.405.700,00
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	9.886.248.200,00
	STATISTIK	186.497.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	186.497.000,00
	PERSANDIAN	247.561.300,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	247.561.300,00
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	19.003.984.200,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.253.984.200,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	400.000.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	250.000.000,00
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	150.000.000,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.550.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	400.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.400.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	600.000.000,00
12	Dinas Kesehatan	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KESEHATAN	283.547.144.158,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	71.616.265.260,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	209.830.878.898,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.130.000.000,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	315.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	655.000.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PENANAMAN MODAL	19.046.198.524,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.952.172.524,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN I KLIM PENANAMAN MODAL	440.000.000,00
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	200.000.000,00
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	500.000.000,00
	PROGRAM PEN GEND ALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	854.026.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100.000.000,00
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	56.986.583.920,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.396.244.920,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.007.042.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	32.524.912.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.058.385.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PERPUSTAKAAN	15.003.700.347,10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.200.624.347,10
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.620.454.000,00
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	182.622.000,00
	KEARSIPAN	1.210.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.210.000.000,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	46.599.380.884,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.237.594.684,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.275.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	15.986.928.200,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.032.858.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.172.000.000,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.895.000.000,00
17	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	PARIWISATA	20.970.168.033,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.170.168.033,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.200.000.000,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.075.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.475.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.050.000.000,00
18	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PANGAN	4.348.837.500,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	227.687.500,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.598.710.000,00
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	300.000.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.222.440.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	PERTANIAN	84.968.225.372,50
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.071.288.733,50
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.635.167.700,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	19.628.212.639,00
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	838.556.300,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.795.000.000,00
19	Dinas Perkebunan	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	PERTANIAN	30.381.348.343,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.209.560.793,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	900.000.000,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.917.960.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	375.000.000,00
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	350.000.000,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.628.827.550,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	PERTANIAN	34.245.177.200,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.296.336.458,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10.438.198.500,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.643.900.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.151.046.242,00
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	149.328.000,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	566.368.000,00
21	Dinas Kehutanan	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	KEHUTANAN	80.046.854.470,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.951.612.470,00
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.955.275.000,00
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	487.122.000,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.310.777.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1.342.068.000,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	21.317.028.400,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.363.918.400,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	600.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	519.110.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1.659.790.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.174.210.000,00
23	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	KESEHATAN	384.896.699.372,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	361.403.699.372,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	23.000.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	493.000.000,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	PERDAGANGAN	25.017.682.690,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.479.682.690,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	70.000.000,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	380.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	750.000.000,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.538.000.000,00
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	800.000.000,00
	PERINDUSTRIAN	3.805.065.910,00
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.550.065.910,00
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	175.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	80.000.000,00
25	Inspektorat	
	UNSUR PENGAWASAN	
	INSPEKTORAT DAERAH	43.401.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.606.363.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.727.475.000,00
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.067.162.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	UNSUR PENUNJANG	
	PERENCANAAN	33.402.565.182,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.918.576.582,00
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.346.616.000,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.137.372.600,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
	UNSUR PENUNJANG	
	KEUANGAN	1.479.317.029.403,70
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	102.114.165.436,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.370.289.321.767,70
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.913.542.200,00
28	Badan Pendapatan Daerah	
	UNSUR PENUNJANG	
	KEUANGAN	118.044.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	98.753.662.500,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	19.290.337.500,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	
	UNSUR PENUNJANG	
	KEPEGAWAIAN	21.800,758,096.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14,111,089,211.00
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7,689,668,885.00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	UNSUR PENUNJANG	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	30.049.405.992,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.056.427.392,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.992.978.600,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	UNSUR PENUNJANG	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12.460.357.434,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.438.488.534,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.021.868.900,00
32	Badan Penghubung	
	UNSUR PENUNJANG	
	PENGHUBUNG	18.712.432.951,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.878.418.551,00
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.834.014.400,00
33	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	3.200.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.800.536.000,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.399.464.000,00
34	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	62.084.157.980,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	823.609.000,00
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	61.260.548.980,00
35	Biro Hukum	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	3.350.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.623.164.000,00
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.726.836.000,00
36	Biro Perekonomian	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	3.000.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.178.285.500,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.821.714.500,00
37	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	3.960.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.702.253.300,00
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.257.746.700,00
38	Biro Administrasi Pembangunan	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	3.200.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	919.500.000,00
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.280.500.000,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
39	Biro Organisasi	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	3.500.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.726.758.600,00
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.773.241.400,00
40	Biro Umum	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	151.771.883.388,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	151.771.883.388,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DAERAH	6.804.923.490,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.804.923.490,00
42	Rumah Sakit Jiwa	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KESEHATAN	42.823.468.349,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.042.220.284,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	663.927.565,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	117.320.500,00
43	Sekretariat DPRD	
	UNSUR PENDUKUNG	
	SEKRETARIAT DPRD	320.276.703.600,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	152.313.379.312,00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	167.963.324.288,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18,868,101,826.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14,663,366,126.00
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	957.226.600,00
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	1.092.819.000,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	258.433.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	346.600.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	824.509.100,00
45	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	559.051.710.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57.491.745.460,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	496.846.546.540,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4.713.418.000,00
46	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99.361.844.940,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.344.427.167,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	44.017.417.773,00
47	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.843.034.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.420.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	843.574.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	750.000.000,00

NO	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	727.700.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.101.760.000,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	25.779.598.950,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.220.401.050,00
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	49.338.580.500,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.761.614.500,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	500.000.000,00
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	19.500.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	13.576.966.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	PERTANAHAN	580.000.000,00
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	280.000.000,00
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	300.000.000,00
48	Satuan Polisi Pamong Praja	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	47,606,411,376.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42,956,563,676.00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,649,847,700.00

6,2 Sinkronisasi Program Prioritas Menurut Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel VI-2
Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/	Rp 25.852.238.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penambahan Ruang Kelas Baru		
2	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 4.546.355.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Rp 8.692.493.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Rp 15.051.503.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 1.716.319.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 1.362.516.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 4.043.562.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rp 5.312.867.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Rp 10.413.141.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Menengah Atas/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
10	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 3.716.608.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Rp 694.731.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Rp 238.930.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Rp 3.019.469.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 129.276.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 1.336.818.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rp 487.485.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pengadaan	Rp 19.105.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
18	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Rp 4.477.118.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Rp 13.886.800.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Rp 247.786.980.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Rp 14.645.367.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Rp 46.155.480.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pembangunan Ruang Laboratorium	Rp 6.626.024.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/	Rp 1.186.584.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
26	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 1.340.217.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 1.000.320.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Rp 1.431.012.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Rp 317.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp 54.325.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Rp 6.095.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Rp 3.900.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Menengah Kejuruan/ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		
34	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Rp 246.465.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 5.217.631.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp 540.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
37	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Rp 650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
38	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
39	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Khusus/ Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Rp 4.999.880.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
40	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM/ Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah/ Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Rp 350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
41	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN/ Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1	Rp 6.591.900.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		(satu) Provinsi/ Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
42	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN/ Pemandangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi/ Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Rp 5.210.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
43	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 35.000.000,00	Dinas Kesehatan
44	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 36.915.900,00	Rumah Sakit Jiwa
45	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 35.000.000,00	Dinas Kesehatan
46	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan	Rp 20.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
47	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 35.000.000,00	Dinas Kesehatan
48	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 25.000.000,00	Dinas Kesehatan
49	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan
50	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 359.319.900,00	Rumah Sakit Jiwa
51	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan
52	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan	Rp 21.496.497.105,00	Rumah Sakit Jiwa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
53	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 46.341.288.520,00	Dinas Kesehatan
54	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 71.261.699.372,40	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
55	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 74.999.999,60	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
56	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 2.550.000.000,00	Dinas Kesehatan
57	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 20.000.000,00	Dinas Kesehatan
58	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 21.320.100,00	Rumah Sakit Jiwa
59	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/	Rp 20.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
60	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 20.000.000,00	Dinas Kesehatan
61	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 20.000.000,00	Dinas Kesehatan
62	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 20.000.000,00	Dinas Kesehatan
63	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 10.000.000,00	Dinas Kesehatan
64	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 10.000.000,00	Dinas Kesehatan
65	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/	Rp 10.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
66	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 10.000.000,00	Dinas Kesehatan
67	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 10.000.000,00	Dinas Kesehatan
68	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 102.874.000,00	Dinas Kesehatan
69	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 20.000.000,00	Dinas Kesehatan
70	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 84.432.300,00	Rumah Sakit Jiwa
71	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 125.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
72	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 412.106.840,00	Dinas Kesehatan
73	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 100.000.000,00	Dinas Kesehatan
74	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 240.000.000,00	Dinas Kesehatan
75	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 27.539.500,00	Rumah Sakit Jiwa
76	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 200.000.000,00	Dinas Kesehatan
77	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 88.622.570,00	Rumah Sakit Jiwa
78	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 300.000.000,00	Dinas Kesehatan
79	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 200.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitas Kunjungan Tamu		
80	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.015.059.000,00	Dinas Kesehatan
81	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Mebel	Rp 150.000.000,00	Dinas Kesehatan
82	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 225.000.000,00	Dinas Kesehatan
83	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 70.000.000,00	Dinas Kesehatan
84	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 250.000.000,00	Dinas Kesehatan
85	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 643.063.221,00	Rumah Sakit Jiwa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
86	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 2.447.196.900,00	Dinas Kesehatan
87	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.373.296.200,00	Rumah Sakit Jiwa
88	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 8.663.400.000,00	Dinas Kesehatan
89	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 10.066.999.999,60	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
90	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 38.856.000,00	Rumah Sakit Jiwa
91	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp 232.206.000,00	Rumah Sakit Jiwa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
92	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.579.900.000,00	Dinas Kesehatan
93	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 115.000.000,00	Dinas Kesehatan
94	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 748.500.000,00	Dinas Kesehatan
95	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan
96	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Peningkatan Pelayanan	Rp 5.310.940.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		BLUD/ Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
97	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Peningkatan Pelayanan BLUD/ Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 16.500.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
98	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Peningkatan Pelayanan BLUD/ Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 280.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
99	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengembangan Rumah Sakit	Rp 1.200.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
100	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengembangan Rumah Sakit	Rp 2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
101	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 3.719.592.000,00	Dinas Kesehatan
102	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Rp 75.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)		
103	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan
104	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp 100.000.000,00	Dinas Kesehatan
105	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang	Rp 134.166.350,00	Rumah Sakit Jiwa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
106	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 3.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
107	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 20.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
108	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 87.143.000,00	Dinas Kesehatan
109	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Rp 65.457.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Provinsi/ Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan		
110	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Rp 130.000.000,00	Dinas Kesehatan
111	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Rp 39.788.450,00	Rumah Sakit Jiwa
112	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Rp 200.000.000,00	Dinas Kesehatan
113	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Rp 65.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Provinsi/ Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan		
114	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Rp 42.361.400,00	Rumah Sakit Jiwa
115	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan
116	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 87.126.000,00	Dinas Kesehatan
117	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota		
118	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Rp 200.000.000,00	Dinas Kesehatan
119	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 59.652.400,00	Rumah Sakit Jiwa
120	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp 177.327.600,00	Rumah Sakit Jiwa
121	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengelolaan	Rp 146.452.305,00	Rumah Sakit Jiwa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA		
122	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Rp 64.179.060,00	Rumah Sakit Jiwa
123	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN/ Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi/ Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 117.320.500,00	Rumah Sakit Jiwa
124	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN/ Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi/ Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 200.000.000,00	Dinas Kesehatan
125	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN/ Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi/ Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 108.400.000,00	Dinas Kesehatan
126	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN/ Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi/ Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Rp 772.750.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Sumber Daya Manusia Kesehatan		
127	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN/ Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi/ Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 48.850.000,00	Dinas Kesehatan
128	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN/ Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)/ Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Rp 90.000.000,00	Dinas Kesehatan
129	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN/ Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)/ Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Rp 75.000.000,00	Dinas Kesehatan
130	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN/ Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)/ Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp 75.000.000,00	Dinas Kesehatan
131	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN/ Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)/	Rp 75.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik		
132	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN/ Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi/ Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Rp 130.000.000,00	Dinas Kesehatan
133	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN/ Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi/ Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp 200.000.000,00	Dinas Kesehatan
134	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN/ Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi/ Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp 250.000.000,00	Dinas Kesehatan
135	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN/ Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Rp 75.000.000,00	Dinas Kesehatan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah Provinsi/ Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM		
136	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 610.838.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
137	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 33.712.586.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
138	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 38.204.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
139	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 20.498.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
140	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 140.302.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
141	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 29.314.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		
142	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 50.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
143	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 191.981.300,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
144	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 800.263.700,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
145	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 823.185.500,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
146	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 126.400.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
147	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 8.027.200,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
148	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 588.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
149	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 220.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
150	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 205.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
151	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 250.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
152	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 500.494.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
153	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Alat Besar	Rp 880.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
154	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/	Rp 1.314.627.600,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
155	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 400.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
156	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.255.655.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
157	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp 200.015.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
158	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM/ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota/ Penyusunan Rencana, Kebiasaan, Strategi dan Teknis SPAM	Rp 843.574.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
159	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH/ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional/ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	Rp 727.700.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		
160	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN/ Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi/ Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Rp 3.801.760.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
161	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN/ Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi/ Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Rp 300.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
162	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG/ Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi/ Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Rp 12.333.661.350,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
163	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG/ Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi/ Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Rp 13.445.937.600,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
164	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA/ Penyelenggaraan Penataan	Rp 255.413.850,00	Dinas Perumahan, Kawasan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Permukiman dan Cipta Karya
165	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA/ Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Supervisi Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Rp 263.677.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
166	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA/ Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp 1.701.310.200,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
167	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 12.431.382.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
168	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pembebasan Lahan / Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Rp 2.023.066.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
169	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan	Rp 2.150.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Provinsi/ Pengelolaan Leger Jalan		
170	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Rp 3.200.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
171	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pembangunan Jalan	Rp 25.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
172	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pelebaran Jalan Menuju Standar	Rp 6.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
173	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Rp 15.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
174	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Rekonstruksi Jalan	Rp 178.384.250.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
175	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Rehabilitasi Jalan	Rp 178.096.156.540,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
176	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp 6.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
177	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 32.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
178	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pembangunan Jembatan	Rp 8.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
179	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan	Rp 4.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Provinsi/ Penggantian Jembatan		
180	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pelebaran Jembatan	Rp 4.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
181	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Rehabilitasi Jembatan	Rp 3.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
182	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp 3.000.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
183	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pemeliharaan Berkala Jembatan	Rp 1.994.700.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
184	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Rp 1.066.992.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
185	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN/ Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan	Rp 11.500.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
186	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI/ Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi/ Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Rp 554.611.500,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
187	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI/ Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi/ Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp 286.207.500,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
188	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG/ Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang/ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Rp 500.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
189	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Rp 500.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
190	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi/ Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp 1.720.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
191	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN/ Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha/ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 2.000.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
192	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)/ Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman/ Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Rp 1.650.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
193	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)/ Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman/ Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	Rp 11.926.966.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		
194	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/ Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp 3.512.642.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
195	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/ Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp 185.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
196	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/ Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur/ Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp 111.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
197	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Rp 70.184.400,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	dan Mitigasi bencana.	Provinsi/ Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi		
198	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi/ Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Rp 135.297.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
199	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp 178.834.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
200	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp 162.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
201	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Pengelolaan Risiko Bencana	Rp 100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
202	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp 328.551.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
203	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan	Rp 95.600.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	dan Mitigasi bencana.	Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Penyusunan Rencana Kontijensi		
204	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 203.175.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
205	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/ Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Rp 50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
206	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Rp 164.859.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
207	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 20.066.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
208	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 259.861.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
209	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp 25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
210	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/ Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Rp 66.481.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
211	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/ Kerjasama An tar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Rp 50.960.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
212	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/ Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rp 89.650.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
213	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/ Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Rp 197.872.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
214	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 19.927.335.753,00	Dinas Sosial
215	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 275.000.000,00	Dinas Sosial
216	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan	Rp 25.450.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
217	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 5.100.000,00	Dinas Sosial
218	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 5.150.000,00	Dinas Sosial
219	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 15.000.000,00	Dinas Sosial
220	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 18.000.000,00	Dinas Sosial
221	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 17.000.000,00	Dinas Sosial
222	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 28.000.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
223	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 84.300.000,00	Dinas Sosial
224	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 60.000.000,00	Dinas Sosial
225	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 374.618.950,00	Dinas Sosial
226	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 363.558.100,00	Dinas Sosial
227	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 41.200.000,00	Dinas Sosial
228	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 91.025.482,00	Dinas Sosial
229	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum	Rp 75.000.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material		
230	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 45.000.000,00	Dinas Sosial
231	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 956.238.000,00	Dinas Sosial
232	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.112.000,00	Dinas Sosial
233	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 440.192.731,00	Dinas Sosial
234	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 45.000.000,00	Dinas Sosial
235	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.302.899.900,00	Dinas Sosial
236	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/	Rp 507.710.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
237	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Mebel	Rp 19.500.000,00	Dinas Sosial
238	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 175.515.500,00	Dinas Sosial
239	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 105.376.000,00	Dinas Sosial
240	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL/ Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp 81.864.000,00	Dinas Sosial
241	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL/ Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Rp 71.391.450,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Provinsi/ Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		
242	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL/ Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi/ Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Rp 70.639.400,00	Dinas Sosial
243	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL/ Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi/ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Rp 69.866.000,00	Dinas Sosial
244	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL/ Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi/ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Rp 232.922.100,00	Dinas Sosial
245	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN/ Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debar kasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal/ Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debar kasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten / Kota Asal	Rp 249.999.500,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
246	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Permakanaan	Rp 573.637.500,00	Dinas Sosial
247	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Sandang	Rp 89.906.700,00	Dinas Sosial
248	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp 241.165.100,00	Dinas Sosial
249	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Alat Bantu	Rp 66.000.000,00	Dinas Sosial
250	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Rp 53.109.000,00	Dinas Sosial
251	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Rp 236.319.399,00	Dinas Sosial
252	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Rp 50.000.000,00	Dinas Sosial
253	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Rp 1.000.000,00	Dinas Sosial
254	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Rp 14.850.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Terlantar di dalam Panti/ Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
255	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp 4.740.000,00	Dinas Sosial
256	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 5.000.000,00	Dinas Sosial
257	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti/ Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp 53.932.800,00	Dinas Sosial
258	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti/ Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 12.160.142,00	Dinas Sosial
259	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Permakanan	Rp 975.602.000,00	Dinas Sosial
260	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Sandang	Rp 65.612.279,00	Dinas Sosial
261	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Rp 149.999.700,00	Dinas Sosial
262	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Alat Bantu	Rp 14.250.000,00	Dinas Sosial
263	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial	Rp 35.153.700,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial		
264	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp 169.934.300,00	Dinas Sosial
265	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Rp 12.960.000,00	Dinas Sosial
266	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Rp 2.500.000,00	Dinas Sosial
267	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 7.100.000,00	Dinas Sosial
268	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp 22.084.000,00	Dinas Sosial
269	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 22.084.000,00	Dinas Sosial
270	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti/ Pemulasaraan	Rp 20.452.000,00	Dinas Sosial
271	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan	Rp 273.750.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Pengemis di dalam Panti/ Penyediaan Permakanan		
272	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Penyediaan Sandang	Rp 19.302.500,00	Dinas Sosial
273	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Rp 120.022.900,00	Dinas Sosial
274	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp 6.304.429,00	Dinas Sosial
275	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp 51.570.000,00	Dinas Sosial
276	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp 122.911.597,00	Dinas Sosial
277	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp 24.611.200,00	Dinas Sosial
278	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Rp 2.000.000,00	Dinas Sosial
279	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan	Rp 7.225.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Pengemis di dalam Panti/ Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
280	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Pemulangan ke Daerah Asal	Rp 9.790.000,00	Dinas Sosial
281	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Rp 10.108.000,00	Dinas Sosial
282	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti/ Penyediaan Permakanan	Rp 656.867.600,00	Dinas Sosial
283	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti/ Penyediaan Sandang	Rp 105.000.000,00	Dinas Sosial
284	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp 872.828.964,00	Dinas Sosial
285	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp 1.608.266.000,00	Dinas Sosial
286	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial	Rp 76.990.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti/ Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		
287	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti/ Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 28.999.660,00	Dinas Sosial
288	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL/ Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi/ Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 283.026.665,00	Dinas Sosial
289	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL/ Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi/ Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten / Kota	Rp 103.153.000,00	Dinas Sosial
290	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL/ Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi/ Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp 983.880.000,00	Dinas Sosial
291	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA/ Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi/ Penyediaan Permakanan	Rp 180.316.320,00	Dinas Sosial
292	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA/ Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi/ Penyediaan Sandang	Rp 19.012.000,00	Dinas Sosial
293	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA/ Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi/	Rp 230.000.000,00	Dinas Sosial

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		
294	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA/ Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi/ Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp 266.200.000,00	Dinas Sosial
295	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA/ Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi/ Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp 251.977.357,00	Dinas Sosial
296	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN/ Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp 44.171.000,00	Dinas Sosial
297	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN/ Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi/ Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp 289.576.273,00	Dinas Sosial
298	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
299	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
300	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
301	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 25.953.093.708,00	Dinas Tenaga Kerja
302	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
303	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
304	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
305	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
306	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 17.268.201,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
307	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
308	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 16.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
309	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 32.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
310	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 60.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
311	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 89.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
312	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 69.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
313	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
314	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
315	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
316	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 631.676.000,00	Dinas Tenaga Kerja
317	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 373.670.000,00	Dinas Tenaga Kerja
318	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
319	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
320	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Rp 92.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
321	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Rp 50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
322	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA/ Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 1.200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
323	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA/ Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja/ Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Rp 75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
324	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA/ Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah/ Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Rp 175.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
325	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA/ Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Provinsi/ Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		
326	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA/ Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten / Kota/ Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
327	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA/ Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten / Kota/ Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Rp 150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
328	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA/ Pengelolaan Informasi Pasar Kerja/ Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
329	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA/ Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi/ Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
330	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA/ Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi/ Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Rp 300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
331	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA/ Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi/ Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Rp 75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
332	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL/ Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota/ Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Rp 107.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
333	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL/ Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi/ Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 115.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
334	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL/ Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi/ Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
335	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL/ Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP),	Rp 100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)/ Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		
336	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN/ Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan/ Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Rp 200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
337	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN/ Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan/ Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Rp 90.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
338	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN/ Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan/ Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Rp 200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
339	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
340	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.782.610.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
341	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan	Rp 50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
342	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
343	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
344	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
345	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
346	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 28.280.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
347	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 75.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
348	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 8.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
349	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
350	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 33.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
351	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 79.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
352	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.576.476.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
353	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 200.938.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
354	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa	Rp 148.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
355	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 515.340.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
356	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 292.908.200,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
357	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 58.960.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
358	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 183.670.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
359	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN/ Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi/ Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Rp 181.168.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
360	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN/ Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi/ Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp 519.420.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
361	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN/ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi/ Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 182.027.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
362	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN/ Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 201.118.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
363	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN/ Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Advokasi Kebijakan dan	Rp 400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
364	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN/ Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp 262.044.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
365	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN/ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi/ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp 191.422.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
366	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA/ Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi/ Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Rp 585.780.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
367	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK/ Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi/ Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp 82.204.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
368	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK/ Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi/ Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Rp 109.039.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
369	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp 197.888.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
370	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi/ Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp 74.121.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
371	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi/ Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	Rp 365.003.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
372	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN/ Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Rp 227.687.500,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
373	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT/ Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/ Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
374	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT/ Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Rp 80.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
375	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT/ Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/	Rp 80.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		
376	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT/ Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi/ Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Rp 410.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
377	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT/ Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi/ Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 1.601.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
378	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT/ Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Rp 277.610.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
379	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN/ Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Rp 300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
380	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN/ Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah	Rp 475.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Kabupaten/Kota/ Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi		Pangan dan Hortikultura
381	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN/ Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 340.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
382	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN/ Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 340.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
383	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN/ Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Rp 67.440.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
384	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
385	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK/ Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk/ Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang	Rp 70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat		
386	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)/ Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal/ Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Rp 84.967.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
387	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)/ Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga/ Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Rp 180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
388	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)/ Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga/ Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),	Rp 85.888.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		
389	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 150.000.000,00	Dinas Perhubungan
390	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 30.000.000,00	Dinas Perhubungan
391	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 13.274.686.897,05	Dinas Perhubungan
392	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 35.000.000,00	Dinas Perhubungan
393	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 10.000.000,00	Dinas Perhubungan
394	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	Rp 700.000.000,00	Dinas Perhubungan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi/ Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		
395	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi/ Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan
396	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp 1.200.000.000,00	Dinas Perhubungan
397	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan
398	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan
399	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B/ Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Rp 210.000.000,00	Dinas Perhubungan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
400	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi/ Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp 25.000.000,00	Dinas Perhubungan
401	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi/ Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan
402	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi/ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp 70.000.000,00	Dinas Perhubungan
403	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi/ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp 35.000.000,00	Dinas Perhubungan
404	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan/ Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
405	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan/ Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan
406	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan/ Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan
407	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan
408	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rp 520.000.000,00	Dinas Perhubungan
409	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	Rp 200.000.000,00	Dinas Perhubungan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		
410	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 75.000.000,00	Dinas Perhubungan
411	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN/ Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		
412	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN/ Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional/ Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp 161.078.402,95	Dinas Perhubungan
413	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN/ Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp 35.000.000,00	Dinas Perhubungan
414	Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN/ Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi/ Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Rp 35.000.000,00	Dinas Perhubungan
415	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGEMBANGAN I KLIM PENANAMAN MODAL/ Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif	Rp 100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		dan Kemudahan Penanaman Modal		
416	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGEMBANGAN I KLIM PENANAMAN MODAL/ Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp 100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
417	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGEMBANGAN I KLIM PENANAMAN MODAL/ Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi/ Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Rp 240.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
418	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL/ Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Rp 200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
419	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL/ Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
420	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL/ Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Penyediaan	Rp 100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		
421	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL/ Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rp 100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
422	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PEN GEND ALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL/ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 454.026.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
423	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PEN GEND ALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL/ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
424	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL/ Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi/ Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	Rp 100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
425	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 150.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
426	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 25.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
427	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 50.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
428	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 30.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
429	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 15.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
430	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen	Rp 30.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
431	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 130.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
432	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 30.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
433	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 687.936.100,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
434	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 100.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
435	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 700.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
436	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 20.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
437	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/	Rp 4.301.530.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
438	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 214.978.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
439	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 22.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
440	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 800.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
441	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Rp 35.788.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
442	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	Rp 100.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Kepemudaan Kewenangan Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi		
443	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Rp 150.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
444	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi/ Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Rp 983.124.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
445	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi/ Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Rp 1.589.310.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
446	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi/ Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Rp 30.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
447	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Rp 1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
448	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/ Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi/ Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Rp 118.820.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
449	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Rp 2.515.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
450	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Rp 11.350.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi		
451	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga/ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Rp 400.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
452	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga/ Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Rp 1.130.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
453	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga/ Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Rp 16.219.912.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
454	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi/ Seleksi Atlet Daerah	Rp 200.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
455	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi/ Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Rp 150.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
456	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi/ Pemberian	Rp 110.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penghargaan Olahraga Provinsi		
457	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN/ Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga/ Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Rp 450.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
458	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN/ Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan/ Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Rp 1.058.385.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
459	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN/ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp 966.245.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
460	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN/ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Rp 1.179.566.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
461	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN/ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya	Rp 154.189.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
462	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL/ Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota/ Peningkatan Pendidikan dan	Rp 415.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
463	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH/ Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi/ Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Rp 400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
464	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA/ Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi/ Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Rp 350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
465	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN/ Pengelolaan Museum Provinsi/ Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Rp 1.067.671.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
466	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN/ Pengelolaan Museum Provinsi/ Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Rp 2.439.873.600,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
467	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN/ Pengelolaan Museum Provinsi/ Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Rp 492.454.900,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
468	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARI WISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi/ Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 1.250.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
469	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARI WISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi/ Pemberdayaan Masyarakat dalam	Rp 750.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
470	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARI WISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi/ Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 150.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
471	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA/ Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp 1.120.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
472	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 300.000.000,00	Dinas Perkebunan
473	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 67.388.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
474	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 80.000.000,00	Dinas Perkebunan
475	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/	Rp 83.109.000,25	Dinas Ketahanan Pangan,

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tanaman Pangan dan Hortikultura
476	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 15.578.607.388,00	Dinas Perkebunan
477	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 42.772.723.340,25	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
478	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 21.166.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
479	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
480	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 44.088.405,00	Dinas Perkebunan
481	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan	Rp 50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		
482	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
483	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 95.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
484	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
485	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
486	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 40.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
487	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 922.357.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
488	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 62.000.000,00	Dinas Perkebunan
489	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 52.137.993,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
490	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
491	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 24.000.000,00	Dinas Perkebunan
492	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
493	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 210.000.000,00	Dinas Perkebunan
494	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 80.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
495	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 50.000.000,00	Dinas Perkebunan
496	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 120.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
497	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 626.400.000,00	Dinas Perkebunan
498	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.227.047.400,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
499	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 293.700.000,00	Dinas Perkebunan
500	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 609.590.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
501	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 133.416.000,00	Dinas Perkebunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
502	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 702.930.000,00	Dinas Perkebunan
503	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.134.040.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
504	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 521.502.000,00	Dinas Perkebunan
505	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.005.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
506	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 50.000.000,00	Dinas Perkebunan
507	Meningkatkan Kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 65.000.000,00	Dinas Ketahanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia.	DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
508	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 325.000.000,00	Dinas Perkebunan
509	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 879.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
510	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 60.000.000,00	Dinas Perkebunan
511	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian/ Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 75.000.000,00	Dinas Perkebunan
512	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian/ Pengawasan Sebaran Pupuk,	Rp 474.775.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
513	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Rp 6.664.080.700,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
514	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/ Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Rp 225.000.000,00	Dinas Perkebunan
515	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/ Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Rp 250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
516	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Rp 370.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
517	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Rp 626.312.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
518	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/ Pengawasan Mutu,	Rp 600.000.000,00	Dinas Perkebunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		
519	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi/ Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Rp 250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
520	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ Penataan Prasarana Pertanian/ Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Rp 4.317.960.000,00	Dinas Perkebunan
521	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ Penataan Prasarana Pertanian/ Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Rp 13.834.737.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
522	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ Penataan Prasarana Pertanian/ Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Rp 4.036.153.500,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
523	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ Penataan Prasarana Pertanian/ Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Rp 175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
524	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ Penataan Prasarana Pertanian/ Pembangunan	Rp 300.000.000,00	Dinas Perkebunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian		
525	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ Penataan Prasarana Pertanian/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp 1.582.322.139,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
526	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ Penataan Prasarana Pertanian/ Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Rp 300.000.000,00	Dinas Perkebunan
527	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN/ Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi/ Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp 275.000.000,00	Dinas Perkebunan
528	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN/ Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi/ Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp 838.556.300,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
529	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN/ Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi/ Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan	Rp 100.000.000,00	Dinas Perkebunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
530	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN/ Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota/ Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Rp 350.000.000,00	Dinas Perkebunan
531	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian/ Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Rp 150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
532	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/ Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Rp 450.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
533	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/ Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Rp 4.178.827.550,00	Dinas Perkebunan
534	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/ Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Rp 3.945.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
535	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan/ Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Rp 450.000.000,00	Dinas Perkebunan
536	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan/ Pembentukan dan	Rp 250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		Pangan dan Hortikultura
537	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi/ Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Rp 460.418.000,00	Dinas Kehutanan
538	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)/ Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Rp 339.485.000,00	Dinas Kehutanan
539	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Rp 489.613.500,00	Dinas Kehutanan
540	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Rp 57.412.800,00	Dinas Kehutanan
541	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Rp 62.500.000,00	Dinas Kehutanan
542	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp 4.351.649.000,00	Dinas Kehutanan
543	Pengelolaan Lingkungan yang	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan	Rp 1.499.980.000,00	Dinas Kehutanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	Hutan Negara/ Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		
544	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Rp 24.772.000,00	Dinas Kehutanan
545	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Rp 957.375.000,00	Dinas Kehutanan
546	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Rp 47.845.000,00	Dinas Kehutanan
547	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Rp 437.819.700,00	Dinas Kehutanan
548	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Rp 46.959.000,00	Dinas Kehutanan
549	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp 13.472.000,00	Dinas Kehutanan
550	Pengelolaan Lingkungan yang	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan	Rp 28.558.000,00	Dinas Kehutanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	Bukan Kayu (HHBK)/ Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya		
551	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)/ Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Rp 22.861.000,00	Dinas Kehutanan
552	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Rp 67.128.000,00	Dinas Kehutanan
553	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Rp 4.180.000,00	Dinas Kehutanan
554	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN/ Perbenihan Tanaman Hutan/ Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan / atau Bibit Terdaftar	Rp 26.990.000,00	Dinas Kehutanan
555	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Rp 8.328.000,00	Dinas Kehutanan
556	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Rp 9.533.000,00	Dinas Kehutanan
557	Pengelolaan Lingkungan yang	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN	Rp 349.292.000,00	Dinas Kehutanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi		
558	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Rp 50.563.000,00	Dinas Kehutanan
559	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Rp 4.887.000,00	Dinas Kehutanan
560	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Rp 3.998.000,00	Dinas Kehutanan
561	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/ Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Rp 5.985.000,00	Dinas Kehutanan
562	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi/	Rp 2.896.000,00	Dinas Kehutanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Perencanaan Pengelolaan TAHURA		
563	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi/ Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Rp 45.789.000,00	Dinas Kehutanan
564	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA/ Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam/ Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Rp 5.851.000,00	Dinas Kehutanan
565	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN/ Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Rp 680.726.000,00	Dinas Kehutanan
566	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	Rp 2.175.086.000,00	Dinas Kehutanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	Produk Unggulan.	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN/ Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
567	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN/ Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Rp 454.965.000,00	Dinas Kehutanan
568	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)/ Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Rp 203.957.000,00	Dinas Kehutanan
569	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)/ Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Rp 1.126.080.000,00	Dinas Kehutanan
570	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)/ Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Pemberdayaan Masyarakat	Rp 6.405.000,00	Dinas Kehutanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		
571	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)/ Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/ Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Rp 5.626.000,00	Dinas Kehutanan
572	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR/ Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota / Pameran Dagang Internasional/Nasional	Rp 350.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
573	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR/ Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota / Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Rp 400.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
574	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI/ Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri/ Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Rp 500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
575	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI/ Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Rp 100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
576	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp 450.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
577	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp 350.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
578	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi/ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp 2.250.065.910,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
579	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 26.405.900,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
580	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 61.339.800,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
581	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 100.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
582	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 124.768.400,00	Biro Hukum
583	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 663.000.000,00	Biro Umum
584	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 18.698.500,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
585	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 8.152.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
586	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran,	Rp 16.364.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
587	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 21.842.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
588	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 127.696.500,00	Biro Organisasi
589	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 509.000.000,00	Biro Umum
590	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 75.072.378.104,00	Biro Umum
591	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 240.784.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
592	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 663.000.000,00	Biro Umum

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
593	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 16.948.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
594	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 13.280.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
595	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 26.880.100,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
596	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 425.000.000,00	Biro Umum
597	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 597.500.000,00	Biro Umum
598	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 10.245.400,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
599	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 405.000.000,00	Biro Umum
600	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 364.500.000,00	Biro Umum
601	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 30.500.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
602	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 90.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
603	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 140.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
604	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 645.941.250,00	Biro Umum

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
605	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 129.630.500,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
606	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 161.675.600,00	Biro Hukum
607	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 176.952.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
608	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 206.728.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
609	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 230.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
610	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 384.750.000,00	Biro Umum
611	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 190.100.000,00	Biro Umum

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
612	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 202.499.000,00	Biro Umum
613	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 193.900.000,00	Biro Umum
614	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 232.790.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
615	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 200.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
616	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 811.184.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
617	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.209.040.000,00	Biro Hukum
618	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/	Rp 1.404.003.400,00	Biro Pemerintahan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		dan Otonomi Daerah
619	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 3.000.000.000,00	Biro Umum
620	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 2.750.000.000,00	Biro Umum
621	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1.175.000.000,00	Biro Umum
622	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 162.000.000,00	Biro Umum
623	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 5.896.400.000,00	Biro Umum

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
624	.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 303.960.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
625	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 127.680.000,00	Biro Hukum
626	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 11.739.785.000,00	Biro Umum
627	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 3.361.760.000,00	Biro Umum
628	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 1.395.000.000,00	Biro Umum
629	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi	Rp 4.410.000.000,00	Biro Umum

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
630	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 271.594.600,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
631	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 3.374.400.000,00	Biro Umum
632	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 7.235.840.284,00	Biro Umum
633	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)/ Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 100.000.000,00	Biro Umum
634	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/	Rp 2.120.000.000,00	Biro Umum

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)/ Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		
635	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)/ Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp 1.390.000.000,00	Biro Umum
636	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)/ Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp 9.500.000.000,00	Biro Umum
637	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan/ Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Rp 178.353.700,00	Biro Organisasi
638	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan/ Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten / Kota	Rp 115.331.300,00	Biro Organisasi
639	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan/ Penataan Analisis Jabatan	Rp 322.678.500,00	Biro Organisasi
640	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja/ Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp 214.324.000,00	Biro Organisasi

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
641	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja/ Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp 351.944.000,00	Biro Organisasi
642	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja/ Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp 97.933.500,00	Biro Organisasi
643	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja/ Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp 151.769.100,00	Biro Organisasi
644	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI/ Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja/ Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Rp 340.907.300,00	Biro Organisasi
645	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH/ Pelaksanaan Tugas Pemerintahan/ Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Rp 235.761.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
646	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH/ Pelaksanaan Otonomi Daerah/ Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Rp 322.277.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
647	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH/ Fasilitas Kerjasama Daerah/ Fasilitas Kerjasama antar Pemerintah	Rp 142.859.700,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
648	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH/ Fasilitas Kerjasama Daerah/ Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Rp 14.936.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
649	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH/ Fasilitas Kerjasama Daerah/	Rp 122.574.300,00	Biro Pemerintahan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		dan Otonomi Daerah
650	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT/ Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual/ Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Rp 13.895.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
651	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT/ Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual/ Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Rp 43.664.158.180,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
652	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT/ Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/ Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Rp 100.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
653	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT/ Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/ Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Rp 751.390.800,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
654	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT/ Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/ Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Rp 1.900.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
655	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT/ Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar/ Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Rp 765.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
656	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT/ Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar/ Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rp 185.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
657	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM/ Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan/ Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Rp 318.242.400,00	Biro Hukum
658	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM/ Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan/ Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Rp 50.894.000,00	Biro Hukum
659	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM/ Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan/ Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Rp 151.343.500,00	Biro Hukum
660	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM/ Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan/ Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten / Kota	Rp 257.707.000,00	Biro Hukum
661	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM/ Fasilitas Bantuan Hukum/ Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Rp 476.172.500,00	Biro Hukum
662	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM/	Rp 472.476.600,00	Biro Hukum

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Fasilitasi Bantuan Hukum/ Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		
663	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN/ Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD/ Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Rp 123.791.000,00	Biro Perekonomian
664	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa/ Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 107.974.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
665	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa/ Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 600.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
666	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa/ Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 180.436.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
667	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Rp 330.649.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
668	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ Pengembangan	Rp 156.293.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		
669	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 136.394.700,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
670	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa/ Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 365.641.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
671	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa/ Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 159.759.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
672	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa/ Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 220.600.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
673	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN/ Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah/ Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp 250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
674	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN/ Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah/ Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp 150.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
675	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN/ Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah/ Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp 480.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
676	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN/ Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah/ Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp 400.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
677	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN/ Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah/ Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 750.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
678	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD/ Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD/ Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp 1.033.230.400,00	Sekretariat DPRD
679	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD/ Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD/ Pembahasan Rancangan Perda	Rp 6.958.286.800,00	Sekretariat DPRD
680	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD/ Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD/ Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp 1.432.271.000,00	Sekretariat DPRD
681	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD/ Pembentukan Perda dan	Rp 1.500.000.000,00	Sekretariat DPRD

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Peraturan DPRD/ Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik		
682	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD/ Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD/ Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp 397.409.600,00	Sekretariat DPRD
683	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 221.293.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
684	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 128.959.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
685	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 15.494.945.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
686	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 76.281.692,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
687	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan	Rp 41.080.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Barang Milik Daerah pada SKPD		
688	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 165.850.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
689	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 102.146.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
690	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 115.328.140,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
691	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 25.486.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
692	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 30.815.750,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
693	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 184.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
694	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp 133.214.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pemerintah Daerah/ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
695	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 424.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
696	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 66.675.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
697	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.779.171.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
698	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 337.434.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
699	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 26.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
700	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik	Rp 333.189.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
701	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan/ Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp 121.842.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
702	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan/ Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Rp 257.595.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
703	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan/ Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Rp 921.169.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
704	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 118.138.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
705	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Rp 314.298.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Perencanaan Pembangunan SKPD		
706	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 122.830.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
707	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Rp 465.807.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
708	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Rp 49.232.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
709	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 532.990.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
710	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Rp 228.639.200,00	Badan Perencanaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		DAERAH/ Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Daerah
711	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah/ Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp 127.560.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
712	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah/ Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp 43.432.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
713	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/ Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah/ Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Rp 43.083.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
714	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Koordinasi Penyusunan	Rp 37.770.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
715	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 205.472.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
716	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 471.453.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
717	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 154.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
718	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Rp 340.180.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
719	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
720	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 154.688.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
721	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 205.651.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
722	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Rp 223.294.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
723	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 50.350.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
724	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 70.089.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
725	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp 197.184.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
726	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Rp 103.714.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
727	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 141.424.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
728	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 85.200.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
729	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 47.567.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
730	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 283.076.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
731	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Rp 231.044.000,00	Badan Perencanaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Pembangunan Daerah
732	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 25.508.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
733	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 32.324.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
734	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 425.228.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
735	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan	Rp 108.802.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Kewilayahan/ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
736	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 35.428.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
737	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 307.924.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
738	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 33.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
739	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 138.523.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
740	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/	Rp 28.730.000,00	Badan Pengelolaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Keuangan Dan Aset Daerah
741	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 28.631.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
742	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 23.751.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
743	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 111.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
744	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 149.600.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
745	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 78.916.179.577,00	Badan Pendapatan Daerah
746	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/	Rp 81.551.494.736,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
747	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 13.057.208.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
748	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 25.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
749	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 46.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
750	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
751	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 50.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
752	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan	Rp 25.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
753	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 43.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
754	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 13.100.000,00	Badan Pendapatan Daerah
755	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 25.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
756	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah/ Pengolahan Data Retribusi Daerah	Rp 414.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
757	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 108.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
758	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan	Rp 200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
759	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 520.814.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
760	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 85.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
761	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 803.152.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
762	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 4.491.286.270,00	Badan Pendapatan Daerah
763	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 10.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
764	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 35.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
765	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum	Rp 1.530.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
766	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 88.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
767	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 112.359.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
768	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 134.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
769	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 147.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
770	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 486.209.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
771	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.000.874.430,00	Badan Pendapatan Daerah
772	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat	Rp 2.359.904.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
773	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 2.165.525.223,00	Badan Pendapatan Daerah
774	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 581.400.000,00	Badan Pendapatan Daerah
775	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 973.078.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
776	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 4.820.124.000,00	Badan Pendapatan Daerah
777	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 352.840.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
778	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp 778.173.000,00	Badan Pendapatan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
779	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 2.923.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
780	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 322.456.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
781	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 413.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
782	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Penyusunan Standar Harga	Rp 366.540.700,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
783	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp 230.459.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
784	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 167.168.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
785	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp 343.228.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
786	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 2.559.635.300,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
787	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 365.662.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
788	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 476.921.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
789	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 665.733.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
790	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 785.038.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
791	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 2.156.587.000,00	Badan Pendapatan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
792	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 1.434.740.200,00	Badan Pendapatan Daerah
793	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 3.104.075.000,00	Badan Pendapatan Daerah
794	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
795	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 6.423.619.500,00	Badan Pendapatan Daerah
796	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Penagihan Pajak Daerah	Rp 5.268.315.800,00	Badan Pendapatan Daerah
797	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 803.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
798	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/ Pengembangan Kompetensi Teknis/ Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Rp 2.501.171.500,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
799	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/ Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional/ Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota	Rp 184.690.100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
800	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/ Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional/ Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp 117.680.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
801	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 163.191.984,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
802	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 51.800.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
803	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 19.042.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
804	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7.910.447.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
805	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 15.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
806	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.624.300,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
807	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 149.109.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
808	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 6.312.400,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
809	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/	Rp 15.493.600,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
810	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 25.906.450,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
811	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 25.200.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
812	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.257.196.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
813	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 93.240.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
814	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 38.740.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
815	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 464.658.600,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
816	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik	Rp 160.027.200,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
817	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 21.500.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
818	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan/ Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rp 45.008.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
819	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan/ Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 99.747.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
820	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan/ Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Rp 244.028.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
821	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang	Rp 118.525.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		
822	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp 402.429.100,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
823	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Rp 160.820.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
824	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp 72.239.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
825	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Rp 119.257.800,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
826	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp 133.084.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
827	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan	Rp 102.923.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
828	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH/ Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp 141.300.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
829	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 8.377.000,00	Badan Penghubung
830	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 32.374.500,00	Badan Penghubung
831	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6.875.845.951,00	Badan Penghubung
832	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 37.408.700,00	Badan Penghubung
833	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 25.000.000,00	Badan Penghubung
834	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 8.300.000,00	Badan Penghubung

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		DAERAH PROVINSI/ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
835	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 65.000.000,00	Badan Penghubung
836	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 188.069.000,00	Badan Penghubung
837	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 1.221.539.100,00	Badan Penghubung
838	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 44.929.800,00	Badan Penghubung
839	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan / Material	Rp 33.000.400,00	Badan Penghubung
840	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 303.100.000,00	Badan Penghubung
841	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 1.846.346.000,00	Badan Penghubung

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
842	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 30.994.000,00	Badan Penghubung
843	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 724.603.900,00	Badan Penghubung
844	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.504.824.000,00	Badan Penghubung
845	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.481.984.000,00	Badan Penghubung
846	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 237.951.200,00	Badan Penghubung
847	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 1.208.771.000,00	Badan Penghubung

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		DAERAH PROVINSI/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
848	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG/ Pelaksanaan Pelayanan Penghubung/ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Rp 901.708.500,00	Badan Penghubung
849	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG/ Pelaksanaan Pelayanan Penghubung/ Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Rp 167.656.500,00	Badan Penghubung
850	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG/ Pelaksanaan Pelayanan Penghubung/ Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Rp 279.865.400,00	Badan Penghubung
851	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG/ Pelaksanaan Pelayanan Penghubung/ Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Rp 294.190.500,00	Badan Penghubung
852	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG/ Pelaksanaan Pelayanan Penghubung/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Rp 190.593.500,00	Badan Penghubung
853	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN/ Penyelenggaraan Pengawasan Internal/ Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 1.806.109.000,00	Inspektorat
854	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN/ Penyelenggaraan Pengawasan Internal/	Rp 576.560.000,00	Inspektorat

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
855	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI/ Pendampingan dan Asistensi/ Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 300.022.000,00	Inspektorat
856	Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI/ Pendampingan dan Asistensi/ Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp 172.929.000,00	Inspektorat
857	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan/ Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 30.141.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6.3 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah dan Nasional

Tabel VI-3
Program Prioritas berdasarkan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
9	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Berkualitas dan Berdaya Saing
11	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
12	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
13	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
14	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
15	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
16	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
17	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
18	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
19	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
		DAYA MANUSIA KESEHATAN		Berkualitas dan Berdaya Saing
20	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
21	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
22	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
23	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
				Ekonomi dan Pelayanan Dasar
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
28	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
29	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
30	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
31	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
32	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
33	Dinas Perumahan, Kawasan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
	Permukiman dan Cipta Karya			Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
34	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
35	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
36	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
37	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
38	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
39	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
40	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	
42	Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
43	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
44	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
45	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
46	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
47	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
48	Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
49	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
50	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatkan Kualitas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
			sumber daya manusia	Berkualitas dan Berdaya Saing
51	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
52	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
53	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
54	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
55	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Non-Program	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
56	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
57	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
58	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
59	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
60	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
61	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
62	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
63	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
64	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
65	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
66	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEN GEND ALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
67	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
68	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEN GENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
69	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
70	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
71	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
72	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
73	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
74	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
			dan Mitigasi bencana	Bencana, dan Perubahan Iklim
75	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
76	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
77	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
78	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
81	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
86	Dinas Perhubungan	Non-Program	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
87	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
88	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
89	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
90	Dinas Komunikasi,	PROGRAM PENGELOLAAN	Kehidupan Masyarakat Yang Religius,	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
	Informatika dan Statistik	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Aman dan Kebudayaan	dan Transformasi Pelayanan Publik
91	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
92	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
93	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
94	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
95	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
96	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
97	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
98	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
99	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
100	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
101	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
102	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
103	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
104	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PEN GEND ALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
105	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
106	Dinas Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
107	Dinas Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA	Meningkatkan Kualitas	Meningkatkan Sumber Daya

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
		SAING KEOLAHRAAGAN	sumber daya manusia	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
108	Dinas Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
109	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	
110	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
111	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
112	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
113	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
114	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
115	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
116	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Meningkatkan Investasi dan	Memperkuat Ketahanan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
		PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produk Unggulan	Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
117	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
118	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
119	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
120	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
121	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
122	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
123	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
	Pangan dan Hortikultura		Produk Unggulan	Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
124	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
125	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
126	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
127	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
128	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
129	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
130	Dinas Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
131	Dinas Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
				yang Berkualitas dan Berkeadilan
132	Dinas Perkebunan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
133	Dinas Perkebunan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
134	Dinas Perkebunan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
135	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
136	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
137	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
138	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
139	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
			Produk Unggulan	yang Berkualitas dan Berkeadilan
140	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
141	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
142	Dinas Kehutanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
143	Dinas Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
144	Dinas Kehutanan	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
145	Dinas Kehutanan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
146	Dinas Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
				Bencana, dan Perubahan Iklim
147	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
148	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
149	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
150	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
151	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	
152	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	
153	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
154	Dinas Perindustrian	PROGRAM STANDARISASI DAN	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah	

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
	dan Perdagangan	PERLINDUNGAN KONSUMEN	Produk Unggulan	
155	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
156	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
157	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	
158	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	
159	Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	
160	Inspektorat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Reformasi Birokrasi	
161	Inspektorat	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Reformasi Birokrasi	
162	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Non-Program	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
163	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
164	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
165	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
166	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
167	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
168	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
169	Badan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
170	Badan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
171	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
172	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
				dan Transformasi Pelayanan Publik
173	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	
174	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Reformasi Birokrasi	
175	Badan Penghubung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
176	Badan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
177	Sekretariat Daerah	Non-Program	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
178	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
179	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
180	Sekretariat Daerah	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya	
181	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
182	Sekretariat Daerah	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
				dan Transformasi Pelayanan Publik
183	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
184	Sekretariat Daerah	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
185	Sekretariat Daerah	Non-Program	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
186	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
187	Sekretariat Daerah	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
188	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
189	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
190	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
191	Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

NO	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
192	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
193	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
194	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
195	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
196	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

6.4. Program Prioritas Berdasarkan SPM

Tabel VI-4
Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
1	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	66.115.021.000,00
2	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	24.392.553.000,00
3	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	19.105.000.000,00
4	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	5.902.118.000,00
5	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	193.333.850.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
6	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	70.953.992.000,00
7	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	54.325.000.000,00
8	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	11.421.500.000,00
9	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	113.870.480.000,00
10	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.217.631.000,00
11	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	540.000.000,00
12	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Penyediaan Biaya Personil	650.000.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
				Peserta Didik Pendidikan Khusus	
13	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	4.999.880.000,00
14	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.915.900,00
15	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	359.319.900,00
16	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.496.497.105,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
17	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	21.320.100,00
18	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.432.300,00
19	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.151.488,00
20	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.539.500,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	berpotensi bencana provinsi				
21	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan / Material	88.622.570,00
22	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	643.063.221,00
23	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.373.296.200,00
24	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah /	38.856.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
25	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.206.000,00
26	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan BLUD / Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	16.500.000.000,00
27	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	134.166.350,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
28	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	39.788.450,00
29	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	42.361.400,00
30	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	59.652.400,00
31	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Pengelolaan	177.327.600,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
32	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	146.452.305,00
33	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	64.179.060,00
34	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi / Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	117.320.500,00
35	Pemenuhan kebutuhan air minum	Dinas Perumahan,	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	843.574.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	curah lintas kabupaten/kota	Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	(SPAM) Lintas Kabupaten / Kota / Penyusunan Rencana, Kebiasaan, Strategi dan Teknis SPAM	
36	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional / Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	727.700.000,00
37	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi / Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	250.000.000,00
38	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur / Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	212.560.000,00
39	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Permakanan	573.637.500,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
40	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Sandang	89.906.700,00
41	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	241.165.100,00
42	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Alat Bantu	66.000.000,00
43	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	53.109.000,00
44	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	236.319.399,00
45	Rehabilitasi sosial dasar penyandang	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti /	50.000.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	disabilitas telantar di dalam panti			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	
46	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.000.000,00
47	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14.850.000,00
48	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.740.000,00
49	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000,00
50	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Pengasuhan	356.238.050,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
51	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Penyediaan Makanan	1.627.554.000,00
52	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Penyediaan Sandang	294.973.700,00
53	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	403.788.850,00
54	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	53.037.103,00
55	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	400.203.829,00
56	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	180.565.220,00
57	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk	7.500.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
				Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	
58	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	613.851.800,00
59	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	53.932.800,00
60	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti / Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.160.142,00
61	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Permakanan	975.602.000,00
62	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Sandang	65.612.279,00
63	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	149.999.700,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
64	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Alat Bantu	14.250.000,00
65	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	35.153.700,00
66	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	169.934.300,00
67	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	12.960.000,00
68	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	2.500.000,00
69	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.100.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
70	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	22.084.000,00
71	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	22.084.000,00
72	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemulasaraan	20.452.000,00
73	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Permakanan	273.750.000,00
74	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Sandang	19.302.500,00
75	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan	120.022.900,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	gelandangan dan pengemis di dalam panti			Asrama/Wisma yang mudah Diakses	
76	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	6.304.429,00
77	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	51.570.000,00
78	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	122.911.597,00
79	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	24.611.200,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	pengemis di dalam panti				
80	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	2.000.000,00
81	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.225.000,00
82	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemulangan ke Daerah Asal	9.790.000,00
83	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	10.108.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	pengemis di dalam panti			Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	
84	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penyediaan Permakanan	180.316.320,00
85	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penyediaan Sandang	19.012.000,00
86	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	230.000.000,00
87	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	266.200.000,00

NO	SPM	OPD	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	bencana bagi korban bencana provinsi				
88	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Pelayanan Dukungan Psikososial	251.977.357,00

6.5. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, jumlah program yang akan dilaksanakan sebanyak 264 program yang terdiri dari 880 kegiatan yang dilaksanakan oleh 48 Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Secara rinci program dan kegiatan tahun 2023 terdapat pada buku II RKPD Provinsi Lampung tahun 2023.

Tabel VI-5
Program dan Kegiatan berdasarkan OPD Tahun 2023

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10	23	1,753,809,691,046
2	Dinas Kesehatan	6	22	283,547,144,158
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	4	14	384,896,699,372
4	Rumah Sakit Jiwa	4	14	42,823,468,349
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	4	14	559,051,710,000
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	3	13	99,361,844,940
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	16	31	88,761,614,500
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3	14	47,606,411,376
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	15	11,216,074,451
10	Dinas Sosial	8	22	39,407,835,753
11	Dinas Tenaga Kerja	7	23	31,990,707,909
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	27	16,492,310,000
13	Dinas Lingkungan Hidup	12	24	18,788,387,800
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	20	9,200,124,163
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	8	17	17,547,951,396
16	Dinas Perhubungan	5	23	23,962,617,300
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6	16	39,487,101,907
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9	19	19,003,984,200
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	17	19,046,198,524
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	5	18	56,986,583,920

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	19	16,213,700,347
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	7	27	46,599,380,884
23	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	6	20	20,970,168,033
24	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	10	25	89,317,062,873
25	Dinas Perkebunan	7	18	30,381,348,343
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	26	34,245,177,200
27	Dinas Kehutanan	6	25	80,046,854,470
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6	26	21,317,028,400
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	24	28,822,748,600
30	Inspektorat	4	15	43,401,000,000
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	18	33,402,565,182
32	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	4	18	1,479,317,029,404
33	Badan Pendapatan Daerah	3	10	118,044,000,000
34	Badan Kepegawaian Daerah	3	15	21,800,758,096
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	13	30,049,405,992
36	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	15	12,460,357,434
37	Badan Penghubung	3	12	18,712,432,951
38	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	15	3,200,000,000
39	Biro Kesejahteraan Rakyat	3	15	62,084,157,980
40	Biro Hukum	3	14	3,350,000,000
41	Biro Perekonomian	3	15	3,000,000,000
42	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3	15	3,960,000,000
43	Biro Administrasi Pembangunan	3	14	3,200,000,000
44	Biro Organisasi	3	14	3,500,000,000
45	Biro Umum	2	13	151,771,883,388
46	Biro Administrasi Pimpinan	2	15	6,804,923,490
47	Sekretariat DPRD	3	23	320,276,703,600
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	16	18,142,953,826
	JUMLAH	264	881	6.267.380.101.557

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berorientasi pada hasil dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Daerah per urusan dalam RKPD Provinsi ditetapkan berdasarkan IKU dan IKD yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Target IKU dan IKD Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel VII-1 dan Indikator kinerja daerah per urusan penyelenggaraan pemerintah daerah disajikan pada tabel VII-2.

Tabel VII - 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	REALISASI	TARGET CAPAIAN	
			2021	2022	2023
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	72,44	73,5	73,5
2	Indeks Demokrasi Indonesia (TPB)	Indeks	72,79	74	75
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	55,38	55,3	55,8
4	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	CC (58,38)	B	B
5	Angka Harapan Hidup (AHH)	Indeks	72,44	70,95	71,50
6	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	72,79	12,67	12,68

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	REALISASI	TARGET CAPAIAN	
			2021	2022	2023
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	55,38	8,2	8,3
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Indeks	CC (58,38)	4,3-4,4	4,0-4,3
9	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,07	69,57	71,37
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Persen	67,96	69,14	69,18
11	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	75,386	76	77
12	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	91,22	92,20	92,31
13	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	Persen	99,94	97	98
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,79	3-4	3,5-4,5
15	Nilai Tukar Petani	Indeks	101,23	102-103	104-105
16	Laju Inflasi	Persen	2,19	3±1	3±1
17	Angka Kemiskinan	Persen	11,67	12,4-11,9	11,9-11,4
18	Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,56	68,66	69,09
19	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	6,74	6,915	7,066
20	Indeks Resiko Bencana	Indeks	145,42	141	139,1

Tabel VII - 2 Indikator Kinerja Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1	Persentase perumusan kebijakan umum, koordinasi supervise, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian	Persen	85	90	95

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
1	Tenaga Kerja				
1.1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Persen	95,31	96,34	96,43
1.2	Persentase tenaga kerja di perusahaan yang mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan	Persen	80,97	84	86
2	Pangan				
2.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,25	78	79
2.2	Stabilitas harga pangan	Koefisien	1,27	Cv ≥ 5%	Cv ≥ 5%
2.3	Persentase (%) penurunan daerah rawan pangan	Persen	2,63	1%	1%
2.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (TPB)	Persen	85,3	87	88
2.5	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	Persen	100	99	99,5
3	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
3.1	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	Persen	2,28	3,29	4,47
3.2	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Persen	35,17	34,26	35,22
3.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas	Indeks	-	B	B
4	Penanaman Modal				
4.1	Realisasi investasi	Rupiah	13,05	12 Trilyun	13,5 Trilyun
	Layanan Urusan Pilihan				
1	Pariwisata				
1.1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	8,9	33	37
1.2	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	Persen	9,7	12	14
1.3	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	Persen	4,8	7	12
1.4	Nilai sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) dalam PDRB Provinsi Lampung	Rupiah	2,16	3,5	3,75
2	Pertanian (Tananam pangan, Perkebunan dan Peternakan)				

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET		
			REALISASI	2021	2022
2.1	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung, dan Ubi Kayu)	Persen	99,48	100	100
2.2	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultural (Cabai Besar, Bawang Merah, Nenas, Pisang dan Manggis)	Persen	91,3	100	100
2.3	Jumlah Populasi Ternak - Sapi Potong - Ayam Pedaging - Ayam Petelur	Ekor	860.951 94.254.495 13.230.147	857.657 86.291.694 9.644.313	883.387 88.017.528 9.837.199
2.4	Jumlah Produksi Daging (Ayam dan Sapi)	Ton	108.286	110.302	112.508
2.5	Jumlah Produksi Telur	Ton	195.204	172.863	176.32
3	Perdagangan				
3.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	4,57	5,8	6
3.2	Nilai Ekspor Non Migas	Milyar US \$	4,83	3,48	3,65
3.3	Andil Inflasi Bahan Makanan	Nilai	1,1	≤1,5	≤1,5
4	Perindustrian				
4.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	8,26	6,3	6,8
5	Keluatan dan Perikanan				
5.1	Prosentase Produksi Perikanan	%	90	100	100
5.2	Prosentase Ekspor Perikanan	%	84,7	100	100
6	Perkebunan				
6.1	Jumlah produksi lada rakyat	Ton	15.412	15.464	15.695
6.2	Jumlah produksi kopi robusta rakyat	Ton	117.311	117.78	119.546
6.3	Jumlah produksi tebu rakyat	Ton	148.549	189.606	192.45
6.4	Jumlah produksi robusta rakyat	Ton	192.601	164.706	167.177
6.5	Jumlah produksi kakao rakyat	Ton	57.507	61.25	62.17
6.6	Jumlah produksi kelapa sawit rakyat	Ton	197.639	199.959	202.958
6.7	Jumlah produksi kelapa dalam rakyat	Ton	81.475	86.225	87.519
	Penunjang Urusan				
1	Keuangan				
1.1	Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Opini	WTP	WTP	WTP
1.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	14,86	2,00	4,75
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan	Persen	85,02	85	88,3

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	75	76,00	77,00
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
2.1	Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaatan ruang thp rencana tata ruang	Persen	100	86,00%	90,00%
2.2	Persentase penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	Persen	82,27	83,75%	85,47%
2.3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman Terhadap Sanitasi Layak	Persen	77,49	79,97%	82,44%
2.4	Persentase jumlah Kawasan kumuh Provinsi yang tertangani	Persen	71,11	71,66%	72,74%
2.5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	Persen	100	97,38%	97,92%
3	PSDA				
31	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan IP>2	Persen	40	45	50
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
4	Lingkungan Hidup				
4.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	57,77	58,44	58,54
4.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,46	83,34	84,44
4.3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	79,56	73,32	73,94
4.4	Indeks Kualitas Tutupn Lahan (IKTL)	Indeks	33,54	40,85	43,03
4.5	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektir Limbah	Persen	15,23	8,07	8,42
4.6	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis lingkungan hidup (PUULH)	Persen	94,32	89	91

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET		
			REALISASI 2021	2022	2023
	yang diterbitkan pemerintah daerah				
5	BPBD				
5.1	Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Nilai	4,8	5,83	6,21
6	Perhubungan				
6.1	Rasio konektivitas Angkutan Sesuai Kewenangan Provinsi	Rasio	0,68	0,7	0,72
6.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	72,62	84	85
6.3	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Persentase	29	35	40
7	Komunikasi dan Informatika				
7.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,76	3,0(Baik)	3,3(Baik)
7.2	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Update	Persen		85	90
7.3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	87,98	75 (cukup informatif)	80 (menuju informatif)
7.4	Kualifikasi Indeks Keterbukaan informasi Publik	Kualifikasi	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Informatif
7.5	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Skor / Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi
7.6	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan sertifikat eelektronik dan terintegrasi dengan BSSN	Persen	4	6	8
	LAYANAN URUSAN PILIHAN				
1	Kehutanan				
1.1	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dipulihkan Baik dengan Mekanisme Alam, Rehabilitas maupun Restorasi	Persen	2,63	1,275	1,275
2	Energi dan Sumber Daya Mineral				
2.1	Rasio Dusun Berlistrik	Persen	52,96	53	54
	PENUNJANG URUSAN				
3	Perencanaan Pembangunan				
3.1	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
3.2	Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	Persen	23,92	30	31
3.3	Persentase OPD yang indicator sasaran Renstranya selaras dengan indicator sasaran RPJMD	Persen	100	100	100
3.4	Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	Persen	100	100	100
3.5	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	Persen	85	90	95
4	Penelitian dan Pengembangan				
4.1	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di desiminasikan	Persen	80	82	85
4.2	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah	Persen	100	100	100
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	CC*	B	B
2	Nilai SAKIP (TPB)		B*	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor/Nilai	82	84	86
4	Nilai SKM untuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Nilai	3,1	3,2	3,3
5	Nilai SKM untuk Fasilitasi Pelayanan Penataan produk perundang -undangan, bantuan hukum dan HAM serta pembinaan dan pengawasan produk hukum	Nilai	3,1	3,2	3,3
6	Nilai SKM untuk Pelayanan Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan di Sekretariat Daerah	Nilai	3,1	3,2	3,3
7	Nilai SKM Pelayanan Kepada Pimpinan	Nilai	3,1	3,2	3,3
8	Persentase OPD yang nilai Hasil evaluasi Kinerjanya B	Skor/Nilai	68	70	75
9	Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persen	75,11	97,5	98

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
10	Prosentase Bahan Kebijakan umum pembinaan, Pemahaman, Pengamalan keagamaan dan Lembaga Keagamaan	Persen	88,5	89	89,5
11	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	99,23	100%	100%
12	Persentase Pelayanan Ketatausahaan Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pimpinan yang dilaksanakan	Persen	98,27	100%	100%
13	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah yang Dilakukan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persen	98,3	100%	100%
14	Skor LPPD Provinsi di Tingkat Nasiona	Skor	Tinggi	Tinggi	Tinggi
15	Persentase Peningkatan Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Wilayah	Persen	100	100	100
16	Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	Persen	97,75	100	100
17	Persentase Perangkat Daerah yang evaluasi kinerja anggarannya baik	Persen	70	70	75
18	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Persen	100	85	87,5
19	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	Angka	74,09	72,50	72,75
20	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan	Persen	102,2	92	93
21	Persentase pelayanan keprotokolan	Persen	91	92	93
22	Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah dalam peningkatan kualitas Kinerja OPD	Persen	100	100	100
23	% Tingkat kepuasan masyarakat Lampung terhadap pelayanan Badan Penghubung	Persen	78	80	85
B	ASPEK PELAYANAN UMUM				

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI			TARGET		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/ Sederajat	Persen	87,59	96,33	97,83			
1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat	Persen	63,55	67,24	68,24			
2	Kesehatan							
2.1	Prevalensi stunting	Persen	18,5	18,4	16			
2.2	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	187	150	130			
2.3	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Kasus	489	570	550			
2.4	Angka Keberhasilan pengobatan TB paru (success rate)	Persen	94	90	90			
2.5	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Orang	667	806	886			
2.6	Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	Akreditasi Tingkat Dasar	Akreditasi Tingkat Utama	Akreditasi Tingkat Paripurna			
2.7	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	Persen	75	82	84			
2.8	Akreditasi rumah sakit	Status	Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 85%	Reakreditasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 90%	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 93%			
2.9	Nilai SPM	Persen	83	85	88			
2.10	Tingkat Layanan Sub Spesialis	Persen	70	77%	88			
2.11	Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan	Mutu Pelayanan	82	85	87			
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
3.1	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan	Persen	65	70	75			
3.2	Persentase Penanganan tindak/kasus kriminalitas yang terselesaikan	Persen	65	70	75			
4	Sosial							

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET		
			REALISASI 2021	2022	2023
4.1	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persen	1,7	1,72	1,74
4.2	Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	Persen	20	20	20
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persen	4,59	3,00	3,10
1.2	Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung	Persen	86,67	100	100
1.3	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif	Persen	100	100	100
2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
2.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	103,31	82	88
2.2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	53	65	82
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
3.1	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village	Persen	16,58	12,76	31,89
3.2	Persentase Desa Mandiri	Persen	3,33	23,44	23,44
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
4.1	Cakupan KB Aktif	Persen	74,52	67,29	67,71
5	Kepemudaan dan Olahraga				
5.1	Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-event Nasional	Persen	50	40,00%	45,00%

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET		
			REALISASI	2021	2022
5.2	Persentase Peran Serta Pemuda Berprestasi	Persen	73,08	52,49%	53,82%
6	Kebudayaan				
6.1	Persentase Warisan Seni dan budaya yang tersertifikasi nasional	Persen	67,5	72,5	76,25
7	Perpustakaan				
7.1	Persentase pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan	Persen	14,2	38,5	48,2
8	Kearsipan				
8.1	Persentase Arsip yang difilekan berbasis TIK	Persen	50	30	35
	PENUNJANG URUSAN				
1	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				
1.1	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi	Persen	64.56	70	75
1.2	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik	Persen	50	79	91
1.3	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	Persen	25,34	32,39	38,30
1.4	Nilai Akreditasi Penyelenggaraan Diklat	Nilai	B	A	A
2	Pengawasan				
2.1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	Level (Skor)	3	3 (3,03)	3 (3,05)
2.2	Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	Persen	96	84%	86%
2.3	Persentase Peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan.	Persen	58,3	70	80
2.4	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	Persen	100	100	100
2.5	Presentase Bantuan Hukum yang di fasilitasi	Persen	100	100	100
2.6	Level Kematangan/Maturitas PBJ	Level	3	3	4
2.7	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan	Persen	100	85	90

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2021	2022	2023
	Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana)				
	ASPEK DAYA SAING				
1	Fokus Iklim Berinvestasi				
1.1	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan	Angka	82,94	86	87

BAB VIII. PENUTUP

Salah satu aspek keberhasilan suatu pembangunan ditentukan oleh keberhasilan dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kinerja jajaran pemerintah, dukungan dan peran aktif masyarakat maupun swasta serta aparat Pemerintah Kabupaten/Kota,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023, adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



**RAKYAT
LAMPUNG**

Berjaya

